PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023 (*Audited*)

SK No 210910 A

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2023 (*Audited*)			Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	**2.637,25**	**2.783,93**	**105,56**	**2.635,84**
Belanja Negara:	**3.117,18**	**3.121,22**	**100,13**	**3.096,26**
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	2.239,79	97,28	2.280,03
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	814,72	881,43	108,19	816,23
Surplus (Defisit) Anggaran	**(479,93)**	**(337,29)**	**70,28**	**(460,42)**
Pembiayaan Neto	**479,93**	**356,66**	**74,32**	**590,97**
SiLPA (SiKPA)		**19,37**		**130,55**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

SiLPA sampai dengan 31 Desember 2023 Rp19,38 triliun menghasilkan SAL akhir Rp459,50 triliun. Berikut merupakan ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**478,96**	**337,77**
B	**Penggunaan SAL**	**(35,00)**	**-**
C	**SiLPA/SiKPA**	**19,38**	**130,56**
D	**Penyesuaian SAL**	**(3,84)**	**10,62**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**459,50**	**478,95**

3. NERACA

Berikut merupakan ringkasan Neraca per 31 Desember 2023.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	894,41	895,41
Investasi Jangka Panjang	4.077,23	3.759,59
Aset Tetap	6.964,29	6.729,89
Properti Investasi	104,37	38,81
Piutang Jangka Panjang	49,19	53,57
Aset Lainnya	983,33	848,18
Total Aset	**13.072,82**	**12.325,45**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	1.092,25	892,29
Kewajiban Jangka Panjang	8.444,42	8.028,27
Total Kewajiban	**9.536,68**	**8.920,56**
Ekuitas	**3.536,14**	**3.404,89**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**13.072,82**	**12.325,45**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
1	Pendapatan Operasional	3.083,23	2.913,65
2	Beban Operasional	(3.111,67)	(3.150,20)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(28,44)	(236,55)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	60,07	(243,72)
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**31,63**	**(480,27)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
Saldo Awal Kas	**536,44**	**374,27**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(34,79)	(220,43)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391,62)	(347,17)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	445,79	698,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	88,76	20,04
Kenaikan (Penurunan) Kas	**108,14**	**150,60**
Penggunaan SAL	(35,00)	00,00
Koreksi Pembukuan	(3,57)	11,57
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penggunaan SAL dan Koreksi Pembukuan	**69,57**	**162,17**
Saldo Akhir Kas	**606,01**	**536,44**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya	**(175,30)**	**(75,92)**
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**430,71**	**460,52**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No.	Uraian	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
1	**Ekuitas Awal**	**3.404,89**	**3.916,34**
2	Surplus/Defisit LO	31,63	(480,27)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	99,62	(31,28)
4	Transaksi Antar Entitas	-	(0,10)
5	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**131,24**	**(511,45)**
6	**Ekuitas Akhir**	**3.536,14**	**3.404,89**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP tahun 2023 (*Audited*) memuat informasi antara lain sebagai berikut.

a. Informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
LKPP merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan terdiri dari 84 LKKL dengan total 19.394 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 784 entitas akuntansi yang tersebar di 10 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

b. Kebijakan Fiskal
Pada tahun 2023, Kebijakan Fiskal APBN diarahkan untuk mendukung "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan memperkuat peran APBN dan melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas.

c. Ekonomi Makro
Berikut merupakan ringkasan capaian makro ekonomi sampai dengan 31 Desember 2023.

(dalam persen, y-on-y)

Indikator	Asumsi APBN 2023	Capaian 2023	Capaian 2022
Pertumbuhan Ekonomi (persen, y-on-y)	5,3	5,05	5,31
Inflasi (persen, *y-on-y*)	3,6	2,61	5,51
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen)	7,90	6,63	7,1
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	14.800	15.255	14.871
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	90	78,43	97,09
Rata-Rata *Lifting* Minyak *(mbopd)*	660	605,5	612,4
Rata-Rata *Lifting* Gas *(mboepd)*	1.100	1.006,4	953,6

d. Ikhtisar hasil pencapaian target keuangan berupa penjelasan mengenai hasil pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja APBN.

e. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan LKPP tahun 2023 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Selain itu, CaLK juga memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

OPINI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 35.C/LHP/XV/05/2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ii
OPINI vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GRAFIK xiii
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 8
III. NERACA 10
IV. LAPORAN OPERASIONAL 15
V. LAPORAN ARUS KAS 21
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 26
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 28
A. PENJELASAN UMUM 29
A.1. INFORMASI ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI 29
A.2. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023 31
A.3. EKONOMI MAKRO 35
A.3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 38
A.3.2. INDIKATOR EKONOMI MAKRO 51
A.3.3. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 60
A.4. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN 65
A.5. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 85
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 87
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 103
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 103
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 104
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 159
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 197
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 206
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 206
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA 207
D.3. CATATAN PENTING LAINNYA 294

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 313
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 313
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 314
E.3. CATATAN PENTING LAINNYA 363
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 366
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 366
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 370
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 402
H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 409

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan APBN Tahun 2023 dan 2022 34
Tabel 2 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan 2022 38
Tabel 3 Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dan 2022 51
Tabel 4 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 dan 2022 53
Tabel 5 Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Januari - Desember 2023 59
Tabel 6 Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 60
Tabel 7 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 dan 2022 68
Tabel 8 Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan 2022 73
Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 Menurut Fungsi 78
Tabel 10 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 dan 2022 80
Tabel 11 Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2023 83
Tabel 12 Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 30
Grafik 2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2014 – 2023 37
Grafik 3 Inflasi Negara Mitra Dagang Tahun 2023 38
Grafik 4 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 39
Grafik 5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran 40
Grafik 6 Perkembangan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha 42
Grafik 7 Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB 44
Grafik 8 Perkembangan Tingkat Inflasi 2021 – 2023 45
Grafik 9 Perkembangan Tingkat Inflasi Januari - Desember 2023 Menurut Kelompok Komponen 46
Grafik 10 Perkembangan Yield Hasil Lelang SUN 10 Tahun 47
Grafik 11 Tren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2022 48
Grafik 12 Perkembangan Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia 2022 – 2023 49
Grafik 13 Perkembangan Rata-Rata Bulanan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 50
Grafik 14 Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2019 – 2023 52
Grafik 15 Perkembangan Cadangan Devisa Tahun 2023 dan 2022 54
Grafik 16 7DRR dan Operasi Moneter Tahun 2022 - 2023 55
Grafik 17 Perkembangan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tahun 2022 – 2023 55
Grafik 18 Perkembangan BI Rate tahun 2021 - 2023 57
Grafik 19 Tren Laju IHSG (end of period) Tahun 2023 dan 2022 58
Grafik 20 Indikator Kinerja Perbankan Umum 2022 – 2023 59
Grafik 21 Perkembangan Total Kredit dan DPK Perbankan 2022 – 2023 (%) 60
Grafik 22 Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2019 – 2023 61
Grafik 23 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 - Maret 2023 62
Grafik 24 Perkembangan Rasio Gini Maret 2019 - Maret 2023 63
Grafik 25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 - 2023 64
Grafik 26 Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan Tahun 2019 - 2023 65
Grafik 27 Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2023 70
Grafik 28 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja 75
Grafik 29 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah Tahun 2019 – 2023 103
Grafik 30 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tahun 2019 - 2023 104
Grafik 31 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 105
Grafik 32 Komposisi K/L Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 121

Grafik 33 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2023 122
Grafik 34 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 123
Grafik 35 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 135
Grafik 36 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2019 – 2023 207
Grafik 37 Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2019 - 2023 313
Grafik 38 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 315
Grafik 39 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2023 316
Grafik 40 Komposisi Beban Operasional Tahun 2023 331
Grafik 41 Komposisi Beban Transfer Tahun 2023 346
Grafik 42 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2023 367

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

SK No 214015 A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Pendapatan Perpajakan	**B.2.1.1**	**2.118.348.000.000.000**	**2.154.208.219.467.830**	**101,69%**	**2.034.552.436.470.075**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	2.045.450.000.000.000	2.089.718.285.003.417	102,16%	1.943.654.770.952.334
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	72.898.000.000.000	64.489.934.464.413	88,47%	90.897.665.517.741
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**515.800.881.485.000**	**612.537.298.582.643**	**118,75%**	**595.594.554.180.605**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	223.312.141.813.000	254.203.031.073.614	113,83%	268.770.896.270.784
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	81.535.797.918.000	82.058.743.373.870	100,64%	40.597.091.946.149
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.3	79.459.372.890.000	95.860.392.158.963	120,64%	89.902.312.175.594
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.4	131.493.568.864.000	180.415.131.976.196	137,20%	196.324.253.788.078
III. Pendapatan Hibah	**B.2.1.3**	**3.100.000.000.000**	**17.184.158.879.725**	554,33%	**5.696.055.413.792**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**2.637.248.881.485.000**	**2.783.929.676.930.198**	**105,56%**	**2.635.843.046.064.472**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**2.302.457.850.414.000**	**2.239.786.701.499.164**	**97,28%**	**2.280.027.893.034.978**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	442.507.211.693.000	412.711.324.466.564	93,27%	402.441.656.300.334
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	375.881.911.438.000	432.714.969.865.127	115,12%	426.149.081.519.090
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	210.322.961.353.000	303.041.293.068.751	144,08%	240.570.302.124.070
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	441.400.000.000.000	439.882.584.341.259	99,66%	386.341.819.789.815
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	298.497.119.385.000	269.592.086.053.747	90,32%	252.812.907.867.326
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	10.085.840.000	219.140.718.777	2172,76%	5.803.272.496.643
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	148.516.872.686.000	156.601.633.832.214	105,44%	161.523.078.405.990
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	385.321.688.019.000	225.023.669.152.725	58,40%	404.385.774.531.710

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**814.718.494.042.000**	**881.430.544.208.454**	**108,19%**	**816.234.826.067.696**
1. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	136.259.972.888.000	205.666.564.020.630	150,94%	168.414.110.278.434
2. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	396.000.000.000.000	398.029.628.594.542	100,51%	378.000.000.000.000
3. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	185.797.257.584.000	181.357.561.783.241	97,61%	173.164.641.054.831
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	54.783.954.054.112
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	130.297.270.000.000	128.081.946.376.309	98,30%	118.380.687.000.719
c. Hibah kepada Daerah	B.2.2.2.3.3	2.077.523.749.000	2.940.874.059.627	141,56%	
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	17.241.263.570.000	17.241.263.570.000	100,00%	20.436.263.570.000
5. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	1.320.000.000.000
6. Dana Desa	B.2.2.2.6	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	67.906.138.390.431
7. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	98,83%	6.993.672.774.000
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		**3.117.176.344.456.000**	**3.121.217.245.707.618**	**100,13%**	**3.096.262.719.102.674**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(479.927.462.971.000)**	**(337.287.568.777.420)**	**70,28%**	**(460.419.673.038.202)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**498.362.712.804.000**	**277.369.700.819.453**	**55,66%**	**563.782.350.533.612**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	229.105.371.913.000	37.225.200.000.000	16,25%	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	6.349.993.814.000	6.374.398.495.969	100,38%	3.952.157.097.370
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	609.660.828.000	1.097.737.606.166	180,06%	667.176.265.512
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39%	658.816.905.421.376
Penerimaan Surat Berharga Negara			848.108.055.742.428		1.097.456.235.269.295
Pengeluaran Surat Berharga Negara			539.914.267.336.466		438.639.329.847.919
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	749.450.378.000	14.558.368.405.525	1942,54%	8.201.282.354.241
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.481.576.753.000	17.504.129.527.679	502,76%	10.125.528.103.890

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		2.732.126.375.000	2.945.761.122.154	107,82%	1.924.245.749.649
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(155.955.303.621.000)	(69.897.795.440.654)	44,82%	(86.724.307.604.887)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	100,00%	(1.130.863.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%	(20.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9		148.514.851.485		
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(18.435.249.833.000)**	**79.294.046.895.068**	**(430,12%)**	**27.195.789.556.541**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	62.056.062.121.000	162.650.352.798.218	262,10%	108.283.083.586.601
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	29.500.000.000.000	82.990.780.840.684	281,32%	65.592.711.439.666
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	32.556.062.121.000	79.659.571.957.534	244,68%	42.690.372.146.935
2. Pemberian Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(1.065.247.517.000)	(1.905.999.112.657)	178,93%	(1.805.388.784.603)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 *(Audited)*			TA 2022 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(79.426.064.437.000)	(81.450.306.790.493)	102,55%	(79.281.905.245.457)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**479.927.462.971.000**	**356.663.747.714.521**	**74,32%**	**590.978.140.090.153**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D + C)	**B.2.5**		**19.376.178.937.101**		**130.558.467.051.951**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	**C.1**	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**C.2**	**(35.000.000.000.000)**	**-**
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**C.3**	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**463.333.335.256.502**	**468.337.473.870.297**
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(3.548.034.701.030)	11.648.084.260.735
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(287.428.484.774)	(1.028.401.811.631)
Total Penyesuaian SAL		**(3.835.463.185.804)**	**10.619.682.449.104**
E. Saldo Anggaran Lebih Akhir (A + B + C + D)	**C.6**	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	4.930.665.723	799.340.452
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	318.602.129.457	28.613.691.119
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	21.596.978.800.469	5.332.149.928.620
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	57.124.640.159.483	52.624.849.776.050
Jumlah Kas dan Setara Kas		**430.715.095.759.788**	**460.525.416.110.350**
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	44.479.546.335	20.878.963.110
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	35.230.294.868.007	26.341.869.598.933
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	29.180.110.096.058	50.582.083.648.060
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	15.268.713.521.615	17.562.805.658.048
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	117.416.962.637.093	114.374.519.793.761
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	346.336.409.911.621	323.802.977.991.480
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	6.303.880.875	5.981.196.227
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	51.329.053.281	165.927.835.826
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	20.910.716.095.280	23.717.712.129.347
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	7.658.986.809.661	7.851.145.991.883
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.666.487.830.436	4.855.272.384.332
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	109.652.841	22.005.766
Jumlah Piutang (Bruto)		498.047.305.871.088	474.773.559.328.622
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(318.262.010.449.930)	(324.433.224.802.061)
Jumlah Piutang (Bersih)		179.785.295.421.158	150.340.334.526.561
Persediaan	D.2.1.1.7	204.183.149.868.940	190.034.054.918.418
Jumlah Aset Lancar		**894.407.139.081.901**	**895.407.443.423.480**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.562.930.032.200)	(4.813.478.526.898)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		17.990.266.888.103	13.497.984.299.522
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	280.412.334.935.034	239.872.791.752.439
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(945.649.215.159)	(760.196.912.027)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		279.466.685.719.875	239.112.594.840.412
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		297.456.952.607.978	252.610.579.139.934
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	3.093.225.298.186.938	2.909.868.558.921.828
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.053.004.500	8.958.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	686.539.843.221.699	597.102.851.922.346
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.779.773.194.413.137	3.506.980.368.899.320
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**4.077.230.147.021.115**	**3.759.590.948.039.254**
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	4.428.281.859.414.984	4.417.293.824.468.955
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	933.675.927.241.240	860.530.886.280.854
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	474.213.237.924.935	448.605.823.943.973
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.138.237.638.193.193	1.077.469.779.946.814
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	54.932.081.546.750	58.291.354.789.790
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	246.569.189.414.353	160.222.980.059.018
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.319.486.078.936.377)	(1.186.265.525.728.671)
Aset Konsesi Jasa	D.2.1.3.7	1.088.210.735.514.398	951.059.329.073.009
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		(80.340.569.263.966)	(57.322.310.734.895)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**8.364.120.669.249.853**	**7.973.473.978.562.413**
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.399.826.648.200.343)	(1.243.587.836.463.566)
Jumlah Aset Tetap (Bersih)		**6.964.294.021.049.510**	**6.729.886.142.098.847**
Properti Investasi	**D.2.1.4**		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	160.506.675.838.552	93.074.388.721.774
Jumlah Properti Investasi (Bruto)		**160.506.675.838.552**	**93.074.388.721.774**
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(56.132.925.175.972)	(54.262.412.167.063)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)		**104.373.750.662.580**	**38.811.976.554.711**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.5**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.5.1	78.839.430.596	80.042.118.815

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.5.2	310.437.056.539	271.286.710.975
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.3	48.644.267.627.749	52.972.302.791.953
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.4	4.576.224.167.487	4.785.472.283.878
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**53.609.768.282.371**	**58.109.103.905.621**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.5	(4.421.514.439.573)	(4.537.490.610.399)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**49.188.253.842.798**	**53.571.613.295.222**
Aset Lainnya	**D.2.1.6**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.6.1	49.875.449.199.365	61.264.824.345.326
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.2	71.168.490.628.320	61.339.638.267.920
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.2.1.6.3	1.241.448.631.883	1.273.242.636.973
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.4	451.183.897.393.302	324.930.703.435.536
Dana Penjaminan	D.2.1.6.5	12.829.602.055.000	12.449.624.844.000
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.6.6	52.063.867.817.609	39.138.707.426.198
Aset Lain-lain	D.2.1.6.7	696.199.863.151.665	667.809.773.446.210
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.6.8	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.364.417.385.162.997**	**1.197.831.957.896.041**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.6.9	(343.079.425.565.565)	(318.133.969.689.488)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.6.10	(38.011.303.406.142)	(31.515.242.045.159)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**983.326.656.191.290**	**848.182.746.161.394**
JUMLAH ASET		**13.072.819.967.849.194**	**12.325.450.869.572.908**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	191.809.032.711.121	131.806.404.311.825
Utang Bunga	D.2.2.1.3	112.693.785.312.937	97.401.735.689.433
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	25.207.352.917.324	15.233.102.271.564
Utang Transfer	D.2.2.1.5	52.187.965.129.846	49.842.043.112.377
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	638.953.070.948.495	525.070.831.354.819
Unamortized Discount		(368.630.075.000)	(414.105.480.000)
Unamortized Premium		440.320.180.000	795.587.678.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	31.412.000.000.000	49.028.000.000.000
Unamortized Discount		(467.650.585.000)	(548.373.999.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	27.965.899.727.133	10.332.306.519.164
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	7.476.388.964.347	9.593.646.386.590
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	403.617.716.901	4.056.160.026

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	4.661.192.664	228.030.249.064
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.092.254.611.766.819**	**892.289.644.366.744**
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	31.552.061.212.395	18.141.468.578.073
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	6.563.241.522.670.168	6.361.787.234.099.673
Unamortized Discount		(49.942.041.191.000)	(52.953.994.105.000)
Unamortized Premium		44.567.904.657.000	43.768.938.860.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	39.891.869.021.700	0
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	25.871.215.355.337	24.446.771.532.148
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	313.375.462.067.170	280.419.679.447.589
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	560.625.887.734	25.727.649.452.793
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		**6.969.118.619.680.504**	**6.701.337.747.865.276**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	886.277.290.731.920	822.838.479.742.048
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	26.579.390.708	26.646.297.359
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		**886.303.870.122.628**	**822.865.126.039.407**
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3		
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3.1	589.002.419.926.666	504.065.294.802.522
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa		**589.002.419.926.666**	**504.065.294.802.522**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**8.444.424.909.729.798**	**8.028.268.168.707.205**
JUMLAH KEWAJIBAN		**9.536.679.521.496.617**	**8.920.557.813.073.949**
EKUITAS	**D.2.3**	**3.536.140.446.352.577**	**3.404.893.056.498.959**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**13.072.819.967.849.194**	**12.325.450.869.572.908**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**E.2.1**				
PENDAPATAN OPERASIONAL	**E.2.1.1**				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**E.2.1.1.1**				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	1.056.264.876.071.451	991.488.696.172.421	64.776.179.899.030	6,53
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	749.872.917.946.326	694.776.882.555.958	55.096.035.390.368	7,93
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	35.111.968.220.488	23.761.243.871.403	11.350.724.349.085	47,77
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	218.828.516.227.555	226.661.405.402.388	(7.832.889.174.833)	(3,46)
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	9.962.359.820.249	6.779.467.430.496	3.182.892.389.753	46,95
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	50.951.896.485.742	51.215.480.999.153	(263.584.513.411)	(0,51)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	13.814.253.622.480	39.784.089.995.800	(25.969.836.373.320)	(65,28)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**2.134.806.788.394.291**	**2.034.467.266.427.619**	**100.339.521.966.672**	**4,93**
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**E.2.1.1.2**				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	280.285.831.628.760	302.124.663.573.157	(21.838.831.944.397)	(7,23)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	4.529.734	819.575	3.710.159	452,69
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	543.920.213.490.935	472.528.075.582.817	71.392.137.908.118	15,11

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)	JUMLAH	%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	97.370.883.293.667	86.672.151.673.733	10.698.731.619.934	12,34
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		**921.576.932.943.096**	**861.324.891.649.282**	**60.252.041.293.814**	**7,00**
PENDAPATAN HIBAH	**E.2.1.1.3**				
Pendapatan Hibah		26.849.886.477.341	17.861.905.684.250	8.987.980.793.091	50,32
Jumlah Pendapatan Hibah		26.849.886.477.341	**17.861.905.684.250**	8.987.980.793.091	50,32
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**3.083.233.607.814.728**	**2.913.654.063.761.151**	**169.579.544.053.577**	**5,82**
BEBAN OPERASIONAL	**E.2.1.2**				
Beban Pegawai	**E.2.1.2.1**	430.426.321.089.044	437.358.559.450.073	(6.932.238.361.029)	(1,59)
Beban Persediaan	**E.2.1.2.2**	44.418.157.818.790	45.630.752.459.661	(1.212.594.640.871)	(2,66)
Beban Barang dan Jasa	**E.2.1.2.3**	225.621.287.655.753	213.785.019.546.865	11.836.268.108.888	5,54
Beban Pemeliharaan	**E.2.1.2.4**	36.518.876.440.164	38.042.529.811.315	(1.523.653.371.151)	(4,01)
Beban Perjalanan Dinas	**E.2.1.2.5**	49.900.388.208.994	39.376.367.717.653	10.524.020.491.341	26,73
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	**E.2.1.2.6**	58.308.588.088.465	66.751.421.939.778	(8.442.833.851.313)	(12,65)
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	**E.2.1.2.7**	489.648.053.202.050	409.393.545.381.079	80.254.507.820.971	19,60

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)	JUMLAH	%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	242.021.207.563.568	244.383.233.896.683	(2.362.026.333.115)	(0,97)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	219.140.718.777	5.803.272.496.643	(5.584.131.777.866)	(96,22)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	156.341.091.530.982	163.486.863.969.805	(7.145.772.438.823)	(4,37)
Beban Transfer	E.2.1.2.11	881.390.373.057.804	819.069.477.047.347	62.320.896.010.457	7,61
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.12	209.244.320.645.414	219.860.952.898.605	(10.616.632.253.191)	(4,83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.13	1.928.970.209.539	37.081.212.202.077	(35.152.241.992.538)	(94,80)
Beban Lain-lain	E.2.1.2.14	285.685.389.969.788	410.181.311.446.044	(124.495.921.476.256)	(30,35)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**3.111.672.166.199.132**	**3.150.204.520.263.628**	**(38.532.354.064.496)**	**(1,22)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(28.438.558.384.404)**	**(236.550.456.502.477)**	**208.111.898.118.073**	**(87,98)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset	E.2.2.1.1	548.935.351.301	679.664.460.287	(130.729.108.986)	(19,23)
Beban Pelepasan Aset	E.2.2.1.2	17.859.492.754.620	126.453.024.838.790	(108.593.532.084.170)	(85,88)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset		**(17.310.557.403.319)**	**(125.773.360.378.503)**	**108.462.802.975.184**	**(86,24)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**E.2.2.2**				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.1**	105.211.500.000	-	105.211.500.000	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.2**	536.653.910.900	1.337.452.801.614	(800.798.890.714)	(59,87)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		**(431.442.410.900)**	**(1.337.452.801.614)**	**906.010.390.714**	**(67,74)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**E.2.2.3**				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.1**	112.360.987.542.646	96.002.565.101.242	16.358.422.441.404	17,04
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.2**	34.554.263.534.160	212.613.734.435.340	(178.059.470.901.180)	(83,75)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**77.806.724.008.486**	**(116.611.169.334.098)**	**194.417.893.342.584**	**(166,72)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**60.064.724.194.267**	**(243.721.982.514.215)**	**303.786.706.708.482**	**(124,64)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)	JUMLAH	%
POS LUAR BIASA	**E.2.3**				
Pendapatan Luar Biasa	**E.2.3.1**	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	**E.2.3.2**	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**31.626.165.809.863**	**(480.272.439.016.692)**	**511.898.604.826.555**	**(106,59)**

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	1.061.234.020.639.596	998.213.803.714.799
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.1.2	763.632.668.212.526	687.609.450.256.247
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700
d. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.4	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323
e. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.5	9.729.790.060.612	7.686.100.141.265
f. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.6	64.489.934.464.413	90.897.665.517.741
Total Penerimaan Perpajakan		**2.154.208.219.467.830**	**2.034.552.436.470.075**
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	254.203.031.073.614	268.770.896.270.784
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	179.868.171.315.795	195.739.979.810.678
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	95.860.392.158.963	89.902.312.175.594
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak		**611.990.337.922.242**	**595.010.280.203.205**
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	17.184.158.879.725	5.696.055.413.792
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**2.783.382.716.269.797**	**2.635.258.772.087.072**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	412.711.324.466.564	402.441.656.300.334
2. Belanja Barang	F.2.1.2.2	432.714.969.865.127	426.149.081.519.090
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	439.882.584.341.259	386.341.819.789.815
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	269.592.086.053.747	252.812.907.867.326

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	219.140.718.777	5.803.272.496.643
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	156.601.633.832.214	161.523.078.405.990
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	225.023.669.152.725	404.385.774.531.710
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	63.845.997.623.000	62.998.688.562.915
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	135.944.555.602.100	100.823.947.472.776
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	5.876.010.795.530	4.591.474.242.743
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	398.029.628.594.542	378.000.000.000.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.334.741.347.305	54.783.954.054.112
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal	F.2.1.2.13	26.520.021.192.724	28.749.936.344.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	128.081.946.376.309	118.380.687.000.719
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	69.856.768.617.317	67.906.138.390.431
16. Hibah Kepada Daerah	F.2.1.2.16	2.940.874.059.627	-
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**2.818.175.952.638.867**	**2.855.692.416.978.604**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(34.793.236.369.070)**	**(220.433.644.891.532)**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	546.960.660.401	584.273.977.400
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	1.097.737.606.166	667.176.265.512
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	359.653.415.387	22.000.000.000
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	26.441.256.275.225	27.059.703.613.522
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**28.445.607.957.179**	**28.333.153.856.434**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	303.041.293.068.751	240.570.302.124.070
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	2.225.200.000.000	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	41.421.985.992.266	60.664.867.718.409
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	53.382.030.644.000	54.272.006.500.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**420.070.509.705.017**	**375.507.176.342.479**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(391.624.901.747.838)**	**(347.174.022.486.045)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	902.837.385.270.107	1.107.581.763.373.185
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	162.650.352.798.218	108.283.083.586.601
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	6.374.398.495.969	3.952.157.097.370
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	148.514.851.485	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.072.010.651.415.779**	**1.219.817.004.057.156**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	542.860.028.458.620	440.563.575.597.568
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	81.450.306.790.493	79.281.905.245.457
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*	F.2.3.2.3	1.905.999.112.657	1.805.388.784.603
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**626.216.334.361.770**	**521.650.869.627.628**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**445.794.317.054.009**	**698.166.134.429.528**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	620.329.866.094	151.170.449.070
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	14.112.089.380.009	(3.468.162.038.412)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	74.033.583.845.555	23.360.027.823.784
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(4.129.878.872)	(649.111.176)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**88.761.873.212.786**	**20.042.387.123.266**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**108.138.052.149.887**	**150.600.854.175.217**
Penggunaan SAL		(35.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan		(3.566.936.515.283)	11.569.849.825.433
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	**F.1.2**	**69.571.115.634.604**	**162.170.704.000.650**
SALDO AWAL KAS	**F.1.1**	**536.443.156.881.227**	**374.272.452.880.577**
SALDO AKHIR KAS		**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**
Kas di Bendahara Pengeluaran		197.710.858.794	215.927.152.362
Kas di Bendahara Penerimaan		318.602.129.457	28.613.691.119
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		7.604.425.582.862	2.436.441.198.784
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(35.230.294.868.007)	(26.341.869.598.933)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(38.643.493.231)	(4.503.505.984)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(148.155.907.631.641)	(52.253.149.048.677)
Kas Transito (Kiriman Uang)		4.930.665.723	799.340.452
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	**F.1.3**	**430.715.095.759.788**	**460.525.416.110.350**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
EKUITAS AWAL	**G.1**	**3.404.893.056.498.959**	**3.916.345.179.380.431**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**G.2**	**31.626.165.809.863**	**(480.272.439.016.692)**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian SiLPA	G.3.1	1.498.554.940.209	9.431.660.376.686
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.2	5.454.942.591.117	3.732.184.012.634
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.3	56.981.718.247.281	(60.953.016.315.937)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.4	2.146.315.181.897	916.566.907.783
Koreksi Lainnya	G.3.5	33.539.693.083.251	15.588.603.391.310
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**99.621.224.043.755**	**(31.284.001.627.524)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**G.4**	**-**	**104.317.762.744**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**G.5**	**131.247.389.853.618**	**(511.452.122.881.472)**
EKUITAS AKHIR	**G.6**	**3.536.140.446.352.577**	**3.404.893.056.498.959**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

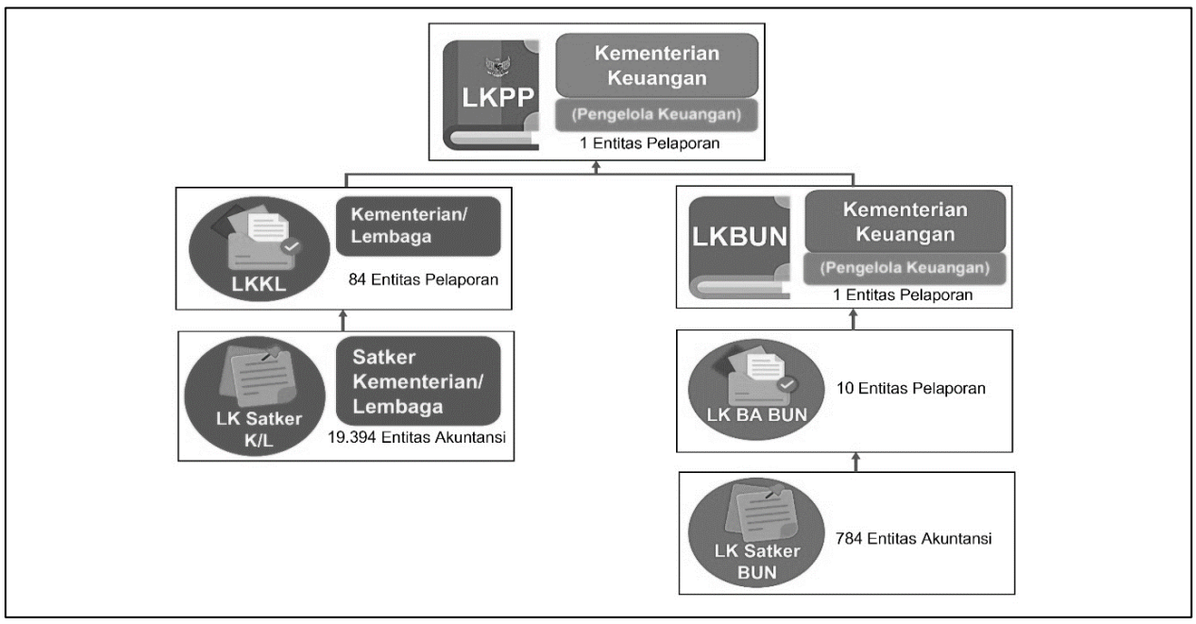
A.1. INFORMASI ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

LKPP Tahun 2023 merupakan laporan keuangan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan terdiri dari 84 LKKL dengan total 19.394 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 784 entitas akuntansi yang tersebar di 10 satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 Penyajian Laporan Keuangan, entitas pelaporan didefinisikan sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi didefinisikan sebagai unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN hanya dibedakan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Dengan demikian, proses konsolidasi secara berjenjang dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan tertinggi (Pemerintah Pusat) telah mencakup seluruh entitas baik lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga negara, badan, dan lembaga/badan lain yang dalam menjalankan kegiatannya menggunakan dana APBN.

Sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang. Dalam konteks pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan memiliki tiga peran, yaitu (1) sebagai pengelola fiskal untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), (2) sebagai Bendahara Umum Negara yang menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan (3) sebagai Pengguna Anggaran kementerian yang menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dengan demikian, Menteri Keuangan menjalankan fungsi dari tiga entitas pelaporan secara berjenjang (LKPP, LKBUN, dan LKKL) sedangkan menteri/pimpinan lembaga lain menjalankan satu peran entitas pelaporan (LKKL).

Grafik 1
Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi



Jumlah entitas akuntansi pada setiap entitas pelaporan berbeda-beda bergantung kepada struktur dan fungsi dari Kementerian/Lembaga masing-masing. Di satu sisi, terdapat satu entitas pelaporan yang terdiri dari satu entitas akuntansi, antara lain Kementerian BUMN, Kemenkopolhukam, dan Badan Intelijen Negara. Di sisi lain, terdapat pula satu entitas pelaporan yang terdiri dari banyak entitas akuntansi, antara lain Kementerian Agama (5.463 entitas akuntansi) dan Kemenkumham (1.158 entitas akuntansi).

Pada tahun 2023, terdapat dua Kementerian/Lembaga Baru yang terkonsolidasi dalam LKPP yaitu Badan Pangan Nasional dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Badan Pangan Nasional didirikan tanggal 29 Juli 2021, dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional merupakan Badan Ketahanan Pangan yang ada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2015. Namun melalui Perpres 66 Tahun 2021 Badan Ketahanan Pangan dipisahkan dari susunan organisasi Kementerian Pertanian dan berubah menjadi Badan Pangan Nasional, yang merupakan sebuah Lembaga setingkat K/L yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan memiliki Bagian Anggaran tersendiri (BA 125).

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden terhadap kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. OIKN

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra. OIKN merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam rangka mendukung UU Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi antara lain pembentukan OIKN melalui PP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Rincian daftar entitas pelaporan dan entitas akuntansi Tingkat K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 1A**.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

APBN TA 2023 dirancang untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan mengantisipasi prospek perekonomian global yang masih dalam tren pelemahan dan situasi ketidakpastian. Perekonomian global masih dihadapkan pada situasi ketidakpastian diakibatkan berbagai risiko seperti peningkatan inflasi yang merata secara global didorong dari peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga pada komoditas pangan serta energi sehubungan dengan pemulihan ekonomi. Hal tersebut kemudian diperburuk oleh situasi konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dan serta komoditas lain secara signifikan. Selain itu, beberapa tantangan lain yang dihadapi perekonomian global di antaranya tingkat suku bunga tinggi berlangsung lebih lama, Ekonomi Tiongkok mengalami pemulihan ekonomi yang lemah dan prospek pertumbuhan melambat dan Ekonomi Amerika Serikat yang masih mengalami pelemahan aktivitas sektor riil dan perdagangan, hingga perubahan iklim. Beberapa faktor tersebut berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara di beberapa kawasan dan memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Ketidakstabilan perekonomian global dan volatilitas harga komoditas berdampak secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan sebelumnya mulai memperlihatkan tren hasil positif, ditunjukkan dengan adanya penguatan investasi dan ekspor serta peningkatan daya konsumsi masyarakat. Walaupun kinerja perekonomian nasional terus menunjukkan tren peningkatan perbaikan, pemerintah tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Pemerintah terus berupaya maksimal mewujudkan APBN yang sehat sebagai fondasi yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. APBN TA 2023 dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. APBN diharapkan tetap melanjutkan perannya sebagai *shock absorber* untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten melalui kebijakan terutama ditujukan untuk: (1) mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, (2) mempertahankan momentum pemulihan termasuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan (3) menjaga prioritas belanja dalam menunjang peningkatan produktivitas dan fondasi perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah dan panjang melalui pelaksanaan konsolidasi dan reformasi fiskal serta penguatan ketahanan fiskal melalui penyiapan *fiscal buffer* yang memadai dalam mengantisipasi ketidakpastian dan memperkuat keberlanjutan fiskal.

Kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, kebijakan diarahkan untuk memperkuat peran APBN dan melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas.

Berdasarkan tema dan berbagai *concern* di atas, kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dan menjawab tantangan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Arah kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan untuk:

1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor; serta
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Pascakrisis pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang diimbangi dengan reformasi fiskal guna mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan tercapainya konsolidasi fiskal tahun 2023. Konsolidasi fiskal tahun 2023 dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara untuk pelebaran ruang fiskal, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang

produktif dan inovatif. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan tanpa mengganggu peran APBN dalam melakukan fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian.

Reformasi fiskal dilaksanakan secara komprehensif melalui tiga langkah berikut. Langkah Pertama, mobilisasi pendapatan negara untuk pelebaran ruang fiskal yang dilakukan melalui efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peningkatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil untuk mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan melaksanakan optimalisasi penerimaan Perpajakan sejalan dengan kinerja perekonomian dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan UU HPP, penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan PNBP serta optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif dan peningkatan layanan dan simplifikasi sistem layanan BLU serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU. Selain itu, Pemerintah terus mewaspadai faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas.

Langkah Kedua yaitu melanjutkan belanja berkualitas melalui: (1) fokus belanja pada peningkatan kualitas SDM (melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, dan reformasi birokrasi, (2) mengalokasikan belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel, dan (3) mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi belanja barang nonprioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah terutama untuk penguatan akses, kualitas layanan publik, dan pencapaian target prioritas nasional. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mendukung persiapan Pemilu tahun 2024 serta tahapan persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah Ketiga yaitu melaksanakan strategi pembiayaan inovatif melalui pengendalian risiko utang, pemanfaatan SAL untuk stabilisasi dan ketidakpastian, serta meningkatkan peran swasta, BUMN, serta BLU dalam partisipasi pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable* dengan (1) mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan *manageable*; (2) mendorong inovasi pembiayaan melalui penguatan peran BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicles* (SMV); (3) menjaga SAL dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan stabilitas ekonomi; serta (4) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dalam mendorong transformasi ekonomi.

Melalui bauran kebijakan tersebut, pembangunan nasional yang akan dicapai diharapkan dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan serta memberikan dampak atas perbaikan indikator kesejahteraan sosial pada tahun 2023. Indikator tersebut meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen, penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada kisaran 0,375-0,378, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

APBN TA 2023 ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, yang didetilkan ke dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 dan diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 ditetapkan bahwa pagu anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.637,25 triliun, anggaran Belanja Negara sebesar Rp3.117,18 triliun yang terdiri dari Rp2.302,46 triliun Belanja Pemerintah Pusat dan Rp814,72 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Defisit APBN TA 2023 ditargetkan sebesar Rp479,93 triliun atau setara dengan 2,27 persen Target PDB 2023, yang akan ditutup melalui Pembiayaan Anggaran sebesar Rp479,93 triliun. Atas penetapan APBN TA 2023 tersebut, diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 persen. Postur APBN TA 2023 berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023 disandingkan dengan postur APBN TA 2022 berdasarkan Perpres 98 Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1
Ringkasan APBN Tahun 2023 dan 2022

(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2023 (Perpres No. 75/2023)	APBN 2022 (Perpres No. 98/2022)	% Angka Naik/ Turun*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.637,25**	**2.266,20**	**16,37**
1. Pendapatan Negara	2.634,15	2.265,62	16,27
a. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.783,99	18,74
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	515,80	481,63	7,09
2. Penerimaan Hibah	3,1	0,58	434,48
B. Belanja Negara	**3.117,18**	**3.106,43**	0,35
1. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	2.301,64	0,04
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	814,72	804,78	1,24
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(38,53)**	**(434,36)**	**(91,13)**

Uraian	APBN 2023 (Perpres No. 75/2023)	APBN 2022 (Perpres No. 98/2022)	% Angka Naik/ Turun*
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(479,93)**	**(840,23)**	**(42,88)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(2,27)	(4,50)	(49,56)
E. Pembiayaan Anggaran	**479,93**	**840,23**	**(42,88)**
I. Pembiayaan Utang	421,21	943,69	(55,37)
II. Pembiayaan Investasi	(175,95)	(230,22)	(23,57)
III. Pemberian Pinjaman	5,28	0,59	794,92
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,33)	(1,13)	(70,80)
V. Pembiayaan Lainnya	229,72	127,30	80,46

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.

A.3. EKONOMI MAKRO

Sepanjang tahun 2023, perekonomian global dihadapkan pada beragam tantangan dan risiko yang membayangi keberlanjutan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tantangan global tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di negara-negara maju. Tingginya inflasi global direspon oleh Bank Sentral di berbagai negara dengan pengetatan kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga, sehingga menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Tingkat suku bunga global yang tinggi juga meningkatkan risiko *debt distress* di banyak negara dengan tingkat utang yang tinggi. Faktor geopolitik, yang ditandai dengan eskalasi konflik dan perang, juga turut menambah ketidakpastian global. Di saat perang di Ukraina masih berlanjut, dunia dikejutkan dengan konflik yang berujung pada krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Eskalasi konflik geopolitik tersebut kemudian berdampak negatif pada kelancaran rantai pasok global serta meningkatkan risiko gejolak harga pangan dan energi. Kecenderungan meningkatnya kebijakan perdagangan dan industri yang bersifat proteksionis serta meningkatnya risiko utang di banyak negara akibat tingkat bunga yang tinggi, juga menciptakan kondisi terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara. Konflik geopolitik yang masih berlanjut menunjukkan potensi risiko belum berhenti. Di tengah ketidakpastian global, kinerja manufaktur internasional mengalami pelemahan yang menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan global.

Aktivitas manufaktur global juga masih melemah. Indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur global yang terus berada dalam zona kontraksi, dan ditutup di angka 49,0 pada akhir tahun. Zona Eropa mengalami kontraksi aktivitas manufaktur paling parah di sepanjang tahun 2023, PMI Manufaktur bulan Desember tercatat hanya mencapai 44,4. Pada bulan Desember 2023, aktivitas manufaktur di lebih dari 65 persen negara G20 dan ASEAN-6 masih berada dalam zona kontraksi. Aktivitas manufaktur di negara-negara dengan perekonomian besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea

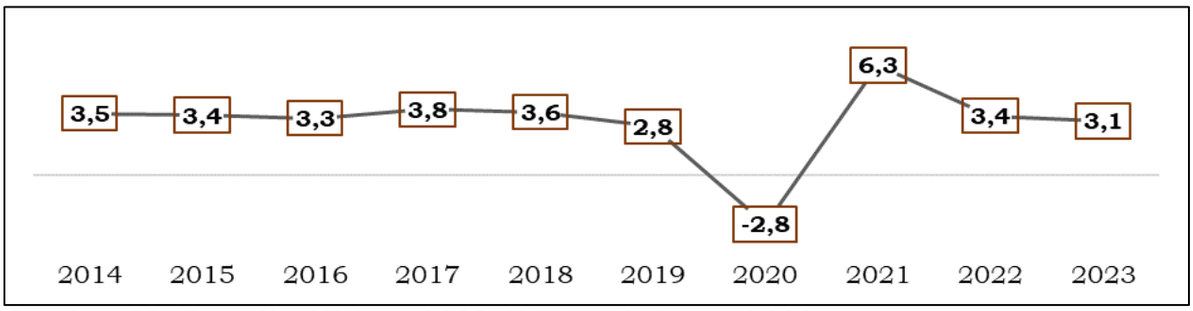
Selatan, Jerman, serta beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam, hampir selalu berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Di sisi lain, Indonesia dan India adalah dua dari sedikit negara yang sepanjang tahun 2023 aktivitas manufakturnya terus berada di zona ekspansi.

Harga komoditas global juga mengalami moderasi sepanjang tahun 2023, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi karena faktor geopolitik dan cuaca ekstrem. Harga komoditas energi berada dalam tren menurun sepanjang tahun 2023, dengan penurunan masing-masing sebesar 38,8 persen (*ytd*) untuk gas alam, 63,8 persen (*ytd*) untuk batu bara, serta 10,3 persen (*ytd*) untuk minyak (*brent*) dibandingkan dengan harga penutupan tahun 2022. Dari sisi komoditas pangan, harga beras masih berada di level tinggi yang disebabkan oleh dampak fenomena *El Nino* yang mengakibatkan kekeringan panjang sehingga menurunkan hasil panen. Sementara itu, harga kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia juga berada dalam tren menurun, tumbuh minus 12,3 persen (*ytd*) dibandingkan dengan harga penutupan tahun 2022. Harga komoditas pangan lain seperti kedelai, gandum, dan jagung relatif stabil dengan kecenderungan menurun.

Berbagai eskalasi tantangan dan risiko global tersebut, serta masih buruknya kinerja manufaktur global, berakibat pada turunnya prospek perekonomian dunia. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasinya pada September 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3,0 persen (*yoy*) pada 2023 dan turun ke 2,7 persen (*yoy*) pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2023 memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 3,0 persen (*yoy*) dan 2,9 persen (*yoy*) pada tahun 2023 dan 2024. Bank Dunia pada bulan Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,6 persen (*yoy*) pada tahun 2023 dan akan menurun ke 2,4 persen (*yoy*) pada tahun 2024. Dengan kondisi perekonomian yang masih dihadapkan pada tekanan ketidakpastian, IMF dalam WEO Januari 2024 menyatakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 pada kisaran 3,1 persen *(yoy)* seperti yang terlihat pada **Grafik 2**, lebih tinggi 0,1 persen dibandingkan dengan proyeksinya pada WEO Oktober 2023. Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada WEO Januari 2023 sebesar 2,9 persen (*yoy*), WEO April 2023 sebesar 2,8 persen (*yoy*), WEO Juli 2023 sebesar 3,0 persen (*yoy*), dan WEO Oktober 2023 sebesar 3,0 persen (*yoy*).

Grafik 2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2014 – 2023

(dalam persen, *yoy*)



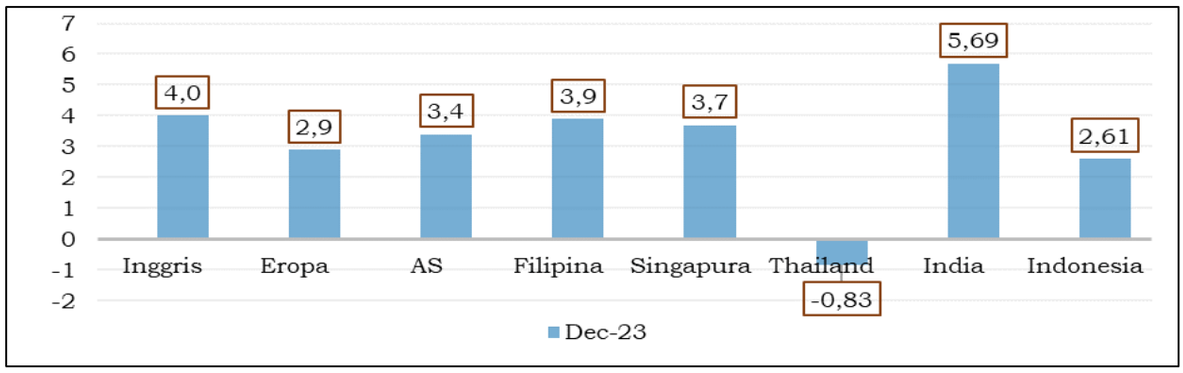
Sumber: LKPP *Audited* Tahun 2022, IMF-WEO Januari 2024

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari negara-negara mitra dagang Indonesia menunjukkan kinerja yang beragam. Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,2 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 3,0 persen. Amerika Serikat juga menunjukkan perbaikan pertumbuhan di angka 2,5 persen (*yoy*) pada tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,9 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi Zona Eropa melambat tajam dari sebelumnya 3,5 persen *(yoy)* pada tahun 2022 menjadi 0,5 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Hal tersebut terutama akibat berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta masih tingginya tekanan inflasi yang direspons dengan pengetatan likuiditas. Pada tahun 2023, perekonomian negara-negara di Kawasan ASEAN masih cukup *resilient*, dengan Vietnam dan Indonesia tumbuh 5,05 persen (*yoy*), serta Filipina tumbuh 5,6 persen (*yoy*). Negara maju di Kawasan ASEAN seperti Singapura tumbuh terbatas sebesar 1,1 persen (*yoy*), sementara Jepang mengalami resesi teknikal pada akhir 2023.

Pada tahun 2023, tingkat inflasi global mulai menunjukkan penurunan, namun masih berada di atas level sebelum pandemi. Dunia masih menghadapi risiko perekonomian global yang berpotensi pada ketidakstabilan keuangan yang terus diwaspadai. IMF dalam WEO Oktober 2023 memproyeksikan inflasi global pada level 6,9 persen (*yoy*). Inflasi beberapa negara hingga Desember 2023 melonjak tinggi seperti yang terlihat pada **Grafik 3.**

Grafik 3
Inflasi Negara Mitra Dagang Tahun 2023

(dalam persen, *yoy*)



Sumber: *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), 2024

Meskipun mulai menunjukkan penurunan, tingkat inflasi global masih berada di atas level sebelum pandemi. Pada tahun 2022, inflasi global mencapai 8,7 persen (*yoy*) jauh di atas tingkat inflasi sebelum pandemi pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,5 persen (*yoy*), dan pada tahun 2023, inflasi global turun menjadi 6,8 persen (*yoy*). Di negara maju, tingkat inflasi yang mencapai 7,3 persen (*yoy*) pada tahun 2022, turun menjadi 4,6 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Sementara itu, di negara berkembang tingkat inflasi yang mencapai 9,8 persen (*yoy*) pada tahun 2022 turun menjadi 8,4 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Tekanan inflasi yang masih tinggi tersebut mendorong otoritas di berbagai negara untuk menjalankan kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh melalui peningkatan suku bunga secara lebih cepat dan agresif. Kebijakan tersebut pada gilirannya menimbulkan kondisi likuiditas yang ketat dan berpotensi menurunkan prospek pertumbuhan global.

A.3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan 2022

Indikator	2023		Realisasi Tahun 2022
	Asumsi APBN	Realisasi Tahun 2023	
Pertumbuhan Ekonomi (persen, *yoy*)	5,3	5,05	5,31
Inflasi (persen, *yoy*)	3,6	2,61	5,51
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen)	7,90	6,63	7,02
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	14.800	15.255	14.871

Indikator	2023		Realisasi Tahun 2022
	Asumsi APBN	Realisasi Tahun 2023	
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	90	78,43	97,09
Rata-Rata *Lifting* Minyak *(mbopd)*	660	604,71	612,41
Rata-Rata *Lifting* Gas *(mboepd)*	1.100	999,88	953,56

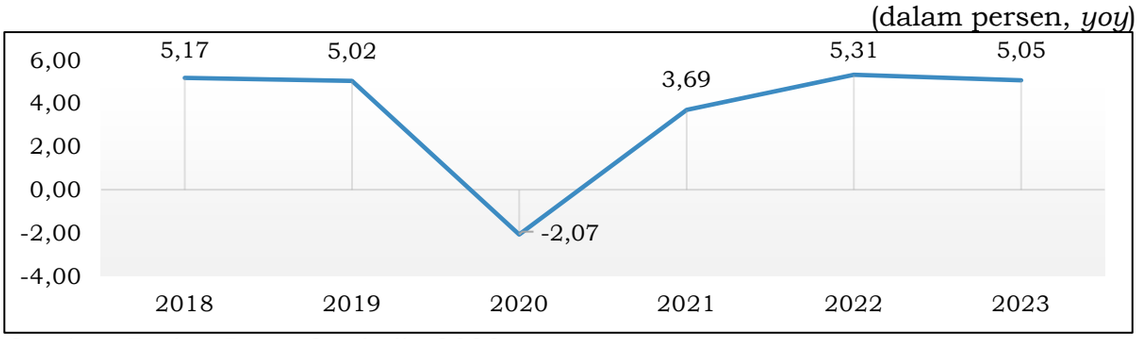
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, 2023

A.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,05 persen (*yoy*), meskipun dari basis yang tinggi (*high base*) pada tahun 2022. Konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023 terhadap Triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan 5,04 persen (*yoy*) yang menunjukkan keberlanjutan kinerja positif dari triwulan-triwulan sebelumnya yang pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen (*yoy*), pada Triwulan II 2023 tumbuh sebesar 5,17 persen (*yoy*),dan pada Triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94 persen (*yoy*). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 lebih rendah dibandingkan asumsi di dalam APBN, yaitu 5,30 persen (*yoy*). Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 melambat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,31 persen (*yoy*), Indonesia masih mampu mempertahankan performa ekonomi yang relatif kuat.

Grafik 4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(dalam persen, *yoy*)



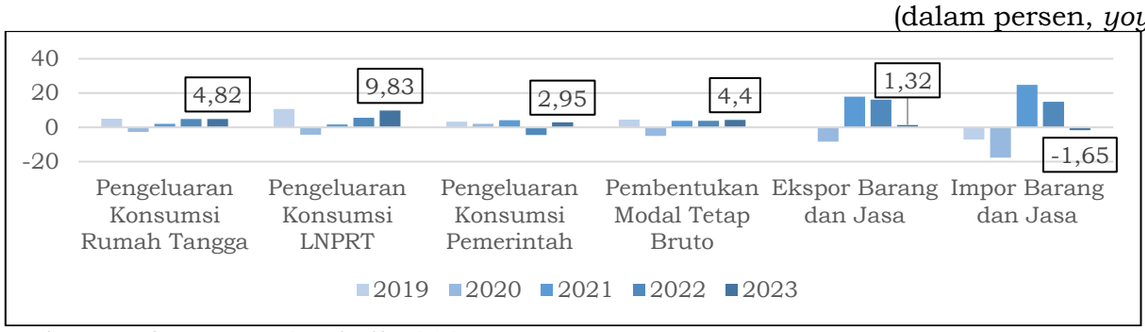
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, seluruh komponen menunjukan tren positif pada akhir tahun kecuali komponen impor yang mengalami kontraksi 1,65 persen (*yoy*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi 53,18 persen, tumbuh 4,82 persen (*yoy*) pada tahun 2023 atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yaitu 4,94 persen (*yoy*). Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh positif ini didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dan relatif terkendalinya tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan pulihnya sektor pariwisata yang juga berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, berbagai kebijakan APBN seperti penebalan bantuan sosial (bansos) untuk mitigasi dampak *El Nino*, percepatan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah peningkatan suku bunga, dan kebijakan penguatan sektor perumahan turut berpengaruh dalam upaya menjaga daya beli masyarakat. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang semakin menguat, tercermin pada kinerja Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 9,83 persen (*yoy*). Persiapan pelaksanaan Pemilu juga menjadi salah satu mesin pendorong perekonomian atas tingginya laju pertumbuhan konsumsi LNPRT.

Grafik 5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran

(dalam persen, *yoy*)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Realisasi APBN menjadi pemicu pertumbuhan kinerja Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2023. Kinerja Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 2,95 persen (*yoy*), setelah sebelumnya mengalami kontraksi 4,47 persen (*yoy*) pada tahun 2022. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah didukung realisasi APBN 2023 yang mencerminkan kebijakan fiskal mampu merespons dinamika perekonomian dengan tetap menjaga sustainabilitas fiskal. Paket kebijakan Pemerintah dan penyerapan belanja negara yang optimal mampu mendorong konsumsi Pemerintah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara juga turut menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat

tetap kuat dan menjadi fondasi kokoh untuk menyongsong dinamika perekonomian ke depan. Peningkatan konsumsi pemerintah diharapkan dapat membawa dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga menjadi komponen pendorong utama ekonomi terus melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh menguat 4,4 persen (*yoy*) pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yaitu 3,87 persen (*yoy*). Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal di Indonesia menjadi penopang pertumbuhan PMTB yang positif. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh komponen investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan. Tingginya aktivitas belanja modal Pemerintah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong kinerja investasi. Keyakinan investor juga terus terjaga, terlihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang masing-masing tumbuh 22,1 persen (*yoy*) dan 13,7 persen (*yoy*). Meskipun dinamika global masih menjadi tantangan, infrastruktur Indonesia yang semakin baik dan stabilitas makroekonomi sosial politik yang terjaga menjadi faktor esensial dalam menjaga iklim investasi di Indonesia.

Dari sisi kinerja ekspor-impor, kinerja ekspor neto riil masih positif sehingga dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2023 ekspor neto riil tumbuh 17,8 persen (*yoy*) dengan *share-to-growth* 0,7 persen terhadap pertumbuhan agregat. Kinerja ekspor neto riil yang masih positif ini terutama didorong pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang dapat mengimbangi kontraksi impor barang dan jasa riil. Ekspor barang-jasa mengalami pertumbuhan 1,32 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekspor barang ditopang peningkatan ekspor barang migas dan ekspor jasa di tengah penurunan ekspor barang nonmigas. Ekspor barang migas tumbuh 8,5 persen (*yoy*) ditopang peningkatan volume ekspor di tengah penurunan harga internasional minyak. Peningkatan ekspor jasa 38,8 persen (*yoy*) didorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, ekspor barang nonmigas sepanjang tahun 2023 mengalami penurunan 1,9 persen (*yoy*), terutama bersumber dari penurunan nilai ekspor sejumlah komoditas ekspor utama (batu bara, minyak sawit, besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik). Penurunan nilai ekspor masih dominan dipengaruhi oleh harga komoditas global yang termoderasi di tengah peningkatan volume ekspor.

Impor barang-jasa mengalami kontraksi cukup signifikan yaitu 1,65 persen (*yoy*) pada tahun 2023 yang bersumber dari impor barang nonmigas yang turun 4,5 persen (*yoy*), didorong penurunan impor bahan baku dan barang modal seiring dengan melambatnya kinerja industri manufaktur dalam negeri, di tengah peningkatan impor barang konsumsi. Sementara itu impor barang migas tumbuh 2,6 persen (*yoy*), sejalan dengan peningkatan permintaan dalam negeri,

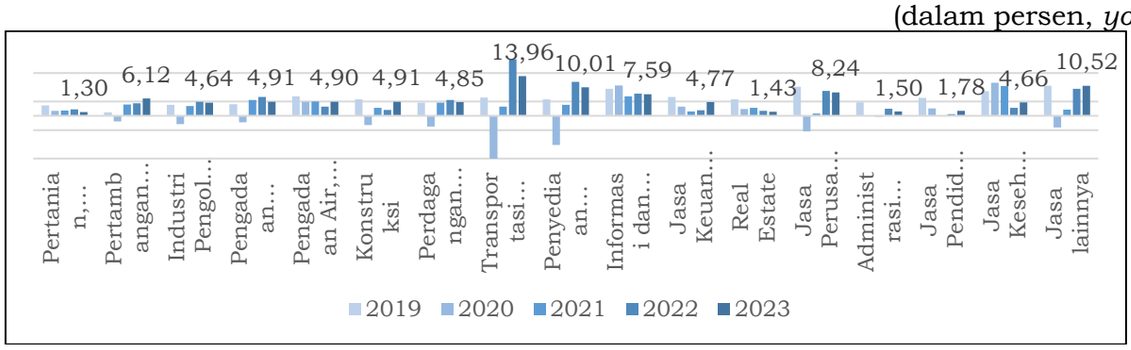
dan impor jasa tumbuh 11,6 persen *(yoy)* imbas meningkatnya jumlah wisatawan nasional ke luar negeri.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2023 melanjutkan tren positif tahun 2022 yang juga menunjukan tren positif untuk seluruh lapangan usaha. Sektor pertanian yang merupakan sektor dengan sebagai penyumbang tertinggi ketiga terhadap PDB nasional, hanya tumbuh 1,30 persen (*yoy*) pada tahun 2023 dan menjadi sektor yang mencatatkan pertumbuhan terendah. Fenomena *El Nino* menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan sektor ini dan mengakibatkan penurunan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan produk tanaman hortikultura semusim, seperti sayur-sayuran. Kondisi tersebut berpengaruh kepada pertumbuhan subsektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura sehingga mengalami kontraksi 3,88 persen (*yoy*) dan 0,31 persen (*yoy*) dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, subsektor perikanan dan peternakan mencatatkan pertumbuhan masing-masing 5,49 persen (*yoy*) dan 3,71 persen (*yoy*). Di sisi lain, subsektor kehutanan dan penebangan kayu tumbuh 2,61 persen (*yoy*) dan subsektor tanaman perkebunan juga tumbuh 1,73 persen (*yoy*).

Grafik 6
Perkembangan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha

(dalam persen, *yoy*)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan 6,12 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Subsektor pertambangan batu bara merupakan penyumbang terbesar terhadap sektor ini, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 10,02 persen (*yoy*), seiring peningkatan permintaan domestik dan luar negeri. Subsektor bijih logam dan galian lainnya tumbuh masing-masing 8,50 persen (*yoy*) dan 5,37 persen (*yoy*) seiring peningkatan produksi. Sementara, subsektor migas mampu tumbuh positif 0,73 persen (*yoy*) sejalan dengan optimalisasi eksploitasi minyak dan pengoperasian sumber gas baru setelah terus terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB pada

tahun 2023 mencapai 10,52 persen (*yoy*). Kontribusi tersebut terdiri dari pertambangan batu bara dan lignit sebesar 5,34 persen (*yoy*), pertambangan minyak, gas, dan panas bumi 2,49 persen (*yoy*), pertambangan dan galian lainnya 1,38 persen (*yoy*), dan pertambangan bijih logam 1,30 persen (*yoy*).

Sektor manufaktur masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Sektor ini tumbuh 4,64 persen (*yoy*), atau sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,89 persen (*yoy*). Kinerja sektor manufaktur ditopang oleh permintaan domestik dan global yang relatif masih kuat atas produk ekspor Indonesia, seperti produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Pertumbuhan industri logam dasar yang terjaga dua digit, yaitu sebesar 14,17 persen (*yoy*) pada tahun 2023, memberikan indikasi keberhasilan kebijakan hilirisasi. Sementara itu, Industri barang logam (komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik) tumbuh sangat signifikan hingga mencapai 13,67 persen (*yoy*). Begitu pula dengan industri alat angkutan yang tumbuh sebesar 7,63 persen (*yoy*) pada tahun 2023, didukung oleh peningkatan permintaan sepeda motor.

Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh positif sebesar 4,85 persen (*yoy*) sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor. Peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik mampu mendorong tumbuhnya subsektor perdagangan besar dan eceran, selain perdagangan mobil dan sepeda motor, hingga mencapai 4,92 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 4,50 persen *(yoy),* terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sepeda motor.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Sektor transportasi dan pergudangan tercatat kembali tumbuh dua digit yakni 13,96 persen (*yoy*), terutama ditopang oleh angkutan udara dan angkutan rel. Angkutan udara tumbuh 28,96 persen (*yoy*) ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara, baik rute domestik maupun internasional. Sementara, angkutan rel tumbuh 23,74 persen (*yoy*), ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penumpang seiring penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh serta pembukaan jalur baru Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

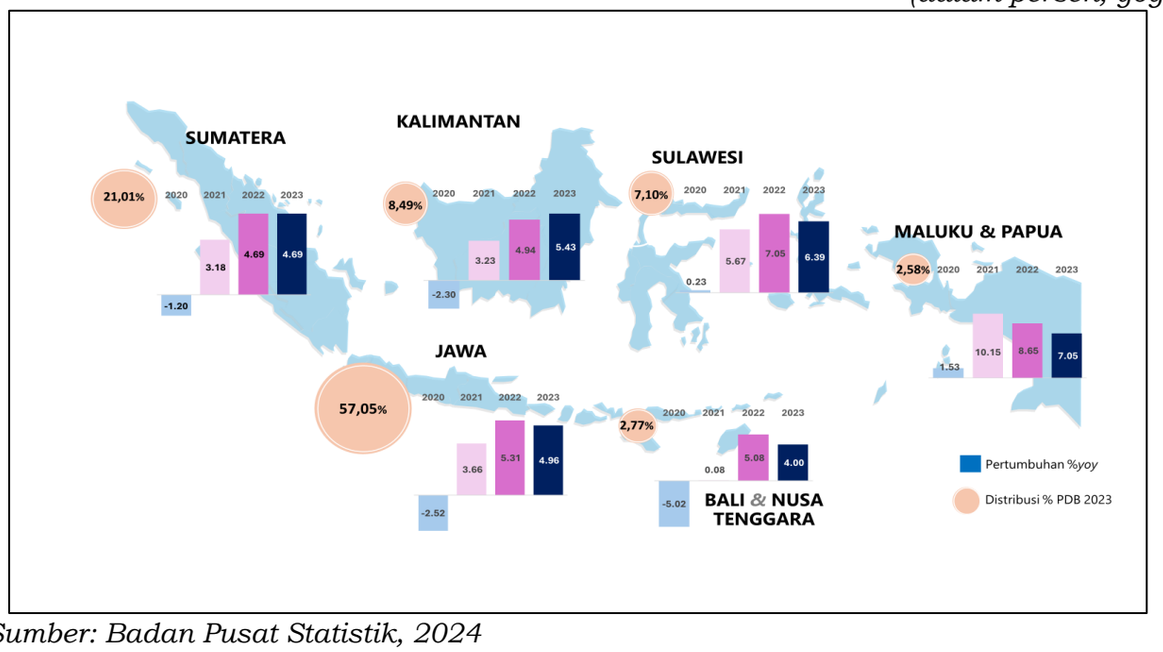
Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif 10,01 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Penyelenggaraan berbagai *event* baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Indikator-indikator sektor akomodasi seperti jumlah wisman dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel meningkat relatif cukup tinggi. Pada tahun 2023 jumlah wisman meningkat 98,30 persen (*yoy*) dan TPK hotel rata-rata mencapai 51,05 persen,

meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat rata-rata 47,61 persen (*yoy*). Selain itu, tumbuhnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga didorong oleh peningkatan mobilitas pada musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan peningkatan kegiatan partai politik menjelang Pemilu.

Sektor konstruksi dan *real estate* mampu tumbuh masing-masing 4,91 persen (*yoy*) dan 1,43 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), aktivitas belanja modal Pemerintah untuk konstruksi dan pembangunan infrastruktur dasar kawasan IKN telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator utama konstruksi seperti penjualan semen domestik tumbuh sebesar 4,12 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Sementara itu, kinerja *real estate* didorong oleh pertumbuhan nilai kredit properti 7,63 persen (*yoy*) dan pertumbuhan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 4,65 persen (*yoy*).

Secara spasial, perekonomian seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2023 dengan sumber pertumbuhan yang beragam. Perekonomian di wilayah yang berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) masih terus mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sulawesi dan wilayah Maluku dan Papua tumbuh tinggi berturut-turut 6,39 persen (*yoy*) dan 7,05 persen (*yoy*), terutama didorong oleh hilirisasi mineral. Wilayah Kalimantan pun mampu mencatatkan pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional, yakni 5,43 persen (*yoy*), terutama didorong oleh konstruksi dan pertambangan di Kalimantan Timur.

Grafik 7
Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB
(dalam persen, yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

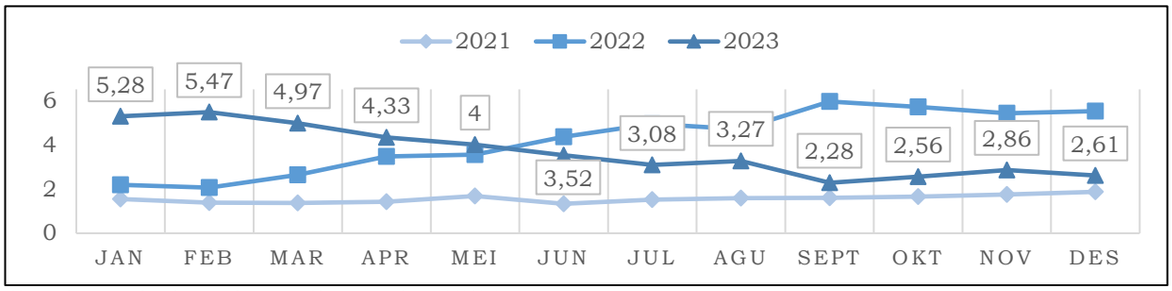
Pada akhir tahun 2023, situasi ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil dan fondasi ekonomi yang cukup kokoh. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, terutama dampak dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, batubara, dan *Crude Palm Oil* (CPO), serta komoditas pangan seperti beras dan cabai, yang dapat berpotensi memengaruhi pelaksanaan APBN. Kebijakan APBN bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan umum, sambil tetap memperhatikan keseimbangan fiskal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang efektif dan strategis terus diambil untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul, sehingga memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

A.3.1.2. Inflasi

Stabilitas ekonomi menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan terutama di tengah situasi tantangan global yang terus berubah. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga. Tingkat inflasi nasional tahun 2023 tercatat 2,61 persen (*yoy*), lebih rendah dari 5,51 persen (*yoy*) pada tahun 2022. Penurunan laju inflasi didukung oleh terjaganya inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) dan inflasi inti (*core inflation*). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak (*volatile food)* dalam tren peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh gangguan cuaca dan fenomena *El Nino.* Tren perkembangan inflasi selama tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 8**.

Grafik 8
Perkembangan Tingkat Inflasi 2021 – 2023

(dalam persen, *yoy)*



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Inflasi dari komponen inti pada Desember 2023 tercatat sebesar 1,80 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar 3,36 persen (*yoy).* Terjaganya inflasi inti didukung oleh kondisi nilai tukar yang stabil dan ekspektasi yang terjaga. Meskipun inflasi inti menurun, berbagai indikator

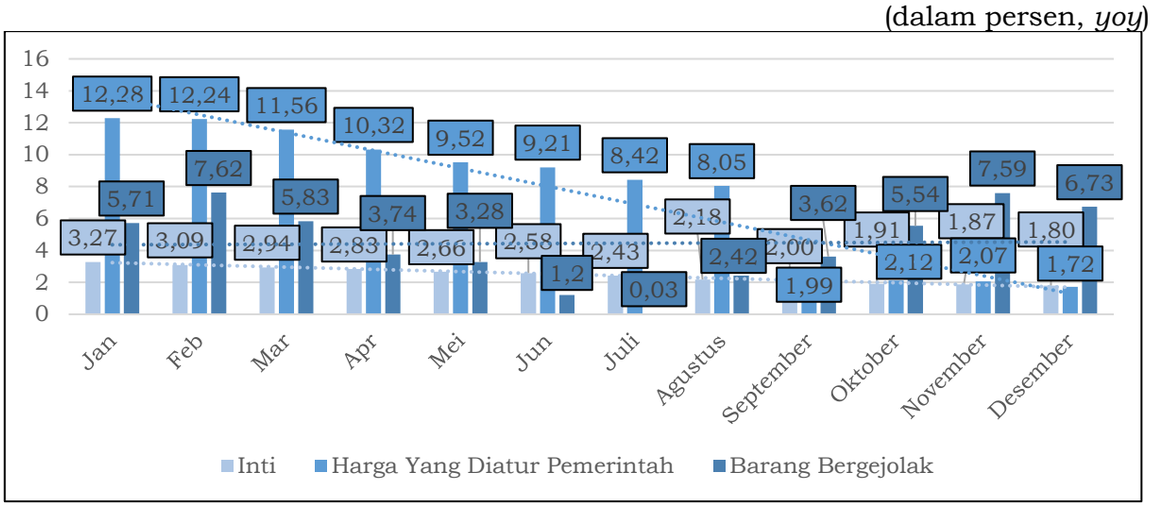
konsumsi masih menunjukkan penguatan mengindikasikan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) pada Desember 2023 mencapai 1,72 persen (*yoy*), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar 13,34 persen (*yoy),* didukung oleh tata kelola kebijakan energi yang terukur. Dalam kebijakan pengendalian inflasi *administered prices*, Pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi energi secara berhati-hati dengan tetap memerhatikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga daya beli masyarakat. APBN memerankan peran penting dalam meredam tekanan inflasi yang lebih tinggi (*shock absorber)* di tengah gejolak harga energi melalui subsidi energi dan penyaluran bantuan pada kelompok rentan.

Tekanan inflasi pangan bergejolak (*volatile food)* masih tinggi pada tahun 2023, tercatat sebesar 6,73 persen (*yoy*), meningkat dari Desember 2022 sebesar 5,61 persen (*yoy*). Gangguan cuaca dan fenomena *El Nino* menyebabkan gangguan produksi pangan terutama pada padi dan komoditas hortikultura, yang kemudian mendorong peningkatan harga sepanjang tahun 2023. Upaya pengendalian inflasi pangan terus dilakukan, antara lain kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan melalui percepatan impor, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. Perkembangan tingkat Inflasi menurut kelompok komponen Tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 9.**

Grafik 9
Perkembangan Tingkat Inflasi Januari - Desember 2023 Menurut Kelompok Komponen

(dalam persen, *yoy*)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

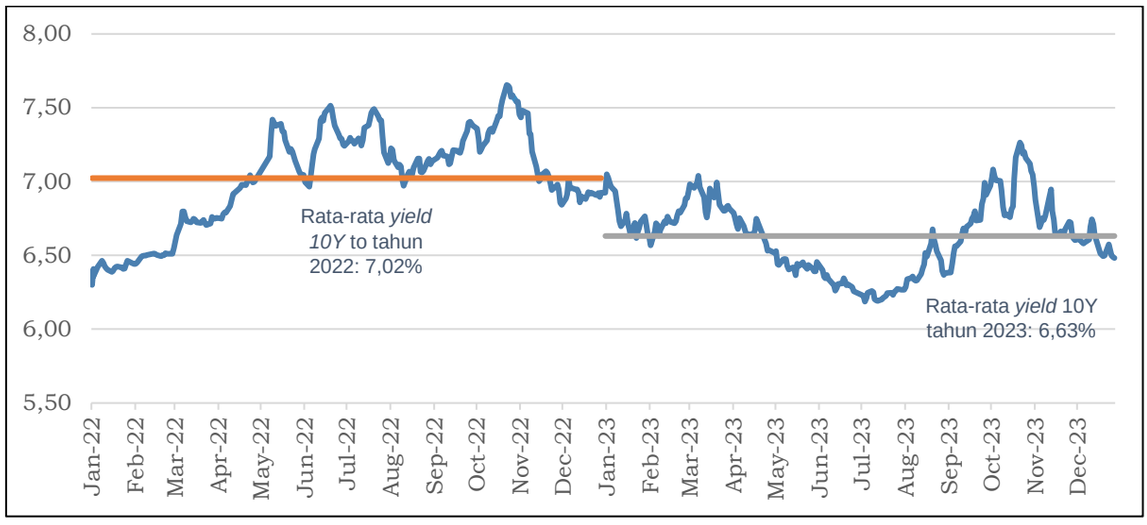
Tingkat inflasi pada tahun 2023 berhasil dipertahankan pada kisaran 3,0±1,0 persen, sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID) dalam menciptakan bauran kebijakan pengendalian inflasi. Efektivitas APBN sebagai *shock absorber* turut berperan penting dalam terkendalinya inflasi yang stabil dan rendah. Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan melalui strategi komunikasi publik yang terarah guna menjangkar ekspektasi masyarakat.

A.3.1.3. *Yield* Surat Berharga Negara

Setelah sempat mencapai angka di atas 7 persen pada awal Mei 2022, *yield* Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berfluktuasi sebelum mengalami penurunan hingga berada pada level 6,92 persen pada awal bulan Januari 2023. Perkembangan *yield* SBN 10 tahun dapat dilihat pada **Grafik 10**. Di tengah ekspektasi bertahannya suku bunga tinggi terutama di negara maju seperti AS, rata-rata *yield* SBN tenor 10 tahun turun ke level 6,63 persen pada akhir 2023. Hal ini tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing ke pasar SBN yang mencapai lebih dari Rp73 triliun selama 2023 seiring ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada 2024.

Grafik 10
Perkembangan Yield Hasil Lelang SUN 10 Tahun



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

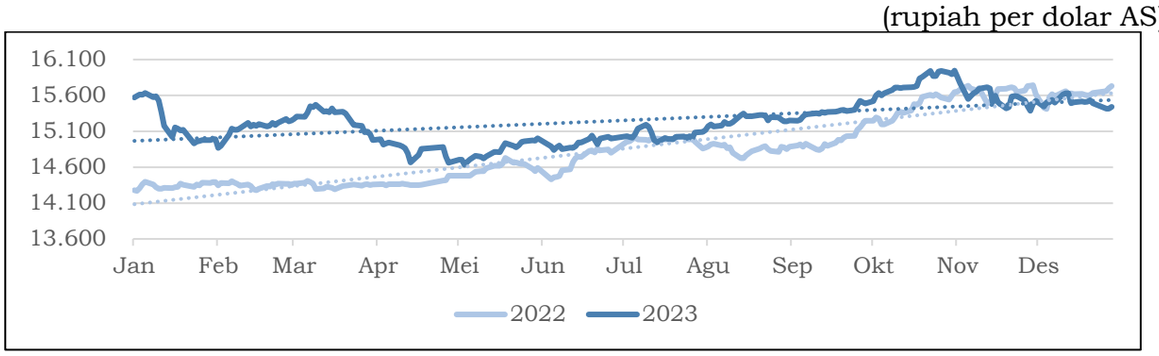
Stabilitas makroekonomi domestik yang terjaga dan kinerja fiskal yang dikelola dengan baik mendorong investor untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi, seperti obligasi di negara *emerging market* termasuk Indonesia. Perkembangan SBN juga dipengaruhi oleh persepsi investor domestik yang menunjukkan kuatnya minat beli, tercermin pada penyerapan SBN pada seluruh sektor mulai dari perbankan, dana pensiun, asuransi, reksa dana, hingga investor individu.

A.3.1.4. Nilai Tukar

Sepanjang tahun 2023, nilai tukar rupiah secara umum mengalami depresiasi khususnya pada paruh kedua 2023. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar rupiah yang mengacu pada kurs JISDOR mencapai Rp15.439 per dolar AS pada Desember 2023, menguat 0,85 persen dibandingkan dengan awal 2023. Meskipun pada rentang bulan Oktober-November nilai rupiah terhadap dolar AS melemah dengan level paling rendah terjadi pada tanggal 1 November 2023, yaitu Rp15.946 rupiah per dolar AS, nilai tukar rupiah kembali menguat menjelang akhir tahun 2023. Rata-rata nilai tukar rupiah selama Januari-Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.255 per dolar AS.

Grafik 11
Tren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2022

(rupiah per dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 2024

Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil pada tahun 2023 tidak lepas dari kebijakan moneter yang secara konsisten diterapkan Bank Indonesia. Pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara masih terus berlanjut dalam rangka mengatasi tekanan inflasi, meskipun tidak seagresif tahun 2022. Dampaknya, terjadi apresiasi dolar AS terhadap berbagai mata uang lain yang terlihat dari pergerakan Indeks Dolar AS pada level di atas 100, terutama pada Semester II 2023. Di Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah dapat tercermin pada tren pergerakan cadangan devisa yang turun pada Triwulan II hingga awal Triwulan IV 2023. Penurunan ini kemudian relatif tertahan oleh surplus neraca perdagangan yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

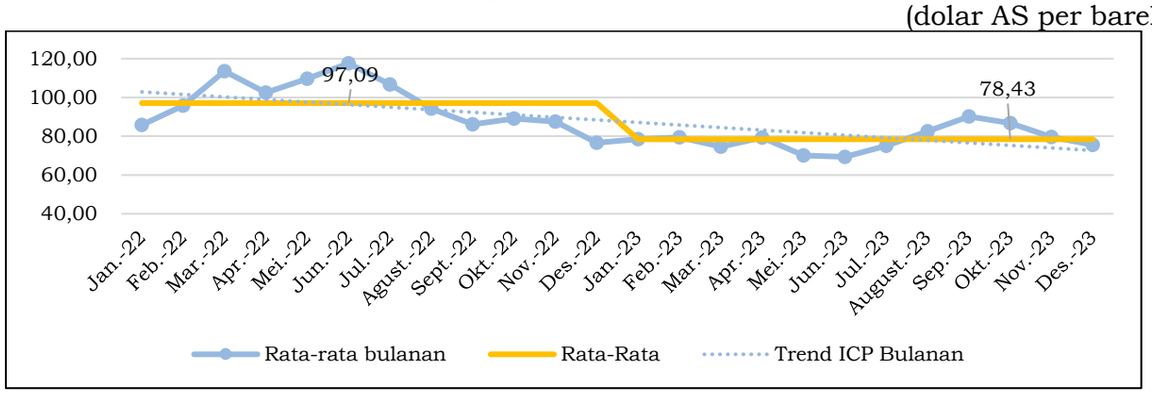
A.3.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia Januari-Desember 2023 tercatat 78,43 dolar AS per barel, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Di tahun 2023, konflik geopolitik Rusia Ukraina masih terjadi dan belum menunjukkan akan berakhir. Di sisi *supply*, embargo ekspor minyak Rusia masih diberlakukan sehingga mengurangi pasokan minyak dunia. Penurunan inventori minyak global yang masih berlanjut juga turut memengaruhi *supply* minyak dunia. Demikian pula kesepakatan pengurangan

produksi *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) menjadi salah satu faktor penyebab penurunan stok minyak global, meskipun tetap saja ada beberapa negara yang tidak patuh terhadap kesepakatan tersebut dan terjadinya peningkatan stok minyak dunia yang berasal dari produksi negara non-OPEC. Di sisi *demand*, pascapandemi Covid-19, dunia berharap adanya pemulihan ekonomi yang diiringi dengan permintaan komoditas global, termasuk minyak bumi. Pada tahun 2023, pemulihan ekonomi Tiongkok yang diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi di Asia bahkan global ternyata tidak terjadi.

Pada sepanjang tahun 2023, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP) bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melandai dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Juni 2023, ICP sempat turun menyentuh level terendahnya yaitu 69,36 dolar AS per barel, karena kekhawatiran pasar atas kondisi ekonomi global khususnya di Kawasan Eropa dan AS akibat turunnya *Purchasing Managers Index* (PMI) AS pada awal bulan Juni 2023. Selain itu, penurunan suku bunga pinjaman acuan di Tiongkok juga turut memengaruhi penurunan permintaan minyak mentah dunia. Sedangkan harga ICP tertinggi berada pada September 2023 di harga 90,17 dolar AS per barel, yang dipengaruhi oleh beberapa sentimen di antaranya permintaan minyak mentah yang tinggi di tengah ketidakpastian perekonomian global. ICP bulan Desember menyentuh angka 75,51 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan dengan harga ICP pada periode yang sama tahun 2022. Realisasi harga rata-rata ICP tahun 2023 berada di level 78,43 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan realisasi harga rata-rata ICP tahun 2022 yang tercatat pada level 97,09 dolar AS per barel. Realisasi harga pada tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2023 sebesar 90 dolar AS per barel.

Grafik 12
Perkembangan Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia 2022 – 2023
(dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, 2024

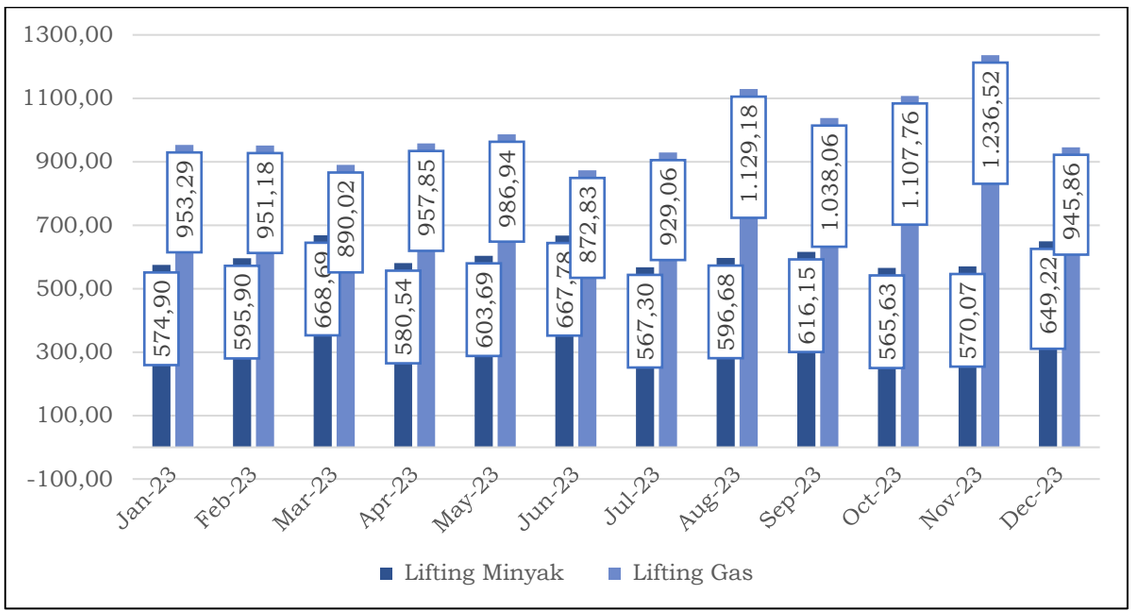
A.3.1.6. Rata-Rata *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi (migas) merupakan volume produksi migas dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. *Lifting* migas menjadi tolok

ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Dalam APBN 2023, target *lifting* migas terdiri dari *lifting* minyak bumi sebesar 660 ribu barel minyak per hari (*mbopd*) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.100 ribu barel setara minyak per hari (*mboepd*). Perkembangan rata-rata bulanan *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi Januari-Desember 2023 dapat dilihat pada **Grafik 13.**

Grafik 13
Perkembangan Rata-Rata Bulanan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

(mbpd, mboepd)



Sumber: Kementerian ESDM, 2024

Sampai Desember 2023, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 604,71 *mboepd* atau 91,62 persen dari target APBN 2023. Sementara itu, realisasi rata-rata *lifting* gas bumi mencapai 999,88 *mboepd* atau sebesar 90,90 persen dari target APBN 2023. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi sampai dengan Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 1,3 persen. Realisasi rata-rata *lifting* gas bumi Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Beberapa kendala yang menjadi penyebab capaian *lifting* migas di bawah target APBN 2023, antara lain : (i) penurunan secara alamiah sumur-sumur migas yang sudah tua, (ii) pemberlakuan *safety stand down* pada awal tahun 2023, (iii) ketersediaan *rig* dan tenaga kerja yang kompeten, serta (iv) isu pembebasan

lahan serta hasil kontribusi pemboran yang tidak sesuai target. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan tersebut, upaya untuk mengoptimalisasikan kinerja *lifting* migas terus dilakukan. Upaya peningkatan produktivitas eksploitasi minyak yang dilakukan pada tahun 2023 dapat menahan laju penurunan *lifting* minyak sehingga mencapai penurunan terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir. Capaian *lifting* gas pada tahun 2023 ditopang oleh *onstream*-nya beberapa kilang gas, seperti Lapangan JTB, MAC – HCML, Lapangan Belida North East, Bronang-MEPN dan Train #3 BP Berau karena produksi migas sangat dipengaruhi oleh kebijakan eksplorasi hulu migas, maka ke depan akan terus diupayakan untuk menemukan sumur-sumur baru sehingga produksi hulu migas dapat terus ditingkatkan.

A.3.2. INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Tabel 3
Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Ekspor (miliar dolar AS)	259,47	291,90
Impor (miliar dolar AS)	213,12	237,45
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	146,38	137,32
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	6,30	3,99
Bank Indonesia *7-day Reverse Repo Rate* (persen)	6,00	5,50
IHSG *(end of period)*	7.272,80	6.850,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI, 2024

A.3.2.1. Ekspor dan Impor

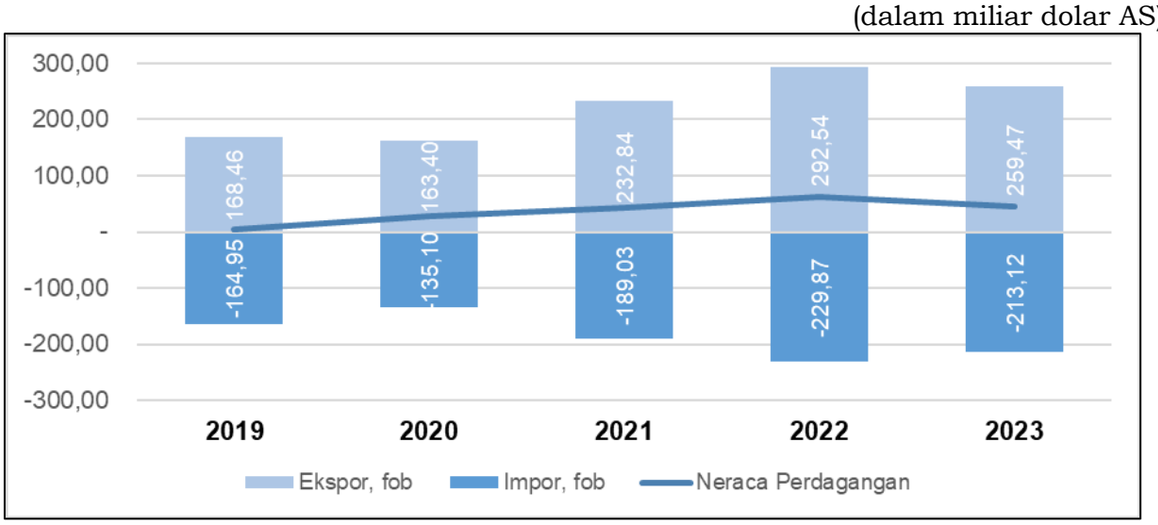
Kinerja ekspor Indonesia tahun 2023 melemah terutama akibat moderasi harga komoditas global. Nilai ekspor barang (*fob*) pada tahun 2023 mencapai 259,47 miliar dolar AS, terkontraksi 11,3 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2022. Kontraksi ekspor tersebut bersumber dari penurunan ekspor migas 2,1 persen (*yoy*) yang terdampak penurunan harga minyak dan penurunan ekspor nonmigas 11,9 persen (*yoy*) karena pengaruh termoderasinya harga mayoritas komoditas ekspor nonmigas, meskipun volume ekspor migas dan nonmigas mengalami peningkatan. Ekspor nonmigas mencapai 241,93 miliar dolar AS, menyumbang 93,2 persen terhadap total ekspor, sedangkan ekspor migas mencapai 16,69 miliar dolar AS dengan sumbangan 6,4 persen terhadap total ekspor.

Kinerja impor juga melemah karena penurunan harga komoditas dan melambatnya permintaan industri di dalam negeri. Nilai impor (*fob*) pada tahun 2023 mencapai 213,12 miliar dolar AS, terkontraksi 7,3 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2022. Nilai impor nonmigas mencapai 174,30 miliar dolar

AS atau sekitar 81,8 persen dari total impor, turun 5,6 persen (*yoy*) dibandingkan impor nonmigas pada periode yang sama tahun sebelumnya. Impor migas mencapai 36,35 miliar dolar AS atau 17,1 persen dari total impor dan terkontraksi 13,1 persen (*yoy*). Kontraksi impor terutama bersumber dari impor bahan baku akibat penurunan harga dan permintaan seiring dengan melambatnya aktivitas industri manufaktur di dalam negeri. Perkembangan nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 14.**

Grafik 14
Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2019 – 2023

(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kinerja neraca perdagangan Indonesia konsisten mencatat surplus. Walaupun pelemahan ekspor lebih besar dibandingkan pelemahan impor, neraca perdagangan tahun 2023 tetap mencatatkan surplus 46,3 miliar dolar AS. Surplus ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2022 sebesar 62,7 miliar dolar AS. Penurunan surplus neraca perdagangan ini lebih lanjut membawa implikasi pada kinerja neraca transaksi berjalan sepanjang tahun 2023.

A.3.2.2. Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2023 mencatat surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan surplus pada tahun 2022 sebesar 4,0 miliar dolar AS. Perbaikan NPI terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada kinerja Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) seiring dengan defisit pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB).

Neraca transaksi berjalan tahun 2023 kembali mencatatkan defisit, setelah mengalami surplus tahun 2022. Pada tahun 2023 neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit sebesar 1,6 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB), setelah mencatatkan surplus sebesar 13,2 miliar dolar AS (1,0 persen dari PDB) pada

tahun sebelumnya. Penurunan kinerja neraca transaksi berjalan ini terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan yang menurun akibat melemahnya kinerja ekspor, terutama dari sektor nonmigas. Selain itu, faktor lain yang turut mendorong penurunan kinerja neraca transaksi berjalan yaitu (1) penurunan surplus neraca pendapatan sekunder akibat menurunnya penerimaan hibah; (2) penurunan defisit neraca jasa seiring dengan peningkatan kunjungan wisman menyusul pemulihan *global tourism* dan penyelenggaraan *event* internasional; serta (3) peningkatan defisit neraca pendapatan primer akibat peningkatan remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kinerja NTMF membaik di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada tahun 2023, kinerja NTMF membaik secara signifikan dengan surplus 8,8 miliar dolar AS, setelah mencatat defisit 8,7 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini ditopang oleh konsistensi surplus investasi langsung karena iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan peningkatan arus masuk investasi portofolio, terutama pada pasar SBN domestik.

Tabel 4
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 dan 2022

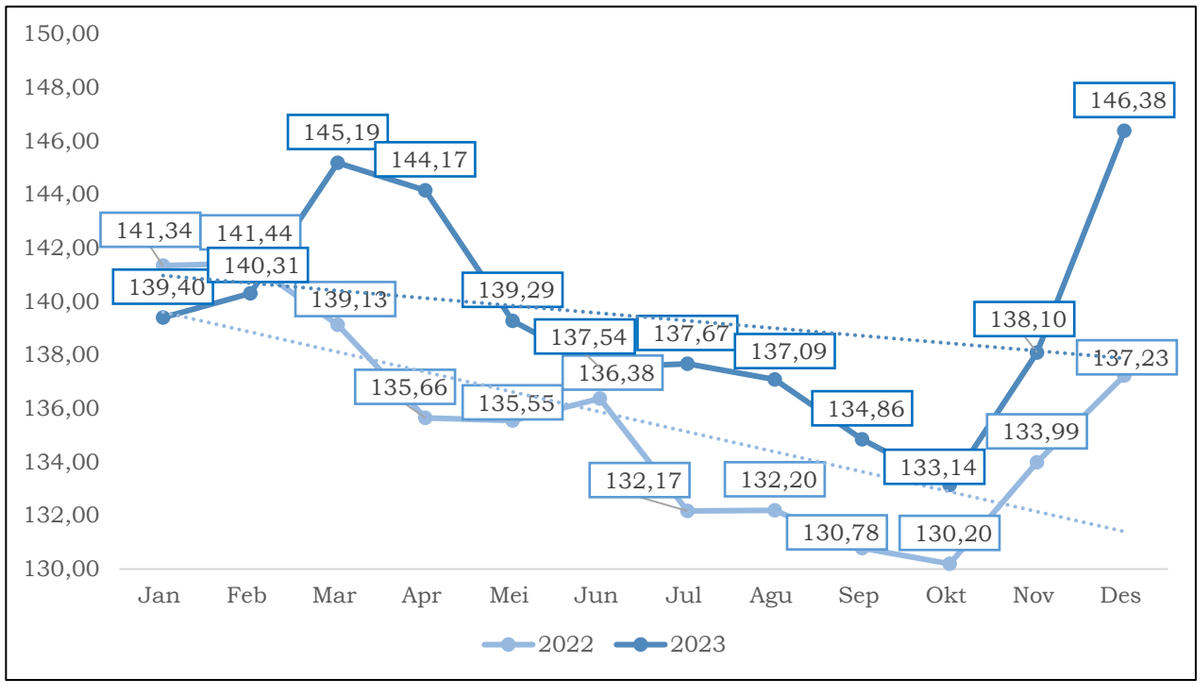
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Transaksi Berjalan *(Current Account)*	(1,57)	13,22
Transaksi Modal dan Finansial *(Capital &Financial Account)*	8,75	(8,68)
Selisih Perhitungan Bersih *(Net Errors & Omission)*	(0,88)	(0,54)
Neraca Keseluruhan *(Overall Balance)*	**6,30**	**3,99**

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Defisit neraca transaksi berjalan yang relatif kecil dan diimbangi dengan berbalik surplusnya neraca transaksi modal dan finansial menyebabkan kinerja NPI secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dengan mencatat surplus yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja NPI tersebut turut mendorong penguatan posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2023 menjadi 146,38 miliar dolar AS dari 137,23 miliar dolar AS pada akhir tahun 2022. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut tetap memadai karena didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Perkembangan cadangan devisa periode Januari-Desember 2023 dapat dilihat pada **Grafik 15**.

Grafik 15
Perkembangan Cadangan Devisa Tahun 2023 dan 2022
(dalam miliar dolar AS)

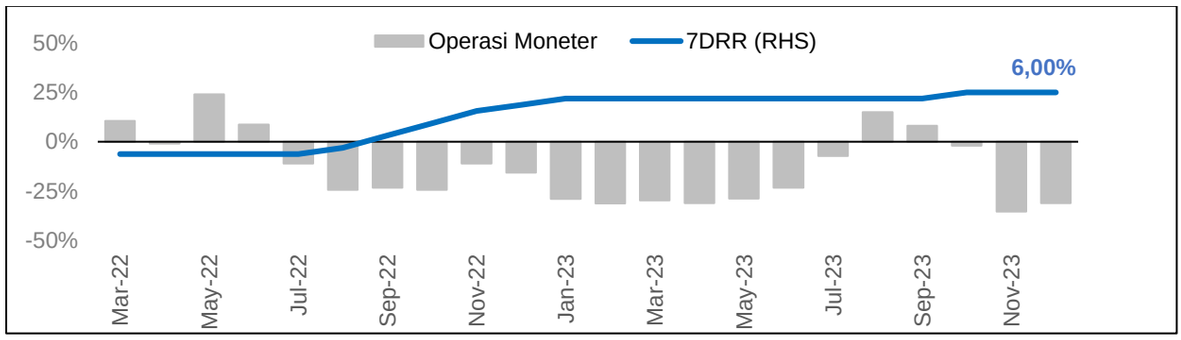


Sumber: *Bank Indonesia, 2024*

A.3.2.3. Perkembangan Kebijakan Moneter

Volatilitas yang terjadi pada pasar keuangan sepanjang tahun 2023 turut memengaruhi *stance* kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Untuk mendukung stabilisasi sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan, yaitu suku bunga *7-Day Reverse Repo* (7DRR), sebanyak dua kali atau sebesar 50 bps pada tahun 2023. Suku bunga 7DRR dinaikkan dari sebesar 5,50 persen pada akhir tahun 2022 menjadi sebesar 6,00 persen pada akhir tahun 2023. Selain itu, upaya stabilisasi nilai tukar juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui operasi moneter dengan memengaruhi likuiditas uang beredar di dalam negeri. Pada akhir tahun 2023, operasi moneter Bank Indonesia terlihat dari uang beredar yang terkontraksi sebesar 31,2 persen (*yoy*). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik melalui kenaikan suku bunga acuan maupun kontraksi uang beredar, merupakan langkah *pre-emptive* dan *forward-looking* dalam rangka menghadapi fluktuasi pasar keuangan global. Pada akhir tahun 2023, nilai tukar rupiah tercatat Rp15.439 per dolar AS, atau menguat sebesar 0,85 persen dibandingkan dengan awal tahun 2023.

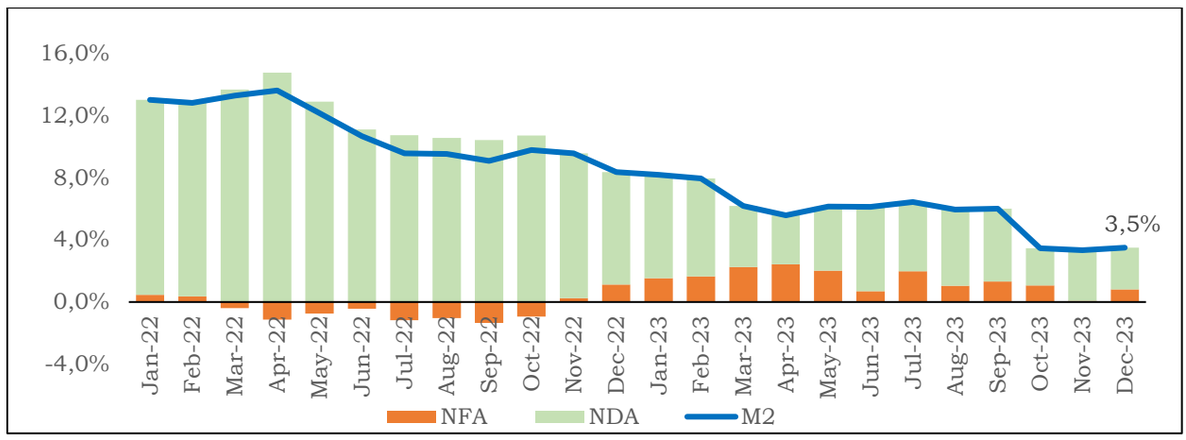
Grafik 16
7DRR dan Operasi Moneter Tahun 2022 - 2023



Sumber: Bank Indonesia

Langkah pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia sedikit banyak juga memengaruhi uang beredar luas (M2). Sepanjang tahun 2023, M2 mengalami perlambatan dengan tumbuh hanya 3,5 persen pada akhir tahun 2023. Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 praktis hanya bersumber dari *Net Domestic Asset* (NDA). Di sisi lain, seiring dengan aliran modal asing yang relatif sedikit masuk ke pasar keuangan Indonesia, *Net Foreign Asset* (NFA) tidak mampu mendorong pertumbuhan M2. Hal ini tidak lepas dari volatilitas pasar keuangan global, sehingga investor asing masih menahan dananya untuk masuk ke pasar *emerging market* seperti Indonesia.

Grafik 17
Perkembangan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Tahun 2022 – 2023



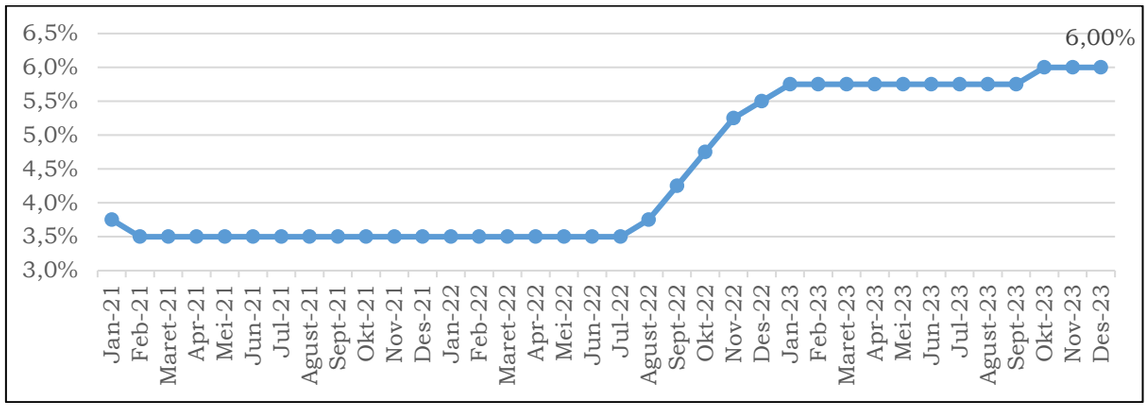
Sumber: Bank Indonesia

A.3.2.4. Bank Indonesia *Rate*

Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan menguat pada tahun 2023 tidak terlepas dari respon pembauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus dioptimalkan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan di tengah potensi risiko global yang semakin meluas. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia melalui penguatan nilai tukar rupiah, normalisasi likuiditas dan respon suku bunga serta kebijakan nilai tukar dengan dukungan kecukupan devisa mendukung stabilitas perekonomian. Penyesuaian terhadap suku bunga acuan atau BI *Rate* pada September 2023 dipertahankan pada nilai 5,75 persen sejak Januari 2023 dan meningkat menjadi 6,00 persen pada bulan Oktober 2023 sebagai respons atas pelemahan rupiah pada Triwulan III 2023. Kebijakan ini berhasil meredam tekanan depresiasi rupiah pada Triwulan IV tahun 2023. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah pada tahun 2023 terdepresiasi 2,59 persen dibandingkan tahun 2022, dari semula Rp14.871/dolar AS menjadi Rp15.255/dolar AS. Meski demikian, depresiasi nilai tukar rupiah ini masih lebih baik dibanding negara-negara *emerging market* lain, seperti Turki, Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Vietnam.

Keputusan dalam mempertahankan BI *Rate* 6,00 persen ini merupakan konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1,0 persen pada akhir tahun 2023 dan 2,5±1,0 persen pada 2024. Dalam rangka menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global, kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial secara konsisten tetap dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kebijakan makroprudensial terus ditempuh dalam rangka mendorong kredit pembayaran perbankan. Selain itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan BI *Rate* Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada **Grafik 18**. yang mencerminkan kenaikan BI *Rate* sejak Agustus 2022 hingga menjadi 6,00 persen pada akhir tahun 2023.

Grafik 18
Perkembangan BI Rate tahun 2021 - 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2024

Selain kebijakan mempertahankan BI *Rate* pada Desember 2023, Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga *Deposit Facility* 5,25 persen dan suku bunga *Lending Facility* 6,75 persen sejak dinaikkan pada bulan Oktober 2023. Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi ini perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan dari dampak rambatan ekonomi global seperti ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif terus dilakukan termasuk melalui (i) stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dengan fokus transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*; (ii) optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI); (iii) pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi; (iv) akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan transaksi QRIS; serta (v) memperluas kerja sama dengan sejumlah bank sentral untuk penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT).

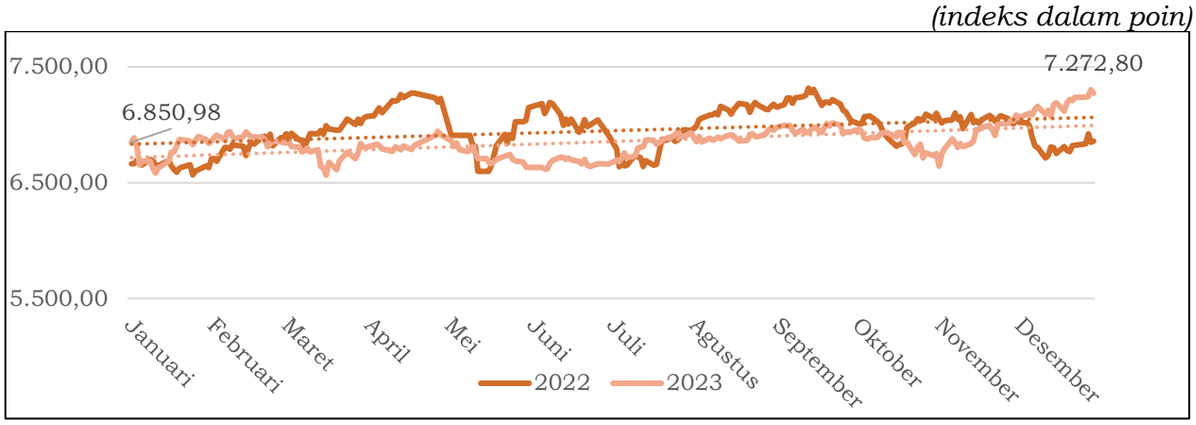
A.3.2.5. Indeks Harga Saham Gabungan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Januari-Desember 2023 menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif. Perdagangan saham tahun 2023 memperlihatkan capaian cukup positif di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sejak awal tahun 2023, IHSG bergerak naik dari level 6.850,98 di pembukaan awal Januari 2023 hingga mencapai posisi tertingginya pada April 2023 di level 6.945,48. Selanjutnya, IHSG mengalami pelemahan hingga akhir Juni 2023 sebesar 4 persen atau 279 poin pada level 6.661,88. Memasuki

Triwulan III 2023, IHSG mengalami penguatan hingga pertengahan September 2023 dan mencapai titik tertinggi di level 7.016,84. Sepanjang Januari-Desember 2023, IHSG mencapai titik tertinggi pada Desember 2023 level 7.272,80. Tren laju IHSG Januari-Desember 2022 dan 2023 ditunjukkan pada **Grafik 19**.

Grafik 19
Tren Laju IHSG (end of period) Tahun 2023 dan 2022

(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan, 2024

A.3.2.6. Indikator Stabilitas Sistem Keuangan

Sepanjang tahun 2023, kinerja perbankan berangsur tumbuh dan relatif membaik dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang sangat memadai. Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada bulan Desember 2023 yang berada pada level 25,7 persen atau di atas standar minimum, yaitu di atas 8,0 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,0 persen, yaitu 2,19 persen (bruto) pada Desember 2023. Sinergi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK (Pemerintah, BI, OJK, dan LPS) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan untuk menjaga kondisi likuiditas tersebut tetap longgar.

Fungsi intermediasi perbankan juga membaik, terlihat dari pertumbuhan kredit yang meningkat hingga *double digit*. Pada Desember 2023, pertumbuhan kredit mencapai sebesar 10,3 persen (*yoy*) terutama pada kredit produktif, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) serta pada sebagian besar sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor pertambangan, transportasi, dan jasa keuangan sejalan dengan membaiknya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit ini didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang membuat permintaan pembiayaan naik. Namun demikian, *Loan to Deposit Ratio*

(LDR) yang masih relatif rendah (83,8 persen) pada akhir tahun 2023 mengindikasikan belum termanfaatkannya peningkatan sumber pendanaan Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi kegiatan intermediasi tersebut. Pertumbuhan DPK per Desember 2023 mencapai 3,8 persen (*yoy*). Perkembangan CAR, NPL, Pertumbuhan Kredit, dan DPK dapat dilihat pada **Tabel 5.**

Tabel 5
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Januari - Desember 2023

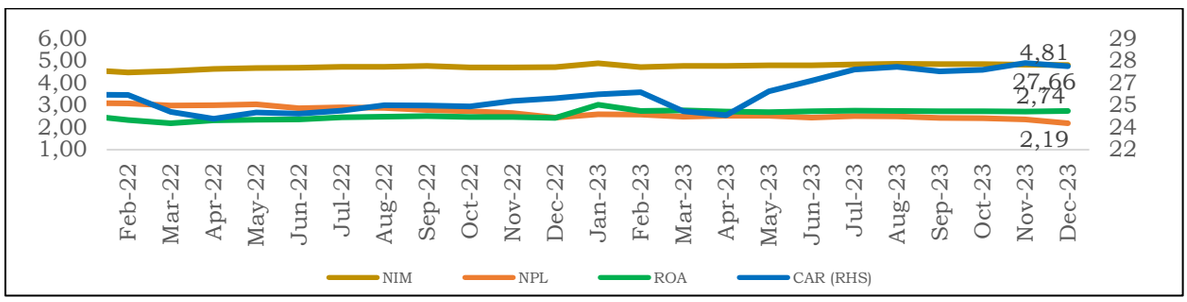
(dalam persen)

Periode	CAR	NPL *(Gross)*	Pertumbuhan Kredit	DPK
Januari	25,89	2,59	10,2	8,5
Februari	26,02	2,58	10,4	9,1
Maret	24,81	2,49	9,8	7,2
April	24,58	2,53	8,1	7,0
Mei	26,07	2,52	9,5	6,9
Juni	26,74	2,44	7,8	6,4
Juli	27,44	2,51	8,4	7,2
Agustus	27,61	2,50	8,9	6,4
September	27,33	2,43	8,7	6,4
Oktober	27,44	2,42	8,7	3,3
November	27,86	2,36	9,7	3,8
Desember	27,65	2,19	10,3	3,8

A.3.2.7. Perkembangan Kinerja Sektor Perbankan

Sektor perbankan sepanjang tahun 2023 menunjukkan kinerja yang solid di tengah fluktuasi pasar keuangan global. Profitabilitas perbankan berada dalam kondisi yang baik, ditunjukkan oleh tingkat *Net Interest Margin* (NIM) yang relatif stabil dan berada pada level 4,81 persen pada akhir tahun 2023. *Return on Asset* (ROA) juga relatif stabil dan tercatat 2,74 persen. Sementara itu, permodalan perbankan juga tetap kuat dan meningkat ke level 27,66 persen pada periode yang sama. Dari sisi kualitas kredit, tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) menunjukkan perbaikan, turun dari 2,43 persen pada akhir tahun 2022 menjadi 2,19 persen pada akhir tahun 2023.

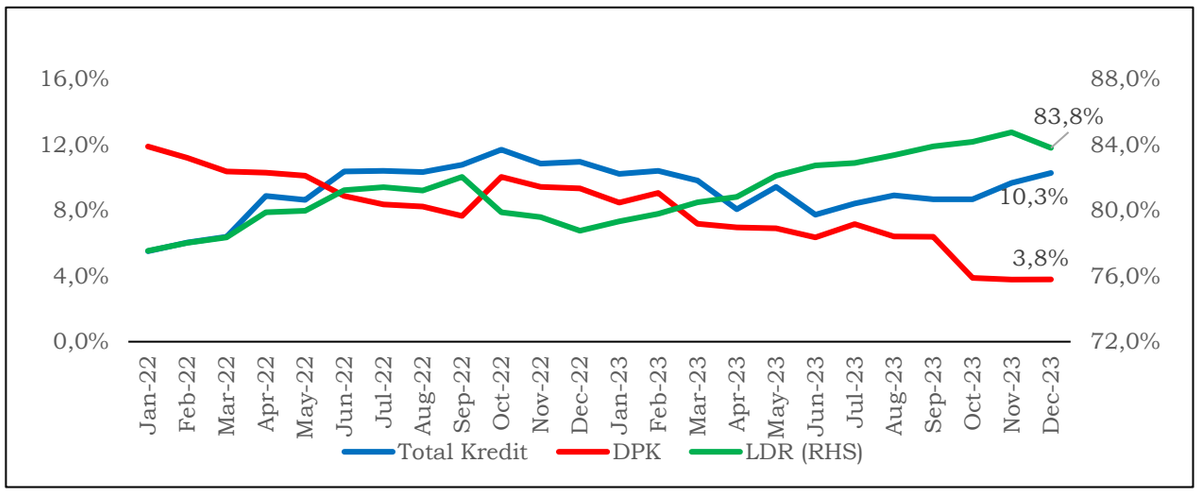
Grafik 20
Indikator Kinerja Perbankan Umum 2022 – 2023



Sumber: Bank Indonesia

Dari sisi intermediasi, total kredit perbankan tumbuh 10,3 persen (*yoy)* pada akhir tahun 2023, didukung oleh kredit korporasi dan kredit perorangan. Kredit korporasi tumbuh 11,6 persen (*yoy)*, sementara kredit perorangan tumbuh 9,0 persen (*yoy)* pada periode yang sama. Sementara itu, dari segi sumber pendanaan perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya tumbuh 3,8 persen (*yoy)* pada akhir tahun 2023, dipengaruhi oleh pertumbuhan rekening dengan nominal di atas Rp5 miliar yang hanya tumbuh 3,5 persen (*yoy)*. Perkembangan ini menyebabkan kenaikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan dari level 78,8 persen pada akhir tahun 2022 ke 83,8 persen pada akhir tahun 2023. Meskipun demikian, level LDR di bawah 90 persen tersebut mengindikasikan bahwa perbankan masih memiliki likuiditas yang cukup *ample* untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam perekonomian lebih lanjut.

Grafik 21
Perkembangan Total Kredit dan DPK Perbankan 2022 – 2023 (%)



Sumber: Bank Indonesia

A.3.3. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berikut merupakan ikhtisar indikator kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2022
TPT (persen) *	5,32	5,86
Tingkat Kemiskinan (persen)**	9,36	9,54
Gini Ratio **	0,388	0,384
IPM (data tahunan)	74,39	73,77
Nilai Tukar Petani	112,46	107,33
Nilai Tukar Nelayan	105,4	106,45

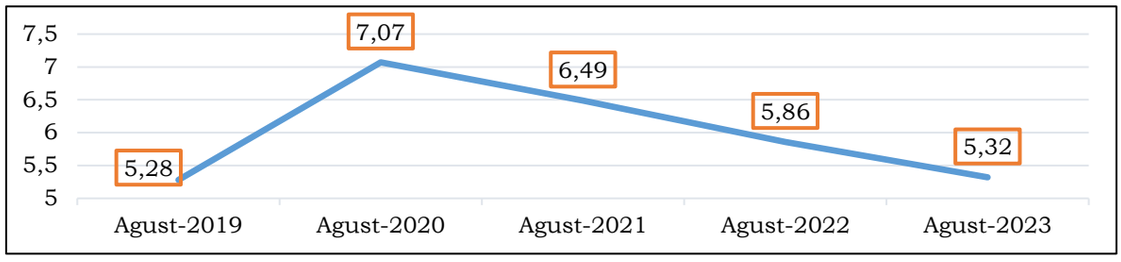
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (*data Agustus 2023, **data Maret 2023)*

A.3.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan positif ekonomi nasional pada tahun 2023 mendorong perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2023 tercatat 5,32 persen atau turun sebesar 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022 sebagaimana terlihat pada **Grafik 22**. TPT Agustus 2023 membaik dibandingkan dengan Agustus 2022 yang berada pada 5,86 persen. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang bekerja 139,85 juta orang, meningkat sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan utama yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak antara lain lapangan pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebanyak 1,18 juta orang, Konstruksi sebanyak 0,77 juta orang, dan Pertanian sebanyak 0,75 juta orang. Selain itu, kualitas kondisi lapangan kerja nasional juga membaik dengan kenaikan orang yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 57,18 juta orang atau naik 40,89 persen.

Grafik 22
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2019 – 2023

(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sejak Agustus 2020, TPT mengalami penurunan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Kinerja perekonomian yang terus terjaga mendorong kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian terus menuju ke arah perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang terus menguat menjadi tantangan untuk menggerakkan seluruh sektor lapangan usaha. Kepercayaan pelaku usaha dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan mendorong aktivitas investasi swasta yang menggerakkan sektor padat karya. Pertumbuhan sektor manufaktur juga ikut berperan dalam penurunan tingkat pengangguran Agustus 2023.

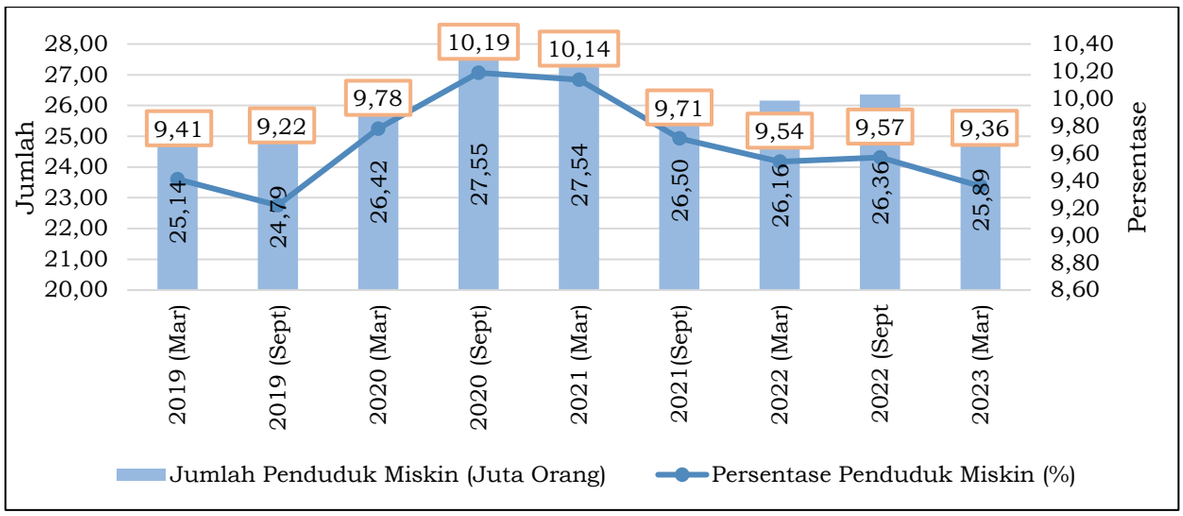
Selanjutnya, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 tercatat mencapai 147,71 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3,99 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Seiring dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan menjadi 69,48 persen atau meningkat 0,85 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Kenaikan nilai TPAK tersebut mengindikasikan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Indonesia mengalami

peningkatan. Kebijakan Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian pada semua sektor ekonomi terus dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga menurunkan TPT.

A.3.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kondisi positif ketenagakerjaan dan juga dukungan program perlindungan sosial dalam APBN berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan nasional melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan tingkat kemiskinan 2022. Jumlah penduduk miskin Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta orang, turun sebanyak 0,26 juta orang dari Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif. Jika dirinci menurut daerah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 11,74 juta orang, menurun sebanyak 0,08 juta orang dari Maret 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 14,16 juta orang, menurun sebanyak 0,18 juta orang dari Maret 2022. Penurunan kemiskinan ini juga diikuti penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 1,12 persen pada Maret 2023, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 2,04 persen.

Grafik 23
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 - Maret 2023



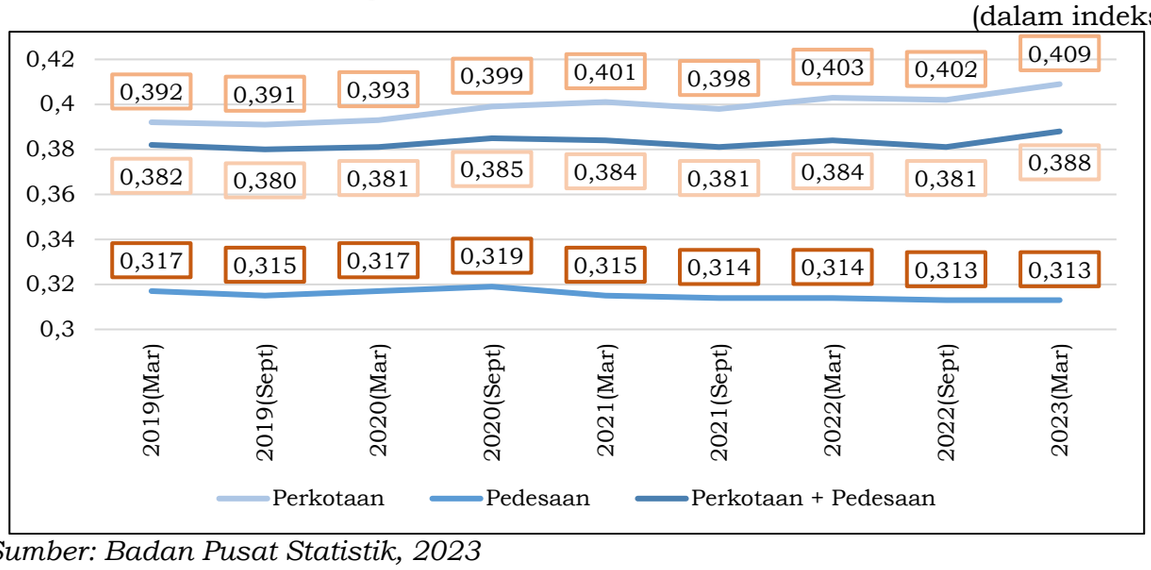
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

A.3.3.3. *Gini Ratio*

Gini Ratio pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388, sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 0,384. Jika dilihat berdasarkan daerah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan tercatat 0,409, naik 0,006

poin dari Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan tercatat 0,313, menurun 0,001 poin dari Maret 2022 yang sebesar 0,314. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Hal ini disebabkan oleh distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah yaitu 18,04 persen atau berada di atas 17 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,99 persen yang artinya tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk di pedesaan, angkanya tercatat sebesar 21,18 persen, yang artinya tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Perkembangan *Gini Ratio* dapat dilihat pada **Grafik 24.**

Grafik 24
Perkembangan Rasio Gini Maret 2019 - Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

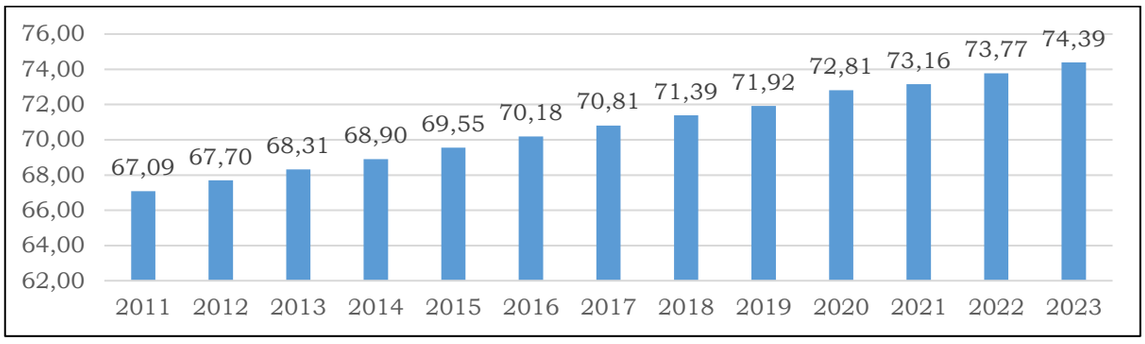
Perkembangan *Gini Ratio* menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, angka *Gini Ratio* mengalami kenaikan signifikan per September 2020. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya, *Gini Ratio* sudah berhasil ditekan kembali sehingga menurun pada periode September 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berjalan efektif.

A.3.3.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan manusia. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat di suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Status IPM berkategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) diraih Indonesia pada

tahun 2016, setelah sebelumnya berada pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70) seiring dengan pembangunan kualitas manusia di Indonesia yang terus meningkat. IPM Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil sehingga pada tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun 2022 seperti terlihat pada **Grafik 25**. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia mempertahankan posisinya di kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80).

Grafik 25
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 - 2023



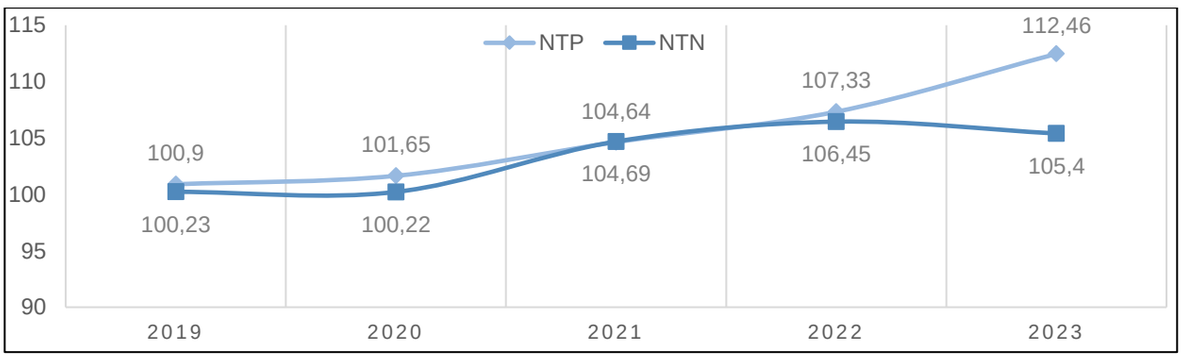
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun dimensi standar hidup layak. Peningkatan pada semua dimensi ini juga terjadi pada tahun 2022. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil/kapita/tahun (yang disesuaikan) meningkat 3,66 persen menjadi sebesar Rp11,9 juta per tahun. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 13,15 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 13,10 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada 2023. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, lebih lama 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

A.3.3.5. Nilai Tukar Petani dan Nelayan

Indikator pembangunan berupa Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat membaik. Secara nasional, NTP pada tahun 2023 sebesar 112,46 atau lebih tinggi 4,78 persen dibandingkan 2022 (107,33). Kenaikan ini didorong terutama oleh peningkatan pada subsektor tanaman pangan, khususnya komoditas gabah dan jagung.

Grafik 26
Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Indikator pembangunan berupa Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga tercatat stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022. Dampak *El Nino* dan kenaikan air laut yang menyebabkan banjir rob telah mengakibatkan berkurangnya tangkapan ikan sehingga berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir. NTN sepanjang tahun 2023 tercatat 105,40 atau turun 0,99 persen dibandingkan NTN tahun 2022 (106,45).

A.4. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Pencapaian Kinerja APBN tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif di tengah-tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan secara prudensial, optimis, dan tetap waspada. Kinerja APBN 2023 yang positif dan momentum keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi awalan yang baik dalam rangka mencapai target-target pembangunan pada tahun 2024.

Hasil positif APBN 2023 tergambarkan pada hasil pencapaian atas indikator ekonomi makro pada tahun 2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 5,05 persen, meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Kerja keras APBN 2023 juga mampu mengendalikan dan menjaga tingkat inflasi yang cenderung menurun sepanjang tahun, yaitu sebesar 2,61 persen di saat dunia mengalami pergolakan inflasi yang diakibatkan tingginya harga komoditas pangan dan energi. Keberhasilan menjaga tingkat inflasi tersebut didorong atas kebijakan pemerintah dalam menjaga *supply* dan distribusi kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk dengan memberikan subsidi dan kompensasi energi.

Pemerintah melakukan akselerasi Belanja Negara pada APBN untuk mendukung penuh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum yang teragendakan tahun 2024 untuk pemilihan

presiden, legislatif dan kepala daerah, serta meredam dampak *El Nino* dan stabilisasi harga. Selain itu, kinerja positif pelaksanaan APBN 2023 juga tergambarkan pada kondisi fiskal yang semakin membaik, ditopang dari peningkatan Pendapatan Negara sebesar 5,62 persen. Dampak positifnya, realisasi defisit anggaran hanya sebesar Rp337,29 triliun atau 1,61 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27 persen terhadap PDB.

Sejalan dengan rendahnya defisit anggaran, Keseimbangan Primer tahun 2023 kembali mencatat nilai positif, di mana total Pendapatan Negara lebih besar daripada Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan Primer dalam APBN selalu berada pada nilai negatif selama 12 tahun terakhir sedangkan surplus Keseimbangan Primer terakhir terjadi pada tahun 2011. Keseimbangan Primer Positif menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang menggunakan Pendapatan Negara. Sedangkan Keseimbangan Primer negatif menggambarkan pemerintah harus mencari pembiayaan untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah harus menggenjot Pendapatan Negara atau menekan Belanja Negara untuk mencapai Keseimbangan Primer yang positif. Keseimbangan Primer positif tahun 2023 sebesar Rp102,59 triliun atau berbanding terbalik dengan target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 tahun 2023, yaitu defisit Rp38,53 triliun. Keseimbangan Primer yang positif tersebut mengindikasikan kondisi APBN yang semakin sehat di mana pemerintah dapat membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utangnya tanpa harus mencari pembiayaan.

Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada realisasi APBN. Sampai dengan akhir tahun 2023, APBN hanya mengalami defisit sebesar 1,61 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu defisit APBN sebesar 2,35 persen terhadap PDB. Rendahnya defisit disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah serta efisiensi Belanja Negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Hingga akhir tahun 2023, Pendapatan Negara mencapai Rp2.783,93 triliun, atau meningkat 5,62 persen (*yoy*) yang berasal dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah yang melampaui target sedangkan realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,22 triliun atau meningkat 0,81 persen (*yoy*).

Defisit APBN yang terealisasi hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp337,29 triliun. Atas defisit tersebut, pemerintah melakukan sejumlah bentuk pembiayaan hingga akhir tahun 2023 yang mencapai Rp356,66 triliun (74,32 persen terhadap Pagu) yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp277,37 triliun serta Pembiayaan Luar Negeri (Neto) yang mencapai 79,29 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan utang pada tahun 2023 yang dilaksanakan dengan penuh perhitungan untuk menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*) yang mencapai sebesar Rp403,95 triliun. Lebih

besarnya realisasi pembiayaan dibandingkan dengan defisit anggaran, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp19,38 triliun, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional lainnya dan kewajiban pemerintah yang tertunda.

A.4.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun 2020 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia hingga memasuki masa resesi ekonomi dan menyebabkan kinerja Pendapatan Negara terkontraksi sebesar 15,96 persen atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Penurunan kinerja tersebut disebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat atau kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta masifnya pemberian insentif perpajakan dan PNBP bagi para pelaku ekonomi dan penerima layanan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Namun pada tahun-tahun berikutnya Pendapatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2021 Pendapatan Negara meningkat sebesar 22,07 persen dan tahun 2022 meningkat lebih besar lagi sebesar 31,05 persen. Hal ini sejalan dengan keberhasilan pemerintah melakukan penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang diiringi peningkatan lapangan pekerjaan serta kenaikan harga komoditas utama global.

Kebijakan fiskal pemerintah yang efektif, responsif, dan berkelanjutan mendorong kinerja Pendapatan Negara yang terus berada pada tren peningkatan. Pemerintah terus memobilisasi Pendapatan Negara secara optimal pada tahun 2023 untuk mencapai konsolidasi fiskal yang berkualitas dan mendukung kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi pendapatan dari perpajakan, PNBP, dan hibah dengan tetap menjaga daya beli, iklim investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan aset, serta meningkatkan inovasi layanan.

Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp2.783,93 triliun atau 105,56 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023, yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.154,21 triliun, PNBP sebesar Rp612,54 triliun, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp17,18 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 5,88 persen (*yoy*) dan 2,84 persen (*yoy*) serta Pendapatan Hibah yang meningkat signifikan sebesar 201,69 persen (*yoy*).

Kinerja dari Pendapatan dan Hibah ditopang dari kinerja Pendapatan Perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), termasuk peningkatan rasio perpajakan dan pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur, moderasi harga komoditas, penurunan nilai impor, pengendalian konsumsi dan

menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang pada tahun 2023. Sedangkan, kinerja PNBP dipengaruhi kenaikan tarif royalti batubara dan kenaikan setoran yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik sektor perbankan maupun sektor non-Perbankan dan kontraksi Pendapatan SDA akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batubara. Pendapatan Hibah yang meningkat signifikan dipengaruhi dari adanya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tabel realisasi Pendapatan Negara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Angka Naik/ Turun*
I. Pendapatan Perpajakan	**2.154,21**	**2.034,55**	**5,88**
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.089,72	1.943,65	7,51
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	64,49	90,89	(29,05)
II. PNBP	**612,54**	**595,59**	**2,84**
1. Pendapatan SDA	254,20	268,77	(5,42)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	82,06	40,59	102,13
3. Pendapatan PNBP lainnya	180,42	196,32	(8,10)
4. Pendapatan BLU	95,86	89,90	6,63
III. Penerimaan Hibah	**17,18**	**5,69**	**201,69**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**2.783,93**	**2.635,84**	**5,62**

Sumber: Kementerian Keuangan
*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan

Perpajakan mengalami peningkatan sebesar Rp119,65 triliun atau tumbuh 5,88 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Perpajakan tersebut bersumber dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.089,72 triliun, yang meningkat 7,51 persen atau sebesar Rp146,06 triliun serta Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp64,49 triliun, yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 29,05 persen atau sebesar Rp26,41 triliun. Pendapatan Perpajakan berdasarkan sumbernya terdiri dari Pendapatan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja Pendapatan Perpajakan didukung oleh kinerja Pendapatan Pajak yang tumbuh 8,80 persen (*yoy*) atau Rp151,09 triliun. Sedangkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2023 mengalami kontraksi sebesar 9,94 persen (*yoy*) atau minus Rp31,43 triliun. Realisasi Pendapatan Pajak dan

Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing adalah 102,73 persen dan 95,41 persen terhadap target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75/2023.

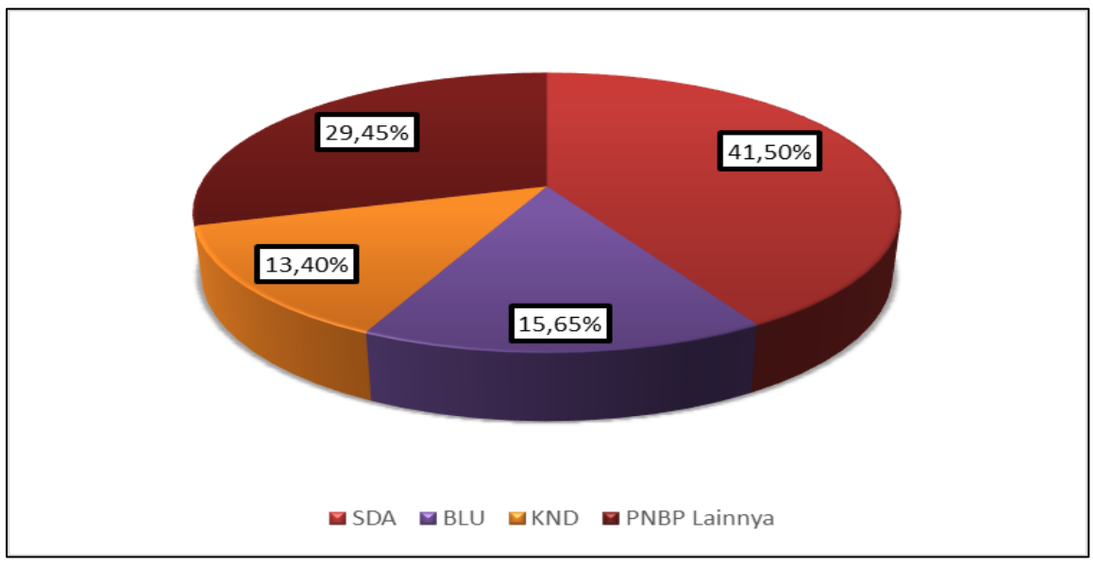
Pendapatan Pajak kembali mencatatkan keberhasilan di mana tahun 2023 merupakan tahun ketiga melampaui target Pendapatan Pajak. Kinerja Pendapatan Pajak tetap kuat meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas harga komoditas. Terjaganya kondisi ekonomi domestik dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak membuahkan hasil yang baik. Selain menggalakkan reformasi perpajakan, pengawasan yang komprehensif dan terarah juga dilakukan sepanjang tahun 2023. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan pasca PPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan basis data dan kemudahan akses informasi perpajakan, dan penerapan pajak untuk ekonomi digital.

Sumber Pendapatan Pajak berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas, PPh Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan Pajak terbesar berasal dari PPh Nonmigas sebesar Rp983,269 triliun dan PPN/PPnBM Sebesar Rp761,53 triliun. Kedua komponen tersebut berkontribusi sebesar 81,25 persen dari total Pendapatan Pajak, di mana PPh Nonmigas berkontribusi sebesar 46,07 persen dan PPN/PPnBM berkontribusi sebesar 35,45 persen. Secara detil, komponen terbesar dalam Pendapatan PPh Nonmigas masih ditopang dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp406,30 triliun, PPh Pasal 21 sebesar Rp200,85 triliun, dan PPh Final sebesar Rp125,09 triliun, di mana jumlah ketiganya mencapai 73,78 persen terhadap total Pendapatan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas berhasil meningkat sebesar 7,83 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen Pendapatan PPh Nonmigas didorong atas perbaikan kondisi ekonomi, utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, serta tekanan akibat moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang.

Pada Pendapatan dari komponen PPN/PPnBM realisasi utamanya ditopang oleh Pendapatan PPN sebesar Rp737,64 triliun atau setara dengan 96,60 persen dari total seluruh komponen PPN/PPnBM, sedangkan komponen PPnBM berkontribusi sebesar Rp23,89 triliun dan PPN/PPnBM ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp2,09 triliun. Pendapatan PPN yang besar, ditopang oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing sebesar 64,23 persen dan 34,69 persen. Berdasarkan pertumbuhannya, PPN/PPnBM berhasil meningkat sebesar 11,06 persen (*yoy*) di mana pertumbuhan tersebut disebabkan adanya Pendapatan PPN yang tumbuh sebesar 11,11 persen (*yoy*), PPnBM tumbuh sebesar 23,51 persen sedangkan PPN/PPnBM ditanggung Pemerintah mengalami penurunan sebesar 52,10 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh perbaikan kondisi perekonomian dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta adanya penurunan nilai impor baik impor migas maupun non migas, serta impor bahan baku.

Pendapatan Kepabeanan dan Cukai berasal dari Pendapatan Cukai sebesar Rp221,85 triliun, Bea Masuk (BM) sebesar Rp50,89 triliun dan Bea Keluar (BK) sebesar Rp13,60 triliun. Secara nominal, Pendapatan Kepabeanan dan Cukai utamanya didukung oleh Pendapatan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 74,56 persen terhadap total Pendapatan Kepabeanan dan Cukai atau Rp213,50 triliun. Pada Akhir tahun 2023, seluruh komponen Pendapatan Kepabeanan dan Cukai mencatatkan Pendapatan di bawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertumbuhannya, seluruh komponen Pendapatan Kepabeanan dan Cukai mencatatkan pertumbuhan negatif. Pendapatan Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar mengalami kontraksi sebesar 2,22 persen (*yoy*), 0,36 persen (*yoy*) dan 65,85 persen (*yoy*). Penurunan Pendapatan Cukai terutama akibat produksi hasil tembakau yang berkurang karena adanya kegiatan pengendalian konsumsi dan upaya pengawasan rokok ilegal. Penurunan Pendapatan Bea Masuk dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan peningkatan pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement* (FTA)). Di sisi lain, kinerja Bea Keluar menurun terutama diakibatkan harga rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah meskipun secara volume ekspor meningkat, serta turunnya harga dan volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit.

Grafik 27
Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi PNBP sampai dengan akhir tahun 2023 mencatatkan hasil yang positif di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas harga komoditas yang menghambat laju pertumbuhan kinerja PNBP di awal-awal tahun. Realisasi PNBP tercatat mencapai Rp612,54 triliun atau sebesar 118,75 persen terhadap target atau tumbuh positif sebesar Rp16,94 triliun atau 2,84 persen (*yoy*).

Pertumbuhan capaian PNBP bersumber dari kenaikan realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Pendapatan Badan Layanan Umum masing-masing sebesar 102,13 persen (*yoy*) dan 6,63 persen (*yoy*), sedangkan pada capaian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Lainnya mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 5,42 persen (*yoy*) dan 8,10 persen (*yoy*).

Pendapatan dari KND mencatatkan kenaikan yang fantastis, yaitu mencapai sebesar Rp82,06 triliun atau lebih dari dua kali lipat dari realisasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp40,60 triliun. Perekonomian nasional yang pulih pascapandemi Covid-19 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN. Kenaikan profit yang diperoleh BUMN mendorong kenaikan rasio pembayaran dividen sehingga meningkatkan jumlah setoran dividen dari BUMN, atas bagian Pemerintah pada Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN di sektor perbankan sebesar Rp40,84 triliun, sektor non-Perbankan sebesar Rp40,37 triliun serta bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian keuangan pada sektor nonperbankan sebesar Rp0,84 triliun. Selain Pendapatan KND, Pendapatan BLU juga mencatatkan hasil yang positif, dengan realisasi sebesar Rp95,86 triliun atau 120,64 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari pemberian jasa layanan umum sebesar Rp86,50 triliun, pendapatan Hibah BLU sebesar Rp0,42 triliun, hasil kerja sama BLU sebesar Rp1,22 triliun, Pendapatan dari Pelayanan BLU dari entitas pusat sebesar Rp0,81 triliun, serta Pendapatan BLU lainnya seperti layanan perbankan, sewa, penjualan BMN dan lain-lain sebesar Rp6,91 triliun.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Pendapatan SDA berhasil melewati target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp254,20 atau 113,83 persen. Akan tetapi, perolehan tersebut mengalami penurunan Rp14,57 triliun atau sebesar 5,42 persen (*yoy*). Penurunan realisasi Pendapatan SDA disebabkan adanya perlambatan Pendapatan SDA Migas sebesar 21,87 persen (*yoy*) yang dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan minyak mentah dunia sebagai dampak risiko ketegangan geopolitik dan peperangan, inflasi dan kondisi perekonomian beberapa negara, di Eropa, serta penurunan *lifting* minyak dan gas bumi. Sedangkan Pendapatan SDA Nonmigas berhasil mencatatkan peningkatan realisasi sebesar 14,95 persen (*yoy*). Peningkatan kinerja SDA Nonmigas didorong kinerja realisasi Pendapatan SDA Minerba yang meningkat 16,55 persen (*yoy*) yang diperoleh dari kenaikan tarif royalti batubara sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. Walaupun Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami kontraksi, namun kenaikan tarif royalti batubara dan volume penjualan berhasil menutupi penurunan tersebut. Selanjutnya SDA Nonminerba terkontraksi sebesar Rp4,18 triliun akibat penurunan jumlah pembayaran piutang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dan perubahan mekanisme pemungutan PNBP dari praproduksi menjadi pascaproduksi. Perubahan tersebut berdampak terhadap waktu penerimaan pembayaran, terutama untuk

nelayan dari semula Wajib Bayar membayar PNBP di depan pada saat akan berlayar dan dihitung untuk perkiraan PNBP 1 tahun, menjadi pembayaran PNBP dilakukan saat mendaratkan ikan.

Realisasi PNBP Lainnya, hingga akhir 2023 mencapai sebesar Rp180,42 triliun atau mengalami penurunan sebesar 8,10 persen (*yoy*). Penurunan realisasi penerimaan dipengaruhi oleh penurunan *Domestic Market Obligation* (DMO) terutama disebabkan penurunan ICP dan *lifting* minyak bumi, penurunan realisasi Penjualan Hasil Tambang (PHT) dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan kegiatan usaha batubara yang tidak berulang pada tahun 2022. Sedangkan dari PNBP K/L memberikan kinerja positif akibat terdapat inovasi layanan dan peningkatan aktivitas masyarakat.

Realisasi Penerimaan Hibah pada tahun 2023 mencapai Rp17,18 triliun atau 554,33 persen terhadap target APBN 2023 yang berasal dari Hibah Dalam Negeri sebesar Rp15,36 triliun dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp1,82 triliun. Penerimaan ini meningkat Rp11,49 triliun atau 201,69% dari tahun 2022 yaitu Rp5,70 triliun. Realisasi penerimaan hibah yang bersumber dari dalam negeri terutama melalui pemerintah daerah digunakan untuk (1) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, (2) meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi, dan (3) dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sedangkan Penerimaan yang berasal dari hibah luar negeri terutama digunakan untuk (1) pengelolaan hutan berkelanjutan, (2) pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, (3) perencanaan pembangunan nasional, dan (4) percepatan penanganan *stunting* dan pemerataan pembangunan.

A.4.2. BELANJA NEGARA

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya peningkatan pengangguran dan kemiskinan, serta menghambat aktivitas pembangunan dengan adanya penundaan beberapa proyek infrastruktur dikarenakan pergeseran anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, pandemi Covid-19 juga menciptakan peluang untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural ini harus diimbangi dengan reformasi fiskal guna mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang sehat. Tahun 2023 menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi fiskal, setelah pada tahun sebelumnya pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal satu tahun lebih cepat dari yang dimandatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

Reformasi fiskal dilaksanakan secara menyeluruh untuk pos-pos APBN mulai dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi belanja, upaya dilakukan pemerintah dengan terus melanjutkan penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*). Pemerintah mendorong pengelolaan Belanja Negara agar dapat dilakukan lebih efisien dan produktif untuk mencapai target

pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan belanja difokuskan pada beberapa hal, di antaranya: Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan kebijakan yang berfokus pada (1) Dukungan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan pelayanan dasar, (3) Revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, (4) Adaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi energi, (5) Peningkatan ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial (bansos) dan subsidi, (6) Peningkatan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, (7) Efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas, (8) Peningkatan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah, serta (9) Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya. Sedangkan pada Belanja Transfer ke Daerah akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal melalui harmonisasi antara Belanja Pusat dengan Daerah dalam rangka mendukung dan memajukan perekonomian daerah serta menyejahterakan masyarakat.

Realisasi Belanja Negara akhir tahun 2023 mencapai Rp3.121,22 triliun atau sebesar 100,13 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023 yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.239,79 triliun atau sebesar 97,28 persen dari target APBN dan realisasi Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp881,43 triliun atau sebesar 108,19 persen dari target APBN. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat selama tahun 2023 dipengaruhi antara lain oleh pengeluaran yang digunakan untuk penebalan bantuan sosial, percepatan penanganan infrastruktur daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, pembayaran bunga utang, subsidi dan kompensasi energi, dan penyesuaian program kartu prakerja yang tidak lagi dijalankan seperti skema yang dijalankan selama pandemi Covid-19. Realisasi Transfer ke Daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan daerah, ketepatan waktu dan kelengkapan persyaratan penyaluran transfer oleh pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkatan penyaluran DAK.

Tabel 8
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Angka Naik/Turun*
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.239,79**	**2.280,02**	**(1,76%)**
1. Belanja Pegawai	412,71	402,44	2,55%
2. Belanja Barang Jasa	432,71	426,15	1,54%
3. Belanja Modal	303,04	240,57	25,97%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	439,88	386,34	13,86%

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Angka Naik/Turun*
5. Subsidi	269,59	252,81	6,64%
6. Belanja Hibah	0,22	5,80	(96,22%)
7. Bantuan Sosial	156,60	161,52	(3,05%)
8. Belanja Lain-lain	225,02	404,39	(44,35%)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**881,43**	**816,23**	**7,99%**
1. Dana Transfer Umum	603,70	546,41	10,48%
a. Dana Bagi Hasil	205,67	168,41	22,12%
b. Dana Alokasi Umum	398,03	378,00	5,30%
2. Dana Transfer Khusus	181,35	173,16	4,73%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,33	54,78	(8,12%)
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,08	118,38	8,19%
c. Hibah Kepada Daerah	2,94	0,00	100,00%
3. Dana Otonomi Khusus	17,24	20,44	(15,63%)
4. Dana Keistimewaan DIY	1,37	1,32	3,99%
5. Insentif Fiskal	7,91	6,99	13,05%
6. Dana Desa	69,86	67,91	2,87%
Jumlah Belanja Negara	**3.121,22**	**3.096,26**	**0,81%**

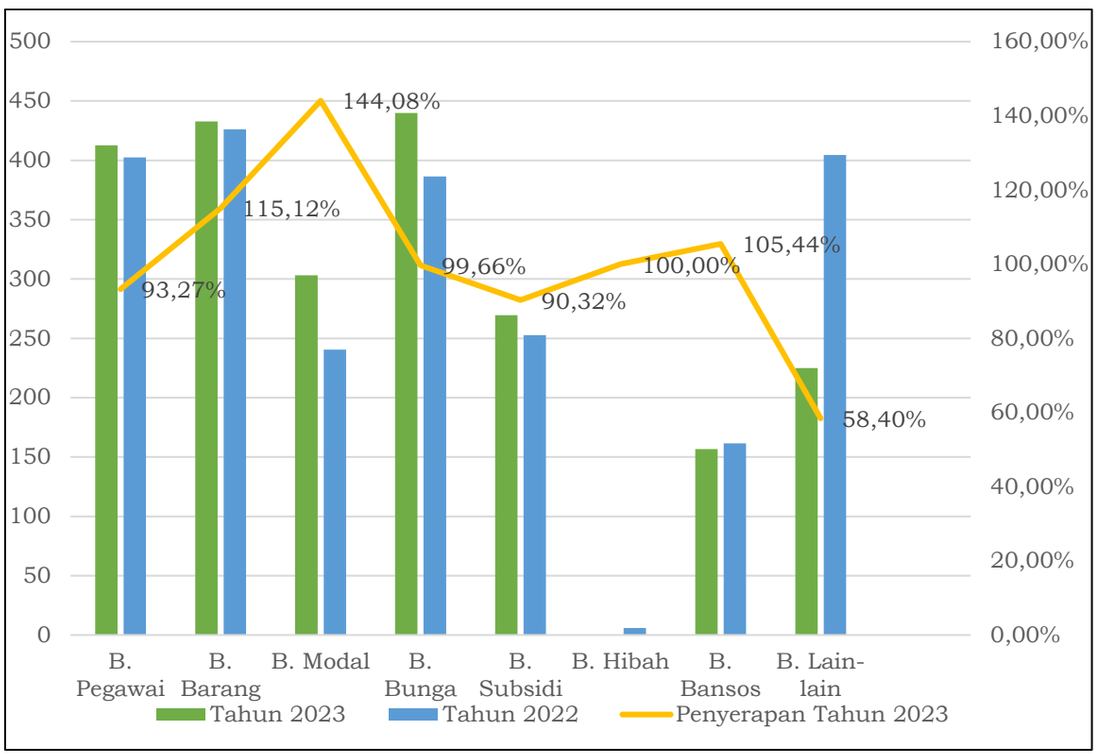
Sumber: Kementerian Keuangan
*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi sebesar 1,76 persen (*yoy*) menjadi Rp2.239,79 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 secara umum dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan K/L dan Bendahara Umum Negara seperti dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur, pengadaan almatsus (alat material khusus) dan alutsista (alat utama sistem senjata), pembangunan IKN, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran manfaat pensiun, serta penyaluran berbagai bansos seperti PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PIP, BOS, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Berdasarkan nominal dan persentase peningkatan, dari urutan terbesar terjadi antara lain pada komponen Belanja Modal sebesar 25,97 persen, Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar 13,86 persen, Belanja Subsidi sebesar 6,64 persen, Belanja Pegawai sebesar 2,55 persen, serta Belanja Barang dan Jasa sebesar 1,54 persen. Selain peningkatan belanja, terdapat Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan secara signifikan, yaitu Belanja Hibah sebesar 96,22 persen, Belanja lain-lain sebesar 44,35 persen, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 3,05 persen. Kontraksi yang dialami oleh hampir seluruh komponen Belanja Pemerintah Pusat merupakan bagian dari penerapan kebijakan efisiensi dan *spending better* yang diterapkan dalam rangka pertimbangan sustainabilitas.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 terdiri dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp1.152,23 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp1.087,56 triliun. Belanja K/L direalisasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, serta Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Non-K/L dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara yang direalisasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pembayaran Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, serta Belanja Lain-lain. Belanja Non-K/L pada umumnya direalisasikan untuk penyaluran manfaat pensiun, penyaluran subsidi (a.l. subsidi energi dan subsidi pupuk), kompensasi energi (BBM dan listrik), serta program kartu prakerja. Jika dirinci menurut kinerja nominal realisasi belanja per masing-masing K/L, maka K/L dengan porsi realisasi tertinggi secara berurutan terhadap total Belanja K/L antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (15,13 persen), Kementerian Pertahanan (14,89 persen), Kepolisian Negara Republik Indonesia (10,40 persen), Kementerian Kesehatan (8,21 persen), Kementerian Sosial (7,42 persen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (7,01 persen), Kementerian Agama (6,32 persen), Kementerian Keuangan (5,75 persen), Kementerian Perhubungan (3,04 persen), serta Komisi Pemilihan Umum (1,71 persen).

Grafik 28
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 mencapai Rp412,71 triliun atau 93,27 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN/TNI/POLRI sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 serta pemenuhan Kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan akhir 2023 mencapai Rp432,71 triliun atau 115,12 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya utamanya dipengaruhi oleh tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang serentak di tahun 2024 serta adanya instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) di sejumlah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah dan diharapkan akan memperlancar akses transportasi, memudahkan mobilitas warga, serta membuka peluang ekonomi baru bagi daerah setempat. Selain itu, realisasi Belanja Barang juga digunakan untuk (1) pemeliharaan BMN dalam rangka mendukung alutsista, nonalutsista pada Tentara Nasional Indonesia Matra Darat, Laut, Udara dan Umum melalui Kementerian Pertahanan, (2) pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional melalui KemenPUPR, (3) pengadaan/dukungan logistik, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kamtibmas melalui POLRI, (4) peningkatan kualitas perguruan tinggi dan penyaluran dana Bantuan Operational PTN, serta pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan melalui Kemendikbudristek, (5) penyaluran dana BOS pada Kementerian Agama, serta (6) pembentukan Badan Ad hoc untuk pelaksanaan persiapan Pemilu 2024, penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta pengadaan laporan dan dokumentasi logistik melalu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta beberapa K/L lainnya.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp303,04 triliun atau 144,08 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi yang mengalami peningkatan tajam bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022, digunakan untuk (1) modernisasi peralatan dan mesin alat material khusus (almatsus) pada POLRI, alutsista pada Kemenhan, dan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan BIN, (2) pengadaan infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan preservasi jalan dan jembatan oleh KemenPUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan laut oleh Kemenhub, (3) pembangunan gedung dan bangunan kantor

Pemerintahan Istana Negara Dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan jalan tol di Kawasan IKN oleh KemenPUPR, terminal bandara pada Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kemendikbudristek, rumah sakit pada Kemenkes, dan rusun prajurit TNI & POLRI.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp156,60 triliun atau 105,44 persen dari pagu yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kontraksi bila dibandingkan tahun 2022, yang dipengaruhi oleh tidak dilaksanakannya kembali penyaluran bansos berupa BLT Minyak Goreng dan BBM pada tahun 2023. Belanja Bantuan Sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan sosial PKH bagi 9,9 juta KPM, penyaluran program kartu sembako untuk 18,5 juta KPM pada Kemensos, (2) penyaluran bantuan sosial iuran kepada 96,7 juta PBI JKN pada Kemenkes, (3) penyaluran bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 960,5 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag, serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang hingga akhir tahun 2023 mencapai sebesar Rp439,88 triliun atau 99,66 persen dari target yang ditetapkan. Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban Pemerintah kepada investor atau pemberi pinjaman sebagai konsekuensi penggunaan utang untuk menutup kebutuhan defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan program dan proyek. Pembayaran bunga utang mencakup kupon dan diskon surat berharga negara, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pengelolaan utang Pemerintah.

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp269,59 triliun atau 90,32 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi Belanja Subsidi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan asumsi makro seperti harga minyak mentah dan nilai tukar, dan volume penyaluran barang bersubsidi. Belanja Subsidi direalisasikan untuk: (1) Subsidi Energi sebesar Rp164,29 triliun yang turun sebesar 4,40 persen (*yoy*) mencakup Subsidi BBM, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik; dan (2) Subsidi Nonenergi Rp105,30 triliun yang turun 30,07 persen (*yoy*) mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga Kredit Program, Subsidi PSO, dan Subsidi Pajak DTP. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 16.504,53 ribu KL, LPG Tabung 3 Kg 7,73 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 39,96 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi sebesar 64,46 TWh. Selanjutnya, realisasi Subsidi Nonenergi meliputi antara lain penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,1 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 4,6 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp259,8 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 229,0 ribu unit rumah.

Pada APBN tahun 2023, program pengelolaan hibah dialokasikan sebesar Rp10,09 miliar dan sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp219,14 miliar atau sebesar 2.172,76 persen dari pagunya. Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 96,22 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan adanya perubahan tata kelola sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), di mana Hibah ke Daerah diklasifikasikan menjadi bagian yang terintegrasi dengan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, kebijakan Hibah ke Daerah pada tahun 2023 mencerminkan desain baru sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibat perubahan tersebut, program pengelolaan hibah pada tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya. Realisasi Belanja Hibah dilakukan kepada Lembaga Pemerintah di Luar Negeri sebesar Rp69,82 miliar, organisasi internasional sebesar Rp149,21 miliar dan pembayaran *banking commision* yang telah terealisasi sebesar Rp101,2 juta yang dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan kepada MUFG Bank.

Belanja Lain-lain tahun 2023 terealisasi sebesar Rp225,02 triliun atau 58,40 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp206,07 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri yang terjangkau oleh masyarakat, pembayaran bantuan pangan tahap I Rp7,76 triliun, penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) triwulan I s.d.III 2023 sebesar Rp2,01 triliun, dan pembayaran kewajiban pemerintah terkait penyaluran beras (PPKM, KPSH, dan bencana alam) tahun 2021-2022 sebesar Rp3,10 triliun. Selain itu, Belanja Lain-lain dikucurkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja Rp2,76 triliun, yang dimanfaatkan utamanya untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 1,14 juta peserta serta biaya operasional program, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat dan bantuan operasional layanan pos universal kepada penyelenggara pos dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*/PSO).

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 Menurut Fungsi

(dalam triliun rupiah)

No	Fungsi	Pagu APBN	Realisasi Tahun 2023	
			Rp	%
1	Pelayanan Umum	721,28	809,69	112,26%
2	Pertahanan	134,31	171,48	127,68%
3	Ketertiban dan Keamanan	182,61	193,33	105,87%
4	Ekonomi	632,93	485,43	76,70%

No	Fungsi	Pagu APBN	Realisasi Tahun 2023	
			Rp	%
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	13,13	13,51	102,89%
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	31,73	38,07	119,99%
7	Kesehatan	96,62	98,41	101,85%
8	Pariwisata dan Budaya	3,56	4,54	127,44%
9	Agama	11,17	11,01	98,60%
10	Pendidikan	234,08	171,95	73,46%
11	Perlindungan Sosial	241,04	242,35	100,54%
	TOTAL	**2.302,46**	**2.239,79**	**97,28%**

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan ke dalam 11 klasifikasi Fungsi, diantaranya: (1) Fungsi Pelayanan Umum, (2) Fungsi Pertahanan, (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Fungsi Kesehatan, (8) Fungsi Pariwisata, (9) Fungsi Agama, (10) Fungsi Pendidikan, dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial. Nominal realisasi tertinggi pertama terealisasi pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp809,69 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, realisasi pemenuhan beberapa program pelayanan lainnya, seperti Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik antara lain statistik ketahanan sosial dan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta pembayaran bunga utang. Tertinggi kedua terealisasi pada Fungsi Ekonomi sebesar Rp485,42 triliun yang digunakan untuk realisasi belanja K/L, penyaluran subsidi BBM dan LPG, subsidi bunga KUR, subsidi pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui Program Belanja Lainnya dan Fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp242,35 triliun di urutan ketiga yang digunakan untuk belanja K/L bidang sosial seperti Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti penyaluran bantuan PKH, bantuan pangan melalui program kartu sembako, pemberian perlindungan bagi perempuan. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial melalui Non-K/L dimanfaatkan antara lain untuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri serta para pensiunan, veteran dan melanjutkan subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan.

Tabel 10
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 dan 2022

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Angka Naik/Turun*
Transfer Ke Daerah	**881,43**	**816,23**	**7,99%**
1. Dana Transfer Umum	**603,69**	**546,41**	**10,48%**
a. Dana Bagi Hasil	205,66	168,41	22,12%
b. Dana Alokasi Umum	398,03	378,00	5,30%
2. Dana Transfer Khusus	**181,35**	**173,16**	**4,73%**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,33	54,78	(8,12%)
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,08	118,38	8,19%
c. Hibah Kepada Daerah	2,94	-	100,00%
3. Dana Otonomi Khusus	**17,24**	**20,44**	**(15,63%)**
4. Dana Keistimewaan DIY	**1,37**	**1,32**	**3,99%**
5. Insentif Fiskal	**7,91**	**6,99**	**13,05%**
6. Dana Desa	**69,86**	**67,91**	**2,87%**

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp881,43 triliun atau sebesar 108,19 persen dari pagu yang ditetapkan dan realisasi TKD meningkat 7,99 persen (*yoy*).

Realisasi DBH mencapai Rp205,67 triliun atau meningkat 22,12 persen (*yoy*) yang didorong oleh penyelesaian kekurangan pembayaran DBH dan tambahan alokasi DBH Reguler yang dilakukan secara tunai untuk DBH *earmarked* dan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* untuk DBH yang bersifat *block grant*. Capaian *Output* DBH CHT, antara lain: layanan kuratif/rehablitatif untuk 878.359 orang, pembangunan/rehabilitasi 752 faskes, bantuan pupuk 10.647 ton, bantuan langsung tunai untuk 773.204 orang, dan pembayaran iuran JKN bagi 4,6 juta orang. Sedangkan capaian *output* DBH Dana Reboisasi, antara lain: rehabilitasi di luar kawasan, hutan dan lahan 3.677 Ha, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan 1.734 unit kendaraan dan 15 lokasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan 35.810 Ha, Penanaman DAS kritis, Penanaman pada Kawasan perlindungan setempat dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air 29.644 batang, Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya 74 lokasi, dan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan 409 orang dan 936 Perkantoran.

Realisasi DAU mencapai Rp398,03 triliun, 100,51 persen dari pagu atau mengalami peningkatan 5,30 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi dikarenakan adanya kebijakan relaksasi penyaluran pada akhir Desember 2023 yaitu DAU Penggajian PPPK yang disalurkan kepada 544 pemda penerima alokasi dan relaksasi penyaluran tahap III untuk DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum terhadap 34 pemda, hal ini sesuai dengan ketentuan PMK 134 tahun 2023, serta adanya kebijakan DAU Tambahan

untuk penggantian komponen THR dan Gaji 13 berupa 50 persen TPG dan/atau Tamsil khusus bagi Guru yang mendapatkan gaji dari APBD dan tidak menerima tunjangan kinerja daerah/TPP.

Realisasi DAK Fisik mencapai 50,33 triliun, 94,22 persen dari pagu atau mengalami penurunan sebesar 8,12 persen (*yoy*) yang disebabkan oleh penurunan pagu DAK Fisik dan berpengaruh pada nilai penyalurannya. Capaian kinerja DAK Fisik tahun 2023 antara lain untuk penanganan jalan sepanjang 6.260 km, pembangunan jembatan sepanjang 775 M, revitalisasi sarana prasarana pada 10,9 ribu unit satuan pendidikan, pembangunan puskesmas di 59 kecamatan, pembangunan/rehabilitasi pada 18 RS Pratama, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi yang mengaliri 48,6 ribu Ha area pertanian serta pembangunan sebanyak 2,6 ribu unit jalan usaha tani. Sedangkan realisasi DAK Nonfisik mencapai 128,08 triliun, 98,30 persen dari pagu atau mengalami peningkatan sebesar 8,19 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemda sehingga meningkatkan kinerja penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian *output* DAK Nonfisik tahun 2023 antara lain berupa penyaluran Dana BOS yang dimanfaatkan oleh 43.764.401 siswa dan penyaluran Dana TPG ASN Daerah untuk 1.109.088 Guru ASN Daerah. Selain itu, Sesuai dengan UU HKPD tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hibah ke Daerah diklasifikasikan sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Dengan kata lain, belanja hibah ke pemda tidak menjadi bagian dari alokasi Belanja Hibah yang ada di alokasi Belanja Pemerintah Pusat. Realisasi Hibah Kepada Daerah mencatatkan realisasi Rp2,94 triliun atau sebesar 141,56 persen dari pagu.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan realisasi Rp1,37 triliun, 96,67 persen dari pagu atau mengalami peningkatan 3,99 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah DIY serta adanya peningkatan perekonomian pascapandemi Covid-19.

Dana Otonomi Khusus telah disalurkan seluruhnya yaitu sebesar Rp17,24 triliun atau 100 persen dari pagu alokasi, turun sebesar 15,63 persen (*yoy*) yang disebabkan penurunan signifikan atas pagu alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh, yang semula sebesar 2,00 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 1,00 persen dari plafon DAU Nasional pada tahun 2023. Penurunan ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjelaskan bahwa Dana Otsus Provinsi Aceh untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Realisasi penyaluran Insentif Fiskal (IF) tahun 2023 mencapai Rp7,91 triliun atau 98,83 persen dari pagu. Realisasi tersebut meningkat 13,05 persen (*yoy*) yang didorong dari peningkatan koordinasi dan pendampingan kepada daerah sehingga daerah penerima alokasi IF dapat menyampaikan dokumen syarat penyaluran secara lengkap dan benar sesuai batas waktu yang ditentukan. Pemberian Insentif Fiskal dikategorikan menjadi (1) Insentif Fiskal atas kinerja sebelumnya bagi daerah tertinggal, (2) Insentif Fiskal atas kinerja sebelumnya bagi daerah berkinerja baik (daerah nontertinggal), (3) Insentif Fiskal atas kinerja pengendalian inflasi pada tahun berjalan, serta (4) Insentif Fiskal atas kinerja peningkatan dukungan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan. Perolehan alokasi Insentif Fiskal tersebar kepada 420 daerah dari total 546 daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan capaian kinerja daerah.

Sementara itu, sampai dengan akhir periode 2023, Dana Desa terealisasi sebesar 69,86 triliun, 99,80 persen dari pagu atau meningkat 2,87 persen (*yoy*). Realisasi digunakan untuk penyaluran BLT Desa Rp10,44 triliun, nonBLT Desa Rp57,42 triliun, dan Tambahan Dana Desa Rp1,99 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk memberikan BLT kepada 2.899.653 keluarga penerima manfaat (KPM) di mana bantuan diprioritaskan bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dalam penyaluran BLT Desa, masih terdapat beberapa kendala, diantaranya kendala proses pendataan calon KPM penerima BLT Desa karena masih terdapat desa yang belum menerima data P3KE dan terdapat desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal sebesar 10 persen dari pagu Dana Desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa 2023 ditentukan untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program Kesehatan termasuk penanganan *stunting*, serta penyertaan modal kepada BUMDes. *Output* Dana Desa yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat antara lain jalan desa, jembatan, pasar desa, kegiatan BUMDes, serta irigasi. Sedangkan *output* dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa antara lain sarana olah raga, air bersih, MCK, polindes, PAUD, serta posyandu.

A.4.3. SURPLUS/(DEFISIT) DAN PEMBIAYAAN

Penerapan Kebijakan fiskal pada tahun 2023 bersifat ekspansif, yaitu dengan mendorong Belanja Negara untuk meningkatkan perekonomian dan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman. Kebijakan anggaran yang defisit ditempuh untuk mendukung program prioritas pemerintah sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan mengupayakan kombinasi yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko.

Pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2023 (Perpres 130 Tahun 2022) ditetapkan sebesar Rp598,2 triliun atau defisit anggaran sebesar 2,84 persen

terhadap PDB sebagaimana telah disesuaikan dengan Perpres 75 Tahun 2023 dengan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp479,93 atau defisit 2,27 persen terhadap PDB, melanjutkan kinerja konsolidasi fiskal yang sudah terwujud pada APBN tahun 2022. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berbagai risiko global menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBN tahun 2023 terutama terkait fungsi dan peran APBN untuk menjamin optimalisasi dan stabilisasi perekonomian serta pencapaian target pembangunan nasional. Pengelolaan pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pengendalian atas kesinambungan fiskal tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang terjaga di level aman pada tahun 2023 yakni sebesar 39,21 persen, mengalami penurunan dari sebelumnya 39,70 persen pada tahun 2022. Berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan Pemerintah tetap harus *prudent* dalam melaksanakan APBN agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.

Seiring dengan perkembangan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama tahun 2023, maka postur APBN mengalami defisit sebesar 1,61 persen terhadap PDB yaitu sebesar Rp337,29 triliun. Defisit Anggaran tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp460,42 triliun dan masih sangat jauh di bawah target yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27 persen terhadap PDB. Defisit anggaran menunjukkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan meningkatkan porsi Belanja Negara yang lebih besar dari Penerimaan Negara dan Hibah secara efisien dan terukur. Defisit disumbangkan oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.783,93 triliun, dengan Belanja Negara mencapai Rp3.121,22 triliun. Berikut ini tabel yang membandingkan realisasi Surplus/Defisit Anggaran 2023 terhadap target APBN serta rasionya terhadap PDB Nominal.

Tabel 11
Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2023

(dalam triliun Rupiah)

Indikator	APBN 2023 (Perpres No. 130 Th 2022)	APBN 2023 (Perpres No. 75 Th 2023)	Realisasi Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Anggaran	(598,15)	(479,93)	(337,29)
PDB Nominal (2023)	21.000*)	21.037*)	20.892
Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,84%)	(2,27%)	(1,61%)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
**) Asumsi APBN 2023 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2022*

Sementara itu, untuk menutup defisit anggaran, pemerintah melakukan pembiayaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp356,66 triliun (74,32 persen terhadap Pagu). Realisasi Pembiayaan tersebut berasal dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp277,37 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp79,29

triliun. Berdasarkan jenisnya, realisasi pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Utang yang dilaksanakan dengan penuh perhitungan untuk menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*) yang mencapai sebesar Rp403,95 triliun atau sebesar 95,90 persen terhadap pagu. Pembiayaan utang terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp308,19 triliun, realisasi Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp14,56 triliun yang terdiri dari hasil Penerimaan Pinjaman sebesar Rp17,50 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp2,95 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp81,20 triliun dari hasil Penarikan Pinjaman Program/Tunai dan Proyek sebesar Rp162,65 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp81,45 triliun.

Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga mengeluarkan anggaran pembiayaan untuk Investasi sebesar negatif Rp89,90 triliun yang digunakan untuk PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp69,90 triliun dan Investasi kepada BLU LPDP untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp20,00 triliun. Selain itu, Pembiayaan juga diperoleh dari Pemberian/Penerusan Pinjaman sebesar Rp4,47 triliun, yang diperoleh dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp6,37 triliun dan meneruskan pinjaman senilai negatif Rp1,90 triliun. Pemerintah juga melakukan merealisasikan Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp0,33 triliun, serta melakukan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp38,47 triliun. Di bawah ini tabel rincian target dan realisasi Pembiayaan selama tahun 2023.

Tabel 12
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2023 (Perpres No. 75 Th 2023)	Realisasi Tahun 2023	% Terhadap APBN
Pembiayaan Utang	421,21	403,95	95,90
Pembiayaan Investasi	(175,95)	(89,90)	51,09
Pemberian/Penerusan Pinjaman	5,28	4,47	84,66
Kewajiban Penjaminan	(0,33)	(0,33)	100,00
Pembiayaan Lainnya	229,71	38,47	16,75
Total Pembiayaan	**479,92**	**356,66**	**74,32**

Sumber: Kementerian Keuangan

Melihat pada postur APBN di mana Defisit APBN yang terealisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp337,29 triliun, sedangkan jumlah pembiayaan yang diperoleh pemerintah untuk menutup defisit APBN mencapai sebesar Rp356,66 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19,38 triliun, yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional lainnya dan kewajiban pemerintah yang tertunda.

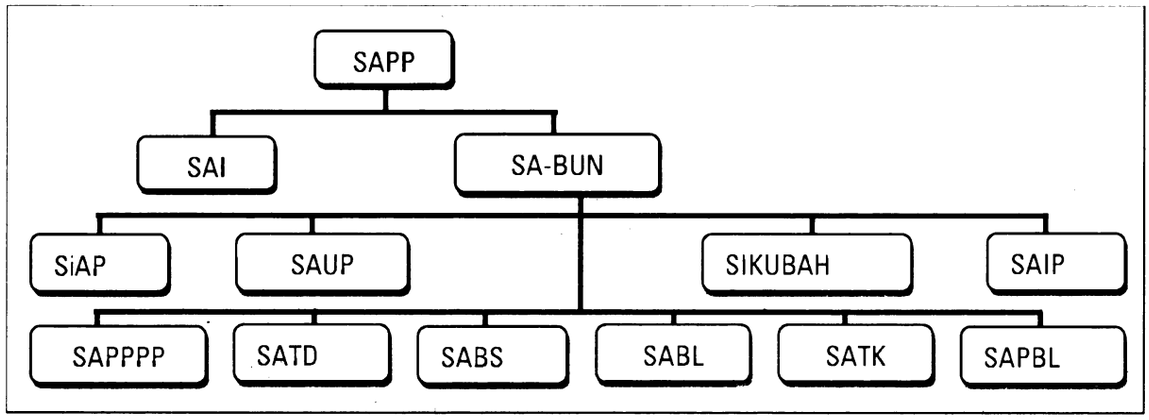
Rincian perubahan angka pembiayaan di atas dibanding periode yang sama tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan di tengah kondisi surplus APBN diarahkan untuk penerapan strategi kebijakan penurunan Pembiayaan Utang untuk meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Selain itu, realisasi Pembiayaan Investasi dan Penerusan Pinjaman yang meningkat merupakan strategi kebijakan Pemerintah untuk mendorong kinerja pasar, memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan stimulus pada dunia usaha terutama UMKM.

A.5. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan LKPP tahun 2023 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Selain itu, LKPP tahun 2023 disusun berdasarkan PMK 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Kerangka Umum SAPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

Kerangka Umum SAPP



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.
   - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sementara itu, data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.

- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).
3. Laporan Operasional
   Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.
5. Neraca
   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
6. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan

ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Secara lengkap, dasar hukum penyusunan LKPP Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1B.**

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP dimaksud, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan hal itu, mulai pelaporan keuangan tahun 2015 Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP sebagai berikut.

1. Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, Pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai PSAP 06 – Akuntansi Investasi, hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka *(face)* laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber

daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini tidak termasuk sumber daya alam, seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dicatat menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman, serta piutang yang timbul dari putusan pengadilan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar.

b. Investasi

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan, serta Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) dinilai menggunakan metode biaya. Untuk Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan dan investasi non permanen berbentuk dana bergulir dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non-BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham

pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk:
   a) peralatan dan mesin; atau
   b) aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
   a) gedung dan bangunan; atau
   b) aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan (Depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan *(historical cost)*. Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
   a) tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
   b) dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3) Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

d. Perjanjian Konsesi Jasa.

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban konsesi jasa diatur di dalam PMK No.231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) disediakan oleh mitra, yang:
   a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
   b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
   a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
   b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMN menggunakan nilai tercatat asetnya.

e. Properti Investasi
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:
1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

g. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, Kewajiban Masa Lalu Program THT/ *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas *(government debt securities)*, yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Kewajiban Akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde),* maka Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)*, setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde),* telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan

3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

6. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Lain-lain

a. Kurs Mata Uang Asing
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

b. Pencatatan Selisih Kurs atas Kas BUN di BI dalam Mata Uang Asing (Valas)
Pencatatan selisih kurs diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN, selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:
1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
   Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
   a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
   b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

c. Pencatatan Selisih Kurs atas Utang dalam Valas
   Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

   (Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Oustanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

   Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi *(unrealized loss)*. Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi *(unrealized gain)*.

d. Pencatatan Selisih Kurs atas Investasi dalam Valas
   Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

e. Dampak Penguatan JISDOR terhadap Penyajian Aset dan Kewajiban Moneter Pemerintah dalam Valas
   Sehubungan dengan penguatan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) oleh Bank Indonesia mulai 5 April 2021 Bank Indonesia menerbitkan kurs yang digunakan bagi pemerintah (Kurs Tengah Khusus Pemerintah) pada pukul 08.00 WIB hari H+0, yang selanjutnya digunakan sebagai referensi kurs transaksi pada hari berkenaan. Lalu pada sore harinya pukul 16.15 WIB, Bank Indonesia kembali merilis kurs yaitu Kurs

Penutup yang menjadi referensi Kurs Penutup pada hari tersebut. Berdasarkan konsepsi proses bisnis pada Bank Indonesia, Kurs Penutup yang diterbitkan pada pukul 16.15 WIB merupakan Kurs Tengah Khusus yang dipublikasikan keesokan harinya (H+1) pukul 08.00 WIB.

f. Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan
Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

g. Dampak Pencatatan Akuntansi Atas Penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
   1) Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran saat prestasi pekerjaan belum diterima. Dengan mekanisme ini pencairan dana ditampung ke dalam RPATA terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel. RPATA menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.
   2) Kebijakan akuntansi pemerintah mengatur bahwa besarnya prestasi pekerjaan, baik barang maupun jasa per 31 Desember yang belum dibayarkan harus diakui berdasarkan BAST/BAPP. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan aset/beban maupun kewajiban sesuai peristiwa ekonomi yang terjadi pada periode yang berakhir pada 31 Desember.
   3) Dampak transaksi RPATA terhadap pencatatan akuntansi pada K/L dan BUN adalah sebagai berikut.
      a. BA BUN 999.00
         i. Pencatatan Kas (Kas di RKUN, Kas di RPKBUNP, dan Dana yang dibatasi Penggunaannya/Dana Lainnya) sehubungan dengan Pemindahan Kas dalam rangka transaksi pada RPATA.
         ii. Pencatatan transaksi non anggaran dalam rangka pemindahbukuan Dana dalam rangka transaksi pada RPATA.

b. Kementerian/Lembaga
   i. Pencatatan Dana yang dibatasi Penggunaannya atas pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan akhir tahun anggaran.
   ii. Pencatatan Belanja/Beban/Aset sehubungan dengan belanja menggunakan mekanisme RPATA, sesuai dengan realisasi anggaran/beban/penyelesaian aset.
   iii. Pencatatan Pendapatan/Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu.
   iv. Pencatatan Utang sehubungan dengan telah terdapat progres penyelesaian pekerjaan, namun belum disalurkannya dana ke Rekening Penyedia sampai dengan akhir tahun anggaran.

4) Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan mekanisme RPATA.
   Terdapat penyajian Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga yang dibukukan baik pada LKKL dan LKBUN. Oleh karena itu, pada periode pelaporan, dilakukan jurnal konsolidasi untuk mengeliminasi Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga pada UAKBUN Pusat sehingga tidak terjadi lebih saji atau pencatatan ganda dalam LKPP.

Kebijakan akuntansi pada bagian ini merupakan ringkasan dari keseluruhan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan LKPP tahun 2023. Adapun secara lengkap seluruh kebijakan akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran 1C.**

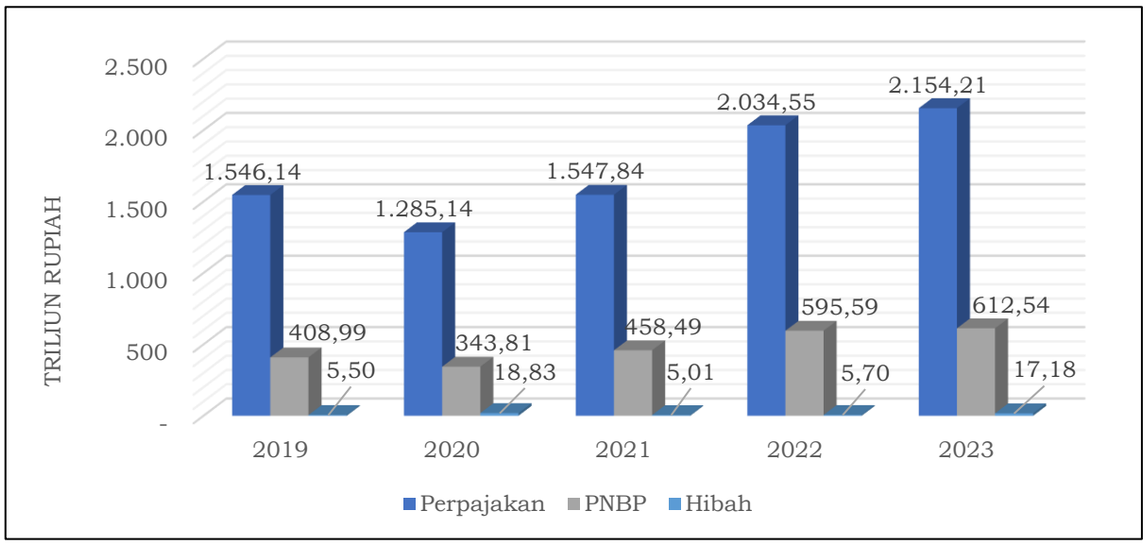
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2.783.929.676.930.198 atau mencapai 105,56 persen dari target APBN TA 2023 sebesar Rp2.637.248.881.485.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.154.208.219.467.830, PNBP sebesar Rp612.537.298.582.643, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp17.184.158.879.725. Dalam realisasi Pendapatan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp9.191.469.439.309 dan PPN dan PPnBM DTP sebesar Rp2.093.723.904.267. Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp148.086.630.865.726 atau lebih tinggi 5,62 persen dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp2.635.843.046.064.472.

Perkembangan realisasi Pendapatan Perpajakan, PNBP, dan Hibah sejak TA 2019 s.d. TA 2023 dapat dilihat pada **Grafik 29.**

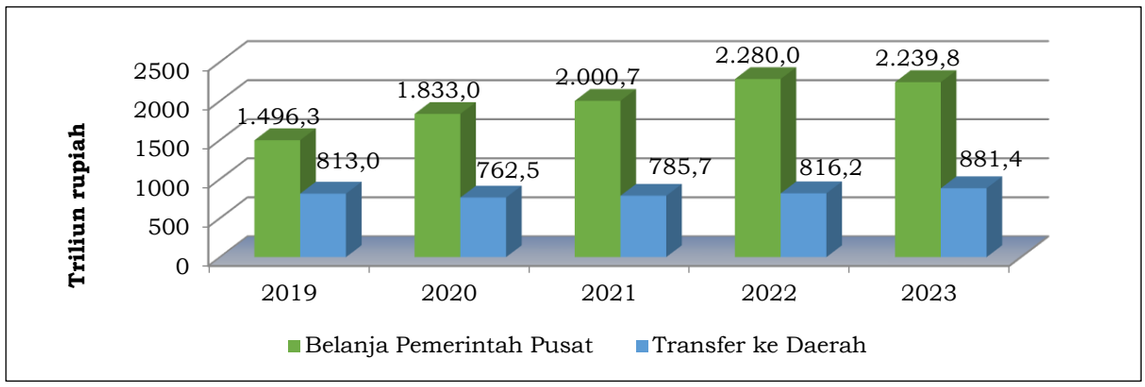
Grafik 29
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah
Tahun 2019 – 2023



Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 sebesar Rp3.121.217.245.707.618 atau 100,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2023 sebesar Rp3.117.176.344.456.000. Realisasi Belanja Negara TA 2023 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.239.786.701.499.164 dan Transfer ke Daerah sebesar Rp881.430.544.208.454. Belanja Negara pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.954.526.604.944 atau lebih tinggi 0,81 persen dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp3.096.262.719.102.674.

Perkembangan realisasi Belanja Negara TA 2019 s.d. TA 2023 terlihat pada **Grafik 30.**

Grafik 30
Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tahun 2019 - 2023



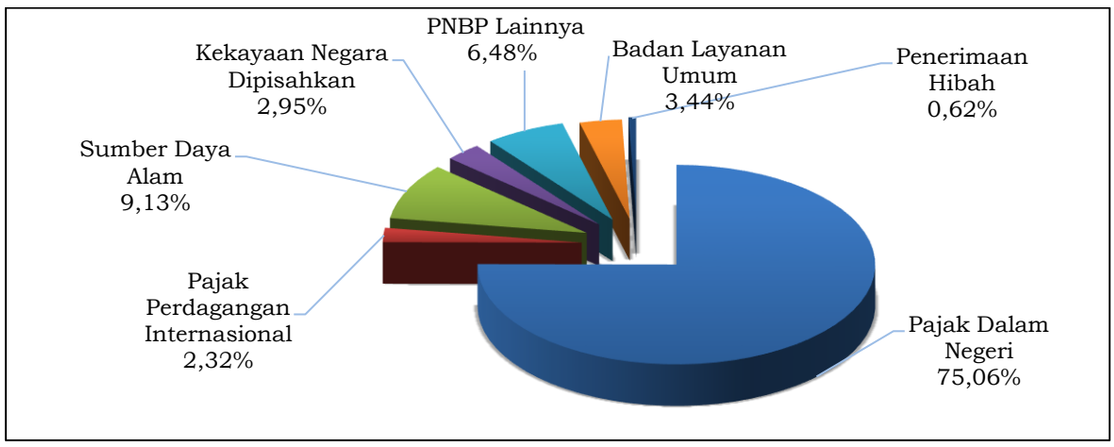
Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.783.929.676.930.198 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp3.121.217.245.707.618, Defisit Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp337.287.568.777.420. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2023 sebesar Rp356.663.747.714.521, terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp277.369.700.819.453 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp79.294.046.895.068. Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp19.376.178.937.101.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 sebesar Rp2.783.929.676.930.198 atau mencapai 105,56 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.637.248.881.485.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Pendapatan Perpajakan, PNBP, dan Hibah.
Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2023 dapat dilihat pada **Grafik 31.**

Grafik 31
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023



Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

B.2.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2023 sebesar Rp2.154.208.219.467.830 atau mencapai 101,69 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.118.348.000.000.000. Pendapatan Perpajakan TA 2023 lebih besar Rp119.655.782.997.755 atau lebih tinggi 5,88 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp2.034.552.436.470.075. Pendapatan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Pendapatan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp9.191.469.439.309 dan PPN-PPnBM DTP sebesar Rp2.093.723.904.267. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang di 2023.

Terdapat perbedaan nilai pencatatan pendapatan Pajak Dalam Negeri (PPN Impor) sebesar Rp5.321.000 dengan yang dilaporkan di LK BA 015 (Kementerian Keuangan) dikarenakan tercatat sebagai transaksi Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah. Selain itu, terdapat perbedaan nilai pendapatan perpajakan dengan agregat sebesar Rp31.014 yang disebabkan antara lain perbedaan periode pengambilan data untuk rekonsiliasi perpajakan dan kesalahan penggunaan kode satker dalam penyetoran.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2023 sebesar Rp2.089.718.285.003.417 atau mencapai 102,16 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.045.450.000.000.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2023 lebih besar Rp146.063.514.051.083 atau lebih tinggi 7,51 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar

Rp1.943.654.770.952.334. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri ini sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
PPh Migas	68.773.171.326.840	77.842.556.544.703
PPh Nonmigas	983.269.379.873.447	908.999.294.332.875
PPh Ditanggung Pemerintah	9.191.469.439.309	11.371.952.837.221
PPN	737.645.586.887.883	663.893.619.287.612
PPnBM	23.893.357.420.376	19.345.135.860.310
PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah	2.093.723.904.267	4.370.695.108.325
PBB	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700
Cukai	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323
Pajak Lainnya	6.894.911.665.855	7.152.551.549.032
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	2.834.136.447.318	533.548.592.233
Pendapatan Denda Penagihan Pajak	741.947.439	-
Jumlah	**2.089.718.285.003.417**	**1.943.654.770.952.334**

Kenaikan pendapatan pajak dalam negeri pada TA 2023 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya mayoritas pajak utama mengalami pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya, perekonomian domestik yang terjaga, kinerja PPh Badan yang impresif di tengah tren penurunan harga komoditas dunia, pertumbuhan PPh Pasal 21 dan Pasal 26, kinerja positif korporasi di Indonesia yang turut menaikkan pembayaran dividen, bunga, dan royalti, dan pertumbuhan PPh Orang Pribadi yang selaras dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak.

- **PPh Migas**
  PPh Migas mengalami perlambatan yang dimoderasi oleh penurunan harga komoditas energi khususnya minyak bumi dan gas alam.
- **PPh Nonmigas**
  Pendapatan PPh Pasal 21 meningkat ditopang oleh perbaikan utilitas dan upah tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 17,76 persen. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 3,09 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Aktivitas Keuangan dan Pertambangan.
  Peningkatan pendapatan PPh Pasal 22 terutama didorong oleh setoran Penjualan Barang Sangat Mewah, diikuti SKPKB dan Penebusan Migas Final. Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu Masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan.

Adapun penurunan pada PPh 22 Impor disebabkan oleh penurunan nilai impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2023 turun 6,55 persen (*yoy*). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada dua sektor utamanya yaitu sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.
Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran utamanya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 14,99 persen diikuti setoran Masa dan Bunga. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti Perdagangan dan Industri Pengolahan.
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) mengalami peningkatan terutama ditopang oleh setoran Tahunan yang tumbuh 12,38 persen. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pejabat Negara, Karyawan terutama pada subsektor Pegawai Swasta (kontribusi 63,41 persen) yang tumbuh 5,03 persen. Sektor dengan kenaikan terbesar selanjutnya yaitu Aktivitas Kesehatan, Penyediaan Akomodasi, dan Perdagangan.
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga, meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.
Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran dividen, bunga dan royalti ke luar negeri. Adapun peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan.
Penurunan yang dalam pada PPh Final disebabkan oleh kebijakan PPS yang tidak berulang. Tanpa PPS, realisasi PPh Final tumbuh 20,19 persen yang utamanya ditopang oleh peningkatan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan sebesar 51,23 persen sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jenis setoran lainnya yang menunjukkan kenaikan terbesar yaitu Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Diskonto/Bunga Obligasi.

- **PPN**
  Kinerja positif PPN DN sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Secara sektoral, peningkatan PPN DN terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Pengangkutan dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan.
  Penurunan PPN Impor sejalan dengan penurunan PPh 22 Impor yang disebabkan oleh turunnya nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, penurunan terbesar PPN impor terjadi pada dua sektor terbesarnya yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan.
- **PBB**
  Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan ditopang oleh pertumbuhan PBB Pertambangan Minerba (kontribusi 35,03 persen) yang tumbuh 117,05 persen dan PBB Pertambangan Migas (kontribusi 51,22 persen) yang tumbuh 25,39 persen.

- **Cukai**
  Penurunan Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang disebabkan penurunan produksi HT khususnya produksi SKM dan SPM gol 1 (tarif tinggi) dan akibat *shifting* konsumsi rokok yang lebih murah.
- **Pajak Lainnya**
  Peningkatan Pajak Lainnya terutama ditopang oleh kenaikan Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai dan Bunga Penagihan PPN yang tumbuh berturut-turut sebesar 40,60 persen, 17,33 persen, dan 33,09 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan diikuti sektor Pengadaan Listrik.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2023 sebesar Rp64.489.934.464.413 atau mencapai 88,47 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp72.898.000.000.000. Pajak Perdagangan Internasional TA 2023 lebih kecil Rp26.407.731.053.328 atau turun 29,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp90.897.665.517.741. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Bea Masuk (BM)	50.891.762.896.870	51.077.726.593.610
Bea Keluar (BK)	13.598.171.567.543	39.819.938.924.131
Jumlah	**64.489.934.464.413**	**90.897.665.517.741**

Realisasi Pendapatan Bea Masuk TA 2023 mengalami kontraksi dikarenakan penurunan nilai impor sebesar 6,6 persen dibandingkan tahun 2022 dan penurunan bea masuk dari komoditas utama seperti gas alam, suku cadang kendaraan, barang dari logam untuk bangunan, besi baja dasar dan bahan baku plastik.

Sedangkan penurunan signifikan pada Bea Keluar dipengaruhi antara lain oleh BK produk sawit yang turun 81,2 persen (*yoy*) dipengaruhi penurunan harga meskipun volume tumbuh, dan BK Bauksit yang turun 89,1 persen (*yoy*) karena berhentinya ekspor sejak Maret.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A**.

B.2.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 sebesar Rp612.537.298.582.643 atau mencapai 118,75 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp515.800.881.485.000. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 lebih besar Rp16.942.744.402.038 atau 2,84 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp595.594.554.180.605. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari

Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, Pendapatan BLU, dan Pendapatan PNBP Lainnya.

Kenaikan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dibandingkan dengan realisasi tahun lalu utamanya disebabkan oleh realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berupa kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan.

B.2.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2023 sebesar Rp254.203.031.073.614 atau mencapai 113,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp223.312.141.813.000. Penerimaan SDA TA 2023 lebih kecil Rp14.567.865.197.170 atau lebih rendah 5,42 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp268.770.896.270.784 yang utamanya disebabkan penurunan pendapatan minyak bumi dan gas bumi. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	87.408.885.465.416	111.992.940.458.410
Pendapatan Gas Bumi	28.769.670.492.312	36.705.949.688.708
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	129.126.791.868.349	110.786.795.000.708
Pendapatan Kehutanan	5.429.603.320.398	5.804.080.517.216
Pendapatan Perikanan	636.893.353.269	1.192.945.829.371
Pendapatan Panas Bumi	2.831.186.573.870	2.288.184.776.371
Jumlah	**254.203.031.073.614**	**268.770.896.270.784**

Penurunan realisasi PNBP SDA Minyak dan Gas Bumi disebabkan antara lain oleh menurunnya realisasi ICP dan *lifting* migas pada tahun 2023.

Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp87.408.885.465.416 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNBP Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO sebagai berikut.

1. Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp28.769.670.492.312. Di antara nilai pendapatan gas bumi yang direklasifikasi tersebut, sejumlah USD169,353,579 atau ekuivalen Rp2.578.068.992.086 merupakan nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT yang telah dibayarkan melalui rekening migas, dan kemudian telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Umum Negara secara utuh melalui mekanisme reklasifikasi.
2. Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan minyak mentah DMO (kode akun 423132) sebesar Rp4.446.262.623.442.

Kenaikan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara disebabkan kenaikan tarif iuran produksi/royalti batubara (semula maksimal 7 persen, menjadi maksimal 13,5 persen) dalam PP 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM dan berlaku setahun penuh selama tahun 2023.

Penurunan Pendapatan Kehutanan TA 2023 dibanding TA 2022 antara lain disebabkan pada TA 2022 terdapat pembayaran piutang Penggunaan Kawasan Hutan dampak Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS).

Penurunan Pendapatan Perikanan antara lain disebabkan oleh belum optimalnya dampak dari perubahan mekanisme pemungutan PNBP Perikanan dari Praproduksi menjadi Pascaproduksi.

Kenaikan Pendapatan Panas Bumi disebabkan oleh adanya tambahan SBP periode Triwulan II Tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Star Energy Geothermal Wayang Windu (SEGWWL) Unit I dari PT PLN untuk periode Juli – Desember 2022 yang sebelumnya tertunda karena *dispute* eskalasi harga.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A**.

B.2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2023 sebesar Rp82.058.743.373.870 atau mencapai 100,64 persen dari target sesuai Perpres 75 Tahun 2023 sebesar Rp81.535.797.918.000. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2023 lebih besar Rp41.461.651.427.721 atau naik 102,13 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp40.597.091.946.149. Rincian realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	81.217.243.776.870	39.735.630.261.242
Pendapatan Bagian Laba BUMN/ Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	841.499.597.000	861.461.684.907
Jumlah	**82.058.743.373.870**	**40.597.091.946.149**

Secara umum peningkatan Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun buku 2023, perbaikan tersebut tercermin dari kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan.

Untuk Setoran Dividen masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2023. Rincian Setoran Dividen BUMN sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.233.807.478.672
2	PT Pertamina (Persero)	14.024.480.569.987
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.845.238.801.206
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.648.487.373.596
5	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.456.000.000.000
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.046.000.000.000
7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.394.892.745.535
8	PT PLN (Persero)	2.188.000.000.000
9	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.377.200.000.000
10	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	847.606.883.956
11	BUMN Lainnya	1.997.029.520.918
Jumlah		**82.058.743.373.870**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.B.**

B.2.1.2.3. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2023 sebesar Rp95.860.392.158.963 atau 120,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp79.459.372.890.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2023 lebih besar Rp5.958.079.983.369 atau naik 6,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp89.902.312.175.594.

Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
a.Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	40.495.126.768.097	36.445.264.426.650
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	2.055.585.827.571	2.232.436.418.891
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	42.727.190.508.087	41.825.694.444.860
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	1.216.601.481.027	807.064.265.232
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**86.494.504.584.782**	**81.310.459.555.633**
b.Pendapatan Hibah BLU	419.285.384.531	169.778.059.270
c.Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.220.147.435.517	974.371.121.113
d.Pendapatan dari Alokasi APBN	820.701.691.766	3.245.497.850.139
e.Pendapatan BLU Lainnya	6.905.753.062.367	4.202.205.589.439
Jumlah	**95.860.392.158.963**	**89.902.312.175.594**

Kenaikan Pendapatan BLU TA 2023 utamanya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Pendapatan BLU Lainnya. Kenaikan pada

Pendapatan Jasa Layanan Umum didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Sedangkan, kenaikan pada Pendapatan BLU Lainnya terutama dikontribusi dari kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Kenaikan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU disebabkan peningkatan tingkat suku bunga deposito dengan rata-rata suku bunga deposito Bank Pemerintah Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).

B.2.1.2.4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2023 sebesar Rp180.415.131.976.196 atau 137,20 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp131.493.568.864.000. Realisasi PNBP Lainnya TA 2023 lebih kecil Rp15.909.121.811.882 atau turun 8,10 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp196.324.253.788.078. Rincian Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	43.077.014.713.687	69.734.126.278.325
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	543.903.485.394	576.804.786.417
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	729.641.737.527	1.016.226.852.242
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	1.043.514.011.559	889.668.745.093
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	78.693.954.050	58.135.549.277
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.862.868.115.536	11.683.994.809.449
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.397.979.712.325	1.389.074.351.832
Subtotal	**51.733.615.730.078**	**85.348.031.372.635**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	9.614.303.493.121	6.452.605.159.302
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	505.723.289.388	410.515.652.095

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	547.376.643.039	734.539.577.153
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	4.320.894.883.737	2.532.237.595.037
Pendapatan Perizinan	2.974.183.681.707	2.398.611.785.959
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.202.711.950.005	7.879.469.220.001
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.165.657.930.808	1.070.902.893.086
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	697.420.967.356	692.866.450.128
Subtotal	**28.028.272.839.161**	**22.171.748.332.761**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.499.080.631.892	2.673.170.765.156
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	244.724.105.000	228.095.364.750
Pendapatan Jasa Karantina	322.985.913.827	317.463.152.702
Pendapatan Jasa Agraria	2.912.592.102.619	2.530.319.333.693
Pendapatan Jasa Keagamaan	769.119.946.034	810.396.538.991
Subtotal	**6.748.502.699.372**	**6.559.445.155.292**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	2.545.045.985.037	3.426.412.355.451
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	368.073.798.081	338.201.420.388
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	802.557.769.615	420.995.834.352
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	4.545.238.637	6.993.110.960
Subtotal	**3.720.222.791.370**	**4.192.602.721.151**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	7.440.418.387.271	6.661.018.266.164
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	22.433.066.955.223	21.039.909.743.685
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	155.286.948.310	124.189.001.627
Subtotal	**30.028.772.290.804**	**27.825.117.011.476**

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	194.526.758.978	406.886.487.297
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	90.575.246.504	79.273.008.130
Pendapatan Jasa Lainnya	1.023.103.040.382	201.378.194.984
Subtotal	**1.308.205.045.864**	**687.537.690.411**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	3.154.006.847.914	2.211.854.197.429
Pendapatan *Gain on Bond Redemption*	105.211.500.000	0
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	7.122.426.793.095	1.016.337.174.900
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	408.068.053.648	319.738.176.863
Pendapatan dari Selisih Kurs	139.914.250.528	201.425.560.332
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	145.234.983.216	113.630.216.436
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	28.333.236.846.558	14.576.572.327.069
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	1.064.868.949.846	937.089.008.095
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	30.035.217.990	33.525.742.095
Subtotal	**40.503.003.442.795**	**19.410.172.403.219**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	752.596.698.884	744.883.756.415
Pendapatan Denda II	655.996.670.423	166.112.375.769
Pendapatan Denda III	853.104.972.879	2.128.786.046.258
Subtotal	**2.261.698.342.186**	**3.039.782.178.442**
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	15.382.890.002.231	24.375.151.596.618
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II (Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL)	327.244.663.561	475.602.164.006

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	13.970.957.108	17.345.213.780
Pendapatan Lain-Lain I	779.469.517	203.370.109.038
Pendapatan Lain-Lain II	357.953.702.149	2.018.347.839.249
Subtotal	**16.082.838.794.566**	**27.089.816.922.691**
Jumlah PNBP Lainnya	**180.415.131.976.196**	**196.324.253.788.078**

Penurunan realisasi PNBP Lainnya terutama berasal dari penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang berupa penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara dan penurunan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas yang antara lain berupa penurunan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagai akibat turunnya harga ICP. Selain itu, PNBP K/L secara umum memberikan kinerja positif akibat terdapat inovasi layanan dan peningkatan aktivitas masyarakat.

B.2.1.3. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp17.184.158.879.725 atau 554,33 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.100.000.000.000. Pendapatan Hibah TA 2023 lebih tinggi Rp11.488.103.465.933 atau lebih besar 201,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp5.696.055.413.792. Realisasi Pendapatan Hibah terdiri dari:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	15.361.429.146.772	2.672.694.521.172
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	423.174.970.047	585.850.301.025
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.399.554.762.906	2.437.510.591.595
Jumlah	**17.184.158.879.725**	**5.696.055.413.792**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 meningkat dibandingkan TAYL, dan mencapai 554,33 persen dari APBN, hal ini dikarenakan terutama antara lain untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A**.

B.2.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara TA 2023 sebesar Rp3.121.217.245.707.618 atau 100,13 persen dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp3.117.176.344.456.000. Belanja Negara TA 2023 lebih besar

Rp24.954.526.604.944 atau naik 0,81 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.096.262.719.102.674. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Rincian atas pelaksanaan UU APBN 2023 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Namun pada perkembangannya dalam rangka melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur *Outlook* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan atas rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan atas APBN 2023 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa perubahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Adapun perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2023 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana;
c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;
d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana;
f. pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
g. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
h. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
i. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

j. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga termasuk restrukturisasi di bidang riset dan inovasi;
k. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama;
l. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*;
m. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
n. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs;
o. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
p. pergeseran anggaran dalam satu atau antarprovinsi/kabupaten/kota dan/atau antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
q. Kebijakan Anggaran *Automatic Adjustment* pada BA K/L;
r. Pergeseran antar Jenis Belanja; dan
s. Percepatan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri dan/atau Pinjaman Luar Negeri.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp2.239.786.701.499.164 atau 97,28 persen dari APBN sebesar Rp2.302.457.850.414.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2023 lebih kecil Rp40.241.191.535.814 atau lebih rendah 1,76 persen dari Realisasi TA 2022 yang sebesar Rp2.280.027.893.034.978.

Perubahan alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat terhadap alokasi dalam Perpres APBN Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam triliun rupiah)

No	Nama Belanja	Perbandingan alokasi DIPA terhadap Perpres APBN			Penjelasan per Jenis Belanja			
		Perpres APBN	DIPA	Selisih	Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN	Pengurangan alokasi pagu melalui Realokasi	Pengurangan melalui Tidak diterbitkan DIPA	Total
1	Belanja Pegawai	442,50	416,96	(25,54)	7,53	(28,08)	(4,99)	(25,54)
2	Belanja Barang	375,88	449,86	73,98	83,62	(9,31)	(0,33)	73,98
3	Belanja Modal	210,32	323,04	112,72	115,42	(2,70)	-	112,72
4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	441,40	441,40	-	-	-	-	-
5	Belanja Subsidi	298,50	271,07	(27,43)	22,16	(49,59)	0	(27,43)
6	Belanja Hibah	0,01	0,23	0,22	0,22	-	-	0,22
7	Belanja Bantuan Sosial	148,52	158,48	9,96	15,76	(1,05)	(4,75)	9,96
8	Belanja Lain-lain	385,32	226,50	(158,82)	82,30	(0,18)	(240,94)	(158,82)
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat		**2.302,45**	**2.287,54**	**(14,91)**	**327,01**	**(90,91)**	**(251,01)**	**(14,91)**

Selisih lebih rendah belanja pegawai sebesar Rp25,54 triliun antara lain bersumber dari:

1. Penambahan pagu sebesar Rp7,53 triliun, yang bersumber dari tambahan dari BUN untuk pelaksanaan pemeriksaan dan untuk operasional empat provinsi baru, realokasi AA Belanja Pegawai dari BA KL ke BA BUN, realokasi dari BA BUN ke BA KL untuk kekurangan pembayaran tunggakan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/ Pimpinan Organisasi Internasional, tambahan anggaran penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Wapres Periode 2019 - 2024, persiapan dan Penyelenggaraan KTT Asean ke 42 tahun 2023, kunker Presiden dan Wakil Presiden dalam dan luar negeri, *Integrated Acces Survilance system*, Pembiayaan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023, Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Penyelenggaraan KTT AIS Forum TA 2023, pengembalian ke BA BUN, perubahan pagu anggaran yang bersumber dari luncuran SBSN TA 2022 ke TA 2023, perubahan pagu anggaran yang bersumber dari percepatan *loan*, penyesuaian tukin gaji 13 dan tukin THR baru, pengembalian blokir AA ke BA BUN, optimalisasi dari Belanja Barang ke Belanja Pegawai, anggaran yang bersumber dari hibah langsung pelaksanaan undian tidak tertebak/pengumpulan uang dan barang, penambahan target PNBP pada unit Setjen;

2. Pengurangan sebesar Rp28,08 triliun yang bersumber dari pergeseran anggaran AA Belanja Pegawai dari BA KL ke BA BUN, realokasi ke BA BUN yang berasal dari alokasi tunjangan kinerja yang melekat pada THR dan Gaji Ketiga Belas, pergeseran anggaran dari Belanja Barang dan Belanja Modal ke Belanja Pegawai untuk kekurangan belanja pegawai, penambahan pagu belanja dan target PNBP dan BLU pada satker-satker Rumkit TNI, penambahan pagu Hibah langsung yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb, perubahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L atau sebaliknya, perubahan anggaran yang bersumber dari pinjaman dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan PLN dan PDN, yang merupakan kegiatan prioritas nasional (PN), perubahan alokasi karena realokasi antar Jenis Belanja, tambahan dari BA BUN untuk kekurangan belanja pegawai dan refocusing AA, Realokasi blokir AA Belanja Pegawai; dan
3. Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp4,99 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja barang sebesar Rp73,98 triliun antara lain berasal dari:
1. Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN sebesar Rp83,62 triliun yang bersumber dari pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai dan Hibah dari Pemda, realokasi dari BA BUN, revisi pergeseran anggaran, revisi penambahan pagu PNBP dan BLU, penambahan pagu Hibah langsung yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb, perubahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L atau sebaliknya, tambahan dari BA BUN dalam rangka bantuan Pemerintah;
2. Pengurangan sebesar Rp9,31 triliun yang berasal dari pergeseran belanja barang ke belanja pegawai dan belanja modal, perubahan anggaran dari BUN ke KL dan sebaliknya, realokasi AA dari BA KL ke BA BUN, pergeseran ke akun 58; dan
3. Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp0,33 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja modal sebesar Rp112,72 triliun antara lain berasal dari:
1. Penambahan alokasi pagu atas Perpres Rincian APBN sebesar Rp115,42 triliun yang bersumber dari pergeseran belanja barang ke belanja modal, pergeseran anggaran dari belanja pegawai dan hibah dari Pemda, realokasi dari BA BUN, revisi luncuran Rupiah Murni Pendamping (RMP), revisi penambahan pagu PNBP, revisi optimalisasi pergeseran anggaran, penambahan pagu belanja dan target PNBP dan BLU pada satker-satker Rumkit TNI, penambahan pagu Hibah Langsung yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb, perubahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L atau sebaliknya, penambahan pagu sumber dana hibah langsung dalam negeri, realokasi sisa blokir AA, pergeseran antar jenis belanja, tambahan pagu PNBP, BLU dan SBSN serta pergeseran anggaran lainnya, pembelian aplikasi portal arsitektur SPBE, pengembangan platform digital SABA, pengadaan kendaraan dinas Pejabat dan Menteri, pembelian peralatan dan mesin; dan

2. Pengurangan sebesar Rp2,70 triliun yang berasal dari penyesuaian ijin penggunaan PNBP, pergeseran belanja modal ke belanja pegawai dan belanja barang, realokasi dari BA KL ke BA BUN.

Selisih lebih rendah belanja subsidi sebesar Rp27,43 triliun antara lain berasal dari penambahan alokasi pagu dari SPP BA BUN sebesar Rp22,16 triliun, pergeseran ke akun 58 sebesar Rp49,59 triliun, dan tidak diterbitkan DIPA Rp641 ribu.

Selisih lebih tinggi belanja hibah sebesar Rp0,22 triliun berasal dari penambahan dari SPP BA BUN sebesar Rp0,22 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja bantuan sosial sebesar Rp9,96 triliun antara lain berasal dari penambahan alokasi pagu sebesar Rp15,76 triliun antara lain Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BA BUN untuk Bantuan Permakanan Lansia dan Disablitas, Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (ATENSI YAPI), anggaran penanggulangan bencana alam, bantuan korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), Bantuan Langsung Tunai (BLT) *El Nino*, dan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), pengurangan alokasi pagu melalui *refocusing* dan realokasi sebesar Rp1,05 triliun, dan tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp4,74 triliun.

Selisih lebih rendah belanja lain-lain sebesar Rp158,82 triliun antara lain berasal dari:
1) Penambahan pagu sebesar Rp82,30 triliun, yang bersumber dari penambahan dari AA BA K/L, penambahan dari akun 51, penambahan dari akun 52, penambahan dari akun 55, penambahan dari akun 57, penerbitan SP SABA (nett), dan penerbitan SPP BA BUN;
2) Pengurangan alokasi pagu sebesar Rp0,18 triliun; dan
3) Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp240,94 triliun.

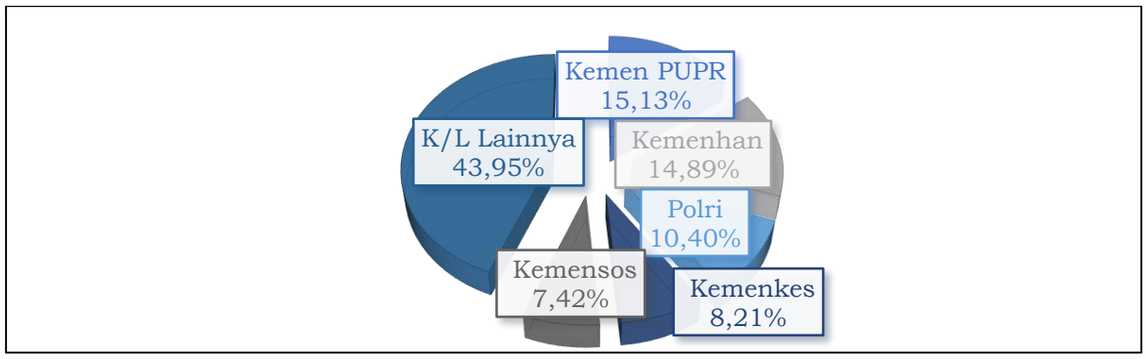
Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2023 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar terdapat pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp1.087.557.384.455.403 atau 48,56 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2023 pada K/L (selain BA BUN) sebesar Rp1.152.229.317.043.761. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp174.324.456.800.897 atau 15,13 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2023 dapat dilihat pada **Grafik 32.**

Grafik 32
Komposisi K/L Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023



Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat pada **Lampiran 3.A**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

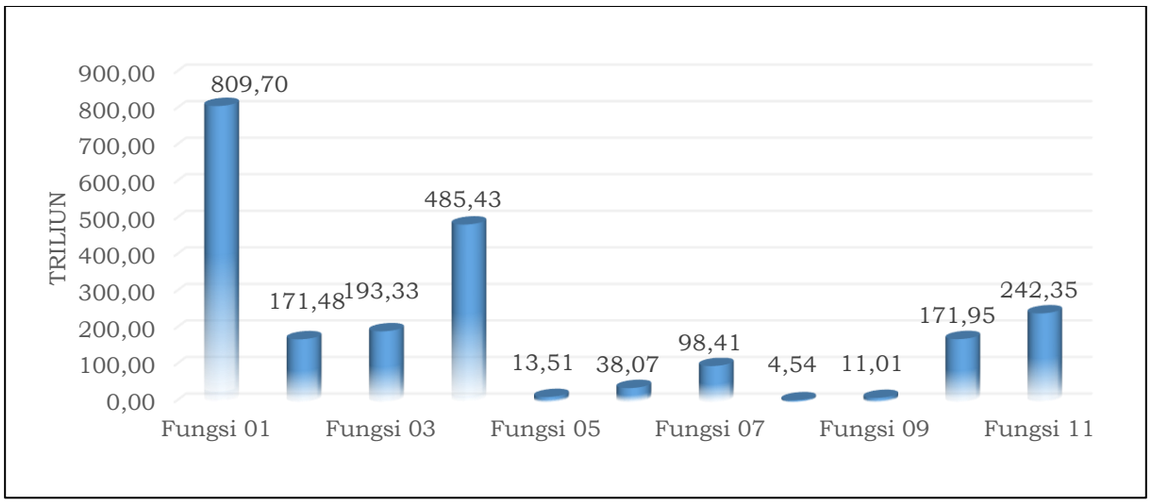
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2023 terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	Realisasi TA 2023
01	Pelayanan Umum	721.277.367.441.000	809.701.525.474.409
02	Pertahanan	134.309.498.080.000	171.480.945.653.915
03	Ketertiban dan Keamanan	182.607.441.113.000	193.328.711.800.125
04	Ekonomi	632.927.131.809.000	485.426.343.115.602
05	Lingkungan Hidup	13.133.458.581.000	13.512.930.632.428

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	Realisasi TA 2023
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.731.457.685.000	38.073.614.458.681
07	Kesehatan	96.621.237.754.000	98.406.400.213.918
08	Pariwisata dan Budaya	3.562.167.765.000	4.539.557.508.276
09	Agama	11.168.673.637.000	11.012.860.755.847
10	Pendidikan	234.079.906.200.000	171.954.969.294.300
11	Perlindungan Sosial	241.039.510.349.000	242.348.842.591.663
Total		**2.302.457.850.414.000**	**2.239.786.701.499.164**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2023 terlihat pada **Grafik 33**.

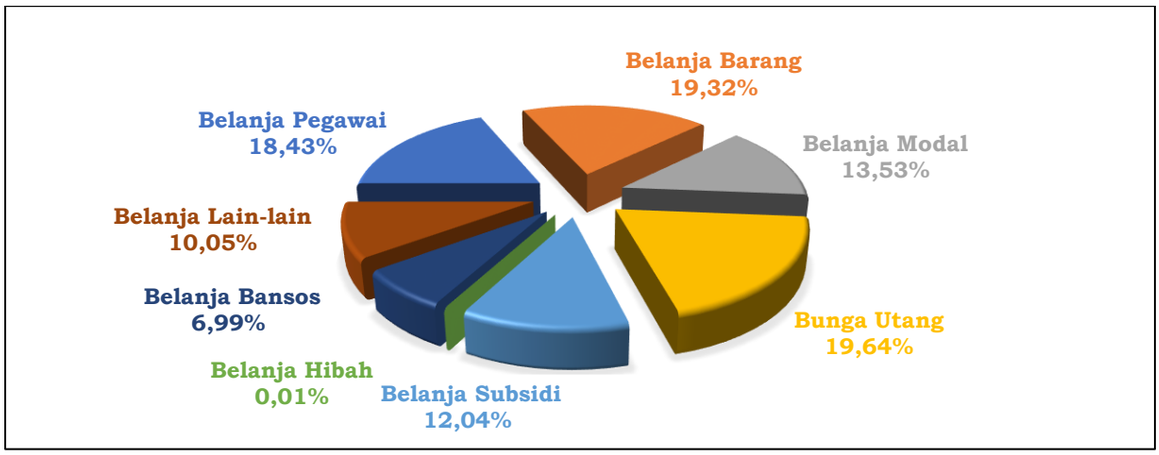
Grafik 33
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2023



Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada **Grafik 34.**

Grafik 34
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun 2023



B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp412.711.324.466.564 atau 93,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp442.507.211.693.000. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 lebih besar Rp10.269.668.166.230 atau naik 2,55 persen dari realisasi TA 2022 yang sebesar Rp402.441.656.300.334.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.439.214.441.661	86.886.751.274.793
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	65.784.325.265.335	64.667.920.553.214
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.445.968.520.506	1.451.426.586.090
Belanja Gaji Dokter PTT	971.858.800	1.414.494.400
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	18.571.148.205.747	17.710.735.289.385
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.872.998.267.850	536.846.863.726
Belanja Honorarium	1.517.199.173.983	1.490.800.609.821
Belanja Lembur	906.265.365.184	902.549.970.369
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	84.744.625.483.910	84.032.922.061.487
Beban Pensiun dan Uang Tunggu serta pembayaran UPSL Program THT	140.283.278.472.696	133.926.708.913.263
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	11.145.329.410.892	10.833.579.683.803
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	-	(17)
Jumlah	**412.711.324.466.564**	**402.441.656.300.334**

Realisasi Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pusat/TNI/POLRI serta pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp432.714.969.865.127 atau 115,12 persen dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp375.881.911.438.000. Realisasi Belanja Barang TA 2023 lebih besar Rp6.565.888.346.037 atau naik 1,54 persen dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp426.149.081.519.090.

Realisasi Belanja Barang yang melampaui anggaran antara lain berasal dari pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai dan Hibah dari Pemda, realokasi dari BA BUN, revisi pergeseran anggaran, revisi penambahan pagu PNBP dan BLU, penambahan pagu Hibah langsung yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb, perubahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L atau sebaliknya, dan tambahan dari BA BUN dalam rangka bantuan Pemerintah.

Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	46.317.631.288.089	45.120.779.684.391
Belanja Barang Non Operasional	81.399.094.446.556	97.100.474.805.972
Belanja Kontribusi	1.484.386.186.755	1.196.566.215.550
Belanja Barang Persediaan	20.774.735.211.855	22.716.034.009.218
Belanja Jasa	50.333.964.148.889	41.614.533.719.335
Belanja Pemeliharaan	48.113.526.685.260	44.489.975.895.976
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.470.108.196.630	35.657.430.154.629
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.835.783.568.105	2.318.172.423.772
Belanja Barang BLU	70.780.247.933.038	79.477.221.388.001
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	41.503.731.531.651	22.632.671.338.682
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	393.194.253.599	501.761.392.556
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	23.291.799.254.537	33.021.729.043.508
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	16.767.160.163	301.731.447.500
Jumlah	**432.714.969.865.127**	**426.149.081.519.090**

Kenaikan realisasi Belanja Barang TA 2023 antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pelaksanaan kegiatan padat karya berbasis masyarakat dan renovasi sarana/prasarana infrastruktur permukiman seperti pasar daerah dan sekolah negeri, pelaksanaan tugas pembangunan di

Ibu Kota Nusantara, dukungan pembangunan yang masuk ke dalam program Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan terealisasinya anggaran Badan *Adhoc* untuk Pemilu Tahun 2024. Selain itu, Kenaikan realisasi Belanja Barang juga dikarenakan telah dicabutnya status PPKM sehingga kegiatan operasional perkantoran kembali berjalan normal dan pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran Belanja Barang tahun 2023 juga dimanfaatkan antara lain untuk:

1) pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air dan penanggulangan darurat akibat bencana, penyediaan akses rumah layak huni, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah melalui KemenPUPR;
2) pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka mendukung alutsista dan non alutsista pada Matra Darat, Laut, Udara dan Umum Integratif melalui Kemenhan;
3) pengadaan/dukungan logistik, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui POLRI;
4) peningkatan kualitas perguruan tinggi dan penyaluran dana Bantuan Operational PTN, serta pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan melalui Kemendikbudristek;
5) penyaluran dana BOS melalui Kemenag;
6) pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43; dan
7) pengadaan KTP-elektronik.

Sementara itu, Belanja Barang BLU sebesar Rp70.780.247.933.038 terdiri dari:

Uraian	**TA 2023 (*Audited*)**	**TA 2022 (*Audited*)**
Belanja Gaji dan Tunjangan	12.906.740.961.129	12.733.297.351.498
Belanja Barang	4.282.396.119.719	4.378.037.769.765
Belanja Jasa	5.760.031.437.981	5.750.735.664.308
Belanja Pemeliharaan	1.676.180.502.787	1.591.195.578.688
Belanja Perjalanan	1.511.066.978.788	1.369.715.114.269
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	9.570.914.260.621	4.769.171.413.857
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	20.748.770.766.043	36.164.055.179.838
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1.903.038.995.632	1.957.981.257.420
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4.385.774.385.307	3.760.004.699.478
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.913.979.064.379	3.274.139.283.432
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	55.813.155.050	46.026.480.147

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges – BLU	405.735.000	725.516.380
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	309.953.384.653	399.713.711.645
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	33.256.193.182	24.404.262.974
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi – BLU	405.789.026	741.641.500
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	3.421.265.056.334	2.577.481.928.733
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	42.235.000	88.476.800
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	6.335.455.750	4.779.701.733
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	1.870.744.300	1.408.385.000
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	207.406.480.901	64.427.184.472
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	2.309.075.978	53.774.036.619
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	5.576.539.748	159.156.890.951
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	28.496.186.011	381.245.156.852
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	198.844.510	659.911.856
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	3.235.868.527
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	36.732.040.793	10.398.616.238
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	713.375.966	578.705.021
Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	10.574.168.450	41.600.000
Jumlah	**70.780.247.933.038**	**79.477.221.388.001**

Penurunan signifikan terjadi pada BLU BPDPKS antara lain disebabkan adanya penurunan penyaluran insentif biodiesel akibat berkurangnya selisih Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel.

Adapun kenaikan dengan nilai signifikan terdapat pada BLU LPDP antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja atas Pengelolaan Endowment Fund dengan rincian *output* berupa layanan pendanaan beasiswa, riset, Dana Abadi (DA) Perguruan Tinggi, dan DA Kebudayaan.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp303.041.293.068.751 atau 144,08 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp210.322.961.353.000. Realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih besar Rp62.470.990.944.681 atau naik 25,97 persen dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp240.570.302.124.070.

Realisasi Belanja Modal yang melampaui anggaran antara lain berasal dari pergeseran belanja barang ke belanja modal, pergeseran anggaran dari belanja pegawai dan hibah dari Pemda, realokasi dari BA BUN, revisi luncuran Rupiah Murni Pendamping (RMP), revisi penambahan pagu PNBP, revisi optimalisasi pergeseran anggaran, penambahan pagu belanja dan target PNBP dan BLU pada satker-satker Rumkit TNI, penambahan pagu Hibah Langsung yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb, perubahan anggaran dari BA BUN ke BA K/L atau sebaliknya, penambahan pagu sumber dana hibah langsung dalam negeri, realokasi sisa blokir AA, dan pergeseran antar jenis belanja.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	21.762.067.765.333	19.595.016.027.337
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.693.504.896.413	100.701.911.264.860
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.664.408.477.682	30.368.008.162.912
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.301.385.315.249	72.951.253.743.088
Belanja Modal Lainnya	5.445.554.835.621	6.754.076.109.763
Belanja Modal BLU	7.174.371.778.453	10.200.036.816.110
Jumlah	**303.041.293.068.751**	**240.570.302.124.070**

Kenaikan realisasi Belanja Modal TA 2023 utamanya dipengaruhi oleh kenaikan signifikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) pada Kementerian Pertahanan, pengadaan alat material khusus (almatsus) pada POLRI, serta pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan RI dan Badan Intelijen Negara.

Kenaikan Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan antara lain karena adanya penanganan paket IKN, paket Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan paket Prioritas Nasional (PN).

Pemanfaatan Belanja Modal antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan preservasi jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan.

Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh Kementerian PUPR, terminal bandara pada Kementerian Perhubungan, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rumah sakit pada Kementerian Kesehatan, dan rumah susun prajurit TNI dan POLRI. Adapun Belanja Modal BLU sebesar Rp7.174.371.778.453 terdiri dari:

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	187.282.865.430	72.272.303.359
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.584.064.733.294	6.691.254.925.960
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.709.770.294.323	2.847.087.708.618
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	499.580.935.815	327.554.955.802
Belanja Modal Lainnya	193.590.379.591	240.788.279.456
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	82.570.000	20.211.106.185
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	-	587.998.620
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	-	177.054.158
Jumlah	**7.174.371.778.453**	**10.199.934.332.158**

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2023 sebesar Rp439.882.584.341.259 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp441.400.000.000.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2023 lebih besar Rp53.540.764.551.444 atau naik 13,86 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp386.341.819.789.815. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	**30.575.331.536.948**	**12.723.908.318.349**
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	**409.307.252.804.311**	**373.617.911.471.466**
a. Pembayaran Bunga SBN	408.030.933.844.172	373.085.036.199.041
b. Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	1.276.318.960.139	532.875.272.425
Jumlah	**439.882.584.341.259**	**386.341.819.789.815**

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan, utamanya dipengaruhi oleh kenaikan utang program dan proyek pada tahun 2023.

Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2023 sebesar Rp408.030.933.844.172 dan Tahun 2022 sebesar Rp373.085.036.199.041. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2023 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas *Public Goods* (PG) sebesar Rp24.356.844.960.000, kontribusi BI atas *Non-Public Goods* (NPG) sebesar Rp987.248.928.896 dan Kontribusi BI atas Cluster A sebesar Rp6.022.602.621.230. Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2023 mengalami kenaikan 9,37 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022, hal ini disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN.

Realisasi Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar Rp1.276.318.960.139 dan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp532.875.272.425. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 139,52 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pinjaman dalam negeri pada Tahun 2023

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp269.592.086.053.747 atau 90,32 persen dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp298.497.119.385.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2023 ini lebih besar Rp16.779.178.186.421 atau 6,64 persen lebih tinggi dari realisasi TA 2022 sebesar Rp252.812.907.867.326.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Subsidi Minyak Solar	16.573.537.577.398	10.126.760.761.603
Belanja Subsidi Minyak Tanah	4.716.272.138.615	5.097.998.717.227
Belanja Subsidi Elpiji	74.300.193.555.508	100.390.005.332.074
Belanja Subsidi Listrik	68.702.258.911.876	56.129.264.276.198
Belanja Subsidi Pupuk	42.057.450.059.622	29.769.041.487.742
Belanja Subsidi PPh-DTP	8.587.136.656.062	8.869.124.713.844
Belanja Subsidi PT KAI	2.524.521.565.006	3.324.045.262.688
Belanja Subsidi PT PELNI	2.395.825.002.151	2.817.152.372.656
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	172.000.950.000	168.293.494.000
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	895.000.000.000	929.968.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	3.457.315.411.888	2.570.570.451.675
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	-	999.369.775
Belanja Subsidi Bunga Kredit *Biofuel* (KPEN-RP)	-	15.692.064.973
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya:		
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR	40.928.036.992.482	-
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	1.827.486.977	2.059.732.713
Total Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	**40.929.864.479.459**	**2.059.732.713**
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	39.496.119.024	-
Belanja Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	-	2.748.956.348
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	41.204.433	-
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	2.142.819.505	1.078.021.248
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	-	114.758.426.726
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	-	23.113.047.044.984
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	604.334.469.803	2.496.064.677.101
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	160.320.970.852	155.176.756.597
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan	1.380.650.258.278	2.348.872.681.379

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19		
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	2.028.573.395.855	3.258.885.627.759
Belanja Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	65.150.508.412	1.111.299.638.016
Jumlah	**269.592.086.053.747**	**252.812.907.867.326**

Realisasi Belanja Subsidi meliputi Subsidi Energi dan Subsidi Nonenergi. Realisasi Belanja Subsidi Energi bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg dan Listrik. Realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg secara tahunan (*yoy*) mengalami penurunan. Penurunan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg di antaranya dipengaruhi oleh penurunan harga produk JBT Minyak Tanah (MOPS *Kerosene)* dan harga produk LPG (CPA) pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Subsidi nonenergi naik. Realisasi tersebut didominasi oleh Subsidi Kredit Program. Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian terbesar dari Subsidi Kredit Program sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran subsidi pupuk sampai dengan Desember 2023 naik signifikan yang disebabkan oleh pembayaran kurang bayar pupuk tahun-tahun sebelumnya. Sementara, penyaluran volume pupuk bersubsidi menurun.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp219.140.718.777 atau 2.172,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp10.085.840.000. Realisasi lebih besar dari pagu APBN karena adanya tambahan anggaran sebesar Rp228.111.201.000 yang berasal dari BA BUN Belanja Lain-lain (BA 999.08) pos Cadangan Lainya (Cadangan Hibah Internasional) ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk pemberian hibah kepada Pemerintah Ethiopia, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste, Nigeria). Anggaran tersebut selanjutnya di-DIPA-kan sebesar Rp238.197.041.000 dan teralisasi sebesar Rp219.140.718.777. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 lebih kecil Rp5.584.131.777.866 atau turun 96,22 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp5.803.272.496.643.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	-	5.755.516.300.341
Belanja Hibah Lainnya	101.163.777	250.404.959
Jumlah	**219.140.718.777**	**5.803.272.496.643**

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023 jauh lebih kecil daripada realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022 terutama karena Hibah kepada Daerah yang sebelumnya merupakan Belanja Pemerintah Pusat, tidak lagi dikonsolidasikan pada UAP BUN BA 999.02 dengan segmen akun 56. Mulai tahun 2023, pengelolaan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dialihkan ke BA BUN 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah) dengan segmen akun 67.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp156.601.633.832.214 atau 105,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp148.516.872.686.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 lebih rendah Rp4.921.444.573.776 atau turun 3,05 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp161.523.078.405.990.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang melampaui anggaran antara lain berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BA BUN untuk Bantuan Permakanan Lansia dan Disabilitas, Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (ATENSI YAPI), anggaran penanggulangan bencana alam, bantuan korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), Bantuan Langsung Tunai (BLT) *El Nino*, dan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	1.281.281.715.566	614.198.479.237
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	67.709.313.222.239	63.192.475.915.731
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	206.932.779.339	177.267.352.566
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	82.368.469.578.565	30.840.927.705.975
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	20.375.194.249	62.227.287.274.121
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	5.015.261.342.256	4.470.921.678.360
Jumlah	**156.601.633.832.214**	**161.523.078.405.990**

Penurunan realisasi Belanja Bantuan Sosial dipengaruhi oleh pelaksanaan penebalan bantuan sosial berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng (Migor) dan BLT BBM pada 2022 yang tidak berlanjut pada tahun 2023.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dimanfaatkan antara lain untuk:
1) Bansos untuk perlindungan sosial antara lain penyaluran PKH dan program kartu sembako untuk KPM;
2) Bansos untuk jaminan sosial antara lain pembayaran bantuan iuran kepada peserta PBI JKN; penyaluran bantuan PIP bagi siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa; dan
3) Bantuan penanggulangan bencana pada BNPB yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada KK terdampak bencana.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2023 sebesar Rp225.023.669.152.725 atau 58,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp385.321.688.019.000. Realisasi Belanja Lain-lain TA 2023 lebih rendah Rp179.362.105.378.985 atau turun 44,35 persen dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp404.385.774.531.710.

Rincian Belanja Lain-lain sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	12.875.144.605.421	5.541.378.587.250
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	121.245.799.637	93.648.376.675
Belanja Lain-lain BUN	206.775.576.705.309	379.968.882.402.407
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	16.381.452.464.426

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	694	2.766
Belanja Lain-lain Lainnya	5.251.702.041.664	2.400.412.698.186
Jumlah	**225.023.669.152.725**	**404.385.774.531.710**

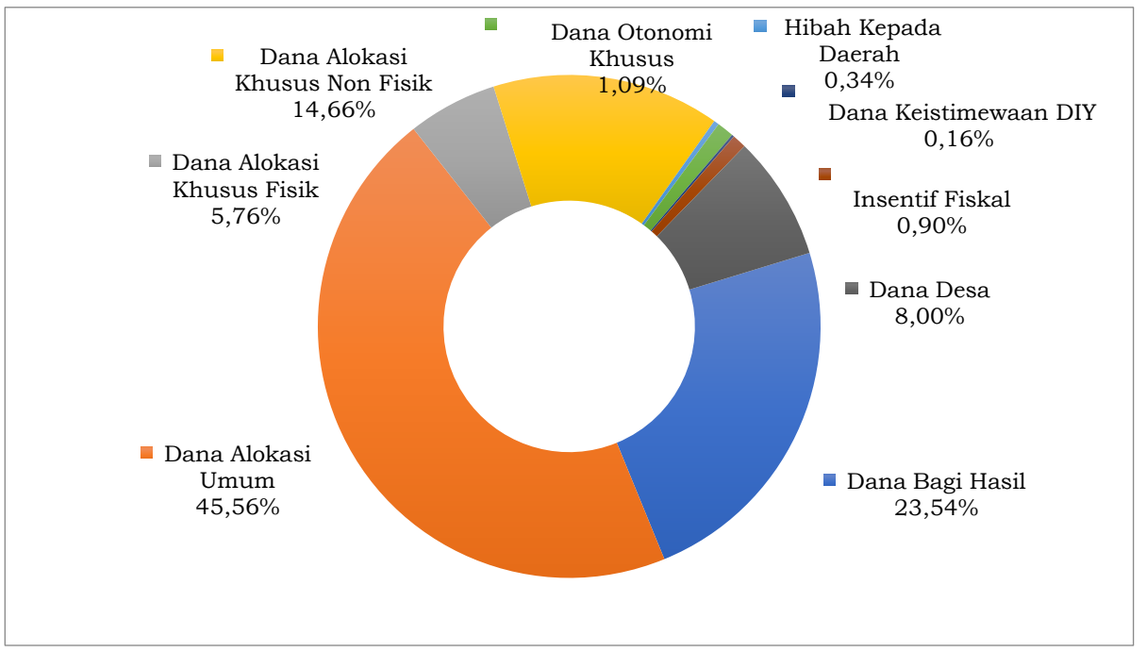
Realisasi Belanja Lain-lain antara lain digunakan untuk pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp206.073.493.135.814. Realisasi pembayaran kewajiban kompensasi Tahun 2023 lebih rendah dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp379.319.425.364.154. Lebih rendahnya kompensasi tahun 2023 disebabkan terutama oleh kenaikan tarif listrik rata-rata dari Rp1.567,95/kWh pada tahun 2022 menjadi Rp1.620,19/kWh pada tahun 2023 dan penurunan realisasi harga produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, di mana rata-rata MOPS JBT Minyak Solar tahun 2023 sebesar USD102.4/barel sementara tahun 2022 sebesar USD129.65/barel, dan rata-rata MOPS JBKP Pertalite tahun 2023 sebesar USD93.32/barel sementara tahun 2022 sebesar USD110.18/barel.

Selain itu, Belanja Lain-lain dimanfaatkan untuk pembayaran bantuan pangan tahap I, penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) triwulan I s.d. III 2023, dan pembayaran kewajiban pemerintah terkait penyaluran beras (PPKM, KPSH, dan bencana alam) tahun 2021-2022. Manfaat lainnya dari realisasi Belanja Lain-lain diantaranya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dimanfaatkan untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 1,14 juta peserta.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2023 sebesar Rp881.430.544.208.454 atau 108,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp814.718.494.042.000. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa dan Insentif Fiskal. Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2023 disajikan pada **Grafik 35.**

Grafik 35
Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2023



B.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 sebesar Rp205.666.564.020.630 atau 150,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp136.259.972.888.000. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023 ini lebih tinggi Rp37.252.453.742.196 atau naik 22,12 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp168.414.110.278.434.

Kenaikan realisasi tersebut dikarenakan pada TA 2023 terdapat kebijakan penambahan pagu DBH reguler akibat pelampauan realisasi penerimaan yang dibagihasilkan dan penambahan pagu penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi DBH yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi untuk DBH Perkebunan Sawit pada bulan Juli 2023 dan Kurang/Lebih Bayar DBH di bulan Desember Tahun 2023. Tambahan alokasi berasal dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya (99908).

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak	**69.722.008.418.530**	**67.590.162.805.658**
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	41.526.659.300.000	37.677.680.471.742
Dana Bagi Hasil PBB	22.319.338.323.000	25.321.008.091.173
Dana Bagi Hasil Cukai	5.876.010.795.530	4.591.474.242.743
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**132.739.779.094.100**	**100.823.947.472.776**
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	16.491.258.147.000	14.388.156.301.036
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	11.738.041.628.000	13.022.127.844.187
Dana Bagi Hasil-SDA Mineral dan Batubara	99.425.415.550.000	68.713.989.486.607
Dana Bagi Hasil-SDA Panas Bumi	2.005.232.650.000	1.726.630.460.219
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	1.984.193.334.100	1.868.480.715.683
Dana Bagi Hasil Perikanan	1.095.637.785.000	1.104.562.665.044
Dana Bagi Hasil Lainnya	**3.204.776.508.000**	**-**
Jumlah	**205.666.564.020.630**	**168.414.110.278.434**

DBH Lainnya pada tabel di atas yaitu DBH Sawit yang merupakan DBH jenis baru yang dihasilkan dari hasil perkebunan sawit. DBH ini baru dialokasikan dan disalurkan pada tahun 2023 berdasarkan PMK 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit.

B.2.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 sebesar Rp398.029.628.594.542 atau 100,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp396.000.000.000.000. Realisasi DAU TA 2023 ini lebih besar Rp20.029.628.594.542 atau naik 5,30 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp378.000.000.000.000.

Meningkatnya realisasi DAU TA 2023 terutama disebabkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan penerapan DAU tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per Daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya ketentuan berdasarkan Undang-undang tersebut. Pada Tahun 2023 juga terdapat kebijakan DAU Tambahan untuk penggantian komponen THR dan Gaji 13 berupa 50 persen TPG dan/atau Tamsil khusus bagi Guru yang mendapatkan gaji dari APBD dan tidak menerima tunjangan kinerja daerah/TPP sebesar Rp2.162.039.188.656 berdasarkan KMK Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023.

Realisasi DAU yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi anggaran untuk Tambahan DAU, yang dialokasikan dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya (99908). Realisasi DAU yang melampaui

anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi anggaran untuk Tambahan DAU, yang dialokasikan dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya (99908).

B.2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 sebesar sebesar Rp181.357.561.783.241 atau 97,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp185.797.257.584.000. Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2023 ini lebih besar Rp8.192.920.728.410 atau 4,73 persen dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp173.164.641.054.831. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Hibah Kepada Daerah.

B.2.2.2.3.1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 sebesar Rp50.334.741.347.305 atau 94,22 persen dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp53.422.463.835.000. Realisasi DAK Fisik TA 2023 ini lebih rendah Rp4.449.212.706.807 atau turun 8,12 persen dari realisasi TA 2022 yang sebesar Rp54.783.954.054.112. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu DAK Fisik yang berpengaruh pada nilai penyalurannya. Realisasi transfer DAK Fisik pada Tahun 2023 disalurkan per bidang/subbidang. Rincian realisasi tersebut sebagai berikut.

Bidang	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Air Minum	1.951.800.000.000	1.830.797.280.205	93,80	2.729.056.087.133	32,91
Infrastruktur Energi Terbarukan	88.000.000.000	87.215.780.515	99,11	0	100
Kesehatan dan KB	13.400.000.000.000	12.376.619.051.710	92,36	12.867.484.274.112	3,81
Pendidikan	15.820.300.000.000	15.095.592.187.700	95,42	17.689.625.337.477	14,66
Perumahan dan Permukiman	160.651.813.000	137.324.360.524	85,48	666.676.807.587	79,40
Sanitasi	1.569.500.000.000	1.550.016.807.373	98,76	1.953.416.589.241	20,65
Industri Kecil dan Menengah	450.000.000.000	398.053.146.865	88,46	644.875.402.963	38,27
Irigasi	1.688.944.553.000	1.507.510.515.757	89,26	1.271.036.217.158	-18,60
Jalan	12.617.759.056.000	12.162.540.594.920	96,39	11.364.072.136.133	-7,03
Kehutanan	32.000.000.000	29.220.059.595	91,31	313.126.608.906	90,67
Kelautan dan Perikanan	1.234.900.000.000	1.120.669.462.214	90,75	1.006.193.999.677	-11,38
Lingkungan Hidup	154.956.000.000	146.853.293.816	94,77	308.501.320.344	52,40
Pariwisata	450.000.000.000	349.057.002.092	77,57	311.634.178.252	-12,01
Pertanian	2.363.652.413.000	2.174.853.051.003	92,01	1.994.413.435.844	-9,05
Transportasi Perairan	440.000.000.000	401.797.186.095	91,32	463.161.480.375	13,25

Bidang	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Transportasi Perdesaan	750.000.000.000	722.014.296.662	96,27	938.895.447.094	23,10
Perdagangan	150.000.000.000	149.622.533.098	99,75	148.565.499.439	-0,71
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	100.000.000.000	94.984.737.161	94,98	113.219.232.377	16,11
Jumlah	**53.422.463.835.000**	**50.334.741.347.305**	**94,22**	**54.783.954.054.112**	**8,12**

B.2.2.2.3.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 sebesar Rp128.081.946.376.309 atau 98,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp130.297.270.000.000. Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 ini lebih tinggi Rp9.701.259.375.590 atau naik 8,19 persen dari realisasi TA 2022 sebesar Rp118.380.687.000.719. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagai berikut.

Bidang	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.449.571.133.000	49.547.218.967.514	98,21	46.547.785.535.686	6,44
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.667.081.869.000	1.594.366.287.923	95,64	1.193.073.260.050	33,64
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.423.098.558.000	1.166.575.891.867	81,97	991.045.485.177	17,71
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.441.572.210.000	53.094.401.455.075	99,35	51.345.762.364.395	3,41
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38	9.653.384.267.000	28,59
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74	2.663.934.986.000	21,28
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	62003157725	94,19	55.658.502.955	11,40
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan	250.000.000.000	249.210.260.000	99,68	223.798.218.000	11,35

Bidang	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Usaha Mikro Kecil					
Dana Pelayanan Kepariwisataan	133.300.000.000	131.787.586.500	98,87	127.814.750.000	3,11
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	4.119.098.130.000	4.086.064.854.769	99,20	3.737.218.787.456	9,33
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.475.083.542.036	98,70	996.671.271.000	48,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00	165.887.500.000	2,46
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	128.562.300.000	97,40	114.052.500.000	12,72
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250.000.000.000	247.386.450.000	98,95	221.756.002.000	11,56
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	292.704.050.000	97,55	197.786.550.000	47,99
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	192.875.000.000	96,44	145.057.021.000	32,96
Jumlah	130.214.110.762.000	128.081.946.376.309	98,36	118.380.687.000.719	8,19

Kenaikan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 antara lain disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur oleh pemda sehingga terdapat peningkatan pada kinerja penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pula kebijakan penyaluran transfer langsung pada jenis dana BOK Puskesmas dari RKUN kepada masing-masing Puskesmas.

B.2.2.2.3.3. Hibah Kepada Daerah

Transfer Hibah ke Daerah disalurkan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mulai tahun 2023. Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2023 sebesar Rp2.940.874.059.627 atau 141,56 persen dari alokasi dalam APBN sebesar Rp2.077.523.749.000.

Realisasi Hibah Kepada Daerah yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya revisi DIPA untuk Hibah Daerah sehingga pagu anggaran bertambah. Revisi ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian *output*. Tambahan alokasi berasal dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya (99908).

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan dua kali revisi DIPA Hibah kepada Daerah, yaitu Revisi ke-1 di tanggal 8 Juni 2023 dan Revisi ke-2 (di Surat Pengesahan DIPA BUN TA 2023 revisi ke-3) tanggal 15 November 2023.

Berdasarkan kedua revisi tersebut terjadi penyesuaian nilai Alokasi Hibah yang semula di dalam Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA. 2023 sebesar Rp2.077.523.749.000 menjadi Rp2.940.874.059.627. Rincian Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.977.982.930.618	-
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	143.405.713.248	-
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	819.485.415.761	-
Jumlah	**2.940.874.059.627**	-

B.2.2.2.4. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 sebesar Rp17.241.263.570.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp17.241.263.570.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 ini lebih kecil Rp3.195.000.000.000 atau lebih kecil 15,63 persen dari realisasi TA 2022 yang sebesar Rp20.436.263.570.000. Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	7.560.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	697.537.158.000	5.783.400.000.000
Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya Provinsi Papua	871.921.448.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	734.634.275.000	2.404.194.963.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	665.426.268.000	2.721.600.000.000
Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya Provinsi Papua Barat	831.782.835.000	-

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	803.970.737.000	1.967.068.607.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan	448.666.078.000	-
Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya Provinsi Papua Selatan	560.832.598.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Selatan	472.527.485.000	-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah	734.493.413.000	-
Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya Provinsi Papua Tengah	918.116.766.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Tengah	773.555.973.000	-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan	784.905.913.000	-
Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	981.132.390.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Pegunungan	826.649.561.000	-
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya	628.971.170.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat Daya	759.925.539.000	-
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	786.213.963.000	-
Jumlah	**17.241.263.570.000**	**20.436.263.570.000**

Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 disebabkan antara lain pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh turun pada 2023, yang semula sebesar 2 (dua) persen pada tahun 2022 menjadi 1 (satu) persen dari plafon DAU Nasional pada tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (2) tersebut, Dana Otonomi Khusus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun kesatu s.d. kelima belas setara dengan 2 (dua) persen plafon DAU Nasional, dan untuk tahun keenam belas s.d. kedua puluh setara dengan 1 (satu) persen plafon DAU Nasional, dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dialokasikan pertama kali pada tahun 2008.

B.2.2.2.5. Dana Keistimewaan DIY

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2023 sebesar Rp1.372.725.809.224 atau 96,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.420.000.000.000. Transfer Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 adalah

realisasi Transfer Dana Keistimewaan sampai dengan Tahap III sesuai PMK 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyaluran telah dilakukan dalam 3 tahap yaitu penyaluran Tahap I sebesar Rp165.725.809.224, penyaluran Tahap II sebesar Rp923.000.000.000 dan penyaluran Tahap III sebesar Rp284.000.000.000. Penyaluran Tahap I TA 2023 merupakan nilai penyaluran bersih setelah memperhitungkan sisa dana tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp47.274.190.776. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DIY Tahap III TA 2023, terdapat sisa Pagu TA 2023 atas realisasi penyerapan Dana DIY Tahap III sebesar Rp23.842.547.568,00.

B.2.2.2.6. Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp69.856.768.617.317 atau 99,80 persen dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp70.000.000.000.000 atau naik sebesar Rp1.950.630.226.886 atau 2,87 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp67.906.138.390.431. Terdapat kenaikan alokasi Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000 atau sebesar 2,94 persen dari TA 2022 ke TA 2023. Realisasi TA 2023 meliputi penyaluran BLT Desa, nonBLT Desa, dan Tambahan Dana Desa.

Kenaikan realisasi Dana Desa tersebut disebabkan karena (i) penyaluran tambahan Dana Desa yang disalurkan sekaligus, dan (ii) adanya relaksasi batas waktu penyampaian persyaratan Tahap II. Kenaikan realisasi Dana Desa tersebut disebabkan terdapat realisasi penyaluran tambahan Dana Desa.

B.2.2.2.7. Insentif Fiskal

Pada tahun 2023 penyajian realisasi anggaran Insentif Fiskal merupakan perubahan nomenklatur Dana Insentif Daerah yang disajikan pada tahun 2022. Realisasi Insentif Fiskal TA 2023 sebesar Rp7.906.031.813.500 atau 98,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp8.000.000.000.000. Nilai realisasi tersebut mengakibatkan realisasi Insentif Fiskal TA 2023 lebih besar Rp912.359.039.500 atau naik 13,05 persen dari realisasi TA 2022 yang sebesar Rp6.993.672.774.000 atau sebesar 99,91 persen dari pagu sebesar Rp7.000.000.000.000. Meskipun nilai realisasi Insentif Fiskal TA 2023 secara jumlah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama di TA 2022, namun persentase penyaluran secara keseluruhan menurun dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama TA 2022. Penurunan persentase realisasi penyaluran disebabkan adanya 22 daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran tahap 2 Insentif Fiskal.

B.2.3. DEFISIT ANGGARAN

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2023 sebesar Rp337.287.568.777.420 atau 70,28 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp479.927.462.971.000 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.783.929.676.930.198	2.635.843.046.064.472
Belanja Negara	3.121.217.245.707.618	3.096.262.719.102.674
Surplus (Defisit) Anggaran	**(337.287.568.777.420)**	**(460.419.673.038.202)**

B.2.4. PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2023 sebesar Rp356.663.747.714.521 atau 74,32 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp479.927.462.971.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp590.978.140.090.153, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp234.314.392.375.632 atau turun 39,65 persen. Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Rincian realisasi Pembiayaan Tahun 2023 berdasarkan format dan struktur UU APBN 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	APBN	Realisasi	Persentase
Pembiayaan Utang	**421.213.499.059.000**	**403.952.202.819.212**	**95,90**
1. Surat Berharga Negara (Neto)	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39
2. Pinjaman (Neto)	(16.620.551.938.000)	95.758.414.413.250	(576,14)
1) Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	749.450.378.000	14.558.368.405.525	1.942,54
2) Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(17.370.002.316.000)	81.200.046.007.725	(467,47)
Pembiayaan Investasi	**(175.955.303.621.000)**	**(89.897.795.440.654)**	**51,09**
PMN/Dana Investasi Pemerintah	(155.955.303.621.000)	(69.897.795.440.654)	44,82
1. Penerimaan Pembiayaan	-	26.800.909.690.612	-
1) Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	2.944.155.651.898	-

Uraian	APBN	Realisasi	Persentase
2) Penerimaan Investasi dari UAKPA Set BPJT	-	359.653.415.387	-
3) Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU LMAN	-	18.207.083.934.327	-
4) Penerimaan pembiayaan dari UAKPA KBUMN	-	5.285.019.139.000	-
5) Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH (*Mangrove*)	-	4.997.550.000	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	(155.955.303.621.000)	(96.698.705.131.266)	62,00
1) Klaster Infrastruktur	(85.318.000.000.000)	(75.318.000.000.000)	88,28
2) Klaster Perlindungan Masyarakat	(4.300.000.000.000)	(4.300.000.000.000)	100,00
3) Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(4.789.910.242.000)	(5.589.910.241.052)	116,70
4) Klaster Kerjasama Internasional	(3.523.940.156.000)	(3.559.632.528.929)	101,01
5) Klaster Lainnya	(58.023.453.223.000)	(6.883.643.222.285)	11,86
6) Investasi Pemerintah	-	(1.047.519.139.000)	-
Dana Abadi di Bidang Pendidikan	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00
Pemberian Pinjaman	**5.284.746.297.000**	**4.468.399.383.312**	**84,55**
Pinjaman kepada BUMN/Pemda	(1.065.247.517.000)	(1.905.999.112.657)	178,93
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari BUMN/Pemda	6.349.993.814.000	6.374.398.495.969	100,38
Kewajiban Penjaminan	**(330.511.505.000)**	**(330.511.505.000)**	**100,00**
Penugasan Percepatan Pembangunan	(296.151.505.000)	(296.151.505.000)	100,00

Uraian	APBN	Realisasi	Persentase
Infrastruktur Nasional			
Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	(34.360.000.000)	(34.360.000.000)	100,00
Pembiayaan Lainnya	**229.715.032.741.000**	**38.471.452.457.651**	**16,75**
Saldo Anggaran Lebih	226.880.171.913.000	35.000.000.000.000	15,43
Hasil Pengelolaan Aset	609.660.828.000	1.246.252.457.651	204,42
Rekening Pembangunan Hutan	2.225.200.000.000	2.225.200.000.000	100,00
Jumlah	**479.927.462.971.000**	**356.663.747.714.521**	**74,32**

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2023 sebesar Rp277.369.700.819.453 atau 55,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp498.362.712.804.000.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara (Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Pada TA 2023 terdapat realisasi pembiayaan dari rekening pemerintah sebesar Rp37.225.200.000.000 atau 16,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp229.105.371.913.000. Realisasi Rekening Pemerintah ini terdiri dari Penggunaan dana SAL sebagai pembiayaan APBN TA 2023 sebesar Rp35.000.000.000.000 dan penerimaan pembiayaan atas dana Reboisasi yang disimpan pada Deposito Rekening Pembangunan Hutan sebesar Rp2.225.200.000.000.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2023 sebesar Rp6.374.398.495.969 atau 100,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp6.349.993.814.000. Realisasi penerimaan cicilan pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp2.422.241.398.599 atau 61,29 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.952.157.097.370.

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Pemda	1.120.000.000	2.922.593.380
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD	198.181.821	163.631.368
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMN	2.030.566.500.738	15.954.640.456
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	9.373.438.846	10.817.634.511
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Daerah	77.691.349.491	77.924.682.822
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	4.233.335.861.730	3.820.849.065.110
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	22.113.163.343	23.524.849.723
Jumlah	**6.374.398.495.969**	**3.952.157.097.370**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.876.690.757.054 atau 72,59 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan di luar Penerimaan PMN Non Tunai.

Kenaikan Signifikan terjadi karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 dan 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Len Industri dengan masing-masing senilai Rp1.955.049.413.943 dan Rp456.253.222.285.

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2023 sebesar Rp1.097.737.606.166 atau 180,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp609.660.828.000. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp430.561.340.654 atau 64,53 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp667.176.265.512.

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan melalui mekanisme pengurusan aset, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan aset inventaris secara lelang, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero). Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	1.030.646.856.018	643.617.367.500
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	67.090.750.148	23.558.898.012
Jumlah	**1.097.737.606.166**	**667.176.265.512**

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2023 sebesar Rp308.193.788.405.962 atau 70,39 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp437.834.050.997.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Rincian realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	34.542.000.000.000	68.605.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	445.320.497.000.000	435.469.216.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	5.605.322.706.060	6.058.451.006.441
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN *Public Goods*	-	207.423.350.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	221.619.255.704.658	190.396.410.602.999
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	2.469.080.982.310	2.129.747.492.160
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara – Jangka Panjang Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	16.576.650.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang	13.830.000.000.000	17.223.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	34.348.433.295.342	29.536.460.397.001
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	58.971.351.694.000	74.526.126.155.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	4.114.360.058	6.373.615.694
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas	31.398.000.000.000	49.505.450.000.000
Total Penerimaan	**848.108.055.742.428**	**1.097.456.235.269.295**
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(54.005.000.000.000)	(58.655.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(159.532.411.170.979)	(136.775.733.563.248)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(32.780.366.000.000)	(24.061.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(5.993.063.722.946)	(4.953.040.043.397)

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(174.659.931.000.000)	(95.679.108.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(2.582.477.419.452)	(2.016.085.525.018)
Pelunasan SPN syariah	(11.983.000.000.000)	(20.450.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas	(79.319.816.212.000)	(52.955.187.227.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	-	(11.579.647.985.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(8.201.811.089)	(30.227.504.256)
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang	(19.050.000.000.000)	(31.484.300.000.000)
Total Pengeluaran	**(539.914.267.336.466)**	**(438.639.329.847.919)**
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	**308.193.788.405.962**	**658.816.905.421.376**

Penurunan realisasi SBN neto sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang Pemerintah yang senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan. Selain hal tersebut, penurunan ini juga dikarenakan nilai realisasi defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri TA 2023 sebesar Rp14.558.368.405.525 atau 1.942,54 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp749.450.378.000. Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2023 naik sebesar Rp6.357.086.051.284 atau 77,51 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp8.201.282.354.241. Adanya kenaikan realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.

Pada Tahun 2023, Pinjaman Dalam Negeri digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah	17.504.129.527.679	10.125.528.103.890
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(2.945.761.122.154)	(1.924.245.749.649)
Jumlah	**14.558.368.405.525**	**8.201.282.354.241**

Realisasi penarikan PDN tahun 2023 sebesar Rp17.504.129.527.679 karena terdapat percepatan penarikan PDN yang dilakukan sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatan. Pada saat perencanaan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022, usulan anggaran penarikan PDN relatif kecil mengingat terdapat kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan kegiatan maupun dalam tahap proses pengadaan PDN sehingga masih terdapat kemungkinan dilaksanakan atau tidaknya kegiatan tersebut. Pada saat tahun berjalan tahun 2023, terdapat proses pengadaan PDN baru sebagai tindak lanjut DKPPDN yang diterbitkan Bappenas dengan jumlah relatif banyak yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan realisasi penarikan PDN tahun 2023.

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri yang melampaui estimasi dalam APBN TA 2023 dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal melalui perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang, yang termasuk di dalamnya adalah Pinjaman Dalam Negeri, sebagaimana dalam Pasal 32 UU APBN TA 2023 dan penjelasannya. Hal ini diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa perubahan anggaran yang bersifat menambah Pagu pada revisi anggaran yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri dapat dilakukan diantaranya dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan pinjaman.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2023 sebesar minus Rp69.897.795.440.654 atau 44,82 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp155.955.303.621.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2023 lebih kecil Rp16.826.512.164.233 atau turun 19,40 persen dibandingan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp86.724.307.604.887.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp69.897.795.440.654 terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp26.800.909.690.612 yang bersumber antara lain dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2023, pengembalian ke Kas Negara atas Dana PMN, pengembalian ke Kas Negara atas Dana IP PEN,

pemindahbukuan IP PEN, angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT, Penerimaan Pembiayaan atas Pengesahan Realisasi Belanja Dana Rehabilitasi Mangrove BRGM, dan penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja LMAN.

b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp96.698.705.131.266 yang bersumber antara lain dilakukan antara lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebudayaan; meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; mendukung perlindungan masyarakat; mendukung ketahanan pangan dan menjaga lingkungan hidup; serta mendukung kebijakan strategis lainnya.

Rincian realisasi pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *)	3.437.500.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen atas Transaksi pada Rekening Investasi Pemerintah PEN	1.047.519.139.000	8.701.143.500.000
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Cadangan IP PEN **)	800.000.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	359.653.415.387	22.000.000.000
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah	2.944.155.651.898	2.311.496.745.459
Penerimaan Pembiayaan atas Pengesahan Realisasi Belanja Dana Rehabilitasi Mangrove BRGM	4.997.550.000	-
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang	18.207.083.934.327	16.047.063.368.063
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir (Dit SMI)	(2.225.200.000.000)	-
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(39.862.353.463.337)	(24.808.999.889.336)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	(34.350.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(1.559.632.528.929)	(1.005.867.829.073)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	-	(500.000.000.000)

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Dana *Pooling Fund* Bencana pada KPA BPDLH	(4.300.000.000.000)	(3.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(1.047.519.139.000)	(1.201.143.500.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	(2.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	(19.480.000.000.000)	(19.100.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(25.424.000.000.000)	(28.840.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPDLH	(800.000.000.000)	-
Jumlah	**(69.897.795.440.654)**	**(86.724.307.604.887)**

Keterangan:
*) Realisasi tahun 2023 termasuk Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Permanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp3.000.000.000.000.
**) Penerimaan Pembiayaan atas pengembalian dana IP PEN dari RIPPEN ke RKUN

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Pada TA 2023 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp330.511.505.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp330.511.505.000. Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar minus Rp296.151.505.000 dan sebesar minus Rp34.360.000.000 merupakan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar *(default)* dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2023 sebesar minus Rp20.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp20.000.000.000.000. Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan Dana Abadi Pendidikan BLU LPDP. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB).

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-Lain

Pada TA 2023 realisasi Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp148.514.851.485 yang berasal dari UAPBUN TK DJKN satker BPLS (999980) yaitu PT Minarak Lapindo Jaya telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp148.514.851.485,00 namun sampai saat ini belum melunasi pinjaman Dana Antisipasi untuk pembelian Tanah dan Bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2023 sebesar Rp79.294.046.895.068 atau minus 430,12 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp18.435.249.833.000, Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2023 naik sebesar Rp52.098.257.338.527 atau 191,57 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp27.195.789.556.541.

Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto setelah dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2023 sebesar Rp162.650.352.798.218 atau 262,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp62.056.062.121.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Program/Tunai dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan. Realisasi Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp82.990.780.840.684 sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan sebesar Rp79.659.571.957.534.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 46 persen dikarenakan penarikan pinjaman tunai yang merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang tahunan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

Realisasi Pinjaman Program TA 2023 sebesar Rp82.990.780.840.684 atau 281,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.500.000.000.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2023 lebih besar Rp17.398.069.401.018 atau 26,52 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp65.592.711.439.666 karena kebutuhan pembiayaan dari Pinjaman Tunai lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan penarikan pinjaman tunai dilakukan dengan menggunakan opsi fleksibilitas pembiayaan utang sesuai dengan Pasal 32 UU APBN 2023 di mana pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang. Optimalisasi pinjaman tunai dimaksudkan untuk mengamankan pembiayaan utang tahun 2023 ditengah kondisi pasar keuangan yang sedang *volatile*. Kondisi ini terjadi pada tahun 2023 di mana target lelang SBN dalam beberapa kesempatan tidak tercapai dan memiliki *cost of fund* yang relatif tinggi.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Adapun tabel rincian *policy matrix* sebagai berikut.

No	***Lender***	**Program**	***Policy Matrix/Output/Pilar***	
1	WB	*Disaster Risk Finance and Insurance (IPF with PBCs)*	*1*	*Performance Based Conditions (PBC)*
2	WB	*Financial Sector Development Policy Loan 3*	*1*	*Increasing the depth of the financial sector*
			2	*Improving the efficiency of the financial sector*
			3	*Strengthening the resilience of the financial sector*

No	*Lender*	Program	*Policy Matrix/Output/Pilar*	
3	WB	*Investing in Nutrition and Early Years*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
4	WB	*Strengthening Nation Tuberculosis Response Program*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
5	WB	*Indonesian Universal Health Coverage Development Policy Loan*	*1*	*To increase the number of practicing medical doctors*
			2	*To increase the number of medical doctors who graduated from abroad*
			3	*To increase the number of non-Indonesian specialist medical doctors*
			4	*To increase the number of specialist medical doctors across Indonesia*
			5	*To increase health system resilience*
6	ADB	*Promoting Innovative Financial Inclusion Program 2 (PIFIP – 2) - PBL*	*1*	*Tools and infrastructure for financial inclusion*
			2	*Access to finance by micro, small, and medium-sized enterprizes (MSMEs) and marginalized groups including women and youth*
			3	*Supervision and consumer protection measures for responsibles financial inclusion*
7	ADB	*Stated-Owned Enterprise/ SOE Reform (PBL)*	*1*	*Efficiency and resilience of SOEs improved*
			2	*Corporate governance framework for SEOs strengthened*
8	ADB	*Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
9	ADB	*Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 2 (PBL)*	*1*	*Creating and enabling environment for investments*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
10	AIF	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*

No	*Lender*	Program	*Policy Matrix/Output/Pilar*	
11	KfW	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
12	KfW	*Co-financing Indonesia Emergency Response to Covid-19 AF (PfR)*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
13	EDCF	*Co-financing competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1*	*1*	*Creating and enabling environtment for investment*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
14	EDCF	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
15	JICA	*Disaster Risk Enhancement and Management Program (DREAM) 3*	*1*	*Strengthening Disaster Risk Reduction governance and mainstreaming*
			2	*Promotion of understanding disaster risk*
			3	*Promotion of investing in disaster reduction for resilience*
			4	*Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction*
16	JICA	*Co-financing Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1*	*1*	*Creating and enabling environtment for investment*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
17	AFD	*Co-financing Disaster Risk Enhancement and Management Program 3*	*1*	*Strengthening Disaster Risk Reduction governance and mainstreaming*
			2	*Promotion of understanding disaster risk*
			3	*Promotion of investing in disaster reduction for resilience*
			4	*Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction*

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2023 sebesar Rp79.659.571.957.534 atau 244,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp32.556.062.121.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp36.969.199.810.599 atau 86,60 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp42.690.372.146.935. Kenaikan realisasi Pinjaman Proyek disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

B.2.4.2.2. Pemberian Pinjaman

Realisasi Pengeluaran Pemberian Pinjaman (neto) TA 2023 sebesar minus Rp1.905.999.112.657 atau 178,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp1.065.247.517.000. Rincian Pemberian Pinjaman (neto) sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(286.277.630.136)	(21.460.809.305)
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(1.619.721.482.521)	(1.783.927.975.298)
Pemberian Pinjaman	**(1.905.999.112.657)**	**(1.805.388.784.603)**

Kenaikan signifikan Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Daerah akibat adanya penarikan pinjaman terhadap perjanjian pemberian pinjaman Nomor SLA-1295/DSMI/2023 antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI Jakarta Atas Dana Pinjaman Dari *Japan International Cooperation Agency, Loan Agreement Number* IP-585 dalam rangka pembiayaan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* (*Phase* 2) (II) sebesar Rp286.277.630.136.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri pada TA 2023 sebesar minus Rp81.450.306.790.493 atau 102,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp79.426.064.437.000.

Realisasi tersebut lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN disebabkan oleh adanya penguatan kurs pada saat transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2023. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok Pinjaman Tunai dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Kegiatan.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2023.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	(41.620.171.896.141)	(37.619.613.777.567)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(39.830.134.894.352)	(41.662.291.467.890)
Jumlah	**(81.450.306.790.493)**	**(79.281.905.245.457)**

B.2.5. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SILPA (SIKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp337.287.568.777.420 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp356.663.747.714.521 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp19.376.178.937.101, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.783.929.676.930.198	2.635.843.046.064.472
Belanja Negara	3.121.217.245.707.618	3.096.262.719.102.674
Surplus (Defisit)	(337.287.568.777.420)	(460.419.673.038.202)
Pembiayaan Neto	356.663.747.714.521	590.978.140.090.153
SiLPA (SiKPA)	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut.

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022; dan
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Jenis Pemberian Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:
a. Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah atas komoditas panas bumi (PPh DTP Panas Bumi) yang diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik;
b. Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas) yang diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri;
c. Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan *cash flow* dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
d. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu (PPh DTP Pasal 21) yang diberikan dalam rangka membantu pegawai yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional;
e. Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (PPh DTP Final atas WP P3-TGAI) yang diberikan dalam rangka membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air,

Gabungan Perkumpulan Petani Pernakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Permakai Air;

f. Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh DTP Final atas UMKM) yang diberikan dalam rangka membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional;
g. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 kepada pihak tertentu dan pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu (PPN DTP Alkes/Non Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19;
h. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun (PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun) yang diberikan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
i. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
j. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat (PPN DTP Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan
k. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu (PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik) yang diberikan dalam rangka

mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik.

Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi Pajak DTP sebesar Rp11.285.195.030.132 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
I. Reguler		
1.	PPh DTP Panas Bumi	3.476.808.245.363
2.	PPh DTP SBN Valas	5.110.328.410.699
Subtotal		**8.587.136.656.062**
II. PC-PEN		
1.	PPh DTP Pasal 21 (Tahun 2021)	505.135.640.947
2.	PPh DTP Final WP P3-TGAI (Tahun 2021)	124.800.000
3.	PPh DTP Final atas UMKM (Tahun 2021)	99.074.028.856
4.	PPN DTP Alkes Non-Vaksin (Tahun 2021 dan 2022)	462.702.785.608
5.	PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun (Tahun 2021 dan 2022)	708.945.410.159
6.	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor (Tahun 2021 dan 2022)	65.150.508.412
7.	PPN DTP Vaksin (Tahun 2021 dan 2022)	856.925.200.088
Subtotal		**2.698.058.374.070**
Total I + II		**11.285.195.030.132**

Realisasi PC-PEN merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 karena pagu anggaran LK BUN 999.07 pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencukupi.
Selain itu, terdapat tagihan insentif DTP Tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2023, yaitu:

No	Uraian	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
I. Reguler		
1.	PPh DTP Panas Bumi Kegiatan Triwulan II & III 2023	917.820.311.039
2.	PPh DTP SBN Valas Oktober s.d Desember 2023	323.169.474.517
Subtotal		**1.240.989785.556**
II. Lainnya		
1.	PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	505.554.567.558
Subtotal		**505.554.567.558**
Total I + II		**1.746.544.353.114**

2. Insentif/Fasilitas Fiskal di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan daya saing global serta peningkatan investasi dan mendorong ekspor, pemerintah memberikan stimulus-stimulus ekonomi di mana salah satunya adalah fasilitas kepabeanan.

Fasilitas kepabeanan, merupakan salah satu jenis kemudahan yang disediakan pemerintah, baik melalui kemudahan prosedur, maupun pemberian insentif dari sisi fiskal. Kemudahan prosedur pada bidang kepabeanan, meliputi pemangkasan waktu *clearance* melalui berbagai skema (contohnya MITA/AEO, *rush handling*, dan lain sebagainya). Sementara itu, kemudahan fiskal diberikan berkenaan dengan pungutan negara, dalam bentuk fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, dan pengembalian bea masuk.

Mekanisme pelaporan insentif/fasilitas fiskal diatur dalam KMK nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan. Dalam KMK tersebut, dijelaskan bahwa pemberian insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan berupa insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan Ditanggung Pemerintah yang disebut DTP dan selain insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan DTP sebagaimana dimaksud yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, disebut Non-DTP.

Realisasi nilai pemanfaatan atas insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada TA 2023 adalah sebesar Rp31.297.762.524.414,40 dengan jumlah wajib pajak penerima manfaat sejumlah 2.595 WP, secara rinci terdapat pada tabel berikut.

No	Jenis Insentif atau Fasilitas/ Kemudahan (IFKP) atau Dasar Peraturan	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Nilai FKP (Rp)	Keterangan
A. DTP				
1	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	-	-	Tahun 2023 tidak diterbitkan PMK fasilitas BMDTP
B. Non-DTP				
1	Pembebasan Bea Masuk sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan	1.127	9.174.376.220.210,10	-
2	Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor	117	977.937.695.489,00	-
3	Penangguhan Bea Masuk dalam Rangka Kawasan Berikat	1.240	19.535.860.317.519,20	-
4	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan	33	124.515.655.341,00	-

	Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	8	13.774.075.142,00	-
6	Pembebasan dan/atau Penangguhan Bea Masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	38	1.468.926.319.531,08	-
7	Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)	32	2.372.241.182,00	-
Total		**2.595**	**31.297.762.524.414,38**	

3. Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP

Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

Pada PPh Badan tedapat fasilitas:

a. Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)

Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

1) Pengurangan PPh badan sebesar 100 persen dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
   a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
   b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	**Jangka Waktu Fasilitas**
≥ 500 s.d. < 1.000	5 tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 tahun
≥ 30.000	20 tahun

   c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama dua tahun dengan

pengurangan PPh badan sebesar 50 persen dari jumlah PPh badan terutang.

2) Pengurangan PPh badan sebesar 50 persen dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
   a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
   b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah lima tahun pajak.
   c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama dua tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25 persen dari jumlah PPh badan terutang.

b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5 persen per tahun selama enam tahun;
2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.

c. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan

tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang.
Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10 persen per tahun selama enam tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)
Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:
   1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
   2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

e. Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction* Litbang)
Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:

1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200 persen dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) 50 persen jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
   b) 25 persen jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
   c) 100 persen jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
   d) 25 persen jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategi. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)
   a) Bagi badan usaha
      Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100 persen dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu sepuluh tahun.
   b) Bagi pelaku usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut.

No	Rencana Penanaman Modal (Dalam Miliar Rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka Waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 Tahun	50%	2 Tahun
2	≥ 500 s.d. < 1.000		15 Tahun		
3	≥ 1.000		20 Tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
   a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama enam tahun masing-masing sebesar 5 persen pertahun;
   b) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
   c) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
   d) kompensasi kerugian selama sepuluh tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. 2023

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023
1.	*Tax Holiday*	25	23	34	19
2.	*Tax Allowance*	34	17	16	11
3.	*Tax Holiday* di KEK	0	12	4	11
4.	*Tax Allowance* di KEK	0	1	3	1
5.	*Investment Allowance*	2	3	2	2
6.	*Super Tax Deduction* Vokasi	23	34	37	32
7.	*Super Tax Deduction* Litbang	0	24	6	10

4. Fasilitas PPN dan PPnBM Bukan Pajak DTP

Fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

a. PPN Tidak Dipungut

1) Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:
   a) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk.
   b) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
   c) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional dan pihak yang ditunjuk.
   d) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
   e) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
   f) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional.
   g) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.
2) Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* atas pelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020. Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh penghasilan.

3) Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dipungut atas Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Fasilitas ini diberikan kepada K3S dengan kontrak *cost recovery* yang terbagi atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksploitasi.

b. PPN Dibebaskan

1) Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu/JKP tertentu Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:
   a) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
   b) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
   c) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara.

2) Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:
   a) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, dan LNG;
   b) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalu KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.

3) Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
   a) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional;
   b) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

Sementara itu Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan DPP PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur lebih lanjut dalam PMK141/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK-42/PMK.010/2022 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:

a) Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (*Low Cost Green Car*/LCGC);
b) Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*;
c) Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, teknologi *Flexy Engine,* dan *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*.

Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi fasilitas PPN dan PPnBM Non-DTP sebesar Rp9.403.171.105.159, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1	Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	570	709.040.606.524
2	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	10	77.598.654.883
3	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)	2	853.828.771.709
4	BBM Kapal Angkutan Luar Negeri	1	2.833.584.697
5	Avtur Angkutan Udara Luar Negeri	82	647.756.191.848
PPN Dibebaskan			
6	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	173	174.185.082.948
7	Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (*Compressed Natural Gas* (CNG) & *Liqufied Natural Gas* (LNG))	962	2.424.427.822.269

8	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Susun Sederhana Milik)	5	1.537.349.000
9	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja)	189	117.074.590.202
10	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Vaksin Polio dalam Rangka Pekan Imunisasi Nasional dan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Covid-19)	23	10.088.765.632
11	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Darat)	32	609.083.982.706
12	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Peralatan dan Suku Cadang untuk Penyediaan Data Batas dan Foto Udara)	7	34.346.361
13	Penyerahan JKP Tertentu (Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana)	1	132.303.470
14	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	58	212.119.537.046
Pengurangan DPP PPnBM			
15	Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC)	2	2.424.340.299.546
16	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*	2	822.718.442.278
17	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, Teknologi *Flexy Engine*, *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*	2	316.370.774.040
Total		**2.121**	**9.403.171.105.159**

5. Fasilitas PBB Bukan Pajak DTP Non PC-PEN

Fasilitas PBB non PC-PEN terdiri dari:

a. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split* Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai

PP Nomor 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020.

b. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019.
c. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014.
d. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi. Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama tahun 2023:

No	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	18	15.186.510.691
2	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	7	711.794.810.400
3	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas pada Tahap Eksplorasi	10	8.535.683.200
4	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	24	1.028.618.800
Total		59	736.545.623.091

6. *Burden Sharing* yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban

belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian pada tahun 2023 sebagai berikut.

No.	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Januari	900.596.250.000		900.596.250.000
2	Februari	1.792.186.000.000		1.792.186.000.000
3	Maret	3.100.967.700.000		3.100.967.700.000
4	April	1.080.898.840.000		1.080.898.840.000
5	Mei	2.270.632.740.000		2.270.632.740.000
6	Juni	1.596.617.460.000		1.596.617.460.000
7	Juli	2.389.736.300.000		2.389.736.300.000
8	Agustus	2.248.414.520.000		2.248.414.520.000
9	September	2.858.143.800.000		2.858.143.800.000
10	Oktober	1.063.634.100.000		1.063.634.100.000
11	November	2.210.271.320.000		2.210.271.320.000
12	Desember	2.844.745.930.000		2.844.745.930.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		24.356.844.960.000		24.356.844.960.000
B. *Non Public Goods*				
1	Juni	540.629.753.425	4.466.588.153.425	5.007.217.906.850
2	Desember	446.619.175.471	4.602.937.677.953	5.049.556.853.424
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		987.248.928.896	9.069.525.831.378	10.056.774.760.274
C. *Cluster* A				
1	Januari	276.095.493.750		276.095.493.750
2	Februari	133.224.244.740		133.224.244.740
3	Maret	1.024.746.069.180		1.024.746.069.180
4	April	342.161.591.700		342.161.591.700
5	Mei	139.828.734.000		139.828.734.000
6	Juni	921.910.000.000		921.910.000.000
7	Juli	488.079.393.230		488.079.393.230
8	Agustus	137.709.317.340		137.709.317.340
9	September	1.051.215.239.580		1.051.215.239.580
10	Oktober	336.825.567.900		336.825.567.900
11	November	135.352.455.660		135.352.455.660
12	Desember	1.035.454.514.150		1.035.454.514.150
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK *CLUSTER* A		6.022.602.621.230		6.022.602.621.230
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG, NPG, DAN *CLUSTER* A		31.366.696.510.126	9.069.525.831.378	40.436.222.341.504

7. Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja dengan kode kewenangan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2023	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	54.302.121.961	4.558.549.490
018	Kementerian Pertanian	570.285.698.921	1.879.031.236.622
019	Kementerian Perindustrian	47.931.945.365	-
024	Kementerian Kesehatan	367.671.776.285	-
026	Kementerian Ketenagakerjaan	112.132.605.375	-
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	72.928.443.934
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	74.820.659.312	18.995.998.172
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	580.955.143.321
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	43.424.461.843
044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17.248.137.634	111.405.955.129
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	30.731.863.604	-
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	11.737.259.180	-
065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.170.814.211	-
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	590.147.158	132.573.573.769
090	Kementerian Perdagangan	26.163.333.723	180.446.145.851
092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	78.060.059.466	-
125	Badan Pangan Nasional	134.463.668.685	-
Jumlah		**1.535.310.090.880**	**3.024.319.508.131**

8. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan Pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung

produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah, dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa *(quasi public goods)* meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 312 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU yang berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga. Ditinjau dari jenis layanan dapat dibagi menjadi:

1. 42 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 7 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 114 BLU bidang Kesehatan;
4. 141 BLU bidang Pendidikan;
5. 8 BLU bidang Pengelolaan Dana.

Ikhtisar keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA Tahun 2023 sebagai berikut.

(dalam miliar rupiah)

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker BLU	Aset	Kewajiban	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA
1	Sekretariat Negara	2	487.278,90	147,48	593,89	452,23
2	Kementerian Pertahanan	30	4.827,50	502,26	4.246,16	5.731,39
3	Kementerian Keuangan	7	294.760,82	207.371,00	49.102,60	31.379,09
4	Kementerian Pertanian	3	3.992,34	1,66	88,93	194,33
5	Kementerian Perindustrian	10	1.925,88	29,82	216,24	381,26
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8	9.677,28	51,42	711,11	1.083,35
7	Kementerian Perhubungan	42	67.493,56	314,88	2.212,26	5.728,53
8	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	50	160.237,17	855,33	9.964,07	18.895,05
9	Kementerian Kesehatan	73	91.780,53	1.817,64	17.485,51	24.596,02
10	Kementerian Agama	29	37.482,68	376,78	3.472,62	7.675,19
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6	4.346,11	1.352,16	94,64	395,03
12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	563,72	0,91	7,15	106,69
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2	7.933,32	6.673,07	313,35	288,33
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	37.662,41	13.351,33	3.811,75	8.414,15
15	Kepolisian Negara Republik Indonesia	42	7.583,49	188,29	2.812,96	3.530,43
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	224,62	1,87	34,42	32,00
17	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	55.583,26	4.500,54	1.643,19	2.152,64
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	3.253,97	2,01	5,37	57,68
19	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	48,99	18,11	58,51	62,57
Jumlah		312	1.276.656,55	237.556,56	96.874,73	111.155,96

Sumber: Data per Satker BLU pada Aplikasi MonSAKTI per tanggal 20 Mei 2024

Keterangan:
*) Termasuk 2 BLU yang dilikuidasi pada bulan Juni dan Juli Tahun 2023
Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.G**.

9. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp200.000.000.000 dan pekerjaan nonkonstruksi sampai dengan Rp20.000.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran. Selanjutnya untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000 dan pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pada Pasal 3 ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan, dan Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan pada tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Rincian sesuai dengan **Lampiran 3.F**.

10. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Pada Tahun 2023, terdapat pengembalian dana (*refund*) kepada *Lender* sebesar Rp390.944.713.171 dikarenakan adanya *refund* administratif dan *refund ineligible*. *Refund* merupakan koreksi nilai ekuitas tahun lalu, sehingga tidak mempengaruhi akun penarikan pinjaman kegiatan. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut.

No	*Loan ID*	Register	Kementerian/Lembaga	*Lender*	Nilai Rupiah
Refund Administratif					(389.158.844.664)
1	20419000	18K6ECNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(1.398.202.792)
2	20422000	1LF9UFAA	PT. SMI	IBRD	(73.969.570.286)
3	20426000	1HG72SWA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(231.826.085.278)
4	20600001	1PTDQQAA	KEMEN PU & PERA	AIIB	(1.398.202.636)
5	20600003	145E6FTA	PT. SMI	AIIB	(73.969.570.288)
6	20999011	1VFX57JA	KEMEN PU & PERA	IDB	(7.830.199)
7	20999012	1ENYRFPA	KEMEN PU & PERA	IDB	(5.167.592.562)
8	20999013	1NT81PXA	KEMEN PU & PERA	IDB	(1.421.790.623)
Refund Ineligible					(1.785.868.507)
9	20408000	10864001	KEMENRISTEKDIKTI	IBRD	(67.003.781)
10	20418000	1NPB3NNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(69.922.307)
11	20433000	1M1JWRAA	BPIW PUPR	IBRD	(67.634.025)
12	21245000	10883301	KEMEN PU & PERA	IDB	(1.581.308.394)
Jumlah					(390.944.713.171)

11. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2023.

Rincian ikhtisar LK PHLN untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 3.C dan 3.D**.

12. Pagu dan Realisasi SBSN Proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga

Untuk Tahun 2023 pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut.

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
1	Kementerian Pertahanan	1.508.265.154.000	1.508.145.579.350
2	Kementerian Pertanian	311.043.764.000	228.906.276.418
3	Kementerian Perindustrian	159.552.306.000	159.249.488.326
4	Kementerian Perhubungan	9.034.303.231.000	7.834.041.071.447
5	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	2.685.697.841.000	2.107.721.106.112
6	Kementerian Agama	2.598.693.572.000	2.567.240.465.862
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.986.840.000	24.854.393.207
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20.053.858.190.000	18.705.161.276.686
9	Kepolisian Negara Republik Indonesia	335.017.497.000	332.817.815.402
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	346.507.690.000	346.008.011.447
11	Badan Keamanan Laut	155.737.065.000	155.736.492.120
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	519.352.336.000	332.921.782.100
Jumlah		37.735.015.486.000	34.302.803.758.477

Keterangan: Berdasarkan data dalam LKBUN yang ditarik pada 1 Januari 2024

13. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan *(Mandatory Spending)*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2023 sebesar Rp624.252,5 miliar, adapun Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2023 sebesar Rp513.387,2 miliar atau 82,24 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan tersebut dituangkan dalam Perpres Rincian APBN TA 2023 sebagai berikut.

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN 2023	DIPA	Realisasi
1.	**Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**249.157.344.329.000**	**265.800.516.910.000**	**187.390.599.800.267**
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga [1)]	173.579.909.662.000	190.223.082.243.000	184.628.605.678.286
1.2	Anggaran Pendidikan pada Non Kementerian Negara/Lembaga	75.577.434.667.000	75.577.434.667.000	2.761.994.121.981
2	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah**	**305.595.143.263.000**		**305.996.561.500.366**
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	174.847.718.165.000		177.121.046.742.796
2.1.1	Dana Bagi Hasil	702.818.165.000		883.077.937.800
2.1.1.1	Gas Bumi dalam rangka Otsus			690.226.677.000
2.1.1.2	Minyak Bumi dalam rangka Otsus			192.851.260.800
2.1.2	Dana Alokasi Umum	174.144.900.000.000		176.237.968.804.996
2.1.2.1	Non Gaji	32.050.197.433.000		32.881.266.336.839
2.1.2.1.1	DAU *Earmarked* Pendidikan (Non Gaji)	32.050.197.433.000		32.881.266.336.839
2.1.2.2	Gaji	142.094.702.567.000		143.356.702.468.157
2.1.2.2.1	DAU *Earmarked* Pendidikan (Gaji)	8.012.549.358.000		7.112.510.070.501
2.1.2.2.2	DAU *Blockgrant* untuk Gaji Pendidik	114.619.295.603.000		114.619.295.603.000
2.1.2.2.3	DAU Tambahan Komponen THR/G13	-		2.162.039.188.656

2.1.2.2.4	DAU *Earmarked* PPPK Guru	19.462.857.606.000		19.462.857.606.000
2.2	Dana Alokasi Khusus	128.668.425.098.000	128.585.265.860.000	126.229.278.186.884
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000.000	15.820.300.000.000	15.095.592.187.700
2.2.2	DAK Nonfisik	112.848.125.098.000	112.764.965.860.000	111.133.685.999.184
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru ASND	50.450.843.688.000	50.449.571.133.000	49.547.218.967.514
2.2.2.2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.476.330.539.000	1.423.098.558.000	1.166.575.891.867
2.2.2.3	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.667.081.911.000	1.667.081.869.000	1.594.366.287.923
2.2.2.4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.569.279.350.000	53.441.572.210.000	53.094.401.455.075
2.2.2.5	BOP PAUD	4.047.395.950.000	4.119.098.130.000	4.086.064.854.769
2.2.2.6	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.467.218.660.000	1.494.568.960.000	1.475.083.542.036
2.2.2.7	BOP Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	169.975.000.000
2.3	Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan [2)]	2.079.000.000.000		2.646.236.570.686
2.3.1	Provinsi Aceh	594.000.000.000		1.043.521.107.559
2.3.2	Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua	1.485.000.000.000		1.602.715.463.127
3	**Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan**	**69.500.000.000.000**	**69.500.000.000.000**	**20.000.000.000.000**
3.1	Dana Abadi Pendidikan	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	49.500.000.000.000		-
Jumlah		**624.252.487.592.000**		**513.387.161.300.633**

Keterangan:

[1)] Perubahan alokasi APBN Tahun 2023 dengan DIPA anggaran pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga disebabkan penambahan alokasi anggaran antara lain berupa penyesuaian dan percepatan proyek bersumber Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, penyesuaian pagu BLU, penyesuaian pagu sumber dana PNBP atas peningkatan capaian pendapatan, serta pergeseran anggaran dari BA BUN ke BA K/L. Selain itu perubahan juga disebabkan adanya pengurangan alokasi anggaran meskipun jauh lebih kecil antara lain berupa realokasi blokir *Automatic Adjustment* ke BA BUN serta perubahan alokasi per program dan per fungsi akibat adanya

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) pada Kementerian/Lembaga.

2) Realisasi berasal dari laporan realisasi untuk masing-masing Pemda pada klasifikasi belanja pendidikan yang dicantumkan dalam laporan tahunan penggunaan Dana Otsus TA 2023 yang disampaikan kepada DJPK dan angka proksi bagi Pemda yang belum menyampaikan laporan dimaksud. Hingga 16 Mei 2024, masih terdapat 19 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan tahunan penggunaan Dana Otsus TA 2023.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3.E**.

14. Capaian *Output* per Fungsi APBN TA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 2 ayat (2), RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yaitu pengelompokkan anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN. Salah satu pengelompokkan anggaran tersebut adalah pengelompokan alokasi sesuai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan diadopsi *Government Finance Statistics* (GFS) *Manual* 2001 - *International Monetary Fund* (IMF), dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (*recreation, culture, and religion*).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Capaian *output* menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2023 antara lain sebagai berikut.

a. Pelayanan Umum (01)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	18.504,57	18.501,21	99,98	11.180.000	12.263.783	Kiloliter	109,69
Pembentukan/ Seleksi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu	12.977,89	12.788,85	98,92	1.647	1.647	Lembaga	100,00
Honorarium Pengawas Ad-Hoc	2.465,29	2.415,96	98,00	88.707	88.523	Lembaga	99,79
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	2.384,81	2.325,11	97,50	515	515	Layanan	100,00
Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.962,95	1.675,34	85,35	15.473	15.501	Lembaga	100,18

b. Pertahanan (02)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
(A) Interim Multirole Combat Air Craft (MRCA) dan Dukungannya 3 PLN TNI AU	10.267,93	10.049,49	97,87	1	1	Unit	100,00
(A) Interim Multirole Combat Air Craft (MRCA) dan Dukungannya 2 PLN TNI AU	5.314,47	5.196,62	97,78	1	1	Unit	100,00
MRCA Sejenis Rafale dan Dukungannya beserta Logistic Support PLN TNI AU (Rafale III)	4.511,31	4.497,13	99,69	1	1	Unit	100,00
Pesawat Terbang	4.076,72	4.073,47	99,92	126	126	Unit	100,00
MRCA Sejenis Rafale dan Dukungannya beserta Logistic Support PLN TNI AU	3.314,45	3.314,45	100,00	1	1	Unit	100,00

c. Ketertiban dan Keamanan (03)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN) (PN)	10.845,68	9.695,06	89,39	64	64	Unit	100,00
Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen	9.102,56	9.052,70	99,45	16	16	Unit	100,00
Penyaluran Dana Siap Pakai	4.666,80	4.666,80	100,00	42.663	42.663	Paket	100,00
Layanan Pencetakan Dokumen Keimigrasian lainnya	1.055,24	1.052,26	99,72	2	2	Layanan	100,00
Laporan Intelijen Wilayah Sumatera dan Kalimantan	664,05	664,05	100,00	3.414	3.414	Operasi	100,00

d. Ekonomi (04)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Dukungan Penanganan Jalan Daerah	14.510,07	14.462,50	99,67	3.273	3.117	Km	95,23
Dukungan Infrastruktur IKN	10.852,25	10.840,22	99,89	47	48	Km	100,58
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	7.378,05	6.763,06	91,66	31	29	Km	92,27
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	6.416,29	6.376,01	99,37	1.993	1.979	Km	99,28
Jalan Strategis (ProPN)	6.621,21	6.247,15	94,35	1.379	1.286	Km	93,26

e. Lingkungan Hidup (05)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	584,97	575,10	98,31	12.000	12.297	Hektar	102,48
PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori V	499,24	496,60	99,47	2.783.092	2.762.265	Bidang	99,25
Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	239,61	235,31	98,20	42.150.000	42.971.427	Unit	101,95
PBT PTSL Desa Lengkap Luar Jawa	182,61	174,63	95,63	2.067.199	2.004.735	Hektar	96,98
SHAT PTSL ASN Kategori 5	163,61	162,07	99,06	1.379.392	1.304.527	Bidang	94,57

f. Perumahan dan Fasilitas Umum (06)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	4.977,90	4.882,43	98,08	13	13	Unit	100,00
Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN)	3.747,18	3.721,47	99,31	1	1	Unit	100,00
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3.305,36	3.298,29	99,79	150.421	150.667	Unit	100,16
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2.216,54	2.084,61	94,05	11.017	11.017	KK	100,00
Pembangunan IKN	2.275,21	2.066,98	90,85	51	46	Hektar	90,83

g. Kesehatan (07)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.331,59	46.300,92	99,93	96.800.000	96.778.967	Orang	99,98
Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	2.677,12	2.677,12	100,00	77.169.337	52.471.920	Orang	68,00
Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19	1.656,76	1.515,53	91,48	161.882	161.882	Orang	100,00
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pilihan (LP)	1.148,34	1.147,02	99,89	1	1	Paket	100,00
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP)	956,40	899,71	94,07	1	1	Paket	100,00

h. Pariwisata dan Budaya (08)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Penerima Penghargaan Olahraga Prestasi	844,31	844,31	100,00	929	930	Orang	100,11
Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single *Event* Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan	675,00	669,02	99,11	34	10	Lembaga	29,41
Pembinaan Olahragawan Nasional dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	465,90	456,72	98,03	699	1.146	Orang	163,95
Olahragawan Potensial Elit yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional	189,34	179,64	94,87	250	250	Orang	100,00
Kejuaraan Multi *event* olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi	174,86	144,63	82,71	4	4	Lembaga	100,00

i. Agama (09)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Penyuluh Agama Islam Non PNS Penerima Tunjangan	491,31	491,06	99,95	50.932	110.357	Orang	216,67
KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	293,76	282,66	96,22	925	4.901	Lembaga	529,89
Layanan Nikah dan Rujuk	310,79	233,42	75,11	663.491	688.013	Orang	103,70
Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	228,63	228,10	99,77	1.000.000	1.205.700	Sertifikat	120,57
Asrama Haji yang Profesional Melayani	193,01	192,36	99,66	17	20	Layanan	117,65

j. Pendidikan (10)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	11.912,85	11.779,15	98,88	913.636	916.827	Orang	100,35
Siswa Penerima BOS	10.734,75	10.721,13	99,87	9.394.511	388.188.886	Orang	4132,08
Program Indonesia Pintar (PIP)	9.672,43	9.669,55	99,97	17.927.992	18.109.119	Orang	101,01
Tunjangan Guru dan Kepsek Non PNS (TPG, TKG dan Insentif Guru)	7.606,58	7.523,83	98,91	343.118	348.873	Orang	101,68
Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	5.076,47	5.056,97	99,62	194.760	227.494	Orang	116,81

k. Perlindungan Sosial (11)

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Bantuan Sosial Sembako	45.120,00	44.745,60	99,17	18.800.000	18.800.000	Keluarga	100,00
Bantuan Sosial Bersyarat	28.735,31	28.280,78	98,42	10.000.000	9.879.558	Keluarga	98,80
Bantuan Langsung Tunai (BLT) *El Nino*	7.575,70	7.576,99	100,02	18.800.000	18.800.000	Keluarga	100,00
Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia	588,80	606,17	102,95	100.000	204.993	Orang	204,99
Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak YAPI	454,50	454,50	100,00	378.755	332.641	Orang	87,82

15. Prioritas Nasional TA 2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat arah kebijakan nasional selama satu tahun dan bertujuan untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Tema RKP Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi Covid-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Adapun sasaran pembangunan tahun 2023 adalah untuk mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif. Rincian realisasi anggaran Prioritas Nasional sebagai berikut.

Uraian Prioritas Nasional	Anggaran	Realisasi	%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	43.406.908.378.000	40.717.400.106.064	93,80
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	9.535.081.562.000	9.356.705.965.803	98,13
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	234.564.893.790.000	229.382.615.108.931	97,79
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6.511.845.621.000	6.159.276.172.560	94,59
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	118.226.910.809.000	109.798.153.723.637	92,87
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	11.352.876.794.000	10.744.741.982.228	94,64
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	115.065.525.037.000	104.748.813.326.970	91,03
Jumlah	**538.664.041.991.000**	**510.907.706.386.193**	**94,85**

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata;

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Major project dalam PN I terdiri dari (1) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (2) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (3) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, (4) Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, (5) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, (6) Pengelolaan Terpadu UMKM, (7) Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas, (8) Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, dan (9) Destinasi Pariwisata Prioritas.

PN I memiliki 8 program prioritas, 45 kegiatan prioritas, 120 proyek prioritas, dan 1.196 rincian *output* yang tersebar di 29 K/L dengan pagu mencapai Rp43.406.908.378.000 dan realisasi sebesar Rp40.717.400.106.064 atau mencapai 93,80 persen.

b. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Major project dalam PN II terdiri dari (1) Pembangunan Batam-Bintan; (2) Pengembangan Wilayah (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; (3) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; (4) Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; (5) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay; (6) Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda; (7) PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan (8) Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria).

PN II memiliki 7 program prioritas, 35 kegiatan prioritas, 461 proyek prioritas, dan 373 rincian *output* yang tersebar di 16 K/L dengan pagu mencapai Rp9.535.081.562.000 dan realisasi sebesar Rp9.356.705.965.803 atau mencapai 98,13 persen.

c. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Major project dalam PN III terdiri dari (1) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas), (3) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan (5) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

PN III memiliki 7 program prioritas, 29 kegiatan prioritas, 79 proyek prioritas, dan 1.339 rincian *output* yang tersebar di 32 K/L dengan pagu mencapai Rp234.564.893.790.000 dan realisasi sebesar Rp229.382.615.108.931 atau mencapai 97,79 persen.

d. PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

Dalam PN IV tidak memiliki MP. Namun demikian pada RKP Tahun 2023 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dan (4) MP Transformasi Digital.

PN IV memiliki 4 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 62 proyek prioritas, dan 356 rincian *output* yang tersebar di 19 K/L dengan pagu mencapai Rp6.511.845.621.000 dan realisasi sebesar Rp6.159.276.172.560 atau mencapai 94,59 persen.

e. PN V Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Major project dalam PN V berupa (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga), (4) Pemulihan 4 DAS Kritis, (5) 18 Waduk Multiguna, (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (8) Kereta Api Makassar-Pare Pare, (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (*Medium Speed* Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung), (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, (11) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong, (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua, (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar (15) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 *Mega Volt Ampere* (MVA), (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah, (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km), dan (18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, serta (19) Transformasi Digital.

PN V memiliki 5 program prioritas, 21 kegiatan prioritas, 66 proyek prioritas, dan 595 rincian *output* yang tersebar di 13 K/L dengan pagu mencapai Rp118.226.910.809.000 dan realisasi sebesar Rp109.798.153.723.637 atau mencapai 92,87 persen.

f. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan

berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

Major project dalam PN VI berupa (1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan (2) penguatan sistem peringatan dini bencana.

PN VI memiliki 3 program prioritas, 11 kegiatan prioritas, 39 proyek prioritas, dan 245 rincian *output* yang tersebar di 16 K/L dengan pagu mencapai Rp11.352.876.794.000 dan realisasi sebesar Rp10.744.741.982.228 atau mencapai 94,64 persen.

g. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memperkokoh upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Major project dalam PN VII terdiri dari (1) penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta (2) penguatan keamanan laut di Natuna.

PN VII memiliki 5 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 67 proyek prioritas, dan 766 rincian *output* yang tersebar di 45 K/L dengan pagu mencapai Rp115.065.525.037.000 dan realisasi sebesar Rp104.748.813.326.970 atau mencapai 91,03 persen.

16. *Output* Strategis

Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga *governance* dan akuntabilitas setiap kebijakan dalam pelaksanaan APBN TA 2023. Belanja negara dalam APBN TA 2023 dioptimalkan untuk menghasilkan *output* strategis yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam penjelasan Pasal 9 butir g disebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan atas penggunaan anggaran dalam APBN TA 2023 yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2023, berikut ini adalah beberapa *output* strategis Belanja Negara tahun 2023. *Output* strategis yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2023 antara lain sebagai berikut.

Uraian *Output*	Alokasi Anggaran (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	%
Perlindungan Sosial							
Kartu Prakerja	4.200,00	2.609,68	62,14	1.151.833	1.151.833	Keluarga	100
Subsidi Bunga KUR	3.457,52	2.673,24	77,32	4.761.092	4.438.471	Debitur	93,22
Subsidi Pupuk	25.276,63	14.023,48	55,48	6.680.286	6.040.669	Ton	90,43
Subsidi Listrik	72.576,85	42.736,31	58,88	637	620	TWH	97,33
Kompensasi Harga BBM	133.123,62	133.123,62	100	1	1	Laporan	100
Kompensasi Tarif Tenaga Listrik	72.949,87	72.949,87	100	1	1	Laporan	100
Kesehatan							
Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.331,59	46.300,92	99,93	96.800.000	96.778.967	Orang	99,98
Bantuan Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	2.677,12	2.677,12	100	77.169.337	52.471.920	Orang	68,00
Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19	1.656,76	1.515,53	91,48	161.882	161.882	Orang	100
Penugasan khusus tenaga kesehatan	28,47	27,63	97,05	5.400	5.754	Orang	106,56
Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*	20,30	20,29	99,95	138.889	138.889	Orang	100
Pendidikan							
Program Indonesia Pintar (PIP)	9.672,43	9.669,55	99,97	17.927.992	18.109.119	Orang	101,01
KIP Kuliah	11.912,85	11.779,15	98,88	913.636	916.827	Orang	100,35

Tunjangan Guru dan Kepsek Non PNS (TPG, TKG dan Insentif Guru)	7.606,58	7.523,83	98,91	343.118	348.873	Orang	101,68
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7,79	7,40	94,99	7.417	7.614	Orang	102,66
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	107,50	105,12	97,79	3.048	4.243	Orang	139,21
Siswa Penerima BOS	10.734,75	10.721,13	99,87	9.394.511	388.188.886	Orang	4.132,08
Pemilu							
Pembentukan/Seleksi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu	12.977,89	12.788,85	98,54	1.647	1.647	Lembaga	100
Penyusunan Peraturan Pemilu	28,98	27,67	95,46	549	549	Lembaga	100
Pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik	1.947,77	1.661,38	85,30	1.647	1.647	Lembaga	100
Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	225,79	154,97	68,63	5.984	6.008	Laporan	100,4
Infrastruktur							
Bendungan yang dibangun	11.221,05	10.375,45	92,46	61*)	32	Unit	52,46
Panjang Jalan Tol yang beroperasi	60,88	56,79	93,28	2.513*)	240,13	Km	9,56
Panjang Jalan yang dibangun	15.106,73	14.797,14	97,95	3.000*)	536,02	Km	17,87
Panjang Jembatan yang dibangun	3.572,80	3.326,85	93,12	38.328*)	7.940,26	m	20,72
Panjang *flyover/underpass* yang dibangun	1,39	1,30	93,53	31.053*)	2.325,33	m	7,49
Rumah susun yang dibangun	5.337,39	5.211,09	97,63	51.340*)	4.724	Unit	9,20
Rumah khusus yang dibangun	1.264,05	1.061,94	84,01	10.000*)	4.311	Unit	43,11
Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya	3.305,36	3.300,57	99,86	813.660*)	150.231	Unit	18,46
Pembangunan PSU rumah umum	328,78	321,96	97,92	262.345*)	43.008	Unit	16,39
Pembangunan Bandara	1.188,74	1.140,50	95,94		7	Unit	

*) Target Renstra 2020-2024

17. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). LKjPP Tahun 2023 disusun untuk menyampaikan Informasi Kinerja Pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran Tahun 2023. Laporan ini dilengkapi dengan informasi kinerja berupa prestasi yang dicapai oleh Kementerian/Lembaga (K/L), berkenaan dengan anggaran yang digunakan, serta hambatan dan kesulitan yang dihadapi setiap K/L dalam mencapai kinerjanya. Pengungkapan informasi kinerja berhubungan dengan informasi sasaran pokok pembangunan nasional yang dicapai oleh K/L, termasuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Informasi kinerja Pemerintah Pusat yang diungkapkan berupa capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan, yang penyusunannya dilakukan dengan cara mengikhtisarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 dari masing-masing K/L, yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PANRB. Metodologi LKjPP Tahun 2023 disusun dengan melakukan pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023, dan bidang tugas atau urusan K/L bersangkutan. Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja atau prestasi kerja dalam LKjPP ini sangat terbatas hanya mencakup pada pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dari K/L (termasuk di dalamnya Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L). LKjPP telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Adanya perbedaan angka-angka, terutama pada informasi makro antara LKPP dan LKjPP disebabkan perbedaan tanggal *cut-off* data yang digunakan dalam penyusunan laporan.

LKjPP secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 34.**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. SAL Awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp478.957.156.319.401 merupakan SAL per 31 Desember 2022. SAL Awal dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2023	1 Januari 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Saldo Awal Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Saldo Awal Kas BLU yang Sudah Disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yang Telah Disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**478.954.317.677.062**	**338.391.616.661.271**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Penyesuai Fisik SAL	5.390.038.579	(612.602.571.149)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Penyesuai Fisik SAL	210.753.180	(156.183.292)
Selisih Kiriman Uang	649.111.176	150.229.276
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	3.355.675.440	-
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.766.936.036)	-
Transito Lainnya	-	(1.317.760)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**2.838.642.339**	**(612.609.842.925)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**

C.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Pemerintah telah menganggarkan Penerimaan Pembiayaan Lainnya dari Saldo Anggaran Lebih yang terakhir diubah rinciannya melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023, sebesar Rp35.000.000.000.000. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih

dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat penggunaan SAL sebesar Rp35.000.000.000.000 yang berasal dari Rekening Lain BI SAL (500000002980).

C.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Pendapatan Negara	2.783.929.676.930.198	2.635.843.046.064.472
Belanja Negara	3.121.217.245.707.618	3.096.262.719.102.674
Surplus (Defisit)	**(337.287.568.777.420)**	**(460.419.673.038.202)**
Pembiayaan Neto	356.663.747.714.521	590.978.140.090.153
SiLPA/(SiKPA)	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**

SiLPA Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp111.182.288.114.850 atau 85,16 persen dari SiLPA Tahun 2022.

C.4. PENYESUAIAN PEMBUKUAN

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs belum terealisasi *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.548.034.701.030 dan Rp11.648.084.260.735 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Koreksi SiLPA	1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
Koreksi Kas BUN	(243.005.835.551)	(87.732.477.966)
Koreksi Kas Hibah	(27.019.436.853)	(58.478.443.129)
Koreksi Kas BLU	(4.264.411.251.718)	(1.098.251.792.777)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	19.102.196.151	74.875.146.456
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(200.381.898)	3.359.288.846
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(3.548.034.701.030)**	**11.648.084.260.735**

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp1.496.864.847.086 merupakan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.603.949.124.314 serta pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp107.084.277.228. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai Rp105.394.184.105 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai Rp1.690.093.123.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp529.364.838.247 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1.596.970.205.995 dikurangi kerugian selisih kurs sebesar Rp2.126.335.044.242 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp243.005.835.551 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp27.019.436.853 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2023 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp2.839.196.445, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp25.765.188.423, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp93.447.775, serta penyesuaian kas hibah akibat kesalahan pembukuan pendapatan hibah sebesar minus Rp3.999.997.100.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp4.264.411.251.718 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2023, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang BPDPKS.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.102.196.151 merupakan koreksi terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp24.325.275.958, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar minus Rp5.357.758.595 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar Rp134.678.788.
7. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp200.381.898 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) terdiri dari penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas sebesar minus Rp197.597.939, selisih kurs sebesar Rp20.447 dan penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga tidak dimintakan kembali sebesar minus Rp2.804.406.

C.5. PENYESUAIAN LAIN-LAIN (PENYESUAIAN PERHITUNGAN CATATAN SAL)

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL ini dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh saldo dari transaksi-transaksi non-SAL dan untuk menghindari pencatatan ganda pada pembukuan catatan SAL.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp287.428.484.774 dan minus Rp1.028.401.811.631 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Penyesuaian Transaksi RPL	(290.350.819.934)	(1.028.102.350.599)
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	160.185.740	(150.549.516)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	2.762.149.420	(148.911.516)
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**(287.428.484.774)**	**(1.028.401.811.631)**

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar minus Rp290.350.819.934, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp160.185.740 dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar Rp0 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL, sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.
2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp2.762.149.420 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(649.111.176)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	(3.355.675.440)
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD (TAYL)	6.766.936.036
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**2.762.149.420**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(35.000.000.000.000)	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**443.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	19.376.178.937.101	130.558.467.051.951
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**463.333.335.256.502**	**468.337.473.870.297**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
Selisih Kurs *(Unrealized)*	(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
Koreksi Kas BUN	(243.005.835.551)	(87.732.477.966)
Koreksi Kas Hibah	(27.019.436.853)	(58.478.443.129)
Koreksi Kas BLU	(4.264.411.251.718)	(1.098.251.792.777)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1)]	19.102.196.151	74.875.146.456
Koreksi Utang PFK [2)]	-	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3)]	(200.381.898)	3.359.288.846
Total Penyesuaian Pembukuan	**(3.548.034.701.030)**	**11.648.084.260.735**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Transaksi RPL [4)]	(290.350.819.934)	(1.028.102.350.599)
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5)]	160.185.740	(150.549.516)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	2.762.149.420	(148.911.516)
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**(287.428.484.774)**	**(1.028.401.811.631)**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

Rincian perhitungan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	215.927.152.362	248.050.262.873
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	197.710.858.794	215.927.152.362
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	18.216.293.568	32.123.110.511
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	37.318.489.719	106.998.256.967
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) = Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran *)	**19.102.196.151**	**74.875.146.456**

*) terdiri dari Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Awal Utang PFK (I)	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	620.417.513.169	151.048.636.559
Mutasi Transaksi PFK (III)	620.329.866.094	151.170.449.070
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	(87.647.075)	121.812.511
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	(87.647.075)	121.812.511
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice*	-	-

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	247.752.918.368	251.218.736.876
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	128.907.360.569	247.752.918.368
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(118.845.557.799)	(3.465.818.508)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(119.045.939.697)	(106.529.662)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) *)	**(200.381.898)**	**3.359.288.846**

*) berasal dari penyesuaian Penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas, selisih kurs dan penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga tidak dimintakan kembali pada KPPN Khusus Penerimaan.

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Awal RPL	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(247.963.671.548)	(251.062.553.584)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	5.203.653.636.302	5.951.791.475.377
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	5.203.653.636.302	5.951.791.475.377
Saldo Akhir RPL	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	(128.394.224.723)	(247.963.671.548)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	3.379.352.455.808	5.203.653.636.302
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.824.301.180.494)	(748.137.839.075)
Mutasi Transaksi RPL (III)	(2.114.652.000.428)	(1.776.240.189.674)

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL =Penyesuaian Transaksi RPL *)	**(290.350.819.934)**	**(1.028.102.350.599)**

*) berasal dari Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas, Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN.

5) Rekening *Escrow*

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Awal Rekening *Escrow*	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Awal Tahun	(3.921.748.145.695)	(3.152.585.086.897)
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (I)	48.331.400.902.982	26.773.447.366.321
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Akhir Tahun	(4.492.658.156.434)	(3.921.748.145.695)
Saldo Akhir Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	143.663.249.475.207	48.331.400.902.982
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	95.331.848.572.225	21.557.953.536.661
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow* (III)	95.332.008.757.965	21.557.802.987.145
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)=Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* *)	**160.185.740**	**(150.549.516)**

*) berasal dari Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening *Escrow* Dana Cadangan Alutsista TNI AU dan Kemenhan serta penyesuaian dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN dari Rekening Pembangunan Hutan sebagai Pembiayaan APBN Tahun 2023.

C.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp459.497.872.070.698 dan Rp478.957.156.319.401. Nilai perhitungan catatan SAL telah sesuai dengan perhitungan fisik SAL. Rincian SAL akhir berdasarkan perhitungan fisik SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Saldo Anggaran Lebih		
Saldo Akhir Kas BUN	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Saldo Akhir Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**454.548.329.062.453**	**478.954.317.677.062**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Utang PFK Penyesuai Fisik SAL	(44.029.816.776)	5.390.038.579
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Penyesuai Fisik SAL	(513.135.846)	210.753.180
Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(3.336.178.894)	3.355.675.440
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.707.739.111)	(6.766.936.036)
Penempatan Dana di Bank Umum	5.000.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**4.949.543.008.245**	**2.838.642.339**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

Dengan demikian, SAL Akhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.459.284.248.703 atau 4,06 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir 31 Desember 2022.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

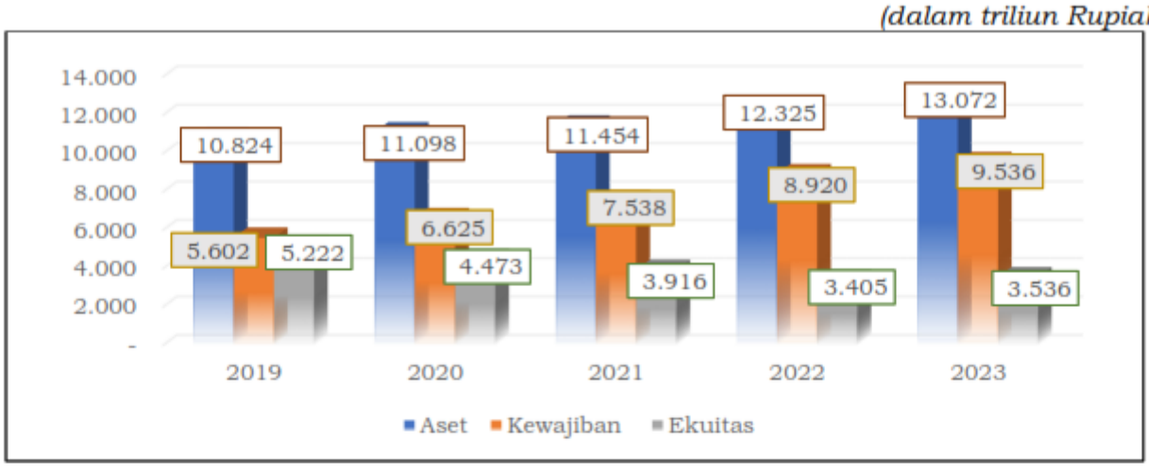
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Neraca	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	894.407.139.081.901	895.407.443.423.480	(0,11)
Investasi Jangka Panjang	4.077.230.147.021.115	3.759.590.948.039.254	8,45
Aset Tetap	6.964.294.021.049.510	6.729.886.142.098.847	3,48
Properti Investasi	104.373.750.662.580	38.811.976.554.711	168,92
Piutang Jangka Panjang	49.188.253.842.798	53.571.613.295.222	(8,18)
Aset Lainnya	983.326.656.191.290	848.182.746.161.394	15,93
Jumlah Aset	**13.072.819.967.849.194**	**12.325.450.869.572.908**	**6,06**
Kewajiban Jangka Pendek	1.092.254.611.766.819	892.289.644.366.744	22,41
Kewajiban Jangka Panjang	8.444.424.909.729.798	8.028.268.168.707.205	5,18
Jumlah Kewajiban	**9.536.679.521.496.617**	**8.920.557.813.073.949**	**6,91**
Ekuitas	**3.536.140.446.352.577**	**3.404.893.056.498.959**	**3,85**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**13.072.819.967.849.194**	**12.325.450.869.572.908**	**6,06**

Nilai Aset per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,06 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2022. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,91 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2022. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 36.**

Grafik 36
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2019 – 2023

(dalam triliun Rupiah)



D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. Aset lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp894.407.139.081.901 dan Rp895.407.443.423.480. Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Aset Lancar	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	430.715.095.759.788	460.525.416.110.350	(6,47)
Uang Muka dari Rekening BUN	44.479.546.335	20.878.963.110	113,04
Investasi Jangka Pendek	35.230.294.868.007	26.341.869.598.933	33,74
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	29.180.110.096.058	50.582.083.648.060	(42,31)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	15.268.713.521.615	17.562.805.658.048	(13,06)
Piutang (Bersih)	179.785.295.421.158	150.340.334.526.561	19,59
Persediaan	204.183.149.868.940	190.034.054.918.418	7,45
Jumlah	**894.407.139.081.901**	**895.407.443.423.480**	**(0,11)**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Penurunan Aset Lancar terutama disebabkan karena nilai Kas dan Setara Kas turun sebesar Rp29.810.320.350.562 atau 6,47 persen.

D.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum (BU) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp342.835.699.040.576 dan Rp394.096.461.571.443, mengalami penurunan sebesar Rp51.260.762.530.867 atau 13,01 persen dibandingkan tahun 2022. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp149.595.370.820.262 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing sebesar Rp193.240.328.220.314. Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	3.397.837.721.385	3.147.161.809.214
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.711.147.196.694	2.412.732.511.396
Rekening Lain BI SAL (500000002980)	121.859.042.325.583	184.317.792.809.485
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah (518000122980)	6.336.895.305.865	34.293.585.351.085
Rekening Khusus dalam Rupiah	4.698.022.677.397	5.439.463.860.693
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-Gaji	8.602.239.471.956	8.495.421.788.199
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-NonGaji	1.182.832.010.487	-
Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat (Kas di Rekening Investasi Pemerintah BUN)	807.354.110.895	289.597.970.365
Jumlah	**149.595.370.820.262**	**238.395.756.100.437**

Saldo kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp88.800.385.280.175 atau sekitar 37,25 persen dari akhir tahun 2022. Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap penurunan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah penurunan saldo pada Rekening Lain BI SAL (500000002980).

Penurunan saldo pada Rekening Lain BI SAL disebabkan adanya penggunaan SAL sebagai pembiayaan APBN Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000.000 dan penggunaan SAL untuk memenuhi kebutuhan kas temporer (peminjaman SAL) sebesar Rp90.000.000.000.000 yang baru dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2024. Selain itu terdapat kebijakan baru yang diimplementasikan oleh Direktorat PKN sehubungan dengan saldo Dana SAL BUN pada tahun 2023 yakni dibentuknya Rekening Lain BI SAL USD yang bersama-sama dengan Rekening Lain BI SAL digunakan sebagai rekening untuk menampung Dana SAL BUN sehingga Dana SAL BUN kini terbagi menjadi dua yakni Dana SAL BUN dalam mata uang Rupiah dan USD.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2023 sebesar Rp193.240.328.220.314. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Rekening KUN dalam Valuta USD	756.926.477.074	322.082.536.666
Rekening KUN Dalam Valuta Yen	6.099.000.486.364	27.267.669.242
Rekening KUN dalam Valuta Euro	15.262.144.761	22.082.827.222.971
Rekening Kas Penempatan Dalam USD	39.874.716.757.070	130.892.668.710.781
Rekening Kas Penempatan Dalam Euro	15.255.402.886.248	-
Kas di Rekening SAL dalam Valuta USD	129.927.177.044.667	-
Rekening Khusus dalam Valas	1.311.842.424.130	2.375.859.331.346
Jumlah	**193.240.328.220.314**	**155.700.705.471.006**

Saldo kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.539.622.749.308 atau naik sebesar 24,11 persen dari akhir tahun 2022. Kenaikan tersebut bersumber dari beragam faktor karena salah satu komponen pembentuk saldo pada pos kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing yang merupakan rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan perpajakan/nonpajak, maupun penerimaan pembiayaan dalam valuta asing.

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut dipengaruhi oleh Pembentukan Rekening Lain BI SAL USD (609028411980).

Peningkatan saldo pada Rekening Lain BI SAL USD bersumber dari transaksi pemindahbukuan dana dari RKUN USD ke Rekening Lain BI SAL USD dalam rangka Pemenuhan Dana SAL BUN.

D.2.1.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.507.746.680.531 dan Rp5.451.617.307.850, mengalami penurunan sebesar Rp1.943.870.627.319 atau 35,66 persen. Penurunan saldo tersebut dipengaruhi oleh Rekening Pengelolaan Migas yang pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.148.873.278.968 atau 59,44 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan peruntukannya, rekening pengelolaan migas ini dibuka untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Aliran uang masuk pada rekening ini dikategorikan sebagai penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam yang meliputi hasil penjualan minyak mentah, hasil penjualan gas alam, dan *Overlifting.*

Rincian Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Rekening Penerimaan - Dana Investasi	(10)	1
Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	27	27
Rekening Penerimaan Migas	1.466.441.303.733	3.615.314.582.701
Rekening Penerimaan Panas Bumi	1.912.870.273.103	1.588.329.504.774
Rekening Dana Bergulir	40.878.955	9.548.799
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji	127.419.028.658	245.275.438.525
Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	975.196.065	2.688.233.023
Jumlah	**3.507.746.680.531**	**5.451.617.307.850**

Rincian Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.3. Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.128.787.424.755 dan Rp2.774.997.342.454, mengalami kenaikan sebesar Rp2.353.790.082.301 atau 84,82 persen. Saldo rekening kas di KPPN merupakan saldo pada Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) sebesar Rp5.128.787.424.748 dan Saldo pada Kas di Rekening SubRKUN Penerimaan sebesar Rp7. Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan

(Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo rupiah dan setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 pada *collecting agent*. Saldo tersebut merupakan penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang belum dilimpahkan ke RKUN.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 7A.**

D.2.1.1.1.4. Kas dalam Transito

Kas dalam Transito per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.930.665.723 dan Rp799.340.452. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.131.325.271 atau 516,84 persen dibandingkan periode akhir tahun 2022 yang didorong adanya penihilan RPKBUN Valas USD BRI (D0021) yang diterima di RKUN USD tanggal 2 Januari 2024 sejumlah USD317,473.11 atau ekuivalen Rp4.901.467.345 (kurs JISDOR 31 Desember 2023 yaitu Rp15.439), dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Kas Dalam Transito BUN	800.786.851	150.229.276
Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Jumlah	**4.930.665.723**	**799.340.452**

D.2.1.1.1.5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp197.710.858.794 dan Rp215.927.152.362, mengalami penurunan sebesar Rp18.216.293.568 atau 8,44 persen. Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri sebesar 118.552.365.738, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp27.282.699.334, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp17.135.840.164. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 7B.**

D.2.1.1.1.6. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp318.602.129.457 dan Rp28.613.691.119, mengalami peningkatan sebesar Rp289.988.438.338 atau 1.013,46 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo

uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada **Lampiran 7B.**

D.2.1.1.1.7. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.596.978.800.469 dan Rp5.332.149.928.620, mengalami kenaikan sebesar Rp16.264.828.871.849 atau 305,03 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan dan bendahara penerimaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
K/L	16.588.864.124.902	5.302.250.061.457
BUN	19.000.667.893.174	2.925.608.596.999
Penyesuaian	(13.992.553.217.607)	(2.895.708.729.836)
Jumlah	**21.596.978.800.469**	**5.332.149.928.620**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Setara Kas Lainnya	221.957.000	15.007.873.566
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	500.941.742.665	663.241.546.032
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	6.336.318.514	598.716.149
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.127.962.631.955	907.521.614.429
Kas Lainnya di BLU	955.593.582.161	754.694.539.886
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	5.254.675.000	65.477.041.559
Jumlah	**16.588.864.124.902**	**5.302.250.061.457**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp9.421.679.903.028 dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp2.543.561.704.696.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Setara kas lainnya	5.008.114.675.567	29.899.867.163
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Jumlah	**19.000.667.893.174**	**2.925.608.596.999**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp19.000.667.893.174, terdiri dari:

1) Saldo Kas Lainnya pada BA 999.00 sebesar Rp5.000.000.000.000 menunjukkan nilai *outstanding* transaksi penempatan kas Pemerintah di bank umum atau instrumen lainnya untuk jangka waktu 0 s.d. 3 bulan sesuai dengan PMK 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK 115/PMK.05/2016. Saldo Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar Rp709 yang merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya pada BA 999.08 sebesar Rp8.114.674.858 terdapat pada Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp8.114.674.857 dan Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp1.
2) Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp13.992.553.217.607 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2023.

Penyesuaian sebesar minus Rp13.992.553.217.607 merupakan eliminasi atas saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BUN karena Kas Lainnya di K/L dari Hibah disajikan pada dua entitas yaitu K/L dan BUN sehingga pada LKPP dilakukan penyesuaian.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dapat dilihat pada **Lampiran 7B.**

D.2.1.1.1.8. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.124.640.159.483 dan Rp52.624.849.776.050, atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.499.790.383.433 atau 8,55 persen, terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	854.705.264.574	804.951.616.067
BLU di Kementerian Pertahanan	553.114.867.451	850.952.935.634
BLU di Kementerian Keuangan	36.953.238.523.654	27.840.812.434.891
BLU di Kementerian Pertanian	26.032.774.492	20.467.014.941

Kas pada BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Kementerian Perindustrian	146.398.361.360	111.321.618.622
BLU di Kementerian ESDM	208.706.324.664	216.651.569.832
BLU di Kementerian Perhubungan	1.240.694.784.229	1.062.525.699.253
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	3.242.933.442.879	4.709.456.321.354
BLU di Kementerian Kesehatan	3.995.807.026.504	4.871.705.012.988
BLU di Kementerian Agama	2.216.226.841.908	2.007.474.996.785
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	30.779.421.970	99.618.258.421
BLU di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.274.407.201	529.162.644
BLU di Kementerian KUKM	1.301.700.029.797	1.229.590.027.465
BLU di Kementerian Kominfo	4.185.981.614.100	6.174.913.946.437
BLU di Kepolisian RI	1.300.989.019.945	1.541.249.562.106
BLU Kementerian Pemuda dan Olah Raga	199.654.656.112	195.473.528.479
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	654.557.041.955	874.069.587.279
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.945.830.464	3.084.143.002
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 124)	5.899.926.224	10.002.339.850
Jumlah	**57.124.640.159.483**	**52.624.849.776.050**

D.2.1.1.2. Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.479.546.335 dan Rp20.878.963.110, mengalami kenaikan sebesar Rp23.600.583.225 atau 113,04 persen. Nilai Uang Muka Rekening BUN tersebut berasal dari Rekening Khusus. Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun Uang Muka Rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Rincian Uang Muka Rekening BUN disajikan sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
ADB	5.565.010.548	2.740.298.842
IFAD	237.160.000	1.459.439.628
Bank Dunia	34.143.459.515	15.243.303.991
IDB	342.708.000	300.000.000
KFW	4.191.208.272	1.135.920.649
Jumlah	**44.479.546.335**	**20.878.963.110**

D.2.1.1.3. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp35.230.294.868.007 dan Rp26.341.869.598.933, mengalami kenaikan sebesar Rp8.888.425.269.074 atau 33,74 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, keseluruhan nilai tersebut merupakan Investasi Jangka Pendek BLU berupa deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU pada Kementerian Pertahanan	42.000.000.000	6.000.000.000
BLU pada Kementerian Keuangan	28.449.253.233.849	21.256.262.228.559
BLU pada Kementerian Pertanian	131.432.327.661	139.432.327.661
BLU pada Kementerian ESDM	68.000.000.000	40.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	39.048.823.536	95.390.180.846
BLU pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1.098.388.111.114	2.161.263.080.740
BLU pada Kementerian Kesehatan	2.622.972.371.847	2.269.851.538.282
BLU pada Kementerian Agama	240.250.000.000	248.870.242.845
BLU pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	110.950.000.000	-
BLU pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.325.000.000.000	-
BLU pada Kepolisian RI	103.000.000.000	124.800.000.000
Jumlah	**35.230.294.868.007**	**26.341.869.598.933**

D.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp29.180.110.096.058 dan Rp50.582.083.648.060 mengalami penurunan sebesar Rp21.401.973.552.002 atau 42,31 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Belanja Dibayar Dimuka	**9.638.827.128.108**	**10.644.582.758.062**
K/L	9.615.908.359.766	10.628.404.255.085
BUN	22.930.421.699	22.006.153.883
Penyesuaian	(11.653.357)	(5.827.650.906)
Uang Muka Belanja	**19.541.282.967.950**	**39.937.500.889.998**
K/L	19.541.272.967.950	39.937.490.889.998
BUN	10.000.000	10.000.000
Jumlah	**29.180.110.096.058**	**50.582.083.648.060**

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp9.638.827.128.108 terdapat pada K/L sebesar Rp9.615.908.359.766 dan BUN sebesar Rp22.930.421.699 serta penyesuaian sebesar minus Rp11.653.357. Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.587.171.821.363 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.735.209.417.057. Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Keuangan sebagian besar merupakan saldo penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit periode 2016 s.d. 2023 yang masih berada pada rekening *escrow*, sementara Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagian besar merupakan berasal dari BTS 4G pada BAKTI. Belanja Dibayar Dimuka pada BUN sebesar Rp22.930.421.699 terdapat pada SKK Migas. Penyesuaian sebesar Rp11.653.357 merupakan transaksi resiprokal utang piutang pendapatan diterima dimuka dan belanja dibayar dimuka BHP Frekuensi TVRI dan Kementerian Kominfo.

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja sebesar Rp19.541.282.967.950 terdapat pada K/L sebesar Rp19.541.272.967.950 dan BUN sebesar Rp10.000.000. Uang Muka Belanja pada K/L yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp18.001.057.781.403 yang sebagian besar merupakan Uang Muka Belanja Barang dan Modal pada Satker Baranahan Kemhan. Uang Muka Belanja pada BUN sebesar Rp10.000.000 terdapat pada SKK Migas.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.268.713.521.615 dan Rp17.562.805.658.048, mengalami penurunan sebesar Rp2.415.777.873.889 atau 13,76 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
K/L	13.606.568.766.196	14.815.354.250.537
BUN	4.303.538.793.658	4.121.830.752.438
Penyesuaian	(2.641.394.038.239)	(1.374.379.344.927)
Jumlah	**15.268.713.521.615**	**17.562.805.658.048**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada K/L per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.606.568.766.196 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp4.645.000.858.281 yang sebagian besar merupakan Pendapatan Royalti dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang, pada Kementerian Keuangan sebesar Rp4.217.358.519.197 yang sebagian besar merupakan potensi pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan oleh BPKP, dan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.440.716.706.208 yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi pada BLU BAKTI.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.303.538.793.658. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebagai berikut.

a. BA 999.01 sebesar Rp3.166.144.779.080 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp347.197.090.899 atau 12,32 persen dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp2.818.947.688.181.
b. BA 999.03 sebesar Rp22.651.238.774 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN dan UAKPA Direktorat EAS. Pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN merupakan pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp10.898.684.091 dan pada Perum Perumnas sebesar Rp3.250.000.000. Pengakuan pendapatan pada UAKPA Direktorat EAS sebesar Rp8.502.554.683 merupakan pendapatan akrual yang terkait dengan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* untuk pelaku usaha UMKM.
c. BA 999.07 sebesar Rp121.971.643.394 terdiri atas Rp52.190.709 terdapat pada Kementerian Pertanian satuan kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan koreksi atas Piutang tahun 2020 hasil koreksi Itjentan no. R.470/PW.110/G.3/12/2022 yang merupakan Lebih Bayar pada PT. Pupuk Kaltim TA 2020 untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, Kementerian PUPR satuan kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan senilai Rp306.060.315, dan Kementerian

Koperasi dan UMKM satuan kerja Deputi Bidang Usaha Mikro senilai Rp121.613.392.370.

d. BA 999.99 sebesar Rp992.771.132.410 Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS sebesar Rp2.202.433.834, SBP triwulan I Tahun 2024 (hasil usaha Panas Bumi periode IV Tahun 2023) sebesar Rp893.433.077.141, dan pengelolaan kas negara pada satker transaksi khusus sebesar Rp97.135.621.435.

Penyesuaian sebesar minus Rp2.641.394.038.239 merupakan penyesuaian atas transaksi resiprokal pengakuan utang dan piutang antara Kemenkeu BA015 dan BA-BUN terkait Subsidi Pajak DTP.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.6. Piutang

D.2.1.1.6.1. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.416.962.637.093 dan Rp114.374.519.793.761, mengalami kenaikan sebesar Rp3.042.442.843.332 atau 2,66 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp73.936.450.171.889 berasal dari nilai bruto sebesar Rp117.416.962.637.093 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.480.512.465.204.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

Piutang Perpajakan	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	73.722.552.156.555	67.687.303.620.366
Penyisihan	(39.913.599.945.722)	(39.387.637.089.433)
Nilai Neto	**33.808.952.210.833**	**28.299.666.530.933**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	43.694.410.480.538	46.687.216.173.395
Penyisihan	(3.566.912.519.482)	(3.713.646.796.914)
Nilai Neto	**40.127.497.961.056**	**42.973.569.376.481**
Jumlah Bruto*	**117.416.962.637.093**	**114.374.519.793.761**
Penyisihan Piutang Perpajakan**	(43.480.512.465.204)	(43.101.283.886.347)
Jumlah Neto	**73.936.450.171.889**	**71.273.235.907.414**

* *Selisih Rp2 pada Jumlah Bruto karena pembulatan*

***Selisih Rp6 pada Penyisihan Piutang Perpajakan karena pembulatan.*

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis piutang pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Perpajakan	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	99.090.478.059	34.550.113.974	186,80
Piutang Pajak PPH NonMigas	32.280.360.977.977	28.515.322.937.231	13,20
Piutang Pajak PPN	27.599.374.735.897	26.917.517.677.272	2,53
Piutang Pajak PPnBM	114.404.746.912	113.680.228.581	0,64
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.603.088.981.006	4.701.553.926.249	40,44
Piutang Cukai dan Bea Materai	38.979.972.933.478	42.005.349.298.953	(7,20)
Piutang Pajak Lainnya	7.205.391.912.158	7.785.902.562.752	(7,46)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.379.963.137.007	4.155.666.733.150	5,40
Piutang Bea Masuk Tindakan	155.314.734.599	144.976.315.599	7,13
Jumlah	**117.416.962.637.093**	**114.374.519.793.761**	**2,66**

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	43.579.886.450	9.173.983.864	375,04
Piutang Pajak PPH NonMigas	16.035.729.928.195	15.601.188.031.783	2,79
Piutang Pajak PPN	15.212.235.392.718	15.004.325.277.183	1,39
Piutang Pajak PPnBM	63.419.576.561	74.407.457.079	(14,77)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	2.628.118.054.686	2.514.362.843.683	4,52
Piutang Cukai dan Bea Materai	255.090.566.452	272.050.629.347	(6,23)
Piutang Pajak Lainnya	5.951.679.580.570	6.206.410.005.138	(4,10)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.290.659.479.572	3.419.365.658.270	(3,76)
Jumlah	**43.480.512.465.204**	**43.101.283.886.347**	**0,88**

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 9A dan 9B.**

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa DJP sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp53.409.264.115.175 mengalami kenaikan sebesar Rp4.629.897.114.887 dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp48.779.367.000.288. Kenaikan piutang daluwarsa DJP utamanya berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan per jenis pajak sebesar Rp6.516.047.949.234. Rincian penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan per jenis pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9C**.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*. Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak memilih opsi melakukan pembayaran terlebih dahulu nilai pajak terutang yang tidak disetujui sebelum upaya hukumnya memperoleh keputusan hukum yang bersifat *inkracht*.

D.2.1.1.6.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp346.336.409.911.621 dan Rp323.802.977.991.480, mengalami kenaikan sebesar Rp22.533.431.920.141 atau 6,96 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp93.100.650.244.185, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp346.336.409.911.621 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp253.235.759.667.436. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	104.521.092.242.348	82.479.068.140.154
Penyisihan	(52.341.563.646.681)	(57.442.861.114.751)
Nilai Neto	**52.179.528.595.667**	**25.036.207.025.403**

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	241.872.476.098.171	241.374.054.869.037
Penyisihan	(200.923.692.003.913)	(202.194.832.006.023)
Nilai Neto	**40.948.784.094.258**	**39.179.222.863.014**
Jumlah Bruto	**346.393.568.340.519**	**323.853.123.009.191**
Penyesuaian Konsolidasian LKPP	**(57.158.428.898)**	**(50.145.017.711)**
Jumlah Bruto setelah Penyesuaian	**346.336.409.911.621**	**323.802.977.991.480**
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(253.265.255.650.594)	(259.637.693.120.774)
Penyesuaian Konsolidasian LKPP	29.495.983.158	32.495.983.158
Penyisihan Piutang Bukan Pajak setelah penyesuaian	(253.235.759.667.436)	(259.605.197.137.616)
Jumlah Neto	**93.100.650.244.185**	**64.197.780.853.864**

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2023 sebesar Rp104.521.092.242.348 mengalami kenaikan sebesar Rp22.042.024.102.194 atau 26,72 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan terdapat pada Kejaksaan RI sebesar Rp55.868.029.936.849 dan Kementerian ESDM sebesar Rp35.537.641.658.922. Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebagian besar merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, piutang denda dan biaya perkara tilang verstek, dan piutang sewa rumah dinas, sedangkan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian ESDM sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari *signature* bonus dan *Firm Commitment*.

Terdapat penyesuaian berupa eliminasi Piutang Bukan Pajak sebesar Rp57.158.428.898 yang merupakan transaksi resiprokal dengan utang yang dicatat pada entitas yang dikonsolidasikan dalam LKPP. Transaksi resiprokal merupakan Piutang BHP Frekuensi Kementerian Kominfo dengan utang BHP frekuensi pada LPP TVRI. Rincian Piutang Bukan Pajak Pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang Dividen pada BA 999.03	49.577.182.163	56.554.713.538
Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	12.892.897.399.321	10.194.543.595.109
Piutang Subsidi pada BA 999.07	12.350.000.000	12.350.000.000
Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	310.101.704.547	304.815.087.684
Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	228.607.549.812.140	230.805.791.472.706
Jumlah	**241.872.476.098.171**	**241.374.054.869.037**

a. Piutang Dividen (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.577.182.163 dan Rp56.554.713.538, mengalami penurunan sebesar Rp6.977.531.375 atau 12,34 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Dividen pada BA 999.03	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Pokok Dividen	23.826.578.448	23.826.578.448
Denda	25.750.603.715	32.728.135.090
Jumlah	**49.577.182.163**	**56.554.713.538**

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Saldo Piutang Negara Bukan Pajak pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp56.554.713.538 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp32.728.135.090. Piutang tersebut berasal dari enam BUMN dan piutang tahun buku sebelum tahun 2022 (1972-2004).
2. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai sebelum TB 2022 sebesar Rp6.977.531.375 yang berasal dari PT Inhutani V, (TB 1999) sebesar Rp529.131.000, dan PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp6.448.400.375.
3. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2023 tercatat menjadi sebesar Rp49.577.182.163 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp25.750.603.715.

b. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.892.897.399.321 dan Rp10.194.543.595.109, mengalami kenaikan sebesar Rp2.698.353.804.212 atau 26,47 persen. Piutang TKD merupakan Piutang Transfer ke Daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Penurunan nilai aset terjadi karena adanya penyelesaian piutang TKD, Piutang TKD Lainnya, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima serta belum ada pengakuan Piutang TKD Diestimasi. Berdasarkan jenis akunnya, Piutang Transfer ke Daerah disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang TKD	10.498.054.168.192	8.571.663.494.352
Piutang TKD Diestimasi	2.392.654.411.852	1.616.216.532.079
Piutang TKD Lainnya	2.188.819.277	6.663.568.678
Jumlah	**12.892.897.399.321**	**10.194.543.595.109**

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)
Piutang TKD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.498.054.168.192 dan Rp8.571.663.494.352, mengalami penurunan sebesar Rp1.926.390.673.840 atau sebesar 22,47 persen. Piutang TKD terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil	6.370.424.360.396	5.130.764.211.892
DAK Non Fisik	4.103.787.260.228	3.393.625.091.684
Dana Keistimewaan DIY	23.842.547.568	47.274.190.776
Jumlah	**10.498.054.168.192**	**8.571.663.494.352**

a) Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.370.424.360.396, mengalami kenaikan sebesar Rp1.239.660.148.504 atau sebesar 24,16 persen. Kenaikan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut Piutang atas lebih bayar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.90 Tahun 2023. PMK tersebut merupakan PMK penetapan kembali atas saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023. Melalui KMK dimaksud dilakukan penyelesaian Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.960.825.244.000, sehingga sisa saldo Lebih Bayar *Audited* TA 2023 menjadi Rp6.370.424.360.396.

b) Piutang TKD pada Satker DAK Non Fisik merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.103.787.260.228, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp710.162.168.544 atau 20,93 persen dari tahun 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pengakuan piutang DAK Nonfisik.

c) Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.842.547.568, nilai tersebut menurun sebesar Rp23.431.643.208 atau 49,57 persen dari tahun 2022 dikarenakan terdapat penyelesaian piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp47.274.190.776 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2023 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2023 sebesar Rp23.842.547.568.

Rincian Piutang Transfer ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

2) Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.392.654.411.852, apabila dibandingkan dengan Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.616.216.532.079, Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp776.437.879.773 atau 48,04 persen.
3) Piutang TKD Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.188.819.277 dan Rp6.663.568.678, menurun sebesar Rp4.474.749.401 atau 67,15 persen, yang merupakan penyelesaian Piutang oleh Desa melalui pemotongan penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III TA 2023.

c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp12.350.000.000. Piutang tersebut merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih.

d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp310.101.704.547 dan Rp304.815.087.684, mengalami kenaikan sebesar Rp5.286.616.863 atau 1,73 persen. Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Kementerian Kominfo	9.097.887.689	12.262.905.762
Kementerian Keuangan	6.398.716.692	-
Kementerian Pertanian	288.901.122.353	288.901.122.353
MPP Kartu Prakerja	5.269.130.000	821.544.690
Otoritas Jasa Keuangan	-	119.223.400
SKK Migas	434.847.813	2.710.291.479
Jumlah	**310.101.704.547**	**304.815.087.684**

1) Kementerian Kominfo, merupakan kelebihan pembayaran bantuan operasional LPU Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi Ditjen PPI pada 29 Februari 2024 di mana pembayaran untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2023 masih menggunakan dasar prognosa.
2) Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Papua sebesar Rp6.398.716.692, yang merupakan piutang atas pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah akibat pelanggaran kontrak oleh PT Pos Indonesia (persero). Piutang tersebut telah disetor pada tanggal 19 Januari 2024.
3) Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang CBN	272.107.336.166	272.107.336.166
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	16.832.310.441
Dana penyegaran Benih CBN	4.700.000.000	4.700.000.000
Jasa Giro Dana CBN	(4.738.524.254)	(4.738.524.254)
Jumlah	**288.901.122.353**	**288.901.122.353**

4) Piutang Bukan Pajak pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp5.269.130.000 yang berasal dari pengembalian belanja atas realisasi implementasi pelatihan Program Kartu Prakerja.
5) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp434.847.813 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp228.607.549.812.140 dan Rp230.805.791.472.706, mengalami penurunan sebesar Rp2.198.241.660.566 atau 0,95 persen. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang pada UAPBUN TK DJPb	133.599.138.234	201.917.018.643
Piutang pada UAPBUN TK DJA	16.892.965.586.621	20.176.468.675.625
Piutang pada UAPBUN TK DJKN	211.580.985.087.285	210.427.405.778.438
Jumlah	**228.607.549.812.140**	**230.805.791.472.706**

1) Piutang Pada UAPBUN TK DJPb per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp133.599.138.234 dan Rp201.917.018.643 terdiri dari:

Piutang Pada UAPBUN TK DJPb	31 Desember 2023 (*Audited*)
Piutang Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Des 23 Asabri	15.945.924.816
Piutang IJP Rampung 2022	148.000
Piutang Piutang Jasa Giro Des 23 Asabri	217.027.706
Piutang Potongan Utang Non TGR (NonDapem Desember 2023)	314.335.894
Piutang Setoran SUP (SUP Bulan Desember dan SUP Retur Desember 2023)	4.538.955.792
Piutang SUP Retur Desember 2023 Taspen	13.622.534.947
Piutang SUP Kompensasi bulan Desember 2023 Taspen	27.740.003.593

Piutang Pada UAPBUN TK DJPb	31 Desember 2023 (*Audited*)
Piutang Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2023 Taspen	59.298.532.862
Piutang Setoran Kas Negara NonDapem dan Susulan bulan Desember 2023	1.803.720.576
Piutang Jasa Giro Desember 2023 Taspen	3.975.559.212
Kelebihan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kesehatan TW IV 23 BPJS	5.282.769.067
Kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2023 Asabri	372.704.880
Kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Triwulan IV Tahun 2023 Asabri	486.920.889
Jumlah	**133.599.138.234**

2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan piutang PNBP SDA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.892.965.586.621 dan Rp20.176.468.675.625, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS, piutang PNBP migas lainnya, dan piutang yang berasal dari kegiatan panas bumi berupa kekurangan setoran bagian pemerintah. Piutang pada UAPBUN TK DJA disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Hasil Penjualan Minyak	9.126.643.089.767	10.724.087.642.125
Hasil Penjualan Gas	2.653.801.451.359	4.543.151.240.677
Overlifting KKKS	4.362.688.151.564	3.951.734.539.222
PNBP Migas Lainnya	748.416.285.947	957.495.253.601
Kekurangan Setoran Bagian Pemerintah – Panas Bumi	1.416.607.984	-
Jumlah	**16.892.965.586.621**	**20.176.468.675.625**

3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp211.580.985.087.285 dan Rp210.427.405.778.438, dapat disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	-	-
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	211.549.299.194.630	210.404.156.919.609

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	31.685.892.655	23.248.858.829
Jumlah	**211.580.985.087.285**	**210.427.405.778.438**

a) Sewa BMN eks Pertamina
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp0. Mutasi Piutang PNBP untuk sewa BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp207.216.542.292 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNBP	Nilai
Saldo 1 PT 2023	-
Mutasi Tambah:	**207.216.542.292**
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2023	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	**(207.216.542.292)**
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2023	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2023	-

b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp211.549.299.194.630 dan Rp210.404.156.919.609. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Aset Kredit Eks BPPN	103.094.434.266.065	100.403.046.368.539
Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	98.650.243.861.984	100.060.644.793.342
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	9.804.621.066.581	9.940.465.757.728
Jumlah	**211.549.299.194.630**	**210.404.156.919.609**

(1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp103.094.434.266.065 dan Rp100.403.046.368.539. Rincian Aset Kredit Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

Aset Kredit Eks BPPN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	43.279.078.895.965	37.947.642.314.451

Aset Kredit Eks BPPN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	34.016.836.940.477	30.470.191.881.578
Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	23.138.424.009.605	29.321.077.942.229
Aset Kredit ATK Lainnya	2.660.094.420.018	2.664.134.230.281
Jumlah	**103.094.434.266.065**	**100.403.046.368.539**

Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 13A.**

(2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.650.243.861.984 dan Rp100.060.644.793.342. Nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) berasal dari hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN. Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebagai berikut.

Aset Kredit Eks PT PPA	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	96.097.715.704.311	96.752.034.799.881
Aset kredit yang masih dikelola DJKN	2.552.528.157.673	3.308.609.993.461
Jumlah	**98.650.243.861.984**	**100.060.644.793.342**

Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 13B.**

(3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.804.621.066.581 dan Rp9.940.465.757.727. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi disajikan sebagai berikut.

Piutang Eks BDL	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Eks Dana Talangan	7.563.499.414.004	7.679.238.031.883
Eks Dana Penjaminan	2.241.121.652.577	2.261.227.725.844
Jumlah	**9.804.621.066.581**	**9.940.465.757.727**

Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

c) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS
Rincian Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.685.892.655 dan Rp23.248.858.829 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode satu tahun. Rincian Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS	**Pihak Ketiga**	**Jumlah Per 31 Desember 2023**	
		USD	**Rp**
Sewa pada KKKS - *Job* Pertamina Petrochina *East* Java*	PT Pertamina (Persero)	1,413,347	21.820.658.929
Sewa pada KKKS - *Job* Pertamina Petrochina *East* Java*	PT Pertamina (Persero)	68,393	1.055.911.808
Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cab. Duri	-	284.274.916
Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam	-	1.999.695.000
Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara	-	6.379.770.000
Jumlah			**31.685.892.655**

** Kurs konversi mata uang sesuai JISDOR 31 Desember 2023 (Rp15.439)*

D.2.1.1.6.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.303.880.875 dan Rp5.981.196.227, mengalami kenaikan sebesar Rp322.684.648 atau 5,39 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.763.508.749 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.303.880.875 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.540.372.126.

D.2.1.1.6.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp51.329.053.281 dan Rp165.927.835.826, mengalami penurunan sebesar Rp114.598.782.545 atau 69,07 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp14.748.386.095 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp51.329.053.281 dikurangi penyisihan sebesar Rp36.580.667.186.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

D.2.1.1.6.5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp20.910.716.095.280 dan Rp23.717.712.129.347, mengalami penurunan sebesar Rp2.806.996.034.067 atau 11,84 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp7.996.390.616.822 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp20.910.716.095.280 dikurangi penyisihan sebesar Rp12.914.325.478.458.

Rincian Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.335.896.343.702	13.243.361.172.791
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	8.140.563.689.625	10.028.553.279.479
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	434.256.061.953	445.797.677.077
Jumlah Bruto	**20.910.716.095.280**	**23.717.712.129.347**
Penyisihan	(12.914.325.478.458)	(13.005.909.661.729)
Jumlah Neto	**7.996.390.616.822**	**10.711.802.467.618**

D.2.1.1.6.6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.658.986.809.661 dan Rp7.851.145.991.883, mengalami penurunan sebesar Rp192.159.182.222 atau 2,45 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp364.425.724.493 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.658.986.809.661 dikurangi penyisihan sebesar Rp7.294.561.085.168.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya	2.724.239.754.924	2.872.754.606.409
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.748.999.426.255	4.796.061.859.846
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	185.747.628.482	182.329.525.628
Jumlah Bruto	**7.658.986.809.661**	**7.851.145.991.883**
Penyisihan	(7.294.561.085.168)	(7.484.625.593.099)
Jumlah Neto	**364.425.724.493**	**366.520.398.784**

D.2.1.1.6.7. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.666.487.830.436 dan Rp4.855.272.384.332, mengalami kenaikan sebesar Rp811.215.446.104 atau 16,71 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU terdiri atas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.367.757.116.083 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.666.487.830.436 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.298.730.714.353.
Rincian Bagian Lancar Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.063.525.938.532	1.171.387.187.151
BLU di Kementerian Pertahanan	330.537.313.885	124.885.353.272
BLU di Kementerian Keuangan	114.864.668.504	114.561.349.822
BLU di Kementerian Pertanian	586.350.000	372.661.858
BLU di Kementerian Perindustrian	2.736.153.860	5.539.198.050
BLU di Kementerian ESDM	95.727.230.868	73.951.012.604
BLU di Kementerian Perhubungan	76.386.459.075	43.561.177.292
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	223.868.946.781	229.957.810.576
BLU di Kementerian Kesehatan	2.085.137.875.656	1.507.924.379.320
BLU di Kementerian Agama	4.554.383.201	4.395.494.128
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	28.745.692.709	-
BLU di Kementerian KUKM	214.417.391.906	213.456.228.653
BLU di Kementerian Kominfo	237.141.534.883	228.763.636.859
BLU di Kepolisian RI	262.468.671.130	174.617.535.317
BLU di BPKPBPB Batam	531.837.819.441	557.781.931.042

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	25.281.088.002	17.718.852.085
Eliminasi Konsolidasi LKPP	(71.300.995.050)	(34.558.860.183)
Jumlah Bruto	**5.226.516.523.383**	**4.434.314.947.846**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.233.577.705.038)	(1.137.256.783.105)
Jumlah Neto	**3.992.938.818.345**	**3.297.058.164.741**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	6.636.067.689	5.929.828.602
BLU di Kementerian ESDM	43.150.000	147.500.000
BLU di Kementerian Perhubungan	29.648.497.746	18.583.808.600
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	8.452.439.763	13.277.178.016
BLU di Kementerian Kesehatan	27.645.178.866	26.377.029.961
BLU di Kementerian Agama	65.179.685.494	44.039.161.966
BLU di Kementerian Perikanan dan Kelautan	35.235.000	5.821.918
BLU di Kementerian Kominfo	280.467.609.890	296.408.617.328
BLU di Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.452.510	1.500.000
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	21.298.800.000	15.623.800.000
Jumlah Bruto	**439.971.307.053**	**420.957.436.486**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(65.153.009.315)	(42.174.940.782)
Jumlah Neto	**374.818.297.738**	**378.782.495.704**

D.2.1.1.6.8. Piutang PFK

Piutang PFK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp109.652.841 dan Rp22.005.766, mengalami peningkatan sebesar Rp87.647.075 atau 398,29 persen. Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu.
Rincian Piutang PFK disajikan sebagai berikut.

Piutang PFK	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (118122)	109.652.841	22.005.766
Jumlah	**109.652.841**	**22.005.766**

D.2.1.1.6.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp318.262.010.449.931 dan Rp324.433.224.802.061. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Piutang Pajak*)	43.480.512.465.204	43.101.283.886.347
Piutang Bukan Pajak	253.265.255.650.594	259.637.693.120.774
Bagian Lancar TPA	1.540.372.126	1.545.001.606
Bagian Lancar TP/TGR	36.580.667.186	55.231.797.777
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.914.325.478.458	13.005.909.661.729
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.294.561.085.168	7.484.625.593.099
Piutang dari Kegiatan BLU	1.298.730.714.353	1.179.431.723.887
Penyesuaian konsolidasi LKPP	(29.495.983.158)	(32.495.983.158)
Jumlah	**318.262.010.449.931**	**324.433.224.802.061**

**) Selisih Rp6 pada Penyisihan Piutang Pajak karena pembulatan*

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.480.512.465.204 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9A.**
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.265.255.650.594 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp52.341.563.646.681 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp200.923.692.003.913. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 10.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.540.372.126, merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, dan LPP RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.580.667.186. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.914.325.478.458.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.294.561.085.168.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.298.730.714.353 dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	102.858.537.810	94.994.823.758
BLU di Kementerian Pertahanan	15.080.082.454	4.453.365.794
BLU di Kementerian Keuangan	10.166.725.264	9.171.417.358
BLU di Kementerian Pertanian	2.931.750	1.863.309
BLU di Kementerian Perindustrian	504.312.915	506.655.135
BLU di Kementerian ESDM	34.469.703.369	20.399.040.197
BLU di Kementerian Perhubungan	26.862.253.971	19.480.457.256
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	69.537.473.423	71.307.562.487
BLU di Kementerian Kesehatan	411.974.216.226	430.528.504.460
BLU di Kementerian Agama	3.259.827.953	3.101.393.520
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	20.458.531.818	29.110
BLU di Kementerian KUKM	206.265.587.619	206.755.452.127
BLU di Kementerian Kominfo	200.545.063.096	143.338.147.643
BLU di Kepolisian RI	1.556.984.233	1.055.833.445
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	21.298.800.000	78.119.000
BLU di BPKPBPB Batam	168.856.321.245	167.594.446.680
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	5.033.361.207	6.664.612.608
Jumlah	**1.298.730.714.353**	**1.179.431.723.887**

8. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp29.495.983.158 adalah eliminasi penyisihan piutang BHP Frekuensi Kementerian Kominfo yang merupakan transaksi resiprokal antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan LPP TVRI.

D.2.1.1.7. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp204.183.149.868.940 dan Rp190.034.054.918.418, mengalami kenaikan sebesar Rp14.149.094.950.522 atau 7,45 persen.
Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Persediaan di K/L	204.181.933.423.550	190.032.974.402.855
Persediaan di BUN	1.216.445.390	1.080.515.563
Jumlah	**204.183.149.868.940**	**190.034.054.918.418**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga
   Persediaan di K/L per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.181.933.423.550. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp89.558.062.373.136, Kementerian Pertahanan sebesar Rp73.593.603.469.350, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp11.199.165.613.987. Rincian Nilai Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 15.**
2. Persediaan di Bendahara Umum Negara
   Persediaan di BUN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.216.445.390 dan Rp1.080.515.563, mengalami kenaikan sebesar Rp135.929.827 atau 12,58 persen. Persediaan yang terdapat pada SKK Migas tersebut merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Persediaan di BUN	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Barang Konsumsi	1.202.342.988	1.065.199.951
Bahan Untuk Pemeliharaan	8.720.208	6.739.520
Persediaan Lainnya	5.382.194	8.576.092
Jumlah	**1.216.445.390**	**1.080.515.563**

D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.077.230.147.021.115 dan Rp3.759.590.948.039.254. Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**	**Kenaikan / Penurunan (%)**
Investasi Non Permanen	297.456.952.607.978	252.610.579.139.934	17,75
Investasi Permanen	3.779.773.194.413.137	3.506.980.368.899.320	7,78
Jumlah	**4.077.230.147.021.115**	**3.759.590.948.039.254**	**8,45**

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp317.639.198.981.861 atau 8,45 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp44.846.373.468.044 atau 17,75 persen sedangkan Investasi Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp272.792.825.513.817 atau 7,78 persen.

D.2.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.553.196.920.303 dan Rp18.311.462.826.420, mengalami kenaikan sebesar Rp1.241.734.093.883 atau 6,78 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	5.468.632.719.703	5.451.564.836.079
Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT)	3.890.340.379.540	4.249.993.794.927
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	8.019.775.521.545	6.640.289.050.977
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	874.548.562.835	637.009.941.741
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI)	1.283.355.073.501	1.314.717.940.318
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	16.544.663.179	17.887.262.378
Jumlah	**19.553.196.920.303**	**18.311.462.826.420**

1. Dana Bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.468.632.719.703 dan Rp5.451.564.836.079. Dana Bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	5.121.364.329.200
NRB Dana Bergulir BA 044 s.d 31 Desember 2023	347.268.390.503
Saldo	**5.468.632.719.703**

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.890.340.379.540 dan Rp4.249.993.794.927 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol telah disepakati antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan

dibayar kembali oleh BUJT kepada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.
Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	142.058.292.184	177.572.865.231
PT Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	173.730.172.460	177.730.172.460
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	96.465.054.626	113.488.299.560
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	176.007.138.972	216.007.138.972
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	313.993.673.322	399.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	691.921.936.197	694.700.739.153
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran	750.225.629.202	765.536.356.328
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	548.617.667.026	645.432.549.442
PT Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	525.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways* / Cibitung – Cilincing	285.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung *Tollway* / Cimanggis – Cibitung	168.494.978.731	173.706.163.639
Jumlah	**3.890.340.379.540**	**4.249.993.794.927**

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.019.775.521.545 dan Rp6.640.289.050.977. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.379.486.470.568 atau 20,77 persen karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada penyalur/masyarakat.
4. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp874.548.562.835 dan Rp637.009.941.741. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

5. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.283.355.073.501 dan Rp1.314.717.940.318, mengalami penurunan sebesar Rp31.362.866.817 atau 2,39 persen. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan belum disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPDLH-Dit SMI.
6. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.544.663.179 dan Rp17.887.262.378, mengalami penurunan sebesar Rp1.342.599.199 atau 7,51 persen. Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) BPDLH sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPDLH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPDLH.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.562.930.032.200 dan Rp4.813.478.526.898, mengalami penurunan sebesar Rp3.250.548.494.698 atau 67,53 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BLU LPDB KUMKM	788.878.222.350	665.876.447.866
Sekretariat BPJT	404.676.785.693	3.895.630.214.638
BLU LPMUKP	67.200.566.340	51.622.093.842
BLU BPDLH (Dit. SMI)	245.257.000.363	149.261.062.919
BLU PIP	40.372.794.275	33.201.445.255
BLU BPDLH	16.544.663.179	17.887.262.378
Jumlah	**1.562.930.032.200**	**4.813.478.526.898**

1. BLU LPDB KUMKM
   Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp788.878.222.350 dan Rp665.876.447.866. Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022	665.876.447.866
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2023	123.001.774.484
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2023	**788.878.222.350**

2. Sekretariat BPJT
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp404.676.785.693 dan Rp3.895.630.214.638. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

BUJT/ Ruas Jalan Tol	Nilai
PT Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	14.205.829.218
PT Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	17.373.017.246
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	9.646.505.463
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	17.600.713.897
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	31.399.367.332
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	69.192.193.620
PT Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper – Kunciran	75.022.562.920
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	54.861.766.703
PT Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	52.544.821.638
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung – Cilincing	28.599.678.962
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis – Cibitung	16.849.497.873
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023	**404.676.785.693**

3. BLU LPMUKP
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUKP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp67.200.566.340 dan Rp51.622.093.842, meningkat sebesar Rp15.578.472.498 atau 30,18 persen. Peningkatan nilai tersebut berasal dari nilai penyisihan piutang pokok dari hasil akumulasi *outstanding* pokok senilai Rp874.548.562.835 dikurang dengan nilai penyisihan jaminan sesuai kualitas piutang setiap debitur.
4. BLU BPDLH (Dit. SMI)
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU BPDLH per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp245.257.000.363 dan Rp149.261.062.919. BPDLH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

Kualitas Piutang	*Outstanding*			Perhitungan Penyisihan	
	Outstsanding awal	Pengurang dari nilai jaminan	*Outstanding* setelah penyesuaian	Tarif %	Penyisihan Akhir
Lancar	806.120.650.501	93.565.658.635	712.554.991.866	0,50	3.562.774.959
Kurang Lancar	23.597.634.008	456.000.000	23.141.634.008	10	2.314.163.401
Diragukan	107.860.769.256	116.872.403.670	(9.011.634.414)	50	(4.505.817.207)
Macet	345.798.813.323	101.912.934.113	243.885.879.210	100	243.885.879.210
Lunas	(31.295.137)	0	(31.295.137)		0
Jumlah	**1.283.346.571.951**	**312.806.996.418**	**970.539.575.533**		**245.257.000.363**

5. BLU PIP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp40.372.794.275 dan Rp33.201.445.255. BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan. Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut.

Kolektibilitas Piutang	Nilai *Outstanding*	Tarif Penyisihan (%)	Nominal Penyisihan
Lancar	8.016.892.188.211	0,50	40.084.460.941
Kurang Lancar	2.883.333.334	10	288.333.333
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	**8.019.775.521.545**		**40.372.794.274**

6. BLU BPDLH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPDLH per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.544.663.179 dan Rp17.887.262.378, nilai tersebut berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Nilai
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2022	17.887.262.378
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2023 yang diakui sebagai Pokok	1.342.599.199
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2023	**16.544.663.179**
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2023	**(16.544.663.179)**

D.2.1.2.1.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp280.412.334.935.034 dan Rp239.872.791.752.439, mengalami kenaikan sebesar Rp40.539.543.182.595 atau 16,90 persen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	9.912.499.999.411	9.302.480.860.411
Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.731	278.424.972.767
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)	240.529.752.919.543	199.619.616.324.242
Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	8.000.000.000.000	6.000.000.000.000
Pinjaman PEN Daerah	21.691.657.043.349	24.672.269.595.019
Jumlah	**280.412.334.935.034**	**239.872.791.752.439**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.912.499.999.411 dan Rp9.302.480.860.411. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam tingkat nasional. Rincian investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.
   a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.062.500.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19;
   b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia;
   c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna;
   d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp2.952.480.860.411. Saat ini sudah dilakukan pencairan tahap akhir sebesar Rp1.047.519.139.000, sehingga total Investasi Non Permanen pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.999.999.999.411.
2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp278.424.972.731 dan Rp278.424.972.767 dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	**31 Desember 2023 *(Audited)***	**31 Desember 2022 *(Audited)***
Kementerian Perindustrian	4.089.232.145	4.089.232.181
PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	274.335.740.586
Jumlah	**278.424.972.731**	**278.424.972.767**

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.145. Terdapat penurunan nilai Investasi Nonpermanen pada Kemenperin dikarenakan adanya koreksi atas kelebihan pengakuan sebesar Rp36. Nilai tersebut merupakan akumulasi sisa saldo pinjaman di bawah Rp50 dan saldo pinjaman bernilai negatif yang sudah tidak tercatat oleh Lembaga Pengelola Program (PT PNM dan BSM).

b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2022 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

3. Investasi Jangka Panjang nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2023 sebesar Rp240.529.752.919.543 terdiri dari:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LPDP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.037.133.919.543 dan Rp119.844.502.324.242. Terjadi kenaikan Rp20.192.631.595.301 atau 16,85 persen, disebabkan adanya pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP, dan pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara. Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
1	Deposito	34.292.400.229.705	35.806.595.572.854
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	103.583.483.689.838	81.956.506.751.388
	b. Obligasi Korporasi – HTM	2.161.250.000.000	2.081.400.000.000
	Jumlah	**140.037.133.919.543**	**119.844.502.324.242**

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.255.114.000.000 terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera yang berasal dari Rekening Investasi BUN pada tahun 2022 sebesar Rp19.100.000.000.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp19.480.000.000.000.

c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BPDPKS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.237.505.000.000. Investasi non permanen ini merupakan hasil reklasifikasi dari kas setara kas BLU berdasarkan Kebijakan Pencatatan dan Penyajian Investasi Surat Berharga Negara pada BPDPKS. Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut berasal dari penggunaan Kas BLU BPDPKS untuk perolehan surat utang negara (SUN) dengan kategori *hold-to-maturity* (HTM) yang diniatkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo selama lebih dari 12 bulan sejak perolehan.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.000.000.000.000 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp2.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan Maret 2023.
5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.691.657.043.349 dan Rp24.672.269.595.019, mengalami penurunan sebesar Rp2.980.612.551.670 atau 12,08 persen. Penurunan nilai tersebut merupakan pengembalian Pokok Nilai Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2023. Investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang ditransfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pada Tahun Anggaran 2023 ini tidak ada pencairan pinjaman PEN.

D.2.1.2.1.4. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp945.649.215.159 dan Rp760.196.912.027, mengalami kenaikan sebesar Rp185.452.303.132 atau 24,40 persen. Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), IP PEN, LDKPI, dan BPDPKS.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

Unit Pengelola	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.145	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	895.133.401.269	726.513.235.359

Unit Pengelola	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
IP PEN	35.312.499.997	32.262.404.302
LDKPI	(9.957.108.728)	(2.667.959.815)
BPDPKS	21.071.190.476	-
Jumlah	**945.649.215.159**	**760.196.912.027**

D.2.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.093.225.298.186.938 dan Rp2.909.868.558.921.828, mengalami kenaikan sebesar Rp183.356.739.265.110 atau 6,30 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya. Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

Investasi PMP	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
1. Persero	2.890.480.531.829.837	2.710.666.467.617.671
2. Perum	36.912.745.897.463	33.701.371.856.008
3. Lembaga Keuangan Internasional	32.347.909.903.362	30.842.638.442.071
4. Badan Usaha Lainnya	133.484.110.556.276	134.658.081.006.078
Jumlah	**3.093.225.298.186.938**	**2.909.868.558.921.828**

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.890.480.531.829.837 dan Rp2.710.666.467.617.671. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero lebih besar dari 50 persen, sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.
   a. PMP pada Persero di Bawah Pembinaan Kementerian BUMN
      Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero di bawah pembinaan Kementerian BUMN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.809.922.466.950.580 dan Rp2.634.727.723.533.045, mengalami peningkatan sebesar Rp175.194.743.417.535 atau 6,65 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dikarenakan adanya penambahan modal Pemerintah.
      Pada tahun 2023, terdapat koreksi atas transaksi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang mempengaruhi nilai investasi pada persero Kementerian BUMN, yaitu koreksi mengurangi nilai investasi yang disebabkan adanya pengakuan aset pada Perusahaan Negara berdasarkan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PMPP sebelum diterbitkan BAST yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar

Rp388.564.810.000. Sesuai ketentuan pada PMK 174 Tahun 2023, perolehan dan/atau penambahan Investasi PMPP secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pencatatannya pada saat ditetapkan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Sehingga atas transaksi tersebut, nilai PMPP sebesar Rp388.564.810.000 harus dikeluarkan dari ILKPN.
Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan, tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah. PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero lebih dari sama dengan 50 persen, sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 16A.**

b. PMP pada BUMN di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan
PMP pada Persero di bawah pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp80.558.064.879.257 dan Rp75.938.744.084.626, mengalami peningkatan sebesar Rp4.619.320.794.631 atau 6,08 persen. Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal BUMN atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.
Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	18.231.142.000.000	16.320.507.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	42.261.465.973.664	40.547.733.124.174
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	15.962.800.178.000	15.153.468.912.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	4.102.656.727.593	3.917.035.048.452
PT Bina Karya	100%	-	-
Jumlah		**80.558.064.879.257**	**75.938.744.084.626**

Nilai Ekuitas Bersih PT Bina Karya bernilai negatif sehingga nilai PMP disajikan sebesar Rp0 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 174 tahun 2023.
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 17B.**

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.912.745.897.463 dan Rp33.701.371.856.008, mengalami peningkatan sebesar Rp3.211.374.041.455 atau 9,53 persen. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas.
   Pada Tahun 2023, terdapat koreksi atas transaksi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang mempengaruhi nilai investasi pada perum Kementerian BUMN yang disebabkan adanya pengakuan aset pada Perusahaan Negara berdasarkan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PMPP sebelum diterbitkan BAST yaitu Perum LPPNI/Airnav sebesar Rp892.009.996.472. Sesuai ketentuan pada PMK 174 Tahun 2023, perolehan dan/atau penambahan Investasi PMPP secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pencatatannya pada saat ditetapkan BAST atau dokumen yang dipersamakan, sehingga atas transaksi tersebut nilai PMPP sebesar Rp892.009.996.472 harus dikeluarkan dari ILKPN.
   Rincian PMP pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 16A**.
3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada LKI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp32.347.909.903.362 dan Rp30.842.638.442.071, mengalami peningkatan sebesar Rp1.505.271.461.291 atau 4,88 persen.
   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan oleh adanya penambahan investasi pemerintah Indonesia pada 6 LKI, yaitu *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *International Development Association* (IDA), *Islamic Development Bank* (IsDB), *International Finance Corporation* (IFC), *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) senilai Rp1.559.632.528.929; Selisih lebih hasil konfirmasi senilai Rp169.063.304.338 berasal dari IBRD, IDA, dan IsDB; dan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi senilai Rp223.424.371.977.
   Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 18.**
4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp133.484.110.556.276 dan Rp134.658.081.006.078, mengalami penurunan sebesar Rp1.173.970.449.802 atau sebesar 0,87 persen.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya *)	125.073.797.670.565	126.412.765.043.554
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	625.792.238	614.509.198

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	1.737.793.416.650	1.776.283.441.533
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri **)	1.914.436.000.000	1.933.408.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.794.889.273.282	2.740.175.360.701
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.962.568.403.541	1.794.834.651.092
Jumlah	**133.484.110.556.276**	**134.658.081.006.078**

** Rincian Penyertaan pada Badan Usaha lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 17B.***
*** Rincian Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 18.***

D.2.1.2.2.2. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.053.004.500 dan Rp8.958.055.146, mengalami penurunan sebesar Rp905.050.646 atau 10,10 persen. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.053.004.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya; dan
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B sebesar Rp1.415.810.000. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82 persen menjadi 22,82 persen.

D.2.1.2.2.3. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp686.539.843.221.699 dan Rp597.102.851.922.346, mengalami kenaikan sebesar Rp89.436.991.299.353 atau 14,98 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. Bank Indonesia (BI)	401.109.298.000.000	348.428.929.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	211.972.301.807.000	186.024.447.070.000
3. PMP Lain-lain	73.458.243.414.699	62.649.475.852.346
Jumlah	**686.539.843.221.699**	**597.102.851.922.346**

1. Penyertaan pada BI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp401.109.298.000.000 dan Rp348.428.929.000.000. Modal BI dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal BI merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada **Lampiran 20A.**
2. Penyertaan pada LPS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp211.972.301.807.000 dan Rp186.024.447.070.000. Modal LPS dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal LPS merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 20A.**
3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp73.458.243.414.699 dan Rp62.649.475.852.346.

PMN Lain-lain	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.910.480.548.431	2.795.117.983.603
Universitas Airlangga	3.386.481.519.574	3.379.522.194.212
Institut Teknologi Bandung	2.137.070.933.465	2.284.725.176.268
Universitas Indonesia	4.791.021.213.806	4.598.356.448.112
Universitas Gajah Mada	4.459.932.986.932	4.432.725.547.821
Universitas Pendidikan Indonesia***	1.142.149.933.752	1.052.744.544.568
Universitas Sumatera Utara	1.898.360.166.970	1.891.943.149.520
Universitas Padjajaran	1.346.990.132.123	1.285.257.997.803
Universitas Diponegoro	4.086.012.209.150	3.651.496.953.823
Universitas Hassanudin	2.492.172.787.826	2.436.270.624.650
Institut Teknologi Sepuluh November	1.879.170.650.603	1.660.405.319.649
Universitas Negeri Sebelas Maret	1.706.907.381.088	1.686.700.442.024
Universitas Negeri Malang	1.954.637.430.081	1.881.508.119.086
Universitas Andalas	1.278.810.808.160	1.241.583.274.047
Universitas Brawijaya	3.610.213.266.894	3.529.459.226.043
Universitas Negeri Padang***	1.358.228.340.297	1.266.801.389.980

PMN Lain-lain	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Universitas Syah Kuala***	1.528.961.186.361	-
Universitas Terbuka***	3.675.028.228.668	-
Universitas Negeri Surabaya	1.765.447.318.340	-
Universitas Negeri Yogyakarta***	1.452.469.064.422	-
Universitas Negeri Semarang***	1.868.130.629.320	-
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.289.025.406.713	10.753.648.947.992
BPJS Ketenagakerjaan	12.440.541.271.726	12.821.208.513.150
Jumlah	**73.458.243.414.702****	**62.649.475.852.351***

**Selisih Rp5 karena pembulatan*

***Selisih Rp4 karena pembulatan*

****Menggunakan angka LK Semester II 2023*

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN 999.03. Per 31 Desember 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 21 PTNBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP. Sementara itu, terdapat satu PTNBH, yakni PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, yang belum ditetapkan kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan dikarenakan masih menunggu penyelesaian proses hibah dari Kementerian Agama kepada PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan di antaranya adalah modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Nilai investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.289.025.406.713 dan Rp10.753.648.947.992. Sedangkan nilai investasi pada BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.440.541.271.726 dan Rp12.821.208.513.150.

D.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.364.120.669.249.853 dan Rp7.973.473.978.562.413. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.964.294.021.049.510 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.364.120.669.249.853 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.399.826.648.200.343. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	Kenaikan/ (Penurunan) %
Tanah	4.428.281.859.414.984	4.417.293.824.468.955	**0,25**
Peralatan dan Mesin	933.675.927.241.240	860.530.886.280.854	**8,50**
Gedung dan Bangunan	474.213.237.924.935	448.605.823.943.973	**5,71**
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.138.237.638.193.193	1.077.469.779.946.814	**5,64**
Aset Tetap Lainnya	54.932.081.546.750	58.291.354.789.790	**(5,76)**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	246.569.189.414.353	160.222.980.059.018	**53,89**
Aset Konsesi Jasa	1.088.210.735.514.398	951.059.329.073.009	**14,42**
Jumlah Bruto	**8.364.120.669.249.853**	**7.973.473.978.562.413**	**4,90**
Akum Penyusutan Aset Tetap	(1.399.826.648.200.343)	(1.243.587.836.463.566)	12,56
Jumlah Neto	**6.964.294.021.049.510**	**6.729.886.142.098.847**	**3,48**

Nilai Aset Tetap (Bruto) per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp390.646.690.687.440 atau 3,48 persen. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp234.407.878.950.663 atau 4,90 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari penyajian Aset Konsesi Jasa pada Tahun 2022.

D.2.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.428.281.859.414.984 dan Rp4.417.293.824.468.955. Nilai Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp10.988.034.946.029 atau sebesar 0,25 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Kenaikan nilai tanah tersebut antara lain disebabkan oleh transaksi pencatatan saldo tanah hasil reklamasi KSOP Patimban pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.290.154.787.786, transaksi penilaian kembali tanah bangunan kantor pemerintahan KBRI

Bangkok pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp3.114.537.355.000, dan transaksi transfer masuk tanah bangunan kantor pemerintahan dari Kementerian Keuangan pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.156.518.772.000.

Nilai Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.452.382.787.393.791, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp768.948.909.564.986, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp586.178.916.553.093, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp364.155.467.675.559.

Pada penyesuaian konsolidasi LKPP terdapat koreksi kurang nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp225.093.337.470 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Badan Pusat Statistik sebesar Rp104.278.709.000;
2. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan dengan Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000.
3. Pencatatan ganda oleh Kementerian Perhubungan yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp26.177.969.000;
4. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp11.675.220.000.
5. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri sebesar Rp139.470;
6. Pencatatan ganda oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.597.110.000; dan
7. Pencatatan ganda oleh Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp39.104.315.000.

Sesuai dengan LHP Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 masih terdapat dua NUP yang terindikasi ganda dalam proses penelusuran pemerintah yaitu aset tanah di Jalan Medan Belawan (Kemenkominfo dan Kemen PUPR) dan aset tanah di Jl. Mangga Parepare (Kemenhan dan Kemenkeu).

Rincian Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 21A**.

D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp933.675.927.241.240 dan Rp860.530.886.280.854. Nilai Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp73.145.040.960.386 atau 8,5 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai buku (neto) Peralatan dan Mesin sebesar Rp284.398.180.713.391, berasal dari nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp933.675.927.241.240 dikurangi Akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp649.277.746.527.849.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut antara lain disebabkan oleh transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP pada Kepolisian RI sebesar Rp21.980.783.074.421, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.867.069.426.545 pada Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.519.436.405.000 dan pada Kejaksaan RI sebesar Rp6.046.758.250.613.

Nilai Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp369.264.631.619.124, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp208.773.759.382.777, Kementerian Perhubungan sebesar Rp59.223.639.749.490, Kementerian Kesehatan sebesar Rp34.303.947.135.878, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp29.683.014.854.455.

Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 21C**.

D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.213.237.924.935 dan Rp448.605.823.943.973. Nilai Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp25.607.413.980.962 atau 5,71 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022.

Nilai Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp102.479.945.092.631, Kementerian Agama sebesar Rp50.089.256.199.962, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp46.570.326.571.079, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp43.298.574.520.466, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp38.165.346.694.511.

Nilai buku (neto) Gedung dan Bangunan sebesar Rp379.629.320.573.995, berasal dari nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp474.213.237.924.935 dikurangi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.583.917.350.940.

Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 21D.**

D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.138.237.638.193.193 dan Rp1.077.469.779.946.814. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp60.767.858.246.379 atau 5,64 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp901.217.936.547.027, Kementerian Perhubungan sebesar Rp182.512.074.216.060, Kementerian Pertahanan sebesar Rp17.379.629.795.819, BP Batam sebesar Rp11.200.226.101.218 dan Kementerian ESDM sebesar Rp6.213.823.146.999.

Nilai buku (neto) Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp583.439.319.069.794, berasal dari nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.138.237.638.193.193 dikurangi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp554.798.319.123.399.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 21E.**

D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp54.932.081.546.750 dan Rp58.291.354.789.790. Nilai Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.359.273.243.040 atau 5,76 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp34.988.035.454.540, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp6.655.088.961.686, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.214.802.904.770, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.862.932.997.823, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.812.214.253.613.

Nilai buku (neto) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp34.105.985.612.561, berasal dari nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.932.081.546.750 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.826.095.934.189.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 21F.**

D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp246.569.189.414.353 dan Rp160.222.980.059.018. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp86.346.209.355.335 atau 53,89 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp116.016.269.695.598, Kementerian Pertahanan Rp61.167.102.615.352, Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.508.820.592.972, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp8.300.137.812.323, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.806.355.802.389.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 21G.**

D.2.1.3.7. Aset Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.088.210.735.514.398 dan Rp951.059.329.073.009. Nilai Aset Konsesi Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp137.151.406.441.389 atau 14,42 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: (a) disediakan oleh mitra, yang: (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau (b) disediakan

oleh pemberi konsesi, yang: (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	438.166.750.223.301	399.167.108.418.480
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	513.841.931.878.479	413.405.687.512.560
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	136.202.053.412.618	138.486.533.141.969
Jumlah Bruto	**1.088.210.735.514.398**	**951.059.329.073.009**
Akum Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(80.340.569.263.966)	(57.322.310.734.895)
Jumlah Neto	**1.007.870.166.250.432**	**893.737.018.338.114**

1. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar Rp438.166.750.223.301 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp416.572.222.848.512 berupa BMN yang dipartisipasikan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Kementerian Perhubungan sebesar Rp17.211.112.087.289 berupa BMN yang dipartisipasikan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan pelabuhan dan BP Batam sebesar Rp4.383.415.287.500.
2. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp513.841.931.878.479 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp368.546.951.275.087, Kementerian Perhubungan Rp137.667.216.285.172, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.294.665.116.449 berupa jaringan serat optik Palapa Ring, dan BP Batam sebesar Rp333.099.201.771.
3. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp136.202.053.412.618 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp103.323.310.207.095, Kementerian Perhubungan sebesar Rp26.457.987.146.598, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.420.756.058.925 berupa jaringan Satelit Indonesia Raya (SATRIA)-1.

Rincian Aset Konsesi Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 21H**.

D.2.1.3.8. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.399.826.648.200.343 dan Rp1.243.587.836.463.566. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp156.238.811.736.777 atau 12,56 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Rincian Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	649.277.746.527.849	592.447.308.786.998
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.583.917.350.940	81.278.115.625.592
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	554.798.319.123.399	489.591.550.585.961
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20.826.095.934.189	22.948.550.730.120
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	80.340.569.263.966	57.322.310.734.895
Jumlah	**1.399.826.648.200.343**	**1.243.587.836.463.566**

D.2.1.4. Properti Investasi

D.2.1.4.1. Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp160.506.675.838.552 dan Rp93.074.388.721.774. Nilai Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp67.432.287.116.778 atau 72,45 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Aset Properti Investasi sebagai berikut.

Properti Investasi	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
1. Pada K/L	72.377.458.373.964	7.870.108.560.906
2. Pada BUN	88.129.217.464.588	85.204.280.160.868
Jumlah Bruto	**160.506.675.838.552**	**93.074.388.721.774**
Akumulasi Penyusutan	**(56.132.925.175.972)**	**(54.262.412.167.063)**
1. Pada K/L	(339.259.823.801)	(120.865.312.060)
2. Pada BUN	(55.793.665.352.171)	(54.141.546.855.003)
Jumlah Neto	**104.373.750.662.580**	**38.811.976.554.711**

1. Properti Investasi pada K/L

   Properti Investasi pada K/L per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.377.458.373.964 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp61.930.599.084.000 berupa Aset Dalam Penguasaan (ADP) yang sudah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.160.410.336.536 utamanya berupa PI Lanud Halim Perdanakusuma, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.835.950.551.832 utamanya berupa PI Depo Depok Jabar PT KCI.

2. Properti Investasi pada BUN

Properti Investasi pada BUN per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.129.217.464.588 terdapat pada BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah sebesar Rp30.273.971.040.544 yang merupakan seluruh aset kelolaan LMAN, baik yang berasal dari Aset eks PPA, Aset eks BPPN, Aset eks Pertamina, dan Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) diklasifikasikan sebagai Properti Investasi. Selain itu, Properti Investasi pada BUN juga terdapat pada BA BUN 999.99 Transaksi Khusus sebesar Rp57.855.246.424.044 yang merupakan PI pada UAKPA BMN Eks BMN *Idle*, PI pada UAKPA Eks Pertamina, PI pada UAKPA PKP2B dan PI pada UAKPA BMN Hulu Migas DJKN.

Rincian Properti Investasi pada BA 999.03 per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Kelompok Aset Penyerah-kelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi Eks BPPN	666.705.946.785	(405.466.565)	666.300.480.220
Properti Investasi Eks PPA	614.761.665.481	(54.658.307.197)	560.103.358.284
Properti Investasi Eks Pertamina	28.027.050.534.100	(18.890.126.863.729)	9.136.923.670.371
Properti Investasi Eks HTBI	751.516.108.628	(20.899.716.138)	730.616.392.490
Properti Investasi Lainnya	213.936.785.550	(4.617.408.814)	209.319.376.736
Total Properti Investasi	**30.273.971.040.544**	**(18.970.707.762.443)**	**11.303.263.278.101**

Rincian Properti Investasi pada BA 999.99 per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

UAKPA	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
UAKPA BMN Eks BMN *Idle*	92.242.781.101	(139.617.044)	92.103.164.057
UAKPA Eks Pertamina	18.644.290.105.918	(7.615.680.476.297)	11.028.609.629.621
UAKPA PKP2B	39.113.646.034.627	(29.207.137.496.387)	9.906.508.538.240
UAKPA BMN Hulu Migas DJKN	5.067.502.398	-	5.067.502.398
Total Properti Investasi	**57.855.246.424.044**	**(36.822.957.589.728)**	**21.032.288.834.316**

Nilai buku (neto) Properti Investasi sebesar Rp104.373.750.662.580, berasal dari nilai Properti Investasi sebesar Rp160.506.675.838.552 dikurangi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp56.132.925.175.972.

Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 21I.**

D.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp56.132.925.175.972 dan Rp54.262.412.167.063.

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.870.513.008.909 atau 3,45 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022.

D.2.1.5. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp53.609.768.282.371 dan Rp58.109.103.905.621. Nilai Piutang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp4.499.335.623.250 atau 7,74 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.188.253.842.798 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp53.609.768.282.371 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp4.421.514.439.573.
Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Tagihan Penjualan Angsuran	78.839.430.596	80.042.118.815
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	310.437.056.539	271.286.710.975
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	48.644.267.627.749	52.972.302.791.953
Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.576.224.167.487	4.785.472.283.878
Jumlah Bruto	**53.609.768.282.371**	**58.109.103.905.621**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(4.421.514.439.573)	(4.537.490.610.399)
Jumlah Neto	**49.188.253.842.798**	**53.571.613.295.222**

D.2.1.5.1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp78.839.430.596 dan Rp80.042.118.815. Nilai Piutang TPA mengalami penurunan sebesar Rp1.202.688.219 atau 1,50 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) hanya terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai neto Piutang TPA yang dapat direalisasikan sebesar Rp47.012.737.259, berasal dari nilai bruto sebesar Rp78.839.430.596 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp31.826.693.337.

D.2.1.5.2. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp310.437.056.539 dan Rp271.286.710.975. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp39.150.345.564 atau 14,43 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp94.759.846.710, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp43.329.600.962, Kementerian Luar Negeri sebesar Rp34.185.012.104, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp29.663.092.122.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Nilai neto Piutang Tagihan TP/TGR yang dapat direalisasikan sebesar Rp126.898.908.347, berasal dari nilai bruto sebesar Rp310.437.056.539 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp183.538.148.192.

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

D.2.1.5.3. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp48.644.267.627.749 dan Rp52.972.302.791.953. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp4.328.035.164.204 atau 8,17 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai tersebut terdiri dari Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp48.048.014.311.995 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp596.253.315.754. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah piutang pokok pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan.

Nilai neto Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman yang dapat direalisasikan sebesar Rp47.807.774.240.440, berasal dari nilai bruto sebesar Rp48.644.267.627.749 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp836.493.387.309.

D.2.1.5.4. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.576.224.167.487 dan Rp4.785.472.283.878. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp209.248.116.391 atau 4,37 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022.

Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	46.744.960
Kementerian Sekretariat Negara	110.460.209	88.002.500
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	-	2.014.400.000
Kementerian Keuangan	1.065.954.651.440	1.242.972.564.793
Kementerian Pertanian	10.463.666.008	11.802.725.065
Kementerian Perindustrian	9.681.995.180	13.783.961.426
Kementerian Perhubungan	16.739.075.295	7.261.407.551
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	89.765.100
Kementerian Kesehatan	276.560.972	333.770.972
Kementerian Ketenagakerjaan	1.753.333.334	1.940.000.000
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	5.011.069.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	103.580.242.333	103.095.598.961
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.144.579.803.545	1.141.809.114.605
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	5.676.722.411	8.228.183.016
Komisi Pemilihan Umum	483.350.500	700.039.908
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-	8.607.750
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	2.522.841.500	2.522.841.500
Badan Riset Dan Inovasi Nasional	6.722.522.380	6.951.546.424
Bendahara Umum Negara	2.207.678.942.380	2.236.811.940.347
Jumlah	**4.576.224.167.487**	**4.785.472.283.878**

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.207.678.942.380, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.144.579.803.545, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.065.954.651.440.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.207.678.942.380 terdiri atas:
   a. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.725.637.648 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.225.637.648, yang merupakan Piutang dari Perum Perumnas.
   Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp24.725.637.648 tersebut merupakan bagian dari piutang atas

tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan total tunggakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.225.637.648.
Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka panjang. Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp24.725.637.648 berasal dari saldo restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 dikurangi dengan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000.

b. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 sebesar USD141,392,144 atau ekuivalen sebesar Rp2.182.953.304.732 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.204.586.302.699, yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp33.329.367.366. Saldo piutang jangka panjang tahun 2023 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kemkominfo sebesar Rp1.144.579.803.545 merupakan piutang atas BHP yang masuk dalam putusan homologasi dan dikategorikan dalam kualitas macet (disisihkan 100%) pada PT Bakrie Telecom, PT Internux dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kemenkeu sebesar Rp1.065.954.651.440 terbesar pada BLU LMAN senilai Rp1.065.028.828.379. Piutang tersebut merupakan tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam yang telah lampau, sehubungan dengan disepakatinya perjanjian antara BLU LMAN dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) nomor PRJ-127/LMAN/2022 dan SP-004/PHM000/2022-S0 tanggal 16 Desember 2022 yang mengatur butir-butir kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran atas pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan LNG WBx dan NR (*Western Buyer Extension*/WBx dan Nusantara Regas/NR), sehingga tagihan lampau kontrak WBx dan NR dapat diakui sebagai pendapatan/piutang jangka panjang.

Nilai neto Piutang Jangka Panjang Lainnya yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.206.567.956.752, berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.576.224.167.487 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp3.369.656.210.735.

D.2.1.5.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.421.514.439.573 dan Rp4.537.490.610.399. Nilai Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya

mengalami penurunan sebesar Rp115.976.170.826 atau 2,56 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	31.826.693.337	35.860.691.153
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	183.538.148.192	234.945.890.091
Piutang Pemberian Pinjaman	836.493.387.309	864.846.987.804
Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.369.656.210.735	3.401.837.041.351
Jumlah	**4.421.514.439.573**	**4.537.490.610.399**

D.2.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.364.417.385.162.997 dan Rp1.197.831.957.896.041. Nilai Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp166.585.427.266.956 atau 13,91 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp135.143.910.029.896 atau 15,93 persen. Nilai Neto Aset Lainnya sebesar Rp983.326.656.191.290 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.364.417.385.162.997 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp343.079.425.565.565 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp38.011.303.406.142. Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Aset Lainnya	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	49.875.449.199.365	61.264.824.345.326
Aset Tak Berwujud	71.168.490.628.320	61.339.638.267.920
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.241.448.631.883	1.273.242.636.973
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	451.183.897.393.302	324.930.703.435.536
Dana Penjaminan	12.829.602.055.000	12.449.624.844.000
Dana Kelolaan BLU	52.063.867.817.609	39.138.707.426.198
Aset Lain-lain	696.199.863.151.665	667.809.773.446.210
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
Jumlah Bruto	**1.364.417.385.162.997**	**1.197.831.957.896.041**
Akumulasi Penyusutan	(343.079.425.565.565)	(318.133.969.689.488)
Akumulasi Amortisasi	(38.011.303.406.142)	(31.515.242.045.159)
Jumlah Neto	**983.326.656.191.290**	**848.182.746.161.394**

D.2.1.6.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.875.449.199.365 dan Rp61.264.824.345.326. Nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp11.389.375.145.961 atau 18,59 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang signifikan terdapat pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp34.066.396.817.257 dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.696.050.678.641.

Terdapat penurunan signifikan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp14.578.416.669.218 atau 100% disebabkan reklasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menjadi Aset Konsesi Jasa. Selain itu terdapat kenaikan signifikan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.586.611.971.000 atau 262,39% disebabkan reklasifikasi BMN menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Nilai neto aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp49.124.221.355.381, berasal dari nilai bruto aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp49.875.449.199.365 dikurangi Akumulasi Penyusutan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp751.227.843.984.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**31 Desember 2023** ***(Audited)***	**31 Desember 2022** ***(Audited)***
Kementerian Sekretariat Negara	34.066.396.817.257	33.421.880.206.000
Kementerian Luar Negeri	156.068.872.428	191.360.231.428
Kementerian Pertahanan	11.696.050.678.641	11.696.050.678.641
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.373.335.000	24.882.836.000
Kementerian Perhubungan	-	14.578.416.669.218
Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.191.282.592.000	604.670.621.000
Kementerian PPN/Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000
Kepolisian RI	649.537.210.000	-
BP Batam	402.192.570.867	39.015.979.867
BP Sabang	4.106.350.000	4.106.350.000
Jumlah	**49.875.449.199.365**	**61.264.824.345.326**

D.2.1.6.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp71.168.490.628.320 dan Rp61.339.638.267.920. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) mengalami kenaikan sebesar Rp9.828.852.360.400 atau 16,02 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar

Rp13.871.352.270.228, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp13.831.458.270.279, Badan Intelijen Negara sebesar Rp7.045.713.598.054, Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp6.260.947.146.504, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.821.703.279.478.

Nilai neto Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp34.289.893.495.411, berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp71.168.490.628.320 dikurangi Amortisasi ATB sebesar Rp36.878.597.132.909.

Rincian ATB berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Hak Cipta	47.479.738.000	70.675.726.475
Paten	440.834.553.197	269.285.576.616
Software	45.787.744.960.227	36.095.870.592.348
Lisensi	6.929.574.574.423	6.087.889.921.146
Hasil Kajian/Penelitian	6.817.163.944.141	7.243.360.819.907
Aset Tak Berwujud Lainnya	11.145.692.858.332	11.572.555.631.428
Jumlah Bruto	**71.168.490.628.320**	**61.339.638.267.920**
Akumulasi Amortisasi ATB	(36.878.597.132.909)	(30.210.063.988.382)
Jumlah Neto	**34.289.893.495.411**	**31.129.574.279.538**

Rincian ATB dapat dilihat pada **Lampiran 23A.**

D.2.1.6.3. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.241.448.631.883 dan Rp1.273.242.636.973. Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan mengalami penurunan sebesar Rp31.794.005.090 atau 2,50 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp698.705.311.900, Kementerian Perhubungan sebesar Rp324.450.514.103, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar Rp75.560.121.705.

Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 23B.**

D.2.1.6.4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp451.183.897.393.302 dan Rp324.930.703.435.536. Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp126.253.193.957.766 atau 38,86 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan

Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan sumber dan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
DDP pada K/L	**27.351.887.044.922**	**6.787.409.442.680**
Dana lainnya	5.401.284.521.578	6.099.123.267.882
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	1.590.534.903	1.988.696.871
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	21.043.371.166.827	-
Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	672.607.878.119	686.297.477.927
Dana di Rekening Penampungan - BLU	233.032.943.495	-
DDP pada BUN	**446.302.794.935.058**	**319.881.409.961.767**
Dana lainnya	354.184.283.761.926	290.826.698.533.548
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	4.492.658.156.434	3.921.748.145.695
Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah	66.498.332.128.500	25.132.963.282.524
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	21.127.520.888.198	-
Penyesuaian DDP pada LKPP	**(22.470.784.586.678)**	**(1.738.115.968.911)**
Total	**451.183.897.393.302**	**324.930.703.435.536**

1. DDP pada K/L sebesar Rp27.351.887.044.922 terbesar pada:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.949.937.531.100 berupa dana di RPATA.
   b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.100.375.547.288 berupa Dana Lainnya Rp3.522.410.585.290 dan Dana di RPATA Rp577.964.961.998.
   c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.718.241.079.550 berupa Dana di RPATA Rp2.485.208.136.055 dan Dana di Rekening Penampungan – BLU Rp233.032.943.495.
   d. Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.570.170.079.194 berupa Dana di RPATA Rp1.562.396.968.456 dan Dana Lainnya Rp7.773.110.738.
   e. Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp1.474.273.557.606 berupa Dana di RPATA Rp1.116.162.870.158 dan Dana Lainnya Rp358.110.687.448.
2. DDP pada BUN sebesar Rp446.302.794.935.058 dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
BA 999.00 Kuasa BUN/Akuntansi Pusat [a)]	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
BA 999.03 Investasi Pemerintah	-	4.847.519.139.589
BA 999.07 Subsidi	-	20.000.000
BA 999.08 Belanja Lainnya	51.085.061.052.125	49.537.201.072.544
BA 999.99 Transaksi Khusus	259.362.135.477.663	229.976.687.840.546
Penyesuaian DDP pada LKBUN [a)]	(12.300.309.226.371)	(16.733.167.139.589)
Total	**446.302.794.935.058**	**319.881.409.961.767**

a. DDP BA 999.00 Kuasa BUN/Akuntansi Pusat sebesar Rp148.155.907.631.641 dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.00	**31 Desember 2023** ***(Audited)***	**31 Desember 2022** ***(Audited)***
Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	-	4.847.519.139.589
Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah	66.498.332.128.500	25.132.963.282.524
Dana Lainnya	56.037.396.458.509	18.350.918.480.869
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	4.492.658.156.434	3.921.748.145.695
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	21.127.520.888.198	-
Total	**148.155.907.631.641**	**52.253.149.048.677**

Dari saldo DDP pada BA 999.00 sebesar Rp148.155.907.631.641, terdapat penyesuaian DDP sebesar Rp12.300.309.226.371 terdiri dari:

1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) sebesar Rp11.809.282.505.000;
2) Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp406.877.000.000; dan
3) Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) sebesar Rp84.149.721.371

Rekening nomor 1 s.d. 2 menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya). Sedangkan Dana di RPATA Rp84.149.721.371 merupakan saldo RPATA pada BA BUN 999.08 yang juga dicatat oleh BA BUN 999.00.

b. DDP pada BA 999.03 sebesar Rp0 merupakan Dana Lainnya berupa Dana Cadangan IP PEN. Dana tersebut berkurang seluruhnya dari saldo tahun lalu sebesar Rp4.847.519.139.589 dikarenakan adanya pengembalian dana PMN yang dialokasikan untuk PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 dan dana IP PEN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp800.000.000.000, serta pencairan alokasi IP PEN kepada PTPN III sebesar Rp1.047.519.139.000. DDP pada BA 999.03 dijelaskan sebagai berikut.

Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2022	Penyetoran ke RKUN	Pencairan dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2023
PT Perkebunan Nusantara III	1.047.519.139.589	589	1.047.519.139.000	-
PT Krakatau Steel	800.000.000.000	800.000.000.000	-	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	-
Total	**4.847.519.139.589**	**3.800.000.000.589**	**1.047.519.139.00**	**-**

c. DDP pada BA 999.07 sebesar Rp0 berupa Dana Lainnya. Saldo DDP tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.000.000 atau 100 persen dari saldo DDP tahun lalu.
d. DDP pada BA 999.08 sebesar Rp51.085.061.052.125 terdiri dari:
   i. DDP Dana Lainnya sebesar Rp51.000.911.330.754 berupa Dana Kegiatan pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas pada SKK Migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD3,303,381,781.90 menggunakan kurs penutup BI Desember Tahun 2023 sebesar Rp15.439.
   ii. Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
e. DDP pada BA 999.99 sebesar Rp259.362.135.477.663 berupa Dana Lainnya Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pencantuman Nilai Aset Lainnya berupa AIP menggunakan angka perubahan yang tertera pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Perhitungan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Badan Penyelenggara. Per 31 Desember 2023 AIP dengan Laporan Keuangan AIP TA. 2023 Audited PT Taspen (Persero) sebesar Rp231.572.672.909.516 dan AIP dengan PT Asabri (Persero) sebesar Rp27.789.462.568.147.

3. Penyesuaian DDP pada LKPP sebesar minus Rp22.470.784.586.678 dijelaskan sebagai berikut.
   a. Eliminasi Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* Alutsista sebesar minus Rp1.427.413.419.851 karena disajikan pada BA 999.00 Kuasa BUN dan pada BA 012 Kementerian Pertahanan.

b. Eliminasi Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) sebesar minus Rp21.043.371.166.827 karena disajikan pada BA 999.00 Kuasa BUN dan pada BA Kementerian Lembaga yang menggunakan RPATA.

Rincian Saldo Dana di Rekening Penampungan-K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7G.**

D.2.1.6.5. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.829.602.055.000 dan Rp12.449.624.844.000. Nilai Dana Penjaminan mengalami kenaikan sebesar Rp379.977.211.000 atau 3,05 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
Dana Penjaminan pada K/L	613.442.550.000	563.976.844.000
Dana Penjaminan pada BUN	12.216.159.505.000	11.885.648.000.000
Total	**12.829.602.055.000**	**12.449.624.844.000**

1. Dana Penjaminan pada K/L sebesar Rp613.442.550.000 terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Pihak Ketiga Retensi berbentuk bilyet deposito perusahaan P3MI yang belum diambil, baik pada perusahaan P3MI masih aktif maupun sudah dicabut izinnya.
2. Dana Penjaminan pada BUN sebesar Rp12.216.159.505.000 terdapat pada BA 999.03 Investasi Pemerintah.
   Terdapat dua KPA Dana Penjaminan pada yaitu Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (EAS) dan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (PRKN).
   Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp11.809.282.505.000 digunakan untuk:
   a. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I);
   b. Percepatan Penyediaan Air Minum;
   c. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN;
   d. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
   e. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2);
   f. Kerja-sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU);
   g. Penyelenggaraan *Light Rail Transit*/LRT Jabodebek;

h. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi; dan
i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN sebesar Rp406.877.000.000 merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

D.2.1.6.6. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp52.063.867.817.609 dan Rp39.138.707.426.198. Nilai Dana Kelolaan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp12.925.160.391.411 atau 33,02 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Dana Kelolaan BLU dijelaskan sebagai berikut.

1. Dana Kelolaan BLU sebesar Rp16.047.968.379.573, merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali. Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut.

Dana Penjaminan	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	1.980.224.478.455	3.359.710.949.023
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) (Dit. SMI)	2.956.427.625.499	699.864.758.682
BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	1.193.503.022.225	1.222.484.034.252
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	475.451.437.165	712.990.058.259
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	1.266.323.666.466	1.286.798.335.585
BLU BPDLH (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)	7.359.964.509.287	3.058.621.910.088
BLU BPDLH (Mangrove)	795.002.450.000	-
BLU BPDKS	21.071.190.476	-
Total	**16.047.968.379.573**	**10.340.470.045.889**

2. Dana Jangka Panjang sebesar Rp36.015.899.438.036, merupakan dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Rincian mutasi Dana Jangka Panjang LMAN pada tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian		Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2022		28.798.237.380.309
(-)	Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	(17.142.475.041.821)
(-)	Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	(1.064.608.892.506)
+	Penambahan dana dari pencairan alokasi APBN TA 2023	25.424.000.000.000
+	Retur/pengembalian dana atas transaksi sebelum tahun 2023	745.992.054
Posisi per 31 Desember 2023		**36.015.899.438.036**

Penggunaan dana jangka panjang pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang dirinci per proyek adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Proyek Air Baku	22.945.264.480	45.194.933.400
Proyek Bendungan	1.969.712.922.391	3.483.829.231.990
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	1.426.137.165.291	-
Proyek Irigasi	31.769.023.220	67.268.122.796
Proyek Jalan Tol	14.396.683.929.514	99.526.768.108.686
Proyek Kawasan Strategis	-	85.240.078.071
Proyek Pelabuhan	975.468.666	75.649.491.460
Proyek Perkeretaapian	358.114.168.711	202.587.034.586
Jumlah Penggunaan Dana s.d. 31 Des 2023	**18.206.337.942.273**	**103.486.537.000.989**

D.2.1.6.7. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp696.199.863.151.665 dan Rp667.809.773.446.210. Nilai Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp28.390.089.705.455 atau 4,25 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai neto Aset Lain-lain adalah sebesar Rp333.045.493.719.774, berasal dari nilai bruto sebesar Rp696.199.863.151.665 dikurangi Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp342.788.466.998.006.

Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. Aset Lain-lain pada K/L	51.254.745.733.362	53.175.074.262.507
2. Aset Lain-lain pada BUN	644.945.117.418.303	614.634.699.183.703
Jumlah Bruto	**696.199.863.151.665**	**667.809.773.446.210**

Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L	(30.500.598.127.290)	(31.528.497.888.704)
Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan Aset Lain-lain pada BUN	(312.960.305.867.524)	(284.378.803.742.066)
Jumlah Akumulasi Amortisasi/Penyusutan	**(343.460.903.994.814)**	**(315.907.301.630.770)**
Jumlah Neto	**352.738.959.156.851**	**351.902.471.815.440**

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 25.**

1. Aset Lain-lain pada K/L sebesar Rp51.254.745.733.362 antara lain berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, serta BMN dalam Proses PMPP. Aset Lain-lain pada K/L terbesar terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp17.733.807.886.203, Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.482.824.800.076, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.713.793.034.389. Ketiganya merupakan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.
2. Aset Lain-lain pada BUN sebesar Rp644.945.117.418.303 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BA 999.03 Investasi Pemerintah	822.118.554.755	810.653.723.664
BA 999.08 Belanja Lainnya	42.911.594.436	-
BA 999.99 Transaksi Khusus	644.080.087.269.112	613.824.045.460.039
Total	**644.945.117.418.303**	**614.634.699.183.703**

a. Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp822.118.554.755 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN 999.03	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1)UAIP	-	13.234.602.981
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	13.234.602.981
2)BLU LMAN	822.118.554.755	797.419.120.683
a) Aset Eks BPPN	50.142.844.000	-
b) Aset Eks Kelolaan PT PPA	169.178.500.393	187.409.252.504
c) Aset Eks Pertamina	583.403.259.612	590.639.298.679
d) Aset Lain-lain BUN	19.393.950.750	19.370.569.500
Total	**822.118.554.755**	**810.653.723.664**

i. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)
Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Saat ini seluruh KUB penerima dana bergulir sudah tidak beroperasi atau tidak menjalankan aktivitas kegiatan serta tidak mengelola dana maupun aset yang berasal dari eks dana bergulir.

ii. BLU LMAN
Aset Lain-lain BLU LMAN berupa Aset Eks BPPN, Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain BUN.
a) Aset Eks BPPN sebesar Rp50.142.844.000. Terdapat penambahan Aset eks BPPN dari penyerah-kelolaan sebesar Rp69.116.658.920. Sebesar Rp18.973.814.920 telah dilakukan reklasifikasi ke Properti Investasi eks BPPN.
b) Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp169.178.500.393. Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA menyajikan Aset eks PPA yang tidak direklasifikasi ke properti investasi.
c) Aset Eks Pertamina sebesar Rp583.403.259.612 terdiri dari Aset Kelompok Kawasan Rp440.632.478.714 dan Aset Kelompok Non-Kawasan Rp148.198.750.071.
d) Aset Lain-lain BUN sebesar Rp19.393.950.750. Nilai tersebut berupa Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 yang belum dihentikan pengakuannya melalui pengesahan belanja modal pada KL. Selain itu juga berupa Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang tidak memenuhi klasifikasi Properti Investasi.

b. Aset Lain-lain pada BA 999.08 sebesar Rp42.911.594.436 merupakan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi pada Satker Otoritas Jasa Keuangan.

c. Aset Lain-lain pada BA 999.99 sebesar Rp644.080.087.269.112 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN 999.99	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
1) Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN	17.161.363.257	8.148.384.448
2) Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN	104.061.918.709	5.725.853.761
3) Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas	615.910.897.460.531	586.653.132.958.891

Aset Lain-lain pada BUN 999.99	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
4) Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA	14.331.042.210.113	13.955.186.333.525
5) Aset PKP2B	2.941.049.250.958	2.489.221.624.116
6) Aset Lainnya BLBI	10.355.953.839.630	10.279.524.386.452
7) Aset ABMA/T	37.267.219.100	37.668.763.100
8) Aset BMN *Idle*	20.081.172.095	32.894.062.705
9) Aset Lain-lain	362.572.834.719	362.543.093.041
Total	**644.080.087.269.112**	**613.824.045.460.039**

1) Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN sebesar Rp17.161.363.257 merupakan aset tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari KKKS Terminasi
2) Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN sebesar Rp104.061.918.709 berupa aset Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP) yang berada pada Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM.
3) Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas sebesar Rp615.910.897.460.531. Aset tersebut berupa Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP).
4) Aset KKKS Hulu Migas pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebesar Rp14.331.042.210.113 berupa Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP).
5) Aset PKP2B sebesar Rp2.941.049.250.958 berupa aset Tanah dan Non Tanah.
6) Aset Lainnya BLBI sebesar Rp10.355.953.839.630 disajikan sebagai berikut

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi	31 Desember 2022
1	Aset Inventaris	5.298.590.721	(367.713.951)	5.666.304.672
2	Aset Properti eks BPPN	3.579.892.681.042	242.922.513.918	3.336.970.167.124
3	Aset Nostro	3.505.077.848	(584.179.642)	4.089.257.490
4	Surat Berharga Eks BPPN	516.935.339.526	(5.059.240.362)	521.994.579.888
5	Aset Saham Eks BPPN	56.633.220.440	(1.650.786.092)	58.284.006.532
6	Aset Lain-lain	6.193.688.930.053	(158.831.140.693)	6.352.520.070.746
	Jumlah	**10.355.953.839.630**	**76.429.453.178**	**10.279.524.386.452**

Rincian Aset Properti Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24A.**
Rincian Aset Inventaris Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24B.**
Rincian Aset Nostro dapat dilihat pada **Lampiran 24C.**
Rincian Surat Berharga Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24D.**
Rincian Aset Saham Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24E.**

7) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebesar Rp37.267.219.100 merupakan aset yang belum diterbitkan KMK pelepasannya.
8) Aset BMN *Idle* sebesar Rp20.081.172.095 merupakan BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle*.
9) Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN sebesar Rp362.572.834.719.

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi dari KPK	2.878	114.462.042.719
2	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m^2	248.110.792.000
Total			**362.572.834.719**

D.2.1.6.8. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp29.854.766.285.853 dan Rp29.625.443.493.878. Nilai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp229.322.791.975 atau 0,77 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Nilai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan nilai Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) bukan Satuan Kerja. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. YHK/BPP TMII	4.334.012.243	4.334.012.243
2. Otorita Asahan	5.396.635.686	5.396.635.686
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	372.961.149.121	186.239.265.940
4. Badan Wakaf Indonesia	26.562.574.185	20.372.797.851
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	8.485.008.632.384	7.869.782.371.449
6. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	20.956.233.856.603	21.539.318.410.709
7. Yayasan Gedung Veteran	4.269.425.631	-
Jumlah	**29.854.766.285.853**	**29.625.443.493.878**

1. Aset Lainnya dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII) yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.334.012.243 dan Rp4.334.012.243. Aset Lainnya tersebut merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan YHK/BPP TMII Tahun 2020 *Audited* serta hasil Inventarisasi Aset Tahap I Kemensetneg pada TMII. Sampai dengan batas akhir penyampaian LK Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited*, TMII masih dalam proses Likuidasi yang dilakukan dengan Inventarisasi Aset Tahap II oleh Kemensetneg.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, YHK/BPP TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai Pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan Pasal 2 dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.396.635.686 dan Rp5.396.635.686. Aset Lainnya tersebut merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited*.

   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan Pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

   Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2023 masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan, bahwa tim likuidasi dimaksud bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp372.961.149.121 dan Rp186.239.265.940. Aset Lainnya tersebut merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2023 *Unaudited*. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.562.574.185 dan Rp20.372.797.851. Aset Lainnya tersebut merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan

Keuangan BWI Tahun 2023 *Audited*. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.485.008.632.384 dan Rp7.869.782.371.449. Aset Lainnya tersebut merupakan Aset Bersih OJK selaku lembaga sebesar Rp8.485.126.112.216 dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08 sebesar Rp117.479.832 berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit.
   Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.956.233.856.603 dan Rp21.539.318.410.709. Aset Lainnya tersebut merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2023 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
7. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.269.425.631 dan Rp0. Aset Lainnya tersebut adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2023 *Unaudited*. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya/Unit Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 30A**, **Lampiran 30B** dan **Lampiran 30C**.

D.2.1.6.9. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp343.079.425.565.565 dan Rp318.133.969.689.488. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp24.945.455.876.077 atau 7,84 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	**30.119.119.698.041**	**33.755.165.947.422**
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	751.227.843.984	3.531.846.115.495
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	806.089.732.443	16.834.840.195
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	28.561.802.121.614	30.206.484.991.732
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	**312.960.305.867.524**	**284.378.803.742.066**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	42.911.594.436	-
Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	310.876.916.694.161	282.408.573.858.499
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	1.247.388.940	430.160.983
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina	423.880.011.094	415.311.394.585
Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B	1.589.463.650.617	1.535.885.268.820
Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN	7.275.644.182	5.796.697.173
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	18.610.884.094	12.806.362.006
Jumlah	**343.079.425.565.565**	**318.133.969.689.488**

D.2.1.6.10. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.011.303.406.142 dan Rp31.515.242.045.159. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp6.496.061.360.983 atau 20,61 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	**37.914.524.897.168**	**31.350.219.114.571**
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	9.244.688.313	13.130.977.065
Akumulasi Amortisasi Paten	132.857.495.845	117.852.806.394
Akumulasi Amortisasi *Software*	28.989.876.640.822	23.168.809.238.952

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Akumulasi Amortisasi Lisensi	2.898.523.440.659	2.401.358.826.082
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	4.751.316.358.296	4.343.889.209.301
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.132.706.273.233	1.305.178.056.777
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	**96.778.508.974**	**165.022.930.588**
Akumulasi Amortisasi *Software*	95.426.490.124	121.399.613.731
Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.352.018.850	43.623.316.857
Jumlah	**38.011.303.406.142**	**31.515.242.045.159**

D.2.2. KEWAJIBAN

D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.092.254.611.766.819 dan Rp892.289.644.366.744, mengalami kenaikan Rp199.964.967.400.075 atau 22,41 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Kewajiban	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan / (Penurunan)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882	15,84
Utang kepada Pihak Ketiga	191.809.032.711.121	131.806.404.311.825	45,52
Utang Bunga	112.693.785.312.937	97.401.735.689.433	15,70
Utang Subsidi	25.207.352.917.324	15.233.102.271.564	65,48
Utang Transfer	52.187.965.129.846	49.842.043.112.377	4,71
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	638.953.070.948.495	525.070.831.354.819	21,69
Unamortized Discount	(368.630.075.000)	(414.105.480.000)	10,98
Unamortized Premium	440.320.180.000	795.587.678.000	(44,65)
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	31.412.000.000.000	49.028.000.000.000	(35,93)
Unamortized Discount	(467.650.585.000)	(548.373.999.000)	14,72
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27.965.899.727.133	10.332.306.519.164	170,66
Pendapatan Diterima Dimuka	7.476.388.964.347	9.593.646.386.590	(22,07)

Kewajiban	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan yang Ditangguhkan	403.617.716.901	4.056.160.026	9.850,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.661.192.664	228.030.249.064	(97,96)
Jumlah	**1.092.254.611.766.819**	**892.289.644.366.744**	**22,41**

Kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu sebesar Rp113.882.239.593.676 atau 21,69 persen. Di samping itu Utang Kepada Pihak Ketiga juga memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp60.002.628.399.296 atau 45,52 persen.

D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.536.797.626.051 dan Rp3.916.380.112.882, mengalami kenaikan sebesar Rp620.417.513.169 atau 15,84 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari Utang PFK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 15,98 persen atau senilai Rp496.588.786.233. Rincian Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. Utang PFK BA 999.99 DJPb	932.586.210.358	809.370.991.446
2. Utang PFK BA 999.99 DJKN	887.002.856	273.494.832
3. Utang PFK BA 999.99 DJPK	3.603.324.412.837	3.106.735.626.604
Jumlah	**4.536.797.626.051**	**3.916.380.112.882**

1. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perbendaharaan (DJPb)
   Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPb Per 31 Desember 2023 sebesar Rp932.586.210.358, mengalami kenaikan sebesar Rp123.215.218.912 atau 15,22 persen. Rincian Utang PFK DJPb menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. BPJS Kesehatan	810.479.628.369	743.361.910.994
2. Perum Bulog	-	2.772.212
3. PT Taspen (Persero)	121.484.623.448	61.290.354.601
4. PT Asabri (Persero)	197.192.160	158.273.803
5. Bapertarum PNS	424.766.381	4.557.679.836
Jumlah	**932.586.210.358**	**809.370.991.446**

2. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
   Utang PFK DJKN Per 31 Desember 2023 sebesar Rp887.002.856, merupakan Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks

Bank Dalam Likuidasi Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) Per 31 Desember 2023.

3. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
   Utang PFK DJPK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.603.324.412.837, merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran triwulan berikutnya Tahun Anggaran 2024 setelah Pemda memenuhi persyaratan.

D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp191.809.032.711.121 dan Rp131.806.404.311.825, mengalami kenaikan sebesar Rp60.002.628.399.296 atau 45,52 persen. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp153.708.347.553.967, Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.706.661.521.496, dan Kementerian PUPR sebesar Rp7.237.748.680.705. Penyajian nilai Utang Kepada Pihak Ketiga pada LKBUN sebesar Rp153.795.462.145.737, atas hal tersebut terdapat perbedaan sebesar Rp87.114.591.770 antara LKPP dengan LKBUN karena adanya perbedaan penyajian akun 219913.

Pada Utang Kepada Pihak Ketiga BUN, terdapat utang/kewajiban yang terjadi akibat kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia. Total Utang kepada pihak ketiga pada LK BUN 999.05 adalah sebesar Rp66.515.508.256.604, yang terdiri dari utang penyaluran pokok DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp66.498.332.128.500 dan utang penyaluran remunerasi DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD, RPKBUNP dan RKUN sebesar Rp17.176.128.104. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2022, utang pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp41.375.778.038.044 dari yang sebelumnya sebesar Rp25.139.730.218.560. Peningkatan kewajiban tersebut dikarenakan terdapat penyaluran kurang bayar DBH pada tahun 2023 kepada daerah secara nontunai melalui mekanisme TDF berdasarkan KMK 38/KM.7/2023.

Selain itu, pada Utang Kepada Pihak Ketiga BUN juga terdapat kewajiban diestimasi atas penyaluran CPP Beras dan Jagung Tahun 2023 pada Dit. Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas sebesar Rp12.133.730.565.887 yang merupakan estimasi kekurangan bayar CPP komoditas beras tahun 2023 atas Kurang Bayar Tahap I, Bantuan Pangan Tahap II, Biaya Distribusi Tahap I dan II, Sisa SPHP TW 1 sd. 3, dan SPHP TW 4, dan Bantuan Bencana Alam. Utang

sebesar Rp12.133.730.565.887 tersebut, belum termasuk atas SPHP jagung Tahun 2023 sebanyak 27.631.992 kg jagung di sembilan provinsi.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

D.2.2.1.3. Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp112.693.785.312.937 dan Rp97.401.735.689.433, mengalami kenaikan sebesar Rp15.292.049.623.504 atau 15,70 persen. Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	98.115.043.145.096	91.657.546.418.920
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman	14.578.742.167.841	5.744.189.270.513
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	494.312.527.035	150.623.558.002
b. Utang Bunga Luar Negeri	14.084.429.640.806	5.593.565.712.511
Jumlah	**112.693.785.312.937**	**97.401.735.689.433**

Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN per 31 Desember 2023 terdiri dari:

1. Utang Bunga SBN/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp98.115.043.145.096, meningkat 7,05 persen dibanding Tahun 2022. Utang Bunga SBN Tahun 2023 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan sebesar Rp1.027.382.710.685.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.578.742.167.841, terdiri dari:
   a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp494.312.527.035, mengalami kenaikan sebesar 228,18 persen dari Tahun 2022; dan
   b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp14.084.429.640.806, mengalami kenaikan sebesar 151,80 persen dari Tahun 2022.

D.2.2.1.4. Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.207.352.917.324 dan Rp15.233.102.271.564, mengalami kenaikan sebesar Rp9.974.250.645.760 atau 65,48 persen. Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Kementerian Keuangan	13.744.959.186.456	2.177.773.329.663
Kementerian Perhubungan	1.544.109.295.439	560.887.183.498
Kementerian PUPR	602.874.649.812	454.467.613
Kementerian KUKM	2.112.882.040.781	12.493.964.459.630
Kementerian Perdagangan	22.831.160	22.831.160
Kementerian Pertanian	9.843.898.951.915	-
Penyesuaian LKPP	(2.641.394.038.239)	-
Jumlah	**25.207.352.917.324**	**15.233.102.271.564**

1. Kementerian Keuangan
   Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.744.959.186.456. Rincian utang subsidi disajikan pada tabel berikut.

Eselon I	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Ditjen Anggaran	11.103.565.148.217	2.089.390.848.390
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	-	88.343.565.059
Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	-	38.916.214
Ditjen Pajak	2.641.394.038.239	
Jumlah	13.744.959.186.456	**2.177.773.329.663**

   Utang subsidi pada satker Ditjen Anggaran sebesar Rp11.103.565.148.217 yang merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain. Utang subsidi pada satker Ditjen Anggaran terdiri dari Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp6.491.764.702.104, dan Utang Subsidi Listrik Rp4.611.800.446.113. Utang subsidi juga terdapat pada satker Ditjen Pajak sebesar Rp2.641.394.038.239.
2. Kementerian Perhubungan
   Utang Subsidi 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.544.109.295.439. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp333.461.160.423, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.210.648.135.016.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp602.874.649.812 berupa Utang Subsidi-Estimasi pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp1.322.719.650 yang akan dibayarkan pada periode April 2024, dan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp601.551.930.162.

4. Kementerian Koperasi dan UKM
   Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.112.882.040.781 yang merupakan Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi.
5. Utang Subsidi pada Kementerian Perdagangan
   Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.831.160 yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menjadi operator subsidi resi gudang atas perintah KPA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
6. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
   Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.843.898.951.915 berasal dari koreksi tambah atas subsidi pupuk karena penyesuaian atas HPP yang masih menggunakan perhitungan tahun 2021 serta reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
7. Penyesuaian LKPP
   Terdapat penyesuaian LKPP pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.641.394.038.239 untuk penyesuaian utang piutang antara Kementerian Keuangan BA 015 dengan BA BUN terkait subsidi pajak DTP.

D.2.2.1.5. Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp52.187.965.129.846 dan Rp49.842.043.112.377, mengalami kenaikan sebesar Rp2.345.922.017.469 atau 4,71 persen. Utang transfer tersebut merupakan kewajiban transfer ke daerah dengan rincian sebagai berikut.

Rincian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Utang TKD	200.961.455.619	4.134.863.367.428
Utang TKD Estimasi	51.987.003.674.227	45.707.179.744.949
Jumlah	**52.187.965.129.846**	**49.842.043.112.377**

1. Utang TKD
   Utang TKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.961.455.619 mengalami penurunan sebesar Rp3.933.901.911.809 atau 95,14 persen dari tahun 2022. Penurunan ini disebabkan kewajiban DBH telah diselesaikan pada akhir tahun 2022 melalui penerbitan KMK 38/KM.7/2023. Rincian Kewajiban TKD disajikan pada tabel berikut.

Rincian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
DBH	2.356.367	3.968.894.493.111
DAK Non fisik	200.959.099.252	165.968.874.317
Jumlah	**200.961.455.619**	**4.134.863.367.428**

a. Utang TKD Satker DBH
Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.356.367. Rincian Utang TKD Satker DBH disajikan pada tabel berikut.

Transaksi	Nilai
Kewajiban DBH TA 2022 *Audited*	3.968.894.493.111
Penetapan kewajiban tambahan DBH SDA Kehutanan TA 2020 berdasarkan PMK No. 90/PMK.07/2023	25.107.446.837
Penetapan kewajiban DBH TA 2022 berdasarkan PMK No. 90/PMK.07/2023	42.915.527.226.419
Penyelesaian kewajiban DBH sampai dengan TA 2021 berdasarkan KMK No. 38/KM.7/2023	(3.994.001.349.000)
Penyelesaian kewajiban DBH TA 2022 berdasarkan KMK No. 38/KM.7/2023	(42.915.525.461.000)
Jumlah	**2.356.367**

b. Utang TKD Satker DAK Non Fisik
Nilai utang Transfer DAK Nonfisik sebagaimana tersaji pada Neraca Satker Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.959.099.252. Rincian Utang TKD Satker DAK Non Fisik disajikan pada tabel sebagai berikut.

Jenis Dana	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Kurang Salur TPG, TKG, Tamsil Guru ASND 2022	165.968.874.317	52.585.123.249
Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND 2023	43.813.921.184	37.952.927.237
TKG ASND TA 2023 2023	(8.823.696.249)	75.430.823.831
Jumlah	**200.959.099.252**	**165.968.874.317**

Rincian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada **Lampiran 28.**

2. Utang TKD Estimasi
Utang TKD Estimasi - DBH per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.987.003.674.227 mengalami penurunan sebesar Rp6.279.823.929.278 atau 13,74 persen dibanding tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun 2023 meningkat sehingga

potensi/estimasi kurang bayar pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi. Saldo akhir Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Dana	31 Desember 2023 (*Audited*)
1	DBH PPh Pasal 21	6.066.241.103.422
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	621.359.075.331
3	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	12.459.244.849.089
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	519.804.393.712
5	DBH Minyak Bumi	46.584.555.124
6	DBH Gas Bumi	1.374.124.044.298
7	DBH Mineral dan Batubara - *Landrent*	182.934.669.790
8	DBH Mineral dan Batubara - Royalti	29.838.338.471.550
9	DBH Kehutanan - DR	41.587.680.680
10	DBH Panas Bumi-Iuran Tetap	5.142.729.617
11	DBH Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah	831.642.101.614
	Jumlah	**51.987.003.674.227**

D.2.2.1.6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp638.953.070.948.495 dan Rp525.070.831.354.819, mengalami kenaikan sebesar Rp113.882.239.593.676 atau 21,69 persen. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebesar Rp639.024.761.053.495 berasal dari nilai bruto sebesar Rp638.953.070.948.495 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp368.630.075.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp440.320.180.000. Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	87.150.338.807.931	85.328.172.549.984
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	4.682.550.610.035	3.534.774.838.832
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	546.991.016.669.505	436.078.719.104.979
Bagian Lancar UJP BUN	**638.823.906.087.471**	**524.941.666.493.795**
K/L		
Bagian Lancar UJP pada Kementerian Luar Negeri	**129.164.861.024**	**129.164.861.024**
Jumlah Bruto	**638.953.070.948.495**	**525.070.831.354.819**
Unamortized Discount	(368.630.075.000)	(414.105.480.000)
Unamortized Premium	440.320.180.000	795.587.678.000
Jumlah Neto	**639.024.761.053.495**	**525.452.313.552.819**

D.2.2.1.7. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.412.000.000.000 dan Rp49.028.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp17.616.000.000.000 atau 35,93 persen. Nilai neto Utang SBN Jangka Pendek sebesar Rp30.944.349.415.000 berasal dari nilai bruto sebesar Rp31.412.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp467.650.585.000. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Utang SBN Jangka Pendek	31.412.000.000.000	49.028.000.000.000
Jumlah Bruto	**31.412.000.000.000**	**49.028.000.000.000**
Unamortized Discount	(467.650.585.000)	(548.373.999.000)
Jumlah Neto	**30.944.349.415.000**	**48.479.626.001.000**

D.2.2.1.8. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp27.965.899.727.133 dan Rp10.332.306.519.164, mengalami kenaikan sebesar Rp17.633.593.207.969 atau 170,66 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp27.004.575.654.399 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan perpajakan per 31 Desember 2023 yang belum terbit SP2D-nya.

D.2.2.1.9. Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.476.388.964.347 dan Rp9.593.646.386.590, mengalami penurunan sebesar Rp2.117.257.422.243 atau 22,07 persen. Nilai Pendapatan Diterima Di Muka yang signifikan disajikan sebagai berikut.

1. BP Batam sebesar Rp3.825.246.790.166 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Lahan, Pendapatan sewa di Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.
2. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.100.273.029.027 yang merupakan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk menyerahkan barang/jasa.

Selain itu, terdapat Penyesuaian Konsolidasi LKPP per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp11.653.357 merupakan eliminasi transaksi resiprokal utang piutang pendapatan diterima di muka dan belanja dibayar di muka BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo.

Rincian Pendapatan Diterima Di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

D.2.2.1.10. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp403.617.716.901 dan Rp4.056.160.026, mengalami kenaikan sebesar Rp399.561.556.875 atau 9.850,73 persen. Pendapatan yang Ditangguhkan antara lain terdiri atas Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan, Pendapatan Panas Bumi Ditangguhkan, Pendapatan Migas Ditangguhkan, dan Pendapatan Setoran Pertambangan yang Ditangguhkan. Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan Migas yang Ditangguhkan berupa saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.1.11. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.661.192.664 dan Rp228.030.249.064, mengalami penurunan sebesar Rp223.369.056.400 atau 97,96 persen. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp10.041.493.026 berupa pajak bendahara yang belum disetor ke negara. Selain itu, terdapat penyesuaian nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar minus Rp114.930.868.896 yang dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk mereklasifikasi (mengakui) Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor ke Pendapatan Pajak Lain-lain, dan menyesuaikan nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya karena adanya perbedaan penyajian akun 219913 antara K/L dan BA-BUN.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

D.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.447.390.714.616.942 dan Rp8.028.268.168.707.205, mengalami kenaikan sebesar Rp419.122.545.909.737 atau 5,22 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)	% Kenaikan / (Penurunan)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.972.084.424.567.648	6.701.337.747.865.276	4,04
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	886.303.870.122.628	822.865.126.039.407	7,71
Kewajiban Konsesi Jasa	589.002.419.926.666	504.065.294.802.522	16,85
Jumlah	**8.447.390.714.616.942**	**8.028.268.168.707.205**	**5,22**

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 terutama berasal dari kenaikan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp270.746.676.702.372 atau 4,04 persen.

D.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.552.061.212.395 dan Rp18.141.468.578.073, mengalami kenaikan sebesar Rp13.410.592.634.322 atau 73,92 persen. Adanya peningkatan penarikan Pinjaman Dalam Negeri yang digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

D.2.2.2.1.2. Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.563.241.522.670.168 dan Rp6.361.787.234.099.673, mengalami kenaikan sebesar Rp201.454.288.570.495 atau 3,17 persen. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.557.867.386.136.168 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.563.241.522.670.168 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp49.942.041.191.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp44.567.904.657.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Utang Jangka Panjang SBN	6.563.241.522.670.168	6.361.787.234.099.673
Unamortized Discount	(49.942.041.191.000)	(52.953.994.105.000)
Unamortized Premium	44.567.904.657.000	43.768.938.860.000
Jumlah Neto	**6.557.867.386.136.168**	**6.352.602.178.854.673**

Rincian *Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium* dapat dilihat pada **Lampiran 29C**, **Lampiran 29D**, dan **Lampiran 29E.**

D.2.2.2.1.3. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp39.891.869.021.700 dan Rp0, mengalami kenaikan 100 persen. Pembiayaan SBN Ditangguhkan merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Rupiah yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

D.2.2.2.1.4. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.871.215.355.337 dan Rp24.446.771.532.148, mengalami kenaikan sebesar Rp1.424.443.823.189 atau 5,83 persen.

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT PT Taspen (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421 dan pada Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-263/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Taspen (Persero) Tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916, maka total UPSL PT Taspen (Persero) di Tahun 2023 sebesar Rp25.871.215.355.337.

Selain itu telah ditetapkan UPSL PT Asabri (Persero) Tahun 2022 melalui surat Menteri Keuangan nomor S-56/MK.02/2023 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp4.550.263.772.727 yang telah dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp2.280.000.000.000 dan di tahun 2023 sebesar Rp2.270.263.772.727, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi Tahun 2023	Saldo per 31 Des 2023
Utang kepada Dana Pensiun dan THT			
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri Tahun 2022	2.270.263.772.727	2.270.263.772.727	-
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2022	22.176.507.759.421	-	22.176.507.759.421
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2023	-	-	3.694.707.595.916
Jumlah	**24.446.771.532.148**		**25.871.215.355.337**

D.2.2.2.1.5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp313.375.462.067.170 dan Rp280.419.679.447.589, mengalami kenaikan sebesar Rp32.955.782.619.581 atau 11,75 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BA 999.03 Investasi Pemerintah	1.750.007.897	
BA 999.04 Pemberian Pinjaman	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08 Belanja Lainnya	51.000.911.330.754	47.328.694.372.544
BA 999.99 Transaksi Khusus	259.362.722.970.725	229.977.534.581.769
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.127.646.013.793	1.234.018.749.275
Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(29.495.983.158)	(32.495.983.158)
Jumlah	**313.375.462.067.170**	**280.419.679.447.589**

1. BA 999.03 Investasi Pemerintah
   Nilai utang jangka panjang dalam negeri lainnya berasal dari UAKPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp1.750.007.897. Nilai tersebut merupakan pencairan klaim subrogasi mitra pada tahun 2022 sebesar Rp860.633.286 dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2023 sebesar Rp889.374.611 yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas.
2. BA 999.04 Pemberian Pinjaman
   Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2023 dengan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan holtikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah. sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.
3. BA 999.08 Belanja Lainnya
   Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp510.911.330.754 dan Rp47.328.694.372.544. Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas yang merupakan kontra-akun dana kegiatan pascaoperasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari

rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021 yaitu pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA.

4. BA 999.99 Transaksi Khusus
   Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp259.362.722.970.725 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp229.977.534.581.769 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Asabri (Persero), serta pembayaran sewa Aset Eks Pertamina. AIP ini selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 dengan rincian sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada BA 999.99	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	231.572.672.909.516	205.285.435.523.564
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	27.789.462.568.147	24.691.252.316.982
Aset Eks Pertamina	587.493.062	846.741.223
Jumlah	**259.362.722.970.725**	**229.977.534.581.769**

5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
Kementerian Luar Negeri	812.174.395.025	941.331.107.318
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	268.476.157.326	240.952.751.515
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	46.995.461.442	51.734.890.442
Jumlah	**1.127.646.013.793**	**1.234.018.749.275**

   a. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian Luar Negeri adalah utang jangka panjang pembelian tanah dan gedung Perwakilan RI di luar negeri.
   b. Utang Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian ESDM merupakan pencadangan dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Wilayah Kerja blok A dan B Aceh sebesar USD17,389,478.42.
   c. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada LPP TVRI adalah Utang BHP Frekuensi dan Utang Pajak.

6. Penyesuaian Konsolidasi LKPP
   Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp29.495.983.158 merupakan eliminasi transaksi resiprokal utang piutang BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo.

D.2.2.2.1.6. Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp560.625.887.734 dan Rp25.727.649.452.793, mengalami penurunan sebesar Rp25.167.023.565.059 atau 97,82 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

No	K/L	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	Keuangan	-	10.202.763.161.231
2	Pertanian	420.266.452.275	16.788.763.757.968
3	Perhubungan	140.359.435.459	110.501.878.521
4	Penyesuaian Konsolidasi LKPP	-	(1.374.379.344.927)
Jumlah		**560.625.887.734**	**25.727.649.452.793**

1. Kementerian Pertanian
   Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp420.266.452.275.
2. Kementerian Perhubungan
   Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp140.359.435.459 merupakan kurang bayar PSO TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521 dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000 serta sisa tunggakan PSO hasil audit BPK RI TA. 2022 sebesar 29.857.556.938.

D.2.2.2.2. Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp886.277.290.731.920 dan Rp822.838.479.742.048, mengalami kenaikan sebesar Rp63.438.810.989.872 atau 7,71 persen dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Utang Program	496.507.150.437.946	467.695.863.960.429
Utang Proyek	389.770.140.293.974	355.142.615.781.619
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	**886.277.290.731.920**	**822.838.479.742.048**

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada **Lampiran 26.** Rincian Utang Program dapat dilihat pada **Lampiran 29A**. Rincian Utang Proyek dapat dilihat pada **Lampiran 29B**.

D.2.2.2.2.2. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.579.390.708 dan Rp26.646.297.359, mengalami penurunan sebesar Rp66.906.651 atau 0,25 persen. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya terdapat pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA, dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

Lender	**Mata Uang Asal**		**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1,135,018	17.523.542.902	17.697.200.656
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223,450.21	3.817.946.261	3.711.195.158
Jumlah*			**26.579.390.708**	**26.646.297.359**

**) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439/USD* dan *Rp17.086,34/EUR*

Rincian *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

Promissory Note	**Tanggal**	**Nilai**
2 *(two) promissory notes*	19 Januari 1973	129.523.754
1 *(one) promissory note*	21 September 1973	355.340.804
1 *(one) promissory note*	26 Desember 1973	71.956.501
1 *(one) promissory note*	25 Mei 1974	514.542.829
1 *(one) promissory note*	14 Juli 2000	2.163.936.250
1 *(one) promissory note*	22 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		**5.237.901.545**

D.2.2.2.3. Kewajiban Konsesi Jasa
D.2.2.2.3.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan Kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan Aset Konsesi Jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian Konsesi Jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra. Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp589.002.419.926.666 dan Rp504.065.294.802.522, mengalami kenaikan sebesar Rp84.937.125.124.144 atau 16,85 persen. Rincian Kewajiban Konsesi Jasa sebagai berikut.

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp418.046.900.436.909. Pencatatan Kewajiban Konsesi Jasa pada Kementerian PUPR timbul karena pencatatan aset konsesi jasa mitra.
2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp160.042.162.559.316. merupakan saldo kewajiban (pendapatan tangguhan) atas hak pengusahaan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan pelabuhan.
3) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.580.257.728.670. Nilai kewajiban ini timbul dari pengakuan Aset Konsesi Jasa atas Paket konstruksi proyek Palapa Ring (Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur) dan Satelit Multifungsi SATRIA-1.
4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp333.099.201.771 merupakan kewajiban atas konsesi jasa partisipasi mitra pada Badan Usaha Pelabuhan Laut.

D.2.3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.536.140.446.352.577 dan Rp3.404.893.056.498.959, mengalami kenaikan sebesar Rp131.247.389.853.618 atau 3,85 persen. Penjelasan lebih rinci terkait perubahan ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. <u>Rekening Pemerintah Lainnya</u>

a. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak Production Sharing (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2023 (Audited) adalah sebesar USD94,982,920.40 atau ekuivalen sebesar Rp1.466.441.308.055,60. Terdapat perbedaan sebesar Rp4.322,60 dibandingkan saldo pembukuan Rp1.466.441.303.733 karena pembulatan. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 7C.**

Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 jo. No. 121 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang: 1) industri pupuk, 2) industri petrokimia, 3) industri *oleochemical*, 4) industri baja, 5) industri keramik, 6) industri kaca, 7) industri sarung tangan karet, serta 8) penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, yang menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah KKKS yang memberlakukan HGBT.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2023 dan tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD431,650,792 atau ekuivalen Rp6.664.256.577.427 dan USD610,886,737 atau ekuivalen Rp9.524.945.996.155. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS *(kept-whole)* pada tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD736,130,731 atau ekuivalen Rp11.365.122.358.850 dan USD1,023,063,144 atau ekuivalen Rp15.951.600.539.740. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.305.320.925.338 dan Rp3.075.963.489.095. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp14.385.151.490.257 atau menurun dari tahun 2022 yang mencapai Rp23.680.703.837.470.

Pada tahun 2021 dan 2020, penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD449,268,404 atau ekuivalen Rp6.414.654.267.188 dan USD174,605,350 atau ekuivalen Rp2.462.808.461.727; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS *(kept-whole)* masing-masing sebesar USD741,217,494 atau ekuivalen Rp10.583.103.372.807 dan USD279,465,750 atau ekuivalen Rp3.941.864.407.431. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.131.465.924.649 dan Rp5.204.357.297.105. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp17.866.639.329.264 atau meningkat dari tahun 2020 yang hanya mencapai Rp16.363.637.258.001.

Pada data penyesuaian bagian negara untuk KKKS PHE NSO tahun 2021 dan 2020, nilai *kept-whole* bagian KKKS belum dapat ditagihkan karena masih terdapat ketidakcukupan bagian negara. Data penyesuaian bagian negara pada KKKS PHE NSO merupakan perhitungan sementara, di mana perhitungan bagi hasil WK NSO untuk tahun 2020 dan 2021 belum dapat difinalkan karena masih terdapat ketidakcukupan bagian Pemerintah untuk *mengkept-whole* bagian KKKS, dan akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas WK NSO yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun nilai kekurangan bagian KKKS

PHE NSO yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah tahun 2020 adalah sebesar USD296,065.01 atau ekuivalen Rp4.175.997.001, sedangkan tahun 2021 adalah sebesar USD1,053,990.75 atau ekuivalen Rp15.048.879.940.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7D.**

Sementara itu, berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2023 dan tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD224,000 atau ekuivalen Rp3.458.340.691 dan USD439,722 atau ekuivalen Rp6.856.148.650. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS *(kept-whole)* pada tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD3,135,987 atau ekuivalen Rp48.416.510.302 dan USD6,156,078 atau ekuivalen Rp95.985.566.897. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.135.779.299 dan Rp8.577.758.915. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp26.287.828.954 atau menurun dari tahun 2022 yang mencapai Rp39.712.476.945.

Selain itu, pada tahun 2021 dan 2020 penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD329,235 atau ekuivalen Rp4.700.821.802 dan USD228,433 atau ekuivalen Rp3.222.044.251; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS *(kept-whole)* masing-masing sebesar USD4,609,270 atau ekuivalen Rp65.811.152.672 dan USD1,814,347 atau ekuivalen Rp25.591.368.636. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp25.779.665.891 dan Rp94.397.142.981. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp37.092.888.344 atau menurun dari tahun 2020 yang mencapai Rp76.918.815.925.

Di samping itu, pada tahun 2020 terdapat nilai kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah, yang penyelesaiannya akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan

ketentuan yang berlaku, dengan nilai sejumlah USD1,285,635.16 atau ekuivalen Rp18.133.883.933.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat disajikan pada **Lampiran 7E**

Dengan mengakumulasikan seluruh KKKS di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA, maka total nilai kewajiban pemerintah, penyesuaian HGBT, dan bagian negara akhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Rincian	2020	2021	2022	2023
(1) Bagian negara awal (sebelum HGBT)	28.172.796.796.057	41.129.247.422.618	52.384.345.813.866	39.801.149.811.117
(2) Kewajiban pemerintah terhadap Kontraktor	5.298.754.440.086	6.157.245.590.541	3.084.541.248.010	7.308.456.704.637
(3) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah **(3=1-2)**	22.874.042.355.971	34.972.001.832.077	49.299.804.565.857	32.492.693.106.480
(4) Penyesuaian HGBT (*kept-whole* kontraktor + penurunan *entitlement* GOI akibat HGBT)	6.433.486.282.045	17.068.269.614.469	25.579.388.251.442	18.081.253.787.269
(5) Bagian negara akhir atau setelah HGBT **(5=3-4)**	16.440.556.073.927	17.903.732.217.609	23.720.416.314.415	14.411.439.319.211
(6) Proporsi penyesuaian bagian negara **(6=4/3)**	28,13%	48,81%	51,89%	55,65%
(7) Kekurangan Bagian Pendapatan KKKS yang tidak tertutupi dari *Kept-whole*	22.309.880.934	15.048.879.940	-	-

Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas melakukan rekonsiliasi hulu- hilir atas implementasi HGBT. Berdasarkan hasil rekonsiliasi hulu-hilir atas implementasi HGBT diketahui bahwa terdapat penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2022 sebesar USD173,602,901.

Rekapitulasi Penerimaan Bagian Negara Atas Hasil Rekonsiliasi Hulu-Hilir HGBT Tahun 2020-2022

(dalam USD)

	Totai Hasil Rekonsiliasi	Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi	Saldo yang Belum Terbayar
SKK Migas	173.580.050	169.330.728	4.249.322
BPMA	22.851	22.851	-
TOTAL	**173.602.901**	**169.353.579**	**4.249.322**

Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut, atas nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT tersebut, dana senilai USD169,353,579 atau ekuivalen Rp2.578.068.992.086 telah dibayarkan melalui rekening migas, dan kemudian telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Umum Negara secara utuh melalui mekanisme reklasifikasi. Dengan demikian, realisasi nilai pembayaran atas penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT tersebut mencapai 97,55 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2022.

Rekapitulasi Penyelesaian dan Reklas Penerimaan Gas Hasil Rekonsiliasi Hulu-Hilir HGBT Audit BPK RI

Periode	Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi			Kurs Reklas	Nilai Penyelesaian Hasil Rekon Hilir HGBT yang Direklas		
	BPMA	SKK Migas	Total		BPMA	SKK Migas	Total
	(dalam USD)			(Rp/USD)	(dalam Rupiah)		
Maret 2023	-	2,247,413	2,247,413	15.243	-	34.256.196.310	34.256.196.311
Juli 2023	-	992,416	992,416	15.066	-	14.951.672.374	14.951.672.373
Oktober 2023	-	80,129,953	80,129,953	15.190	-	1.217.173.981.437	1.217.173.981.437
Desember 2023	22,851	85,960,946	85,983,797	15.255	348.587.966	1.311.338.553.999	1.311.687.141.965
TOTAL	22,851	169,330,728	169,353,579		-	2.577.720.404.120	2.578.068.992.086

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084.980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084.980 ke RKUN/ rekening Pengusaha Panas Bumi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan

perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.912.870.273.099 dan Rp1.588.329.504.770. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

No	URAIAN		31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
I.	Saldo Awal		1.588.329.504.770	1.428.552.738.965
II.	Penerimaan:			
	1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	3.727.920.311.039	2.944.542.106.880
	2.	Koreksi Pembukuan Kredit		
	Total Penerimaan		3.727.920.311.039	2.944.542.106.880
III.	Pengeluaran:			
I.	1.	Pembayaran PBB Panas Bumi a)	439.988.647.320	400.171.960.144
	2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi b)	175.871.851.026	147.221.743.521
	3.	Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum c)	93.180.322.346	90.658.226.036
	4.	Pemindahbukuan PNBP Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN d)	2.694.338.722.018	2.146.713.411.374
	5.	Koreksi Pembukuan debit		
	Total Pengeluaran		3.403.379.542.710	2.784.765.341.075
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)		324.540.768.329	159.776.765.805
V.	Saldo Akhir (I + IV) *)		1.912.870.273.099	1.588.329.504.770

*) Selisih saldo akhir 2023 dan 2022 sebesar Rp4 antara saldo pembukuan dengan saldo rekening koran karena pembulatan

Penjelasan:

a) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp439.988.647.320.

b) Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp175.871.851.026 adalah *reimbursement* PPN dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp2.520.463.220 (2) Pengajuan Tahun 2021 sebesar

Rp22.282.293.630 (3) Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp107.851.355.157 dan (4) Pengajuan Tahun 2023 sebesar Rp43.217.739.019.

c) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp93.180.322.346 adalah pembayaran penggantian bonus produksi dengan rincian Pengajuan Tahun 2017 sebesar Rp1.529.136.314, Pengajuan Tahun 2018 sebesar Rp1.607.812.843, Pengajuan Tahun 2019 sebesar Rp417.885.474, Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp1.178.566.490, Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp529.169.660, Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp47.060.603.102, dan Pengajuan Tahun 2023 sebesar Rp40.857.148.463.

d) Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2023 ke RKUN sebesar Rp2.694.338.722.018.

e) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2023 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

2. <u>Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)</u>

RIPPEN merupakan rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok, dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN.

Saldo pada RIPPEN s.d. 31 Desember 2023 adalah 0, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo RIPPEN per 31 Desember 2022	4.847.519.139.589
2	Pemindahbukuan dana titipan ke Rek Lain BI Penampungan Dana PMN	(3.000.000.000.000)
3	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Krakatau Steel	(800.000.000.000)
4	Saldo RIPPEN per 31 Juni 2023	1.047.519.139.589
5	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(409.617.705.284)

6	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(637.901.433.716)
7	Penihilan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(589)
8	Realisasi RIPPEN Tahun 2023	1.847.519.139.589
Saldo RIPPEN Per 31 Desember 2023		**0**

Berdasarkan rincian saldo RIPPEN di atas, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21A ayat (4) PMK Nomor 189/PMK.06/2021 diatur bahwa KPA BUN mengajukan penutupan RIPPEN setelah seluruh dana Investasi Pemerintah PEN selesai ditempatkan pada penerima investasi. Berdasarkan hal tersebut Rekening RIPPEN telah dilakukan penutupan sesuai dengan Surat KPA BUN nomor S-1/KPA999.03.MBU/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kepala Divisi Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri Bank Indonesia nomor No.26/ 26 /DPPT-GKPP-LJP/Srt/B tanggal 18 Januari 2024.

3. Rekening TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

a. Realisasi TDF pada Semester I tahun 2023
   Selama tahun 2022, telah dilakukan penyaluran DBH nontunai berupa TDF kepada 542 pemda dengan total nilai Rp25.132.963.282.524. Sampai dengan Semester I tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 542 pemda dengan total sebesar Rp13.013.685.229.269 dalam IV tahap. Saldo akhir dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda per semester I tahun 2023 sebesar Rp12.119.278.053.255.
b. Realisasi TDF pada Triwulan III tahun 2023
   Pada sepanjang Triwulan III tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 17 pemda dengan total sebesar Rp601.101.922.081 dalam IV tahap. Saldo akhir dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda per 30 September 2023 sebesar Rp11.518.176.131.174.
c. Realisasi TDF pada Triwulan IV tahun 2023
   Pada sepanjang Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 523 pemda dengan total sebesar

Rp11.518.176.131.174 pada tanggal 16 dan 17 Desember 2023 berdasarkan KMK 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023. Penarikan dana TDF berdasarkan KMK dimaksud merupakan penarikan atas Saldo TDF Tahun 2022, sehingga dana TDF yang berasal dari DBH Nontunai Tahun 2022 telah seluruhnya ditarik.

Selain penarikan DBH, pada bulan Desember 2023 terdapat pengisian TDF yang berasal dari penyaluran DBH Nontunai tahun 2023 untuk 354 Pemda pada tanggal 29 Desember 2023 dengan total realisasi sebesar Rp16.237.365.176.000.

Pada tanggal yang sama, terdapat pula penarikan DBH non tunai sebesar Rp686.726.766.950. Penarikan tersebut untuk Kab. Siak, Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Rincian saldo DBH nontunai tahun 2023 yang disimpan dalam Rekening TDF terdapat pada **Lampiran 7F.**

4. <u>Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)</u>

Pada tahun 2023 pemerintah menetapkan PMK Nomor 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima. Pencairan dana ditampung dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sementara itu pembayaran kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Mutasi saldo Dana RPATA sebagai berikut:

a. Mutasi saldo RPATA sejak pembentukan RPATA s.d. 31 Desember 2023

(dalam miliar rupiah)

Jumlah K/L	Nilai Kontrak	Nilai Pembentukan RPATA	Pembayaran RPATA s.d. 31 Desember 2023				SPM Penihilan ke RKUN	Nilai RPATA 31 Desember 2023
			SPM Pembayaran RPATA (Bruto)	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	SPM Pembayaran RPATA (Netto)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4-5-6)	(8)	(9)=(3-4-8)
80 K/L & 1 BUN	89.196,58	23.495,65	2.296,46	2,31	0,24	2.049,61	71,67	21.127,52

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan pembentukan Awal RPATA adalah sebesar Rp23.495.651.494.994. Dari dana tersebut s.d. 31 Desember 2023 dana tersebut telah dilakukan pembayaran bruto sebesar Rp2.296.460.063.000 dan penihilan sebesar Rp71.670.543.796 sehingga per 31 Desember masih terdapat saldo RPATA sebesar Rp21.127.520.888.198. Rincian pada **Lampiran 7H.**

Kebijakan akuntansi pemerintah mengatur bahwa besarnya prestasi pekerjaan, baik barang maupun jasa, per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan harus diakui berdasarkan BAST/BAPP yang ditandatangani oleh satker dan penyedia. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan aset/beban maupun kewajiban sesuai peristiwa ekonomi yang terjadi per 31 Desember 2023.

Terdapat penambahan nilai aset dan beban non aset/jasa yang berasal dari progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 yang pembayarannya pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp14.530.999.469.713 dengan rincian Persediaan Rp3.357.437.055.561 Aset Tetap Rp7.124.579.363.081 Aset Lainnya Rp136.350.234.091 dan Jasa Rp3.912.632.816.980. Penambahan nilai aset dan beban non aset/jasa tersebut juga diiringi dengan penambahan nilai utang kepada pihak ketiga/hak pihak ketiga yang baru dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp14.530.999.469.713. Rincian nilai aset/jasa dan utang per K/L disajikan pada **Lampiran 7J**.

b. Mutasi saldo pada RPATA di tahun 2024

(dalam miliar rupiah)

Nilai RPATA 1 Januari 2024	Pembayaran RPATA di 2024					Penihilan ke RKUN	Nilai RPATA per 1 Mei 2024
	SPM Pembayaran RPATA (Bruto)	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	Potongan - PNBP Lainnya	SPM Pembayaran RPATA (Netto)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-3-4-5)	(7)	(8)=(1-2-7)
21.127,52	19.589,61	392,33	1.934,56	14,79	17.247,93	1.537,91	-

Keterangan: Saldo RPATA per 22 April 2024 adalah sebesar Rp0,00

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan Saldo RPATA per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.127.520.888.198 pada tahun 2024 telah dilakukan SPM Pembayaran sebesar Rp19.589.609.151.385 dan SPM Penihilan sebesar Rp1.537.911.736.813 sehingga saldo RPATA per 22 April 2024 sudah nihil. Rincian nilai pembayaran dan penihilan RPATA pada tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 7I.**

5. <u>Aset KKKS Pada SKK Migas Yang Tidak Disajikan Pada Neraca</u>

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset KKKS pada SKK MIGAS yang tidak disajikan dalam Neraca karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Aset Tanah sebesar Rp11.862.259.593.355,30
2) Aset Harta Benda Modal
   a) Aset sumur yang tidak digunakan USD28,868,861.00
   b) Aset Kondisi Rusak Berat USD41,487,768.00
   c) Aset *Subsequence Expenditure* (SE) USD489,707,715.70

d) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2023 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dengan total nilai USD5,827,210,645.16

e) Aset dalam proses penghapusan.
Terdapat aset yang sudah terjual namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2023 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD154,778,773.94

f) Aset Tidak Ditemukan.
Pada Tahun 2023, terdapat aset tidak ditemukan sebesar USD45,959,594.00 yang merupakan aset eks PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

3) Aset Harta Benda Inventaris.

a) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Posisi Per 31 Desember 2023. Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2023 sebesar USD4,174,813.85

b) Aset Dalam Proses Penghapusan.
Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2023 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD27,197.87

c) Aset Tidak Ditemukan.
Pada Tahun 2023, terdapat aset tidak ditemukan sebesar USD27,522.00

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada Kementerian/Lembaga antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat mencatat aset bersejarah berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sebanyak 1 unit. Gedung tersebut adalah Gedung Merdeka yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.65 RT01/RW04 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat dengan luas 7.646 m^2.

b. Kementerian Pertahanan
Pada Unit Organisasi TNI AD terdapat 1.544 unit terdiri dari Peralatan Dan Mesin 748 unit, Aset Tetap Lainnya 796 unit. Sementara pada UO TNI AL terdapat 8 unit aset bersejarah yang berupa Monumen dan Gedung di antaranya Monumen Yos Sudarso di Tegal, Monumen Bahari/Kapal Selam di Surabaya dan Monumen KKO AL/CA-4 di Pemalang.

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

7. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Pada Tahun 2023 sebanyak 10 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 6 aset diselesaikan sebagian status hukumnya. Sampai dengan Tahun 2023, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 560 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 460 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 83 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 377 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

8. Aset Properti Eks BPPN

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, DJKN telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut, dan sampai dengan saat ini masih terdapat sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

9. Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 BDL baik eks

Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.804.501.675.703, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL. Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.595.333.766.453. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit Rp10.897.165.792.765, aset inventaris Rp1.342.300, aset surat berharga Rp1.524.031.350, dan aset properti eks BDL Rp1.696.642.600.038.

10. <u>Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah</u>

Sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut di antaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait BMN berupa tanah yang belum di dukung dokumen kepemilikan, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah periode sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 124,35% dari target tahunan. Adapun dari total 130.016 NUP BMN

berupa tanah, saat ini telah bersertipikat sebanyak 90.618 NUP, dan selebihnya sebanyak 39.398 NUP belum bersertipikat.

11. <u>Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</u>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai aset SBSN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021, BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan paling tidak yaitu memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. BMN tersebut merupakan BMN yang belum pernah diajukan sebagai aset SBSN atau BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai aset SBSN pada periode sebelumnya.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban, imbalan, dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud, serta BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Adapun total usulan BMN *underlying assets* SBSN selama tahun 2023 dalam rangka penerbitan SBSN Tahun 2024 adalah sebesar Rp200,11 triliun yang selanjutnya dilakukan proses *due diligence* oleh Konsultan Hukum.

Penggunaan BMN memiliki peran penting dalam penerbitan SBSN, yang dapat dilihat dari besarnya nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. *Outstanding* SBSN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.431.550.915.237.030. *Outstanding* penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2023 yang menggunakan BMN sebagai dasar penerbitannya adalah sebesar Rp809,97 triliun. *Resume*

Penggunaan BMN sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN dapat dilihat pada **Lampiran 31.**

Selain penggunaan BMN sebagai aset SBSN, keterkaitan lain BMN dalam penerbitan SBSN yaitu digunakannya proyek pengadaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN atau disebut dengan *project underlying*. *Output* berupa BMN yang dihasilkan dari proyek pengadaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak akan digunakan sebagai aset SBSN selama *project underlying* belum selesai. Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2023 yang terdiri dari *project underlying* adalah sebesar Rp576,88 triliun.

Dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, sejak tahun 2020 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset,* khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Sementara itu untuk menghindari penggunaan BMN yang tidak layak digunakan sebagai *underlying asset* SBSN, secara reguler dilakukan penggantian atas BMN yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prinsip Syariah (sengketa, kondisi rusak berat dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN).

12. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Desember Tahun 2023, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan.

Dalam APBN TA 2023 telah dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp330,5 miliar (Rp296,15 miliar untuk program percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan Rp34,35 miliar untuk program penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang telah direalisasikan untuk dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 sebesar Rp11,81 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp406,87 miliar.

13. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp12.452.878.178 dengan rincian sebagai berikut.

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2022 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2023 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2023 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2023 (Rp)
PT Pertamina	12.452.878.178	0	12.452.878.178	0
Jumlah	12.452.878.178	0	12.452.878.178	0

Nilai BPYBDS sebesar Rp12.452.878.178,53 merupakan BPYBDS pada PT Pertamina dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Rincian aset adalah sebagai berikut.

No	Rincian BPYBDS	Nilai (Rp)
1	DPPU Bandara Hasanudin Makassar Tahap II- Instalasi *Refueling Apron*	3.042.863.450
2	Fasilitas DPPU Bandara Juanda Surabaya- *Fuel Hydrant Facilities*	9.410.014.728
TOTAL		12.452.878.178

b. Melalui surat Sekjen Kementerian Perhubungan Nomor PL.201/6/25 PHB 2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Tindaklanjut BPYBDS di Lingkungan Kementerian Perhubungan menyampaikan:
   1) Surat komitmen berupa surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) nomor 251/C00000/2023-S4 tanggal 20 Juni 2023 hal Konfirmasi Kesediaan Menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) berupa *Refueling Apron* pada Bandar Udara Hasanuddin Makassar dan *Fuel Hydrant Facilities* pada Bandara Udara Juanda Surabaya.
   2) Telah ditandatangani BAST Pengembalian Aset BPYBDS *Refueling Apron* pada Bandar Udara Hasanuddin Makassar dan *Fuel Hydrant Facilities* pada Bandara Udara Juanda Surabaya dari PT Pertamina (Persero) kepada Dirjen Perhubungan Udara nomor BA-002/C00000/2023-S0 dan BA.59 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023.
   3) Kementerian Perhubungan akan mengusulkan PMPP mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

14. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Selama Tahun 2023, terdapat 1 PDAM telah selesai proses penyelesaian piutang negara, yaitu PDAM Kota Ambon melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2023 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon tanggal 14 Juli 2023 dengan Nilai Piutang Non Pokok sebesar Rp589.182.544.

15. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat lima Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut.

a. Satu Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi pelaksanaan *debt swap* yaitu pemprov Maluku;
b. Satu Pemda telah mendapat penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang Negara non pokok oleh Presiden dan saat ini masih melaksanakan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara;
c. Satu Pemda telah mendapat penetapan penghapusan secara bersyarat piutang negara non pokok oleh Presiden dan telah melunasi pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Tengah. Pemkab Lampung Tengah saat ini dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak;
d. Satu Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak yaitu Pemkot Makassar;
e. Satu Pemda dalam proses cicilan melalui potongan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

16. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Nilai kewajiban jangka Panjang program pensiun per 31 Desember 2023 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-234/AG/2024 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Aktuaris mengenai Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp3.120.693.808.287.170 dengan rincian:

a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp1.202.943.295.577.480.
b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp1.917.750.512.709.690.

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2023 tersebut dapat terbagi juga sebagai berikut.

a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.279.357.149.733.055.
b. Kewajiban terhadap pensiunan sebesar Rp1.841.336.658.554.116.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1013/MK.02/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Revisi Persetujuan Metode dan Asumsi Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2023, metode dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KMPMD Program THT adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	2023
Metode Asumsi:	GPV	GPV
Based on data	31 Januari 2022	31 Januari 2023
Bunga Aktuaria	9,50%	7,50%
Kenaikan gaji	Sesuai hasil studi	Sesuai hasil studi
Selisih usia pasangan	perusahaan	perusahaan
Selisih usia dengan anak	Data aktual	Data aktual
Batas usia	Data aktual	Data aktual
Laju Kematian	Data aktual	Data aktual
Inflasi	Sesuai studi terkini	TNA 2016
	Data aktual	Data aktual

Berdasarkan persetujuan metode dan asumsi tersebut, PT Asabri (Persero) melakukan perhitungan KMPMD sesuai dengan data peserta pada tanggal 31 Desember 2023. Terdapat selisih perhitungan antara KMPMD dengan suku bunga 7,5% dengan suku bunga 9,5%. Sesuai dengan PMK Nomor 86 Tahun 2023 bahwa kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh perubahan metode dan asumsi (dalam hal sesuai S1031/MK.02/2023) diakui sebagai *Unfunded Past Service Liability* (UPSL).

Atas perubahan metode dan asumsi tersebut, Menteri Keuangan melalui Surat nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Asabri (Persero) Tahun 2023 menyatakan antara lain terdapat UPSL pada program THT yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) di tahun 2023 sebesar Rp5.171.631.486.375. Atas penetapan tersebut, masih akan dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

17. <u>Unit Badan Lainnya</u>

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai amanat peraturan perundangan-undangan dan/atau

mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga di mana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen dan dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023, terhadap 70 UBL yang terdiri dari UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 UBL dan UBL Bukan Satker sebanyak 8 UBL. Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut di atas disajikan dalam **Lampiran 30A.**

18. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara melalu mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Tahun 2023

UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan penambahan PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN (PMPP) kepada PT ASDP Indonesia Ferry, Perum DAMRI, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Brantas Abipraya, dan PT Sejahtera Eka Graha. Pada tahun 2023 telah diterbitkan PP PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN kepada PT ASDP Indonesia Ferry, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan PT Brantas Abipraya, adapun untuk Perum DAMRI dan PT Sejahtera Eka Graha belum diterbitkan PP PMPP-nya.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

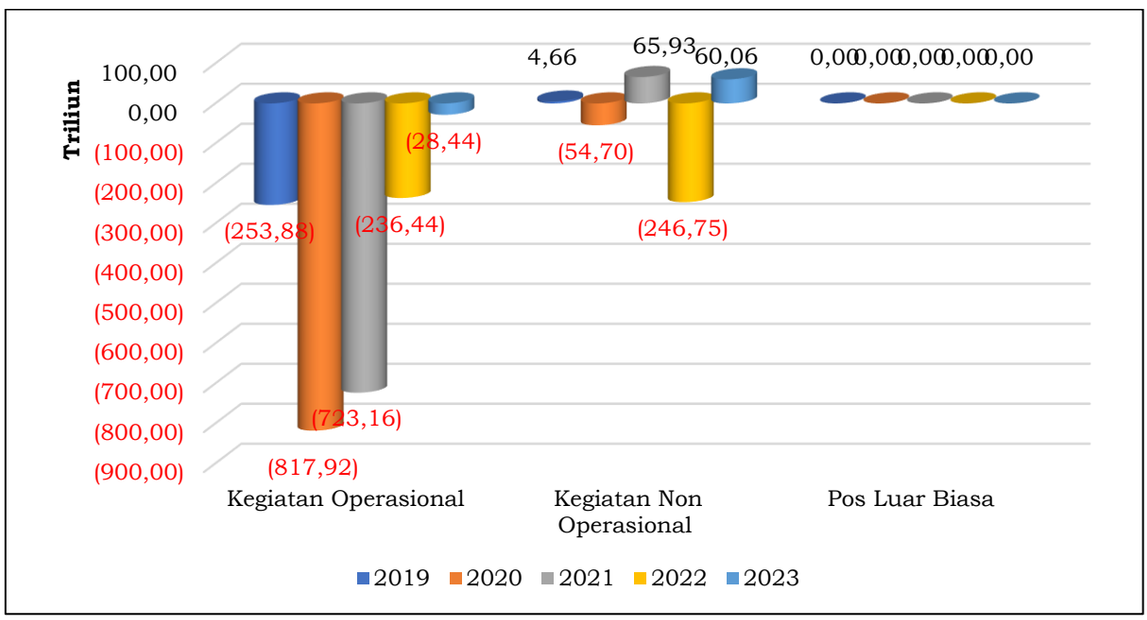
Surplus LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp31.626.165.809.863. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp511.898.604.826.555 atau 106,59 persen dibandingkan Tahun 2022 yang defisit sebesar Rp480.272.439.016.692. Surplus LO Tahun 2023 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp28.438.558.384.404 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60.064.724.194.267, serta Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp28.438.558.384.404, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp3.083.233.607.814.728 dan Beban Operasional sebesar Rp3.111.672.166.199.132.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60.064.724.194.267, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset sebesar Rp17.310.557.403.319, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp431.442.410.900 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp77.806.724.008.486.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 37.**

Grafik 37
Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2019 - 2023



E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1. KEGIATAN OPERASIONAL

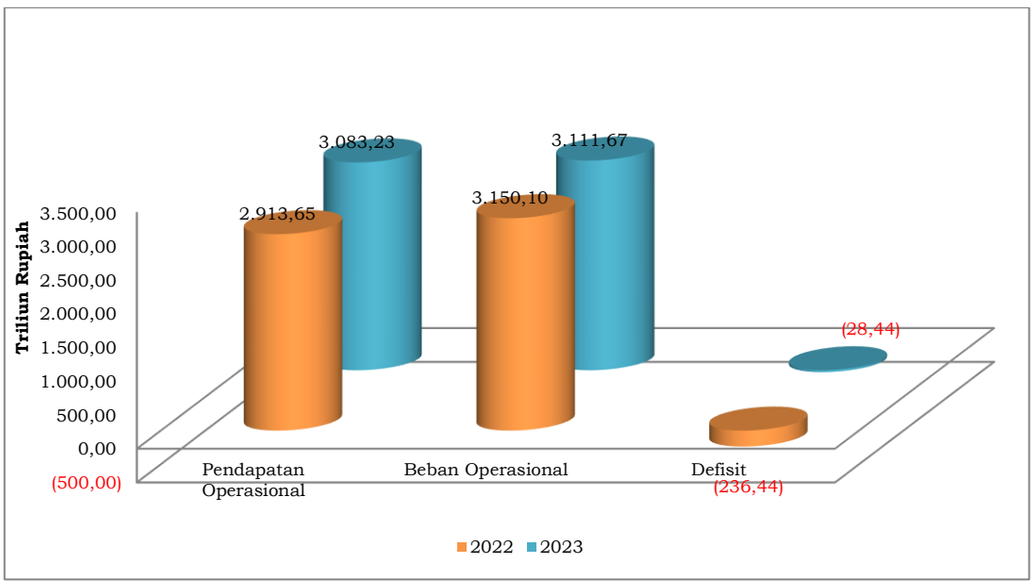
Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, dan Pendapatan Bea Keluar. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan Beban Lain-lain.

Defisit Tahun 2023 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp28.438.558.384.404. Nilai tersebut naik sebesar Rp208.111.898.118.073 atau 87,98 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar minus Rp236.550.456.502.477. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 38**.

Grafik 38
Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun 2023 dan 2022

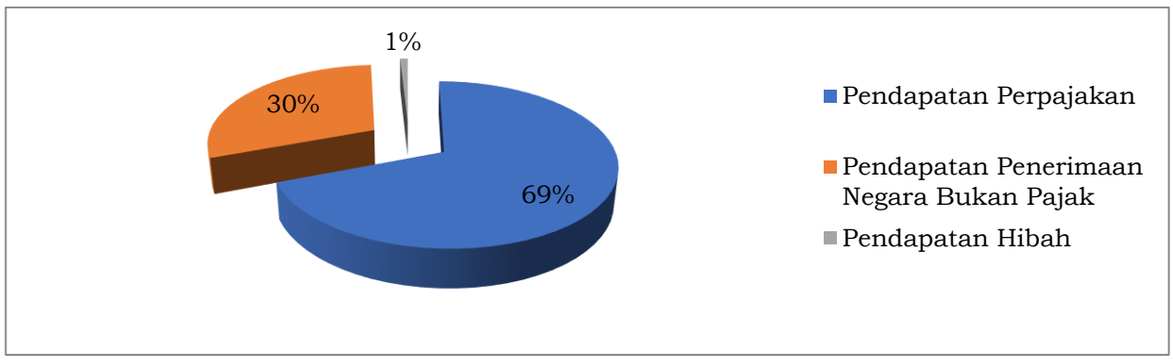


E.2.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp3.083.233.607.814.728 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.134.806.788.394.291, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp921.576.932.943.096, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp26.849.886.477.341. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2023 meningkat sebesar Rp169.579.544.053.577 atau 5,82 persen dibanding Tahun 2022 sebesar Rp2.913.654.063.761.151. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada **Grafik 39.**

Grafik 39
Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2023



E.2.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2023, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp2.134.806.788.394.291. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp100.339.521.966.672 atau 4,93 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp2.034.467.266.427.619. Rincian Pendapatan Perpajakan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.056.264.876.071.451	991.488.696.172.421
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	749.872.917.946.326	694.776.882.555.958
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	35.111.968.220.488	23.761.243.871.403
Pendapatan Cukai	218.828.516.227.555	226.661.405.402.388
Pendapatan Pajak Lainnya	9.962.359.820.249	6.779.467.430.496
Pendapatan Bea Masuk	50.951.896.485.742	51.215.480.999.153
Pendapatan Bea Keluar	13.814.253.622.480	39.784.089.995.800
Total	**2.134.806.788.394.291**	**2.034.467.266.427.619**

Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan terutama di Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai. Meningkatnya penerimaan perpajakan pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan antara lain berupa pengawasan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi untuk perpajakan, dan intensifikasi pemajakan ekonomi digital. Secara umum, kinerja pendapatan mengalami kenaikan, kecuali Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

E.2.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.056.264.876.071.451. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp64.776.179.899.030 atau 6,53 persen dibanding Tahun 2022 sebesar Rp991.488.696.172.421. Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	22.940.477.064.534	30.045.226.895.589
Pendapatan PPh Gas Bumi	45.874.280.254.549	48.237.728.525.158
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.572.224.727	3.108.450.219
Pendapatan PPh Pasal 21	201.186.176.672.685	172.263.756.859.453
Pendapatan PPh Pasal 22	34.117.835.702.959	33.092.265.452.519
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	69.534.204.345.819	74.171.052.321.539
Pendapatan PPh Pasal 23	58.450.222.301.338	48.768.369.062.926
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.623.982.112.669	11.702.755.442.894
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	408.235.004.516.176	341.628.396.296.017
Pendapatan PPh Pasal 26	77.391.327.914.654	65.621.586.072.029
Pendapatan PPh Final	125.757.096.159.889	165.825.105.087.807
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	152.696.801.452	129.345.706.271
Jumlah	**1.056.264.876.071.451**	**991.488.696.172.421**

Secara nominal, Pendapatan PPh merupakan penerimaan dengan kontribusi terbesar terhadap capaian penerimaan nasional. Kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2023 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Pasal 21, dan Pendapatan PPh Pasal 26. Selain itu, terdapat beberapa PPh yang mengalami penurunan dibandingkan kinerja periode sebelumnya antara lain PPh Pasal 22 Impor yang disebabkan oleh penurunan nilai impor Indonesia serta PPh Final yang antara lain disebabkan oleh tidak berulangnya kebijakan PPS.

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga, meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Peningkatan PPh Pasal 21 ditopang oleh perbaikan utilitas dan upah tenaga kerja. Lain halnya dengan Pendapatan PPh Pasal 26 yang ditopang dengan kinerja positif korporasi di Indonesia turut menaikkan pembayaran dividen, bunga, dan royalti ke luar negeri.

E.2.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023 adalah sebesar Rp749.872.917.946.326. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.096.035.390.368 atau 7,93 persen dibandingkan periode Tahun 2022 sebesar Rp694.776.882.555.958.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	462.317.035.003.923	398.485.314.629.457
Pendapatan PPN Impor	255.641.181.915.144	270.821.002.576.887
Pendapatan PPN Lainnya	8.010.587.913.149	6.158.822.277.509
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16.795.565.871.666	14.423.116.123.422
Pendapatan PPnBM Impor	7.107.546.458.786	4.888.182.483.058
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.000.783.658	444.465.625
Jumlah	**749.872.917.946.326**	**694.776.882.555.958**

Pendapatan PPN mengalami kenaikan yang ditopang oleh peningkatan kinerja PPN Dalam Negeri, PPN Lainnya, dan PPnBM Dalam Negeri. Pesatnya peningkatan Pendapatan PPN Dalam Negeri disebabkan oleh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Sementara itu, penurunan dalam terjadi pada Pendapatan PPN Impor yang memiliki kontribusi yang besar namun mengalami penurunan pendapatan dikarenakan turunnya nilai Impor Indonesia.

E.2.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.111.968.220.488. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.350.724.349.085 atau 47,77 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp23.761.243.871.403. Rincian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan PBB Perkebunan	3.364.879.808.126	2.961.879.230.320
Pendapatan PBB Kehutanan	838.602.241.073	744.942.773.914
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	12.193.691.522.005	5.560.347.686.129
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	18.030.357.168.131	14.084.911.886.945
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	618.233.513.493	494.214.270.643
Pendapatan PBB Lainnya	66.203.967.660	(85.051.976.548)
Jumlah	**35.111.968.220.488**	**23.761.243.871.403**

Pertumbuhan positif Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini terutama disebabkan naiknya kinerja PBB Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan kinerja PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.2.1.1.1.4. Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Tahun 2023 mencapai nilai Rp218.828.516.227.555. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.832.889.174.833 atau 3,46 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp226.661.405.402.388. Rincian Pendapatan Cukai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	210.290.310.431.136	218.305.015.819.946
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	126.729.867.000	128.695.026.195
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.088.201.742.000	8.159.188.444.990
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	283.980.874.000	47.267.491.598
Pendapatan Cukai Lainnya	39.293.313.419	21.238.619.659
Jumlah	**218.828.516.227.555**	**226.661.405.402.388**

Penurunan Pendapatan Cukai Tahun 2023 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Cukai Hasil Tembakau TA 2023 antara lain penurunan produksi sampai dengan bulan Oktober, produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 yang masih menurun dan *shifting* konsumsi rokok yang lebih murah, serta penurunan produksi hasil tembakau.

Perbedaan atas Pendapatan Cukai pada LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
411511	Pendapatan Cukai hasil Tembakau	210.290.310.431.136	213.497.773.071.725	(3.207.462.640.589)
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	126.729.867.000	127.918.170.000	(1.188.303.000)
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	8.088.201.742.000	8.103.897.479.000	(15.695.737.000)
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	283.980.874.000	104.242.719.000	179.738.155.000
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	39.293.313.419	17.313.103.000	21.980.210.419
Jumlah		**218.828.516.227.555**	**221.851.144.542.725**	**(3.022.628.315.170)**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Cukai berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Cukai, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Cukai), adanya penghapusan piutang dan koreksi lainnya atas piutang.

E.2.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.962.359.820.249. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.182.892.389.753 atau 46,95 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp6.779.467.430.496. Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bea Materai	1.223.134.338.946	1.074.469.041.161
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.470.840.719.647	5.661.404.285.336
Pendapatan PPn Batubara	196.395.808.289	417.224.046.910
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.797.155.830	(68.442.962)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.573.551.129.574	(536.317.612.741)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	477.836.481.408	171.677.457.146
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	6.410.033.324	(1.227.446.796)
Pendapatan Denda Penagihan PPh	729.772.787	-
Pendapatan Denda Penagihan PPN	12.174.652	-
Pendapatan Pajak Lain-Lain	9.652.205.792	(7.693.897.558)
Jumlah	**9.962.359.820.249**	**6.779.467.430.496**

Kenaikan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bunga Penagihan PPN dan Pendapatan Bea Materai.

Pendapatan negatif pada beberapa pos Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2022 disebabkan oleh penyesuaian akrual atas pendapatan yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya dan mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran bersangkutan.

E.2.1.1.1.6. Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.951.896.485.742. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp263.584.513.411 atau 0,51 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp51.215.480.999.153. Rincian Pendapatan Bea Masuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk (pokok)	47.007.953.096.112	45.518.777.860.801
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	980.673.878.926	835.766.833.691
Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	424.068.178.662	1.065.699.527.275
Pendapatan Pabean Lainnya	67.748.558.042	100.899.875.044
Pendapatan Bea Masuk *Antidumping*	299.503.535.000	319.832.520.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	2.171.949.239.000	3.374.504.382.342
Jumlah	**50.951.896.485.742**	**51.215.480.999.153**

Penurunan Pendapatan Bea Masuk disebabkan oleh turunnya nilai impor dan bea masuk dari komoditas utama seperti gas alam, suku cadang, kendaraan, barang dari logam untuk bangunan, besi baja dasar dan bahan baku plastik.

Perbedaan atas Pendapatan Bea Masuk pada LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
412111	Pendapatan Bea Masuk (pokok)	47.007.953.096.112	47.031.645.101.860	(23.692.005.748)
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	5.321.000	(5.321.000)
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	980.673.878.926	991.256.259.179	(10.582.380.253)
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)	424.068.178.662	402.746.814.511	21.321.364.151
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	67.748.558.042	7.792.099.320	59.956.458.722
412121	Pendapatan Bea Masuk *Antidumping*	299.503.535.000	301.082.959.000	(1.579.424.000)
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	2.171.949.239.000	2.157.234.342.000	14.714.897.000
Jumlah		**50.951.896.485.742**	**50.891.762.896.870**	**60.133.588.872**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Bea Masuk berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk), Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, dan adanya penghapusan piutang.

E.2.1.1.1.7. Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2023 mencapai Rp13.814.253.622.480. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.969.836.373.320 atau 65,28 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp39.784.089.995.800. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Dengan rincian Pendapatan Bea Keluar Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bea Keluar (pokok)	13.812.270.982.754	39.743.520.644.044
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	601.387.726	39.754.054.756
Pendapatan Bunga Bea Keluar	1.381.252.000	815.297.000
Jumlah	**13.814.253.622.480**	**39.784.089.995.800**

Penurunan Pendapatan Bea Keluar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Bea Keluar produk sawit mengalami penurunan harga meskipun volume tumbuh dan Bea Keluar Bauksit mengalami penurunan semenjak Maret karena berhenti ekspor.

Perbedaan atas Pendapatan Bea Keluar pada LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
412211	Pendapatan Bea Keluar (pokok)	13.812.270.982.754	13.597.383.848.543	214.887.134.211
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	601.387.726	619.652.000	(18.264.274)
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	1.381.252.000	168.067.000	1.213.185.000
Jumlah		**13.814.253.622.480**	**13.598.171.567.543**	**216.082.054.937**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Bea Keluar dapat berasal dari penyesuaian terkait Piutang Bea Keluar, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar), mutasi PYMHD, adanya penghapusan piutang dan koreksi atas piutang.

E.2.1.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2023 sebesar Rp921.576.932.943.096 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp280.285.831.628.760, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp4.529.734, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp543.920.213.490.935, dan Pendapatan BLU sebesar

Rp97.370.883.293.667. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp60.252.041.293.814 atau 7,00 persen dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp861.324.891.649.282.

E.2.1.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp280.285.831.628.760. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.838.831.944.397 atau 7,23 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp302.124.663.573.157. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	105.109.342.931.994	136.951.787.024.759
Pendapatan Gas Bumi	37.150.123.354.087	42.613.602.339.465
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.154.642.269.162	1.113.983.684.085
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	123.941.672.734.325	110.389.372.030.421
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.717.621.028.239	1.853.780.427.110
Pendapatan Dana Reboisasi	1.556.237.095.717	1.620.248.923.067
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.068.152.455.166	1.134.585.173.313
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	33.417.084.550	34.444.994.150
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.201.265.574.932	2.203.375.034.569
Pendapatan Perikanan	637.161.520.387	1.193.172.107.213
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	3.586.160.908.554	2.888.250.904.570
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	30.858.255.740	30.860.599.185
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	99.176.415.907	97.200.331.250
Jumlah	**280.285.831.628.760**	**302.124.663.573.157**

Penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam disebabkan menurunnya realisasi ICP dan *lifting* migas pada tahun 2023. Sedangkan menurunnya Pendapatan Minyak Bumi disebabkan oleh realisasi ICP yang mencapai USD76,46 per barel untuk periode Desember 2022 – Mei 2023 atau 84,96 persen dari target ICP APBN TA 2023 dan USD76,41 per barel untuk periode Januari 2023 – Mei 2023 atau hanya mencapai 84,90 persen dari target ICP APBN TA 2023 di mana target ICP yang ditetapkan pada APBN TA 2023 sebesar USD90 per barel.

E.2.1.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Pada Tahun 2023, Pendapatan dari KND sebesar Rp4.529.734 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp3.710.159 atau 452,69 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp819.575. Keseluruhan nilai pendapatan ini pada 2023 berasal dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN.

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN yang berasal dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun Buku 2022. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan - LO merupakan pendapatan bagian laba BUMN yang berasal dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dengan pencatatan metode biaya. Metode biaya digunakan untuk penilaian Investasi Pemerintah pada PMN apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20 persen dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau minoritas.

Rincian penerimaan bagian pemerintah dari pembagian dividen secara tunai berdasarkan porsi kepemilikan minoritas adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	10	19
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	4.529.724	819.556
Jumlah	**4.529.734**	**819.575**

Rincian atas BUMN dengan porsi kepemilikan minoritas dapat dilihat pada **Lampiran 2.B**

E.2.1.1.2.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp543.920.213.490.935. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp71.392.137.908.118 atau 15,11 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp472.528.075.582.817. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	42.483.333.867.949	70.108.871.261.211
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	708.730.791.176	619.042.134.832
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	908.875.863.634	787.404.150.492
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.652.767.360	56.159.419.587
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	14.417.065.658.390	21.525.322.530.579
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.778.109.382.385	2.364.886.285.713
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**61.368.768.330.894**	**95.461.685.782.414**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	9.626.635.833.798	6.541.299.784.963
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	509.819.813.697	422.739.871.812
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	578.449.449.327	781.793.771.940
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	23.296.677.331.512	5.480.179.150.296
Pendapatan Perizinan	2.964.813.003.861	2.369.844.138.630
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.202.610.800.522	7.870.502.949.590
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.172.405.490.388	1.071.915.587.038
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	696.053.253.088	691.401.355.053
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**47.047.464.976.193**	**25.229.676.609.322**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.600.647.562.834	2.468.683.165.421

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	240.530.887.500	226.260.314.750
Pendapatan Jasa Karantina	322.983.556.248	317.459.813.356
Pendapatan Jasa Agraria	4.657.061.644.517	1.576.713.894.900
Pendapatan Jasa Keagamaan	768.302.934.599	810.380.635.110
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	**8.589.526.585.698**	**5.399.497.823.537**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	2.580.098.432.581	3.556.190.737.930
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	309.279.371.381	330.173.502.608
Pendapatan Penelitian/Riset, *Survey*, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	511.947.174.013	412.600.845.103
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	3.971.589.587	7.131.333.420
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	**3.405.296.567.562**	**4.306.096.419.061**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.930.113.209.555	6.994.083.265.658
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	22.729.932.162.121	20.851.281.138.741
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	148.752.222.360	131.749.534.921
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	**29.808.797.594.036**	**27.977.113.939.320**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	184.953.289.494	392.979.703.916
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	92.490.733.555	80.012.226.662
Pendapatan Jasa Lainnya	896.973.483.136	198.113.209.314
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	**1.174.417.506.185**	**671.105.139.892**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	3.080.972.730.755	2.540.897.217.368
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	6.678.728.494.095	7.345.761.468.900

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan *Fee* Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	383.107.306.315	319.738.176.863
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	125.973.688.091	114.334.310.756
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	28.360.117.712.074	14.583.292.435.680
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	1.064.702.905.584	935.505.219.195
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**39.693.602.836.914**	**25.839.528.828.762**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	750.843.219.459	3.128.002.408.658
Pendapatan Denda II	718.333.905.791	253.283.172.358
Pendapatan Denda III	7.198.961.209.927	843.710.517.141
Subtotal Pendapatan Denda	**8.668.138.335.177**	**4.224.996.098.157**
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	778.369.517	203.371.209.038
Pendapatan Lain-Lain II	34.066.780.213.146	24.425.043.841.201
Subtotal Pendapatan Lain-lain	**34.067.558.582.663**	**24.628.415.050.239**
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	308.607.481.035.758	257.942.187.968.841
Pendapatan Sitaan/Rampasan	1.489.161.139.855	847.771.923.272
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual	**310.096.642.175.613**	**258.789.959.892.113**
Jumlah PNBP Lainnya	**543.920.213.490.935**	**472.528.075.582.817**

Kenaikan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2023 yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dan Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp308.607.481.035.758, berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha *(investee)* yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1) Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp235.905.029.079.745 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh kenaikan laba yang dicatatkan oleh BUMN Persero sebagian besar dicatatkan oleh laba BUMN klaster energi, perbankan, minerba, jasa pariwisata, dan telekomunikasi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pengakuan laba kurs pada PT. Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), pertumbuhan kredit perbankan Bank BUMN, pengakuan laba pada PT Freeport oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero), peningkatan pendapatan dari segmen *airport management* & *airport business* pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), peningkatan penjualan data dan jasa TI PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., pengakuan *gain* atas *fair value* kombinasi bisnis bertahap pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta keuntungan atas penjualan hak pengusahaan jalan tol pada PT Hutama Karya (Persero).
2) Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp7.885.124.100.945, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan terbesar terdapat pada Badan Usaha Lainnya.
3) Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp11.283.040 merupakan bagi hasil dari deposito mudarabah yang diakui pada tanggal laporan yang diinvestasikan kembali dengan menambahkan pada pokok investasi. Adapun deposito dimaksud merupakan setoran modal Pemerintah yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan telah ditempatkan pada rekening atas nama Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, Perusahaan Penerbit SBSN V pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Thamrin, Jakarta.
4) Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp64.688.635.973.193 terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari kenaikan investasi permanen lainnya.
5) Pendapatan Penyesuaian Tahun 2023 pada Direktorat SMI DJPb sebesar Rp29.791.828.380 di mana terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan kenaikan nilai wajar investasi LPDP yang sesuai PMK nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah termasuk dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale* dan *held to maturity* diskonto.
6) Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp54.529.660.743 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera Tahun 2023 *Audited*.

7) Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi milik KPA LDKPI dengan nilai sebesar Rp7.289.148.913. Pendapatan tersebut berupa pendapatan PNBP lainnya yang merupakan amortisasi atas penempatan dana pada instrumen investasi yang diperoleh dengan nilai diskonto. Pendapatan atas pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaporkan sebagai PNBP pada laporan keuangan LDKPI selaku Satker BA 015.
8) Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah sebesar Rp37.069.960.799. Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi tersebut merupakan bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional yang dibukukan pada Laporan Keuangan Badan Bank Tanah Tahun 2023 *Audited.*

Selain Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi yang mengalami kenaikan, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang disebabkan adanya peningkatan pendapatan terkait uang pengganti tindak pidana korupsi yang sudah *inkracht* pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Tahun 2023 adalah sebesar Rp97.370.883.293.667. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.698.731.619.934 atau 12,34 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp86.672.151.673.733. Pendapatan BLU Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
a. Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	41.697.543.672.854	35.822.223.632.926
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.497.820.590.827	1.395.211.748.312
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	42.887.769.491.904	42.114.210.144.714
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	1.075.397.515.047	2.282.156.636.505
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	**88.158.531.270.632**	**81.613.802.162.457**
b. Pendapatan Hibah BLU	**793.400.134.748**	**650.214.277.309**
c. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	**1.413.537.192.274**	**1.013.062.425.947**
d. Pendapatan dari Alokasi APBN	**218.945.635.657**	**(681.062.277.835)**
e. Pendapatan BLU Lainnya	**6.786.469.060.356**	**4.076.135.085.855**
Jumlah	**97.370.883.293.667**	**86.672.151.673.733**

Kenaikan Pendapatan Badan Layanan Umum terbesar terdapat pada Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sedangkan nilai terbesar terdapat pada Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat. Komponen-komponen tersebut termasuk pada Pendapatan Jasa Layanan Umum.

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa mengalami kenaikan pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan. Nilai Pendapatan dari Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat terbesar terdapat pada Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2023 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

E.2.1.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.849.886.477.341. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.987.980.793.091 atau 50,32 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp17.861.905.684.250. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	3.274.761.499.466	3.587.433.576.302
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	45.477.730.108	108.712.509.416
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	15.361.429.146.772	2.672.694.521.172
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**18.681.668.376.346**	**6.368.840.606.890**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	423.174.970.047	581.693.945.628
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	2.393.230.936.908	4.749.496.033.745
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.999.627.682.797	3.763.137.991.214
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.399.554.762.906	2.437.510.591.595
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	**8.215.588.352.658**	**11.531.838.562.182**
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	**(47.370.251.663)**	**(38.773.484.822)**
Jumlah Pendapatan Hibah	**26.849.886.477.341**	**17.861.905.684.250**

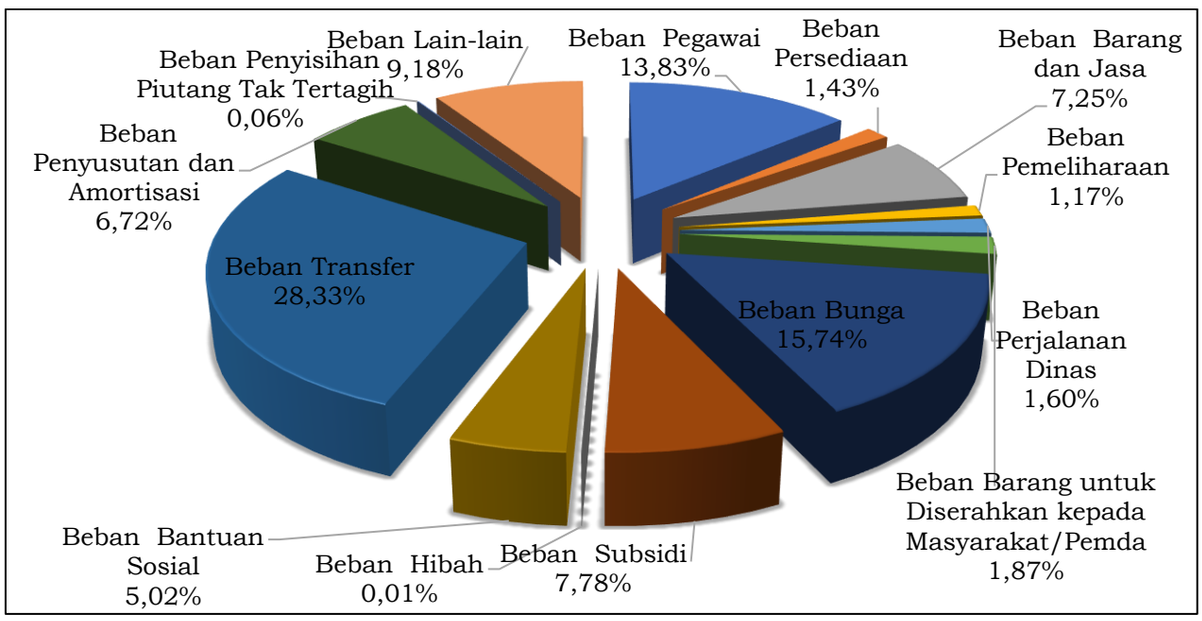
Kenaikan Pendapatan Hibah sebagian besar antara lain disebabkan oleh realisasi pendapatan hibah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak guna pengamanan pilkada yang diterima oleh TNI dan Polri dan untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

E.2.1.2. Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.111.672.166.199.132. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.532.354.064.496 atau 1,22 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.150.204.520.263.628. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada **Grafik 40.**

Grafik 40
Komposisi Beban Operasional Tahun 2023



Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Pegawai	430.426.321.089.044	437.358.559.450.073
Beban Persediaan	44.418.157.818.790	45.630.752.459.661
Beban Barang dan Jasa	225.621.287.655.753	213.785.019.546.865
Beban Pemeliharaan	36.518.876.440.164	38.042.529.811.315
Beban Perjalanan Dinas	49.900.388.208.994	39.376.367.717.653
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	58.308.588.088.465	66.751.421.939.778
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	489.648.053.202.050	409.393.545.381.079
Beban Subsidi	242.021.207.563.568	244.383.233.896.683
Beban Hibah	219.140.718.777	5.803.272.496.643
Beban Bantuan Sosial	156.341.091.530.982	163.486.863.969.805
Beban Transfer	881.390.373.057.804	819.069.477.047.347
Beban Penyusutan dan Amortisasi	209.244.320.645.414	219.860.952.898.605
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.928.970.209.539	37.081.212.202.077
Beban Lain-Lain	285.685.389.969.788	410.181.311.446.044
Jumlah	**3.111.672.166.199.132**	**3.150.204.520.263.628**

E.2.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp430.426.321.089.044. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.932.238.361.029 atau 1,59 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp437.358.559.450.073. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	86.409.241.180.350	86.846.399.655.893
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	65.784.408.013.485	64.668.010.282.132
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.445.977.632.407	1.451.528.349.300
Beban Gaji Dokter PTT	971.858.800	1.414.494.400
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	20.466.091.960.424	18.380.569.253.045
Beban Honorarium	1.514.960.016.547	1.490.513.014.705
Beban Lembur	906.145.827.468	902.560.852.419
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	85.892.306.111.679	84.063.478.275.992
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	143.853.310.805.044	155.975.811.846.319
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	11.162.280.566.968	10.849.409.746.588
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	12.990.627.115.872	12.728.863.679.280
Jumlah	**430.426.321.089.044**	**437.358.559.450.073**

Beban Pegawai Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana nilai penurunan tertinggi terdapat pada Beban Pensiun dan Uang Tunggu. Salah satu faktornya karena penurunan Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*).

Kementerian/Lembaga dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 yang signifikan adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan.

E.2.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp44.418.157.818.790. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.212.594.640.871 atau 2,66 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp45.630.752.459.661. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Persediaan Konsumsi	32.572.120.893.472	34.864.430.619.914
Beban Persediaan Amunisi	2.074.393.867.755	1.352.861.789.934
Beban Persediaan Bahan Baku	1.254.714.666.361	1.159.666.145.247
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	22.493.753.564	12.593.326.712
Beban Persediaan Lainnya	8.494.434.637.638	8.241.200.577.854
Jumlah	**44.418.157.818.790**	**45.630.752.459.661**

Secara umum Beban Persediaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terlihat pada komponen Beban Persediaan Konsumsi yang menurun signifikan. Menurunnya beban ini karena berkurangnya persediaan dan pemakaian persediaan berupa vaksin Covid-19. Nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp225.621.287.655.753. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.836.268.108.888 atau 5,54 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp213.785.019.546.865. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Barang Operasional	45.196.400.165.690	43.476.046.117.025
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	89.467.700.074	767.827.766.421
Beban Barang Non Operasional	80.097.954.547.330	60.281.131.966.047
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	18.959.696.536	9.793.028.123.508
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund*	1.083.024.922.213	942.746.122.110
Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	356.179.054.179	170.296.846.344
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	1.401.380.000	1.463.345.000
Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi Covid-19	10.047.885.858	12.076.357.599
Beban Langganan Daya dan Jasa	8.600.595.261.309	7.580.790.740.173
Beban Jasa Pos dan Giro	14.134.054.305	12.498.367.728
Beban Jasa Konsultan	5.980.822.578.975	6.523.520.911.804
Beban Sewa	11.345.929.593.136	8.706.140.601.368
Beban Jasa Profesi	3.567.290.758.048	3.281.833.275.120
Beban Jasa kepada BLU	17.716.434.174	14.577.229.494
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	304.877.715.000	285.947.915.000

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	7.538.361.198	1.349.719.163
Beban Jasa Lainnya	23.425.113.875.275	17.272.333.330.601
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	27.243.563.835	1.482.251.249.513
Beban Barang dan Jasa BLU	45.053.394.018.044	52.428.355.981.695
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	3.823.585.200	9.598.126.933
Beban Barang dan Jasa BLU II	213.947.448.383	470.898.910.651
Beban Barang Ekstrakomptabel BLU	45.621.804.993	10.028.474.031
Beban Aset Ekstrakomptabel	159.803.251.998	260.278.069.537
Jumlah	**225.621.287.655.753**	**213.785.019.546.865**

Beban Barang dan Jasa terbesar terdapat pada komponen Beban Barang Non Operasional di mana kenaikan terbesar terdapat pada Beban Honor *Output* Kegiatan, utamanya pada Komisi Pemilihan Umum dengan nilai Rp10.080.433.682.180. Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp36.518.876.440.164. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.523.653.371.151 atau 4,01 persen dibandingkan periode Tahun 2022 sebesar Rp38.042.529.811.315. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.488.925.169.428	6.012.086.680.636
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	118.309.752.041	77.571.752.053
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	547.672.780	8.650.498.642
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	371.548.571.007	396.019.239.774
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.014.363.567.074	11.323.283.610.746
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	2.174.878.943.781	3.625.363.148.871

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	29.566.370.576	6.754.490.966
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.012.345.493	257.347.568.738
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.926.807.057.536	4.414.575.342.652
Beban Pemeliharaan Irigasi	1.163.765.465.688	1.294.238.762.336
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.537.575.758.493	3.121.409.344.806
Beban Pemeliharaan Lainnya	402.967.721.163	578.204.434.986
Beban Barang dan Jasa BLU-Beban Pemeliharaan	1.647.751.887.067	1.598.567.302.079
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	2.575.000	690.487.261
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	359.929.028.457	332.337.527.740
Beban Persediaan Suku Cadang	5.019.159.157.141	4.972.202.510.903
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	10.765.397.439	23.227.108.126
Jumlah	**36.518.876.440.164**	**38.042.529.811.315**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina pada Kementerian Pertahanan dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan nilai terbesar pada beban ini terdapat pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Beban tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisan Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp49.900.388.208.994. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.524.020.491.341 atau 26,73 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp39.376.367.717.653. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.081.321.300.241	20.262.229.566.017
Beban Perjalanan Dinas Tetap	64.175.497.507	59.061.900.253
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.176.157.255.621	1.978.303.743.795
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	6.671.634.981.166	4.510.821.953.917
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	544.209.488	127.100.490.178
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	10.492.516.276.716	8.703.449.079.762
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.638.306.598.148	1.546.771.585.038
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	40.012.677.405	32.870.575.833
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.223.940.997.462	777.870.791.514
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.511.778.415.240	1.374.652.162.819
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19		3.235.868.527
Jumlah	**49.900.388.208.994**	**39.376.367.717.653**

Secara umum Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan kecuali Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19. Nilai kenaikan terbesar pada Beban Perjalanan Dinas terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa. Sedangkan nilai terbesar terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Kenaikan signifikan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 Kementerian/Lembaga terjadi pada Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Badan Pengawasan Pemilu. Naiknya Beban Perjalanan Dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi disebabkan telah terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023 maka pelaksanaan kegiatan sudah aktif dilaksanakan di luar kantor. Sedangkan pada Badan Pengawas Pemilu disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan pemilihan umum Tahun 2024.

E.2.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2023 adalah sebesar Rp58.308.588.088.465. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.442.833.851.313 atau 12,65 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp66.751.421.939.778. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.652.347.249.335	3.415.453.158.506
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	100.000.000	190.000.000
Beban Barang Fisik Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	-	1.894.015.117
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.854.895.094.086	21.629.526.859.208
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	8.987.044.810	4.939.701.283.808
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	-	121.068.054.250
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	16.421.132.163	-
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.775.837.568.071	36.643.588.568.889
Jumlah	**58.308.588.088.465**	**66.751.421.939.778**

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami penurunan pada Tahun 2023. Penurunan terbesar terdapat pada Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

E.2.1.2.7. Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2023 sebesar Rp489.648.053.202.050 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp80.254.507.820.971 atau 19,60 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp409.393.545.381.079. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Rincian Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	**40.686.203.394.415**	**16.707.191.146.480**
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	1.620.007.929.172	568.866.466.256
Beban Bunga Pinjaman Program	21.334.657.919.454	7.817.228.859.548
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	169.342.160.634	227.975.739.623
Beban Bunga Pinjaman Proyek	13.664.992.845.659	6.138.570.178.738
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	3.896.869.661.421	1.954.264.493.850
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	332.878.075	285.408.465
Beban Bunga SBN	**439.326.233.430.912**	**384.504.445.234.755**
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	313.700.619.979.947	270.298.703.420.368
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	242.515.144.295	190.937.201.909
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	42.205.592.083.000	40.563.447.448.571
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	43.726.664.053	61.668.253.633
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	70.675.625.816.608	61.160.484.557.848
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	307.098.351.120	201.608.457.712
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	12.128.812.944.249	11.999.749.589.291
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	22.242.447.640	27.846.305.423
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	**9.635.616.376.723**	**8.181.908.999.844**
Jumlah	**489.648.053.202.050**	**409.393.545.381.079**

Beban Pembayaran Kewajiban Utang terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Utang disebabkan oleh penarikan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023 dan adanya tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman dari *commitment fee* dan dari *Mark Up.*

Beban Bunga Instrumen Pinjaman naik dibandingkan sebelumnya. Kenaikan terbesar terdapat pada Beban Bunga Pinjaman Program dan Beban Bunga Pinjaman Proyek. Selanjutnya, Beban Bunga SBN juga mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan terbesar terdapat pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun rincian realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku disajikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	1.579.023.519.000	1.174.277.689.000
Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	4.742.202.109.136	4.742.722.587.195
Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	495.683.871.193	411.492.631.746
Beban Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	2.519.164.951.394	1.645.451.661.903
Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah	299.541.926.000	207.964.430.000
Jumlah	**9.635.616.376.723**	**8.181.908.999.844**

Perbedaan atas Beban Bunga pada LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	40.686.203.394.415	31.851.650.497.087	8.834.552.897.328
Beban Bunga SBN	439.326.233.430.912	400.996.815.289.550	38.329.418.141.362
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	9.635.616.376.723	6.497.464.643.722	3.138.151.733.001
Jumlah	**489.648.053.202.050**	**439.345.930.430.359**	**50.302.122.771.691**

Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun 2023.

E.2.1.2.8. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp242.021.207.563.568 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07 dan penyesuaian di tingkat LKPP. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.362.026.333.115 atau 0,97 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp244.383.233.896.683. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Rincian Beban Subsidi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Subsidi Minyak Solar	17.561.498.024.249	8.794.981.039.646
Beban Subsidi Minyak Tanah	4.560.105.170.437	5.266.109.914.526
Beban Subsidi Elpiji	73.719.718.440.748	89.984.283.902.254
Beban Subsidi Listrik	68.636.731.031.486	58.831.960.181.037
Beban Subsidi Pupuk	35.533.530.690.953	40.109.471.670.438
Beban Subsidi PT KAI	3.271.612.480.022	3.221.224.017.339
Beban Subsidi PT PELNI	2.661.813.756.015	2.217.997.267.098
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	172.000.950.000	168.293.494.000
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	933.112.000.000	919.140.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	4.020.613.823.221	2.563.079.496.205
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	29.492.388.610.110	1.237.435.466
Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	2.015.271.068	-
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	2.142.819.505	12.388.510
Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	-	29.827.547.271.599
Beban Subsidi Estimasi	1.322.719.648	88.778.032.672
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	160.295.082.887	155.176.756.597
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.292.306.693.219	2.233.941.029.296
Jumlah	**242.021.207.563.568**	**244.383.233.896.683**

Beban Subsidi berasal dari BUN Pengelola Belanja Subsidi yaitu BA 999.07. Penurunan Beban Subsidi Tahun 2023 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Elpiji dan Beban Subsidi Pupuk. Kedua beban ini memiliki kontribusi yang besar terhadap nilai Beban Subsidi. Beban Subsidi Pupuk mengalami penurunan signifikan pada Kementerian Pertanian. Namun demikian terdapat Beban Subsidi yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya Beban Subsidi Minyak Solar.

E.2.1.2.9. Beban Hibah

Beban Hibah selama Tahun 2023 sebesar Rp219.140.718.777. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.584.131.777.866 atau 96,22 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp5.803.272.496.643. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077
Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	5.755.516.300.341
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Beban Hibah	101.163.777	250.404.959
Jumlah	**219.140.718.777**	**5.803.272.496.643**

Beban Hibah mengalami penurunan signifikan karena terdapat pengalihan pencatatan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah menjadi bagian dari transfer ke daerah yang dikelola oleh BA BUN 999.05 Pengelola Transfer ke Daerah sesuai dengan UU no.1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Beban Hibah sebesar Rp219.140.718.777 merupakan pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing yang dikelola oleh LDKPI (Satker 985252) yang terdiri atas realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp69.824.315.937 dan Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional sebesar Rp149.215.239.063.

Sementara itu, Beban Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp101.163.777 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.1.2.10. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp156.341.091.530.982. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.145.772.438.823 atau 4,37 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp163.486.863.969.805. Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	948.946.243.436	287.029.158.325
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	71.101.459.333	278.599.334.315
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	67.603.711.600.319	62.751.392.290.271
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	183.194.602.048	177.267.352.566
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	20.702.977.270	2.669.618.160
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	81.386.973.089.291	2.302.024.384.356
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	791.850.000	28.407.469.733.475
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	20.375.194.249	223.503.200.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	100.281.000.000	64.505.086.916.935
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	2.781.428.938.007	1.812.145.695.904

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang	670.250.295.611	739.290.886.542
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.478.783.638.818	573.958.535.075
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	68.203.825.712	1.311.486.266.021
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	6.346.816.888	114.940.597.860
Jumlah	**156.341.091.530.982**	**163.486.863.969.805**

Penurunan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari tahun sebelumnya terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19. Kementerian/Lembaga yang berkontribusi besar dalam Beban Bantuan Sosial adalah Kementerian Sosial. Namun mengalami penurunan signifikan disebabkan penurunan anggaran belanja bantuan sosial pada Tahun 2023 dan tidak menggunakan lagi belanja untuk keperluan penanganan Covid-19 sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023.

Perbedaan atas Beban Bantuan Sosial pada LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	1.020.047.702.769	1.281.281.715.566	(261.234.012.797)
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	67.603.711.600.319	67.709.313.222.239	(105.601.621.920)
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	203.897.579.318	206.932.779.339	(3.035.200.021)
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	81.387.764.939.291	82.368.469.578.565	(980.704.639.274)
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	120.656.194.249	20.375.194.249	100.281.000.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	6.005.013.515.036	5.015.261.342.256	989.752.172.780
Jumlah	**156.341.091.530.982**	**156.601.633.832.214**	**(260.542.301.232)**

Perbedaan nilai antara Beban Bantuan Sosial di LO dan Belanja Bantuan Sosial di LRA terbesar terdapat pada Kementerian Sosial dikarenakan adanya perbedaan basis akuntansi, di mana beban bantuan sosial digunakan untuk mencatat penggunaan persediaan dalam rangka bansos, sedangkan dalam belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat adanya pembelian persediaan dalam rangka bantuan sosial TA 2023. Penyebab perbedaan itu antara lain adanya jurnal penyesuaian untuk mengoreksi dan penyesuaian piutang bantuan sosial.

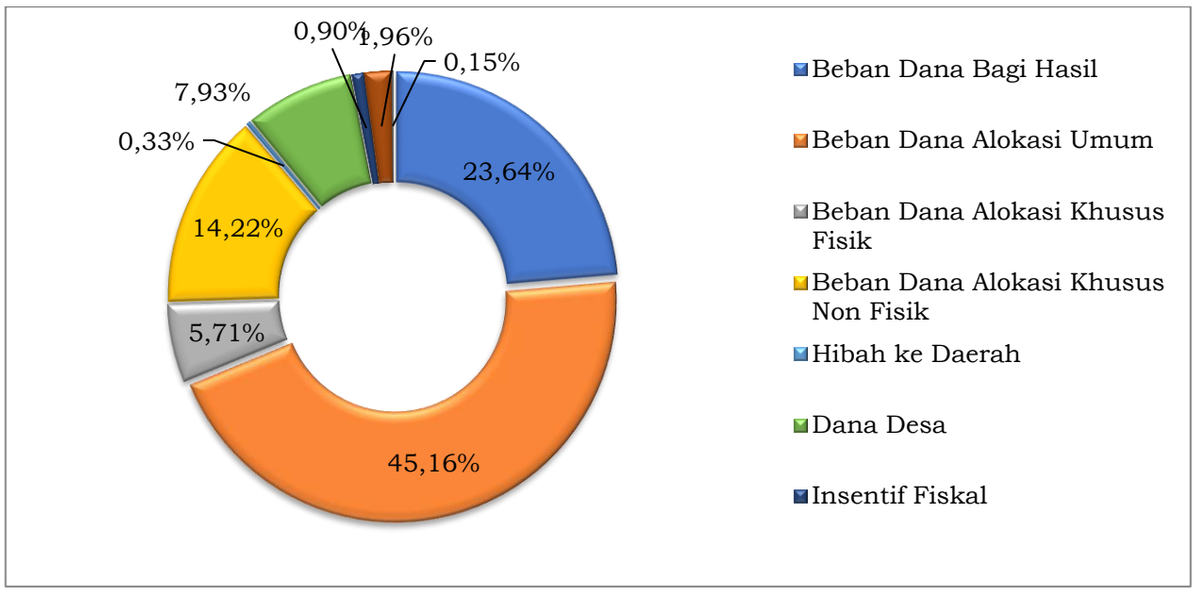
E.2.1.2.11. Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp881.390.373.057.804 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp62.320.896.010.457 atau 7,61 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp819.069.477.047.347. Beban Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Dana Bagi Hasil	208.351.386.473.005	174.605.073.491.304
Beban Dana Alokasi Umum	398.029.628.594.542	378.000.000.000.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	50.334.741.347.305	54.783.954.054.112
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	125.341.735.389.619	115.071.648.958.276
Hibah ke Daerah	2.940.874.059.627	
Dana Desa	69.895.828.548.550	67.906.138.390.431
Insentif Fiskal	7.906.031.813.500	6.993.672.774.000
Otonomi Khusus	17.241.263.570.000	20.436.263.570.000
Dana Keistimewaan	1.348.883.261.656	1.272.725.809.224
Jumlah	**881.390.373.057.804**	**819.069.477.047.347**

Besarnya bagian masing-masing Beban Transfer dapat dilihat dalam **Grafik 41** berikut.

Grafik 41
Komposisi Beban Transfer Tahun 2023



a. Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp208.351.386.473.005. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.746.312.981.701 atau 19,33 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp174.605.073.491.304. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	40.068.884.113.422	34.451.662.288.909
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.935.803.739.331	2.801.051.025.632
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	15.460.957.691.089	3.601.514.065.557
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	15.745.644.170.000	15.232.976.895.999
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	-	112.472.621.642
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	-	545.517.275.863
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang	-	2.325.245.797.723

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota		
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	12.541.960.314.124	12.508.819.328.994
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%		306.183.904.801
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	561.931.814.000	273.421.429.616
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	6.972.776.751.298	5.013.966.822.962
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%		81.601.870.159
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.975.050.200.000	1.303.879.777.471
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	647.415.455.790	763.342.660.044
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	99.371.885.899.550	86.585.001.215.359
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerinah	2.155.470.977.614	1.731.767.639.886
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Tetap	29.954.252.617	23.652.241.515
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	79.524.028.865	75.127.939.696
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	23.229.897.140	34.664.723.290
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	802.185.916.944	845.873.519.140
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	638.971.950.330	669.170.520.685
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	509.514.682.615	954.275.027.497
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.536.747.285.034	
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.293.477.333.242	4.363.884.898.864
Jumlah	**208.351.386.473.005**	**174.605.073.491.304**

Nilai penambah Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp51.987.003.674.227. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022, nilai penambah beban DBH atas Potensi/Estimasi KB periode 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp6.279.823.929.278 (12,08%). Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan di TA 2023 meningkat, sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi.

Nilai pengurang Beban Dana Bagi Hasil atas timbulnya estimasi Piutang DBH Tahun 2023 sebesar Rp2.392.654.411.852 yang jika dibandingkan Tahun 2022 nilai pengurang beban DBH atas potensi lebih bayar adalah meningkat sebesar Rp776.437.879.773 (32,45%). Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan yaitu penerimaan SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH, SDA pertambangan panas bumi – iuran produksi, dan perikanan yang menurun sehingga potensi/estimasi lebih bayar DBH pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi.

b. Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 adalah sebesar Rp398.029.628.594.542 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nilai Beban DAU Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.029.628.594.542 atau 5,30 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp378.000.000.000.000. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pagu DAU Tahun Anggaran 2023. Mulai tahun 2023 jenis DAU terbagi menjadi dua, terdiri atas DAU yang murni *Block Grant* dan DAU yang belanjanya sudah ditentukan penggunaannya.

c. Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.334.741.347.305. Beban DAK Fisik Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.449.212.706.807 atau 8,12 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp54.783.954.054.112.

d. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp125.341.735.389.619. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.270.086.431.343 atau 8,92 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp115.071.648.958.276. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	48.578.118.047.897	46.500.658.749.728
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.616.962.621.824	1.161.327.006.930

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.249.638.248.206	972.312.067.205
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.365.278.092.392	51.345.762.364.395
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.598.757.900.097	7.274.354.312.073
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.974.561.728.208	2.022.020.818.083
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	62.003.157.725	55.658.354.550
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	242.766.765.857	208.293.097.654
Beban Dana Pelayanan Kepariwisataan	125.749.412.031	115.693.698.499
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		(35.356.539.552)
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	4.088.407.337.853	3.737.218.787.456
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	1.480.979.095.232	996.671.271.000
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	165.411.039.978	155.117.241.457
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	109.483.930.186	73.345.606.961
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	232.772.897.862	186.497.334.288
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	292.704.050.000	182.803.369.712
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	158.141.064.271	119.271.417.837
Jumlah	**125.341.735.389.619**	**115.071.648.958.276**

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya pengakuan piutang selama periode Tahun 2023, sehingga mengurangi besarnya beban DAK Non Fisik Tahun 2023.

e. Beban Hibah Ke Daerah

Beban Hibah ke Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.940.874.059.627. Sedangkan Beban Hibah ke Daerah pada tahun sebelumnya tidak tercatat sebagai bagian dari Transfer ke Daerah melainkan pada pos Beban Hibah yang dikelola oleh BA BUN Pengelola Hibah 999.02. Mulai Tahun 2023, Beban

Hibah ke Daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

f. Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.241.263.570.000. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.195.000.000.000 atau 15,63 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp20.436.263.570.000. Mulai tahun 2023, Dana Otsus terbagi menjadi Dana Otsus yang bersifat umum, Dana Otsus yang ditentukan penggunaannya, dan Dana Tambahan Infrastruktur.

g. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.348.883.261.656 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.157.452.432 atau 5,98 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp1.272.725.809.224.

h. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Tahun 2023 sebesar Rp7.906.031.813.500 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2023. Insentif Fiskal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp912.359.039.500 atau 13,05 persen dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp6.993.672.774.000.

i. Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp69.895.828.548.550. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.989.690.158.119 atau 2,93 persen dari nilai Tahun 2022 sebesar Rp67.906.138.390.431.

E.2.1.2.12. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp209.244.320.645.414. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.616.632.253.191 atau 4,83 persen dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp219.860.952.898.605. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.102.547.022.483	79.300.937.409.321
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.356.894.059.843	14.548.369.500.339
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41.542.590.635.359	53.701.916.384.512
Beban Penyusutan Irigasi	20.809.972.910.825	20.193.068.137.359
Beban Penyusutan Jaringan	1.525.707.669.220	1.643.237.796.091
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.057.943.587.839	3.091.533.651.345
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	2.416.563.312.731	985.317.797.382
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	11.527.223.612.484	9.319.481.918.400
Beban Penyusutan Properti Investasi	836.810.594.919	2.666.139.808.976
Beban Amortisasi Hak Cipta	778.175.070	1.301.830.891
Beban Amortisasi Paten	19.825.181.333	12.745.750.829
Beban Amortisasi *Software*	6.947.988.774.874	5.142.905.301.806
Beban Amortisasi Lisensi	629.552.743.523	576.338.653.990
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	421.691.084.799	463.886.642.997
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	19.108.452.000	87.247.466.526
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	536.415.116.870	1.255.565.966.862
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	684.697.933.162	1.167.913.005.662
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	25.787.694.243.907	25.600.010.005.578
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	853.625.595	430.160.983
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	399.992.628.050	18.011.867.297
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	612.736.199.419	77.894.248.491
Beban Penyusutan Aset *Idle* yang Sudah Diserahkan ke DJKN	521.759.021	488.270.880
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	6.211.322.088	6.211.322.088
Jumlah	**209.244.320.645.414**	**219.860.952.898.605**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan dan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terbesar terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tepatnya pada Ditjen Bina Marga. Kementerian/Lembaga dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, dan Bendahara Umum Negara (BA 999).

E.2.1.2.13. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.928.970.209.539. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.152.241.992.538 atau 94,80 persen dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp37.081.212.202.077. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2022. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	52.056.790.699	8.917.558.833
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	3.045.753.399.074	2.523.395.392.006
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	2.604.924.519.034	1.885.593.673.285
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	230.044.803	1.856.339.867
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	854.554.066.397	627.317.338.695
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	(15.365.760.526)	(14.565.092.493)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	571.136.667.412	63.694.169.509
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(82.968.041.872)	260.496.541.650
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	(2.567.410.976.237)	12.883.128.815.975
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.754.856.086.050)	15.977.902.224.503
Beban Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman	2.288.790.574.086	1.066.242.798.604
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang	(47.062.433.591)	404.210.537.686

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar		
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	286.681.436.749	1.578.845.097
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	6.175.000.000	(51.507.567)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	23.937.230	17.500
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	629.822.447	230.831.441
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(1.255.559.859)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	125.231.634.700	50.206.536.762
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	8.735.625.370	9.947.657.641
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	9.458.586.790	80.025.678
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	2.215.523.277	794.179.915
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	24.081.816.359	5.093.666.699
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(3.256.377.244.519)	(301.513.403.881)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(4.056.272.751)	35.384.393.976
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	(68.246.059.256)	2.736.156.457
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	7.435.975	6.036.251

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(5.603.384.717)	9.917.971.549
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(148.514.851.485)	1.578.610.496.439
Jumlah	**1.928.970.209.539**	**37.081.212.202.077**

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Penyisihan Piutang pada BA BUN mengalami penurunan yang signifikan pada akun Piutang Lainnya diakibatkan karena penambahan nilai piutang pada BLBI Tahun 2023 tidak sebesar piutang pada tahun 2022 dan adanya pelunasan piutang sehingga beban penyisihan piutangnya turun dibandingkan dengan Tahun 2022. Selain itu, menurunnya Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disebabkan oleh Piutang PNBP pada Kejaksaan Republik Indonesia mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.2.1.2.14. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2023 sebesar Rp285.685.389.969.788. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124.495.921.476.256 atau 30,35 persen dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp410.181.311.446.044. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Cadangan Beras Pemerintah	21.907.297.958.895	3.711.471.783.128
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	121.245.799.637	93.648.376.675
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	99.327.469.278	118.638.882.514
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	546.650.473.751	530.818.155.739
Beban Lain-Lain BUN Lainnya Dana Kompensasi	200.888.732.293.042	340.739.237.539.248
Beban Lain-Lain Penggunaan PNBP BUN	39.534.780.432	-
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	-	16.332.056.618.484
Beban Lain-lain	4.973.362.125.105	2.159.147.983.173
Beban Pihak Ketiga Migas	25.977.643.819.220	36.938.747.602.467
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - *Reimbursement* PPN	152.398.856.442	98.185.229.492

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	109.575.132.791	88.280.570.763
Beban Diestimasi *Reimbursement* PPN	367.101.143.558	295.314.770.508
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	430.561.669.691	321.366.763.884
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	30.071.958.447.946	8.754.397.169.969
Jumlah	**285.685.389.969.788**	**410.181.311.446.044**

Beban Lain-Lain pada Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan disebabkan oleh menurunnya Dana Kompensasi BBM dan Listrik. Rincian Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi pada tahun 2023 sebesar Rp200.888.732.293.042 pada tabel berikut.

No.	Uraian Kompensasi	Jumlah
Beban Dana Kompensasi Listrik		
a	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan I	18.387.491.971.936
b	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan II	19.340.393.528.057
c	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan III	18.451.196.536.095
d	Kekurangan Kompensasi Listrik Periode Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023	17.835.197.231.014
Subtotal Beban Dana Kompensasi Listrik		**74.014.279.267.102**
Beban Dana Kompensasi BBM		
a	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan I	20.499.682.729.955
b	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan I	11.407.313.519.507
c	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan I	169.435.772.363
d	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan II	11.675.957.591.497
e	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan II	11.160.842.026.150
f	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan II	87.564.156.286
g	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan III	16.639.795.715.141
h	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan III	11.344.274.731.432
i	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan III	141.364.900.739
j	Kekurangan Kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-233/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Tahun 2023	43.520.357.185.487

No.	Uraian Kompensasi	Jumlah
k	Kekurangan Kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT AKR Corporindo, Tbk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-232/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2023	232.578.572.757
l	Koreksi Beban dan utang dana kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang (JBT Solar PT PPN)	(3.553.645.877)
m	Koreksi Beban dan utang dana kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang (JBKP Pertalite PT PPN)	(1.097.944.133)
n	Koreksi Beban dan utang dana kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang (JBT Solar PT AKR)	(62.285.364)
Subtotal Beban Dana Kompensasi BBM		**126.874.453.025.940**
Jumlah		**200.888.732.293.042**

Beban Lain-lain Dana Kompensasi BBM turun Rp149.556.645.882.574 dari tahun 2022 sebesar Rp276.435.812.783.888 triliun menjadi Rp126.874.453.025.938. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi rata-rata ICP yang menurun dari USD97/barel pada 2022 menjadi USD80/barel pada 2023, meskipun di sisi lain kurs meningkat dari Rp14.770/USD menjadi Rp15.174/USD. Selain itu kenaikan harga jual eceran minyak solar pada bulan September 2022 turut menurunkan Beban Lain-lain Dana Kompensasi BBM tahun 2023.

Beban Lain-Lain Dana Kompensasi Listrik naik Rp9.688.472.408.788 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp64.325.806.858.314 menjadi sebesar Rp74.014.279.267.102 antara lain disebabkan oleh kenaikan volume listrik sebesar 11,1 TWh dari 205,9 TWh menjadi 217 TWh.

Dana kompensasi listrik sebesar Rp74.014.279.267.102 merupakan penetapan pemerintah atas tagihan dana kompensasi listrik sebesar Rp74.171.945.899.119 yang diajukan PT PLN (Persero) berdasarkan perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik APBN. Namun demikian nilai tagihan tersebut berkurang menjadi Rp65.679.658.957.291 apabila dihitung dengan menggunakan formula BPP Tenaga Listrik Riil.

Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah (dhi. Kementerian ESDM) sedang menyusun kajian mengenai formula perhitungan dana kompensasi listrik, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan dana kompensasi listrik.

Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar pada tahun 2023 bernilai Rp30.071.958.447.946 pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2023
1	Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP	553.996.829.070
2	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN	11.394.338.053.675
3	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN	18.117.843.166.212
4	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Dit SMI	5.780.398.989
Jumlah		**30.071.958.447.946**

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar Rp30.071.958.447.946 merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp21.317.561.277.978 atau naik 243,51% utamanya dikarenakan kenaikan pada KPA DJKN.

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp18.117.843.166.212 dan Rp3.114.554.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp15.003.289.166.212 atau 481,72 persen dari beban tahun 2022. Nilai tersebut berasal dari rugi PT TPI sebesar Rp3.516.166.211 dan LPEI sebesar Rp18.114.327.000.000.

E.2.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2023 mengalami surplus sebesar Rp60.064.724.194.267. Surplus Kegiatan Non Operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus Kegiatan Non Operasional lainnya. Dibandingkan dengan Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp243.721.982.514.215, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp303.786.706.708.482 atau 124,64 persen. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Defisit Pelepasan Aset selama periode Tahun 2023 sebesar Rp17.310.557.403.319. Nilai mengalami perubahan sebesar Rp108.462.802.975.184 atau 86,24 persen dari Tahun 2022 yaitu defisit sebesar Rp125.773.360.378.503. Defisit Pelepasan Aset tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp548.935.351.301 dan Beban Pelepasan Aset sebesar Rp17.859.492.754.620.

E.2.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset selama periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp548.935.351.301. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp130.729.108.986 atau 19,23 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp679.664.460.287.

Pendapatan Pelepasan Aset tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan Aset Non Lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	14.102.900.933	15.144.719.565
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	229.102.645.818	192.597.185.215
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	5.146.953.259	139.111.564
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	2.518.000	2.043.726.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	201.009.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	291.806.114.989	358.585.727.630
Pendapatan Pelepasan Aset	8.573.209.302	111.153.990.313
Jumlah	**548.935.351.301**	**679.664.460.287**

Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2023 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Pendapatan Pelepasan Aset dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan, Bendahara Umum Negara (BUN), dan Kementerian Perhubungan.

E.2.2.1.2. Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset selama periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.859.492.754.620. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp108.593.532.084.170 atau 85,88 persen dibanding Tahun 2022 sebesar Rp126.453.024.838.790.

Beban Pelepasan Aset merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap Dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi Aset Non Lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas.

Penurunan Beban Pelepasan Aset disebabkan oleh adanya proses penghapusan aset serta realisasi hibah keluar aset pada tahun sebelumnya. Beban Pelepasan Aset terbesar terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 adalah sebesar Rp431.442.410.900. Nilai defisit ini mengalami penurunan sebesar Rp906.010.390.714 atau 67,74 persen dibandingkan defisit Tahun 2022 sebesar Rp1.337.452.801.614. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/Defisit tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1. Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp105.211.500.000. Sedangkan Tahun 2022 tidak terdapat Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.

E.2.2.2.2. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 adalah sebesar Rp536.653.910.900. Beban ini menurun sebesar Rp800.798.890.714 atau 59,87 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.337.452.801.614. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak terdapat belanja pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.

E.2.2.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp77.806.724.008.486 mengalami perubahan sebesar Rp194.417.893.342.584 atau 166,72 persen dibandingkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 yaitu sebesar minus Rp116.611.169.334.098. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp112.360.987.542.646 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp34.554.263.534.160.

E.2.2.3.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.360.987.542.646. Nilai tersebut naik sebesar Rp16.358.422.441.404 atau 17,04 persen dibanding Tahun 2022 sebesar Rp96.002.565.101.242. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan BLU Lainnya	220.098.982.560	164.141.924.935
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU	-	73.551.900.500

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.895.504.188	81.688.142.695
Pendapatan dari Selisih Kurs	140.835.592.776	201.454.508.302
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	41.347.366.203	21.013.249.661
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.287.879.313.442	8.877.588.747.500
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	199.103.667.209	332.196.942.307
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	13.909.727.383	18.028.947.515
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	50.097.042.023.413	35.187.364.663.010
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	11.234.072.773.005	14.423.052.943.104
Pendapatan Perolehan Jasa	1.290.017.663	6.008.498.081
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	47.123.526.335.086	32.078.173.743.102
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	997.986.239.718	4.538.300.890.530
Jumlah	**112.360.987.542.646**	**96.002.565.101.242**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terbesar terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Lainnya. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara diantaranya adalah selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami kenaikan disebabkan kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing di 31 Desember 2023 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

E.2.2.3.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp34.554.263.534.160. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp178.059.470.901.180 atau 83,75 persen dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp212.613.734.435.340. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023 (*Audited*)	TA 2022 (*Audited*)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	406.978.881	424.686.365
Beban Selisih Kurs Terealisasi	7.623.000.000	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	22.040.706	1.466.334.079
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.516.387.656.911	5.665.508.512.156
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	8.594.606.580.783	6.780.239.331.407
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1.250.397.099.291	7.653.695.932.499
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	429.763.112	58.596.387
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	23.145.862.146.753	192.817.079.079.649
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	25.492.347.748	120.584.595
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	-	2.330.698
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	9.373.851.278	90.892.318.345
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.662.068.703	(395.753.270838)
Pembulatan	(6)	(2)
Jumlah	**34.554.263.534.160**	**212.613.734.435.340**

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara, Kementerian Pertahanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi mengalami penurunan yang signifikan akibat dari kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing di 31 Desember 2023 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

E.2.3. POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada pada tahun 2023.

E.2.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2023.

E.2.3.2. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada tahun 2023.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Burden Sharing

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema *burden sharing* termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(2.142.456.970.000)	-	(2.142.456.970.000)
2	Januari	900.596.250.000	-	900.596.250.000
3	Februari	1.792.186.000.000	-	1.792.186.000.000
4	Maret	3.100.967.700.000	-	3.100.967.700.000
5	April	1.080.898.840.000	-	1.080.898.840.000
6	Mei	2.270.632.740.000	-	2.270.632.740.000
7	Juni	1.596.617.460.000	-	1.596.617.460.000
8	Juli	2.389.736.300.000	-	2.389.736.300.000
9	Agustus	2.248.414.520.000	-	2.248.414.520.000
10	September	2.858.143.800.000	-	2.858.143.800.000
11	Oktober	1.063.634.100.000	-	1.063.634.100.000
12	November	2.210.271.320.000	-	2.210.271.320.000
13	Desember	2.844.745.930.000	-	2.844.745.930.000
14	Penyesuaian Akrual 2023	2.436.044.010.000	-	2.436.044.010.000
Subtotal PG		**24.650.432.000.000**	**-**	**24.650.432.000.000**
B. *Non Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(50.498.383.561)	(169.241.650.028)	(219.740.033.589)
2	Juni	540.629.753.425	4.466.588.153.425	5.007.217.906.850
3	Desember	446.619.175.471	4.602.937.677.953	5.049.556.853.424
4	Penyesuaian Akrual 2023	24.488.397.350	402.442.638.510	426.931.035.860
Subtotal NPG		**961.238.942.685**	**9.302.726.819.860**	**10.263.965.762.545**
C. *Cluster* A				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(625.992.334.620)	-	(625.992.334.620)
2	Januari	276.095.493.750		276.095.493.750
3	Februari	133.224.244.740		133.224.244.740
4	Maret	1.024.746.069.180	-	1.024.746.069.180
5	April	342.161.591.700		342.161.591.700
6	Mei	139.828.734.000		139.828.734.000
7	Juni	921.910.000.000	-	921.910.000.000
8	Juli	488.079.393.230		488.079.393.230
9	Agustus	137.709.317.340		137.709.317.340
10	September	1.051.215.239.580	-	1.051.215.239.580
11	Oktober	336.825.567.900	-	336.825.567.900
12	November	135.352.455.660	-	135.352.455.660

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
13	Desember	1.035.454.514.150	-	1.035.454.514.150
14	Penyesuaian Akrual 2023	705.612.371.730	-	705.612.371.730
Subtotal *Cluster* A		**6.102.222.658.340**	**-**	**6.102.222.658.340**
Total PG, NPG, dan *Cluster* A		**31.713.893.601.025**	**9.302.726.819.860**	**41.016.620.420.885**

2. Rincian Pendapatan Perpajakan yang Belum Mendapatkan Nomer Pendaftaran

Pendapatan Perpajakan yang berupa PDRI dicatat hanya atas pendapatan berbasis akrual yang berasal dari piutang. Saat adanya pelunasan atas piutang PDRI, penerimaan basis kasnya tidak dicatat di dalam Laporan Keuangan DJBC, namun menjadi realisasi penerimaan DJP. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 yang mengatur Pendapatan Perpajakan serta hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan seperti pengembalian dan pelunasan piutang di DJBC adalah bersifat *recurring*, sehingga pengurangan piutang yang terbit pada periode sebelumnya yang pelunasannya terjadi pada tahun berjalan menjadi pengurang pendapatan pada tahun berjalan. Hal tersebut memungkinkan timbulnya pendapatan negatif dalam hal piutang terbit pada tahun berjalan lebih kecil dari pengurangan piutang yang terbit pada periode-periode sebelumnya.

Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh DJBC dengan metode *self-assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Kas Negara dan telah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan penetapan. Per 31 Desember 2023, terdapat penerimaan perpajakan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribu Rupiah)

Jenis Dokumen	Jml. Dok.	Bea Masuk	Bea Masuk KITE	Bea Masuk *Anti Dumping*	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Bea Keluar	Total
		412111	412114	412121	412123	412211	
BC 2.0 PIB Biasa	584	40.954.076	2.361.135	334.339	1.490.652	-	45.140.202
BC 2.5	56	317.218	-	-	35.897	-	353.115
BC 2.8	37	1.033.589	-	-	-	-	1.033.589
BC 3.0	23	-	-	-	-	32.641	32.641
Jumlah	**700**	**42.304.883**	**2.361.135**	**334.339**	**1.526.549**	**32.641**	**46.559.547**

Sedangkan pendapatan perpajakan Tahun 2023 yang mendapatkan nomor pendaftaran pada tahun 2024 atau sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun dirinci sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dokumen	Jml. Dok.	Bea Masuk	Bea Masuk KITE	Bea Masuk *Anti Dumping*	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Total
		412111	412114	412121	412123	
BC 2.0 PIB Biasa	546	39.712.445.000	2.361.135.000	334.339.000	1.490.652.000	43.898.571.000
BC 2.5	4	17.960.000	-	-	-	17.960.000
BC 2.8	12	296.013.000	-	-	-	296.013.000
BC 3.0	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**562**	**40.026.418.000**	**2.361.135.000**	**334.339.000**	**1.490.652.000**	**44.212.544.000**

Sehingga pendapatan perpajakan Tahun 2023 yang belum mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan Laporan Keuangan *Audited* ini adalah sebagai berikut.

Jenis Dokumen	Jml. Dok.	Bea Masuk	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Bea Keluar	Total
		412111	412123	412211	
BC 2.0 PIB Biasa	38	1.241.631.000	-	-	1.241.631.000
BC 2.5	52	299.258.000	35.897.000	-	335.155.000
BC 2.8	11	737.576.000	-	-	737.576.000
BC 3.0	37	-	-	32.641.000	32.641.000
Jumlah	**138**	**2.278.465.000**	**35.897.000**	**32.641.000**	**2.347.003.000**

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp536.443.156.881.227, merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Tahun 2022 sebesar Rp374.272.452.880.577, Saldo Awal Kas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp162.170.704.000.650 atau 43,33 persen. Rincian Saldo Awal Kas sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2023	1 Januari 2022
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Kas Transitoris	-	-
Kas *Escrow*	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Kas pada BLU yang telah disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Saldo Awal Kas	**536.443.156.881.227**	**374.272.452.880.577**

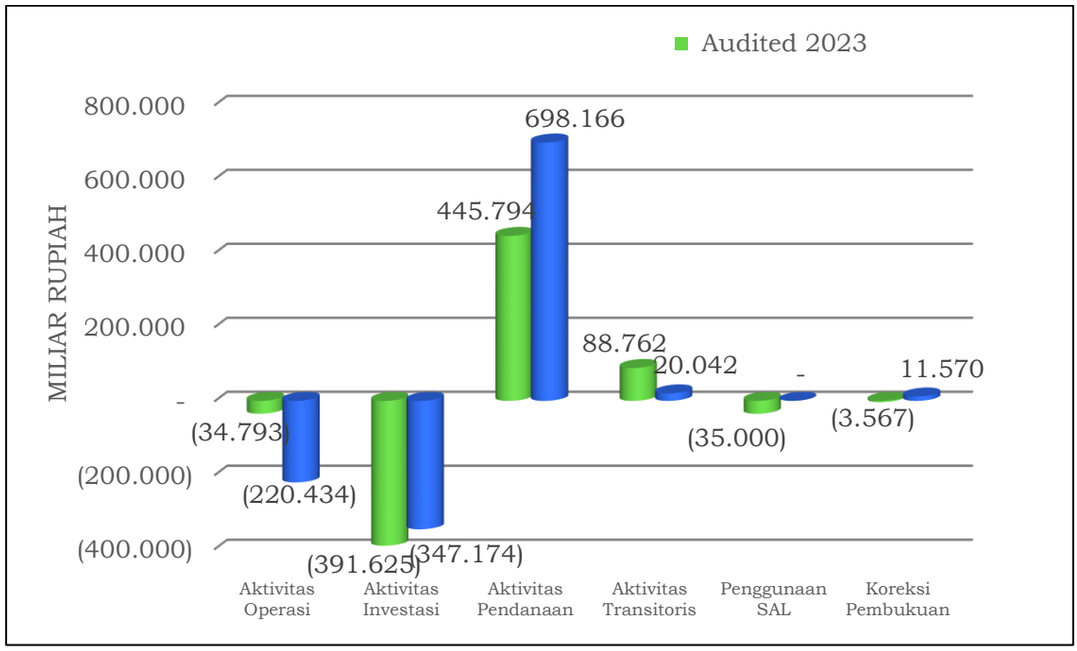
F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(34.793.236.369.070)	(220.433.644.891.532)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(391.624.901.747.838)	(347.174.022.486.045)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	445.794.317.054.009	698.166.134.429.528
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	88.761.873.212.786	20.042.387.123.266
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan	(3.566.936.515.283)	11.569.849.825.433
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	**69.571.115.634.604**	**162.170.704.000.650**

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2023 disajikan dalam **Grafik 42.**

Grafik 42
Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2023



1. Penggunaan SAL pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp35.000.000.000.000 dan Rp0. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Penggunaan Dana SAL sebesar Rp35.000.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2023 yang seluruhnya bersumber dari Rek Lain BI SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran.
2. Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.566.936.515.283, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi SiLPA	1.496.864.847.086
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(529.364.838.247)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(4.534.436.524.122)
Total Koreksi Pembukuan		**(3.566.936.515.283)**

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1) Koreksi SiLPA sebesar Rp1.496.864.847.086 merupakan pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp107.084.277.228 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.603.949.124.314. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp105.394.184.105 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp1.690.093.123.
2) Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp529.364.838.247 merupakan penyesuaian yang berasal dari pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.596.970.205.995 dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp2.126.335.044.242.
3) Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp4.534.436.524.122 terdiri dari:
   a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp4.264.411.251.718 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2023, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, serta penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
   b. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp243.005.835.551 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.
   c. Koreksi kas Hibah sebesar minus Rp27.019.436.853 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2023 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar minus Rp2.839.196.445, revaluasi saldo kas hibah sebesar Rp25.765.188.423, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar Rp93.447.775, serta penyesuaian kas hibah akibat kesalahan pembukuan pendapatan hibah sebesar Rp3.999.997.100.

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp430.715.095.759.788 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Saldo Akhir Kas [1]	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**
Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas di Bendahara Penerimaan	318.602.129.457	28.613.691.119
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan [2]	7.604.425.582.862	2.436.441.198.784
Kas BLU yang Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(35.230.294.868.007)	(26.341.869.598.933)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan/Lainnya [3]	(38.643.493.231)	(4.503.505.984)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) [4]	(148.155.907.631.641)	(52.253.149.048.677)
Kas Transito (Kiriman Uang)	4.930.665.723	799.340.452
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**430.715.095.759.788**	**460.525.416.110.350**

1) Saldo Akhir Kas sebesar Rp606.014.272.515.831 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Rekening Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas BLU yang Sudah Disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
Jumlah Saldo Akhir Kas	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**

Kas di BLU yang sudah disahkan pada Tahun 2023 sebesar Rp92.393.578.520.721 termasuk kas yang telah didepositokan (disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca) sebesar Rp35.230.294.868.007 oleh Satker BLU.

2) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp7.604.425.582.862 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp21.596.978.800.469 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp13.992.553.217.607.

3) Kas BLU belum Disahkan/Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp38.643.493.231 terdiri dari Kas BLU yang direklasifikasi menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Keuangan (BA 015) sebesar minus Rp35.355.980.391, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA

059) sebesar minus Rp2.508.099.622 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020) sebesar minus Rp779.413.218.

4) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar Rp148.155.907.631.641 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

F.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar minus Rp34.793.236.369.070 dan minus Rp220.433.644.891.532. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp185.640.408.522.462 atau 84,22 persen dari Tahun 2022. Peningkatan arus kas bersih aktivitas operasi di topang oleh kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2023 sebesar Rp148.123.944.182.725 atau 5,62 persen dari Tahun 2022 disebabkan kenaikan realisasi penerimaan negara yang signifikan, walaupun pada sisi yang berbeda, belanja pemerintah juga mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan negara terjadi pada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	2.783.382.716.269.797	2.635.258.772.087.072
Arus Kas Keluar	2.818.175.952.638.867	2.855.692.416.978.604
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**(34.793.236.369.070)**	**(220.433.644.891.532)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar minus Rp34.793.236.369.070 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

F.2.1.1. Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.154.208.219.467.830 dan Rp2.034.552.436.470.075, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.061.234.020.639.596	998.213.803.714.799
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	763.632.668.212.526	687.609.450.256.247
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700
Pendapatan Cukai	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323
Pendapatan Pajak Lainnya	9.729.790.060.612	7.686.100.141.265
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**2.089.718.285.003.417**	**1.943.654.770.952.334**
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	50.891.762.896.870	51.077.726.593.610
Bea Keluar	13.598.171.567.543	39.819.938.924.131
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**64.489.934.464.413**	**90.897.665.517.741**
Penerimaan Perpajakan	**2.154.208.219.467.830**	**2.034.552.436.470.075**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 119.655.782.997.755 atau 5,88 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non-Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.061.234.020.639.596 dan Rp998.213.803.714.799, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	22.904.493.665.260	29.599.710.570.513
Pendapatan PPh Gas Bumi	45.867.105.436.853	48.239.737.523.971
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.572.224.727	3.108.450.219
Jumlah Pendapatan PPh Migas	**68.773.171.326.840**	**77.842.556.544.703**
Pendapatan PPh Non-Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	200.849.556.208.059	172.271.504.252.153
Pendapatan PPh Pasal 22	33.960.305.154.489	33.047.948.496.551
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	69.528.072.968.512	74.199.825.147.250
Pendapatan PPh Pasal 23	58.168.982.689.674	48.703.438.992.715
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.263.329.558.127	11.577.509.255.097
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	406.296.468.651.423	337.592.447.567.747
Pendapatan PPh Pasal 26	76.957.876.931.724	65.293.293.607.543
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	125.092.090.364.487	166.183.983.224.667

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	9.191.469.439.309	11.371.952.837.221
Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya	152.697.346.952	129.343.789.152
Jumlah Pendapatan PPh Non-Migas	**992.460.849.312.756**	**920.371.247.170.096**
Jumlah	**1.061.234.020.639.596**	**998.213.803.714.799**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp63.020.216.924.797 atau 6,31 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp763.632.668.212.526 dan Rp687.609.450.256.247, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	473.769.779.998.203	387.026.098.889.803
Pendapatan PPN Impor	255.865.218.976.531	270.707.542.997.208
Pendapatan PPN Lainnya	8.010.587.913.149	6.159.977.400.601
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16.795.994.592.963	14.458.512.864.627
Pendapatan PPnBM Impor	7.096.362.043.755	4.886.178.530.058
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.000.783.658	444.465.625
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	2.028.573.395.855	3.259.395.470.309
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	65.150.508.412	1.111.299.638.016
Jumlah	**763.632.668.212.526**	**687.609.450.256.247**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah sebesar Rp76.023.217.956.279 atau 11,06 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp33.270.661.547.958 dan Rp23.264.663.527.700, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan PBB Perkebunan	3.241.035.767.076	2.979.222.049.742
Pendapatan PBB Kehutanan	627.259.722.024	774.422.597.198
Pendapatan PBB Pertambangan	11.492.310.087.449	5.292.431.739.792

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	17.192.838.858.870	13.711.084.449.060
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	618.223.603.408	490.714.138.086
Pendapatan PBB Lainnya	98.993.509.131	16.788.553.822
Jumlah	**33.270.661.547.958**	**23.264.663.527.700**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp10.005.998.020.258 atau 43,01 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.4. Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp221.851.144.542.725 dan Rp226.880.753.312.323, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	213.497.773.071.725	218.621.484.007.231
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	127.918.170.000	127.411.014.195
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	8.103.897.479.000	8.067.276.626.590
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	104.242.719.000	43.076.467.478
Pendapatan Cukai Lainnya	17.313.103.000	21.505.196.829
Jumlah	**221.851.144.542.725**	**226.880.753.312.323**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Cukai sebesar Rp5.029.608.769.598 atau 2,22 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp9.729.790.060.612 dan Rp7.686.100.141.265, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.223.862.796.089	1.070.263.327.848
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.470.840.719.647	5.661.404.285.336
Pendapatan PPn Batubara	196.395.808.289	417.224.046.910
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.812.341.830	3.659.888.938
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**6.894.911.665.855**	**7.152.551.549.032**
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.260.155.446.639	124.551.321.166

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	576.930.315.430	408.996.871.067
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	(2.949.314.751)	400.000
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	-
Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	**2.834.136.447.318**	**533.548.592.233**
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-
Pendapatan Denda Penagihan	741.947.439	-
Jumlah	**9.729.790.060.612**	**7.686.100.141.265**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp2.043.689.919.347 atau 26,59 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.1.6. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp64.489.934.464.413 dan Rp90.897.665.517.741, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	47.031.645.101.860	45.608.785.765.341
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	5.321.000	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	991.256.259.179	749.777.238.893
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	402.746.814.511	1.087.732.642.874
Pendapatan Pabean Lainnya	7.792.099.320	9.504.407.160
Pendapatan Bea Masuk *Antidumping*	301.082.959.000	320.462.589.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	2.157.234.342.000	3.301.463.950.342
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	**50.891.762.896.870**	**51.077.726.593.610**
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	13.597.383.848.543	39.781.491.339.398
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	619.652.000	38.359.518.733
Pendapatan Bunga Bea Keluar	168.067.000	88.066.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	**13.598.171.567.543**	**39.819.938.924.131**
Jumlah	**64.489.934.464.413**	**90.897.665.517.741**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp26.407.731.053.328 atau 29,05 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. PNBP Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp611.990.337.922.242 dan Rp595.010.280.203.205, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Sumber Daya Alam	254.203.031.073.614	268.770.896.270.784
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149
Pendapatan PNBP Lainnya	179.868.171.315.795	195.739.979.810.678
Pendapatan Badan Layanan Umum	95.860.392.158.963	89.902.312.175.594
Jumlah	**611.990.337.922.242**	**595.010.280.203.205**

Dengan demikian, terdapat kenaikan PNBP sebesar Rp16.980.057.719.037 atau 2,85 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp254.203.031.073.614 dan Rp268.770.896.270.784, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	87.408.885.465.416	111.992.940.458.410
Pendapatan Gas Bumi	28.769.670.492.312	36.705.949.688.708
Pendapatan Pertambangan Umum	129.126.791.868.349	110.786.795.000.708
Pendapatan Kehutanan	5.429.603.320.398	5.804.080.517.216
Pendapatan Perikanan	636.893.353.269	1.192.945.829.371
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.831.186.573.870	2.288.184.776.371
Jumlah	**254.203.031.073.614**	**268.770.896.270.784**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp14.567.865.197.170 atau 5,42 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan negara. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp82.058.743.373.870 dan Rp40.597.091.946.149, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	81.217.243.776.870	39.735.630.261.242
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	841.499.597.000	861.461.684.907
Jumlah	**82.058.743.373.870**	**40.597.091.946.149**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp41.461.651.427.721 atau 102,13 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.2.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp179.868.171.315.795 dan Rp195.739.979.810.678, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	51.186.655.069.677	84.763.757.395.235
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	28.028.272.839.161	22.171.748.332.761
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.748.502.699.372	6.559.445.155.292
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	3.720.222.791.370	4.192.602.721.151
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	30.028.772.290.804	27.825.117.011.476
Pendapatan Jasa Lainnya	1.308.205.045.864	687.537.690.411
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	40.503.003.442.795	19.410.172.403.219
Pendapatan Denda	2.261.698.342.186	3.039.782.178.442
Pendapatan Lain-lain	16.082.838.794.566	27.089.816.922.691
Jumlah	**179.868.171.315.795**	**195.739.979.810.678**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp15.871.808.494.883 atau 8,11 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp95.860.392.158.963 dan Rp89.902.312.175.594, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	86.494.504.584.782	81.310.459.555.633
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	419.285.384.531	169.778.059.270
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.220.147.435.517	974.371.121.113
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	820.701.691.766	3.245.497.850.139
Pendapatan BLU Lainnya	6.905.753.062.367	4.202.205.589.439
Jumlah	**95.860.392.158.963**	**89.902.312.175.594**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp5.958.079.983.369 atau 6,63 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, pemerintah daerah, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.184.158.879.725 dan Rp5.696.055.413.792, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	-	766.400.000
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	137.278.319.260	130.825.019.513
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	15.221.390.183.638	2.526.187.637.207
Bentuk Uang – Lainnya	2.760.643.874	14.915.464.452
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**15.361.429.146.772**	**2.672.694.521.172**
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana		
Terencana Bilateral	181.831.927.857	186.394.259.492
Terencana Multilateral	241.343.042.190	399.456.041.533
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	1.250.430.211	2.061.618.178

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Langsung Bentuk Uang Bilateral	523.321.750.393	96.937.080.633
Langsung Bentuk Uang Multilateral	850.175.319.681	2.314.500.561.582
Langsung Bentuk Uang Lainnya	24.807.262.621	24.011.331.202
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	**1.822.729.732.953**	**3.023.360.892.620**
Jumlah	**17.184.158.879.725**	**5.696.055.413.792**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp11.488.103.465.933 atau 201,69 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2. Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp412.711.324.466.564 dan Rp402.441.656.300.334, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.439.214.441.661	86.886.751.274.793
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	65.784.325.265.335	64.667.920.553.197
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.445.968.520.506	1.451.426.586.090
Belanja Gaji Dokter PTT	971.858.800	1.414.494.400
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.571.148.205.747	17.710.735.289.385
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.872.998.267.850	536.846.863.726
Belanja Honorarium	1.517.199.173.983	1.490.800.609.821
Belanja Lembur	906.265.365.184	902.549.970.369
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	84.744.625.483.910	84.032.922.061.487
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	140.283.278.472.696	133.926.708.913.263
Belanja Asuransi Kesehatan	11.145.329.410.892	10.833.579.683.803
Jumlah	**412.711.324.466.564**	**402.441.656.300.334**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp10.269.668.166.230 atau 2,55 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional

kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp432.714.969.865.127 dan Rp426.149.081.519.090, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Barang	149.975.847.133.255	166.133.854.715.131
Belanja Jasa	50.333.964.148.889	41.614.533.719.335
Belanja Pemeliharaan	48.113.526.685.260	44.489.975.895.976
Belanja Perjalanan Dinas	48.305.891.764.735	37.975.602.578.401
Belanja Badan Layanan Umum	70.780.247.933.038	79.477.221.388.001
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	65.188.725.039.787	56.156.161.774.746
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	16.767.160.163	301.731.447.500
Jumlah	**432.714.969.865.127**	**426.149.081.519.090**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang sebesar Rp6.565.888.346.037 atau 1,54 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp439.882.584.341.259 dan Rp386.341.819.789.815.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp53.540.764.551.444 atau 13,86 persen dari Tahun 2022. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp409.307.252.804.311 dan Rp30.575.331.536.948, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp409.307.252.804.311 dan Rp373.617.911.471.466, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	1.276.318.960.139	532.875.272.425
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	318.954.315.650.029	283.107.682.082.592
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	82.042.499.639.521	72.349.854.787.991
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	3.448.731.870.328	11.189.872.757.941
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption*	536.653.910.900	1.337.452.801.614
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara	3.048.732.773.394	5.100.173.768.903
Jumlah	**409.307.252.804.311**	**373.617.911.471.466**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp35.689.341.332.845 atau 9,55 persen dari Tahun 2022.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp30.575.331.536.948 dan Rp12.723.908.318.349, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	16.041.674.225.787	5.883.922.682.379
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	14.533.324.433.086	6.839.700.227.505
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	332.878.075	285.408.465
Jumlah	**30.575.331.536.948**	**12.723.908.318.349**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp17.851.423.218.599 atau 140,30 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Tahun 2023

dan Tahun 2022 sebesar Rp269.592.086.053.747 dan Rp252.812.907.867.326, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	95.590.003.271.521	115.614.764.810.904
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM	119.346.845.627.560	94.767.430.477.784
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	5.092.347.517.157	6.309.491.129.344
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**220.029.196.416.238**	**216.691.686.418.032**
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	45.323.860.034.309	3.523.116.596.732
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**45.323.860.034.309**	**3.523.116.596.732**
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	4.239.029.603.200	32.598.104.852.562
Jumlah Belanja Subsidi – Darurat Bencana	**4.239.029.603.200**	**32.598.104.852.562**
Jumlah	**269.592.086.053.747**	**252.812.907.867.326**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp16.779.178.186.421 atau 6,64 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, maupun Pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp219.140.718.777 dan Rp5.803.272.496.643, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077
Belanja Hibah Kepada Organiasasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	-	5.755.516.300.341
Belanja Hibah Lainnya	101.163.777	250.404.959
Jumlah	**219.140.718.777**	**5.803.272.496.643**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp5.584.131.777.866 atau 96,22 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp156.601.633.832.214 dan Rp161.523.078.405.990, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	1.281.281.715.566	614.198.479.237
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	67.709.313.222.239	63.192.475.915.731
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	206.932.779.339	177.267.352.566
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	82.368.469.578.565	30.840.927.705.975
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	20.375.194.249	62.227.287.274.121
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	5.015.261.342.256	4.470.921.678.360
Jumlah	**156.601.633.832.214**	**161.523.078.405.990**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.921.444.573.776 atau 3,05 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.7. Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp225.023.669.152.725 dan Rp404.385.774.531.710, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	12.875.144.605.421	5.541.378.587.250
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	121.245.799.637	93.648.376.675
Belanja Lain-lain BUN	206.775.576.705.309	379.968.882.402.407
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	16.381.452.464.426
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	694	2.766
Belanja Lain-lain Lainnya	5.251.702.041.664	2.400.412.698.186
Jumlah	**225.023.669.152.725**	**404.385.774.531.710**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Lain-lain sebesar Rp179.362.105.378.985 atau 44,35 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.8. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp63.845.997.623.000 dan Rp62.998.688.562.915, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	41.526.659.300.000	37.677.680.471.742
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	22.319.338.323.000	25.321.008.091.173
Jumlah	**63.845.997.623.000**	**62.998.688.562.915**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp847.309.060.085 atau 1,34 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp135.944.555.602.100 dan Rp100.823.947.472.776, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	16.491.258.147.000	14.388.156.301.036
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	11.738.041.628.000	13.022.127.844.187
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	99.425.415.550.000	68.713.989.486.607
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	2.005.232.650.000	1.726.630.460.219
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.984.193.334.100	1.868.480.715.683
Dana Bagi Hasil Perikanan	1.095.637.785.000	1.104.562.665.044
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	3.204.776.508.000	-
Jumlah	**135.944.555.602.100**	**100.823.947.472.776**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp35.120.608.129.324 atau 34,83 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.10. Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.876.010.795.530 dan Rp4.591.474.242.743. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.284.536.552.787 atau 27,98 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.11. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp398.029.628.594.542 dan Rp378.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp20.029.628.594.542 atau 5,30 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.12. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp50.334.741.347.305 dan Rp54.783.954.054.112. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4.449.212.706.807 atau 8,12 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Insentif Fiskal

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insentif Fiskal adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp26.520.021.192.724 dan Rp28.749.936.344.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Aceh	3.960.000.000.000	7.560.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Papua	8.804.973.058.000	8.187.594.963.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.476.290.512.000	4.688.668.607.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.372.725.809.224	1.320.000.000.000
Insentif Fiskal	7.906.031.813.500	6.993.672.774.000
Jumlah	**26.520.021.192.724**	**28.749.936.344.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal sebesar Rp2.229.915.151.276 atau 7,76 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp128.081.946.376.309 dan Rp118.380.687.000.719, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	51.141.585.255.437	47.740.858.795.736
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.166.575.891.867	991.045.485.177
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.094.401.455.075	51.345.762.364.395
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	15.705.734.730.625	12.372.977.755.955
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisataan	380.997.846.500	351.612.968.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.731.123.396.805	4.899.777.558.456

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	128.562.300.000	114.052.500.000
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	247.386.450.000	221.756.002.000
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	292.704.050.000	197.786.550.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	192.875.000.000	145.057.021.000
Jumlah	**128.081.946.376.309**	**118.380.687.000.719**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp9.701.259.375.590 atau 8,19 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.15. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp69.856.768.617.317 dan Rp67.906.138.390.431. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp1.950.630.226.886 atau 2,87 persen dari Tahun 2022.

F.2.1.2.16. Hibah Kepada Daerah

Hibah Kepada Daerah adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah Kepada Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.940.874.059.627 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.977.982.930.618	-
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	143.405.713.248	-
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	819.485.415.761	-
Jumlah	**2.940.874.059.627**	**-**

F.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas bersih neto dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar minus Rp391.624.901.747.838 dan minus Rp347.174.022.486.045. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Rincian Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	28.445.607.957.179	28.333.153.856.434
Arus Kas Keluar	420.070.509.705.017	375.507.176.342.479
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(391.624.901.747.838)**	**(347.174.022.486.045)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.450.879.261.793 atau 12,80 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.1. Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp546.960.660.401 dan Rp584.273.977.400, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	543.903.485.394	576.804.786.417
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	3.057.175.007	7.469.190.983
Jumlah	**546.960.660.401**	**584.273.977.400**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp37.313.316.999 atau 6,39 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.1.2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.097.737.606.166 dan Rp667.176.265.512, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	1.030.646.856.018	643.617.367.500
Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	67.090.750.148	23.558.898.012
Jumlah	**1.097.737.606.166**	**667.176.265.512**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp430.561.340.654 atau 64,53 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.1.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT berdasarkan perjanjian antara para BUJT dengan BPJT. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp359.653.415.387 dan Rp22.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp337.653.415.387 atau 1.534,79 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.1.4. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan Penerimaan Kembali Investasi dan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Investasi Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp26.441.256.275.225 dan Rp27.059.703.613.522, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Kembali Investasi		
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	3.437.500.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	1.047.519.139.000	8.701.143.500.000
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Cadangan IP PEN	800.000.000.000	-
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi	**5.285.019.139.000**	**8.701.143.500.000**
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah		

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	2.944.155.651.898	2.311.496.745.459
Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	4.997.550.000	-
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	18.207.083.934.327	16.047.063.368.063
Jumlah Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	**21.156.237.136.225**	**18.358.560.113.522**
Jumlah	**26.441.256.275.225**	**27.059.703.613.522**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp618.447.338.297 atau 2,29 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.2. Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp303.041.293.068.751 dan Rp240.570.302.124.070, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	21.762.067.765.333	19.595.016.027.337
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.693.504.896.413	100.701.911.264.860
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.664.408.477.682	30.368.008.162.912
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.301.385.315.249	72.951.253.743.088
Belanja Modal Fisik Lainnya	5.445.554.835.621	6.754.076.109.763
Belanja Modal BLU	7.174.371.778.453	10.200.036.816.110
Jumlah	**303.041.293.068.751**	**240.570.302.124.070**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Modal sebesar Rp62.470.990.944.681 atau 25,97 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.2.2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.000. Dengan demikian, Pengembangan Pendidikan Nasional tidak berubah dari Tahun 2022.

F.2.2.2.3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.225.200.000.000 dan Rp0. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.225.200.000.000 atau 100,00 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.2.4. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp41.421.985.992.266 dan Rp60.664.867.718.409, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	39.862.353.463.337	59.158.999.889.336
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	1.559.632.528.929	1.005.867.829.073
Penyertaan Modal Negara Lainnya	-	500.000.000.000
Jumlah	**41.421.985.992.266**	**60.664.867.718.409**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp19.242.881.726.143 atau 31,72 persen dari Tahun 2022.

F.2.2.2.5. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp53.382.030.644.000 dan Rp54.272.006.500.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Investasi Pemerintah	4.300.000.000.000	3.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1.047.519.139.000	1.201.143.500.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	2.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	19.480.000.000.000	19.100.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	25.424.000.000.000	28.840.000.000.000

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	800.000.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	330.511.505.000	316.863.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi Covid-19	-	814.000.000.000
Jumlah	**53.382.030.644.000**	**54.272.006.500.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp889.975.856.000 atau 1,64 persen dari Tahun 2022.

F.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp445.794.317.054.009 dan Rp698.166.134.429.528.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp252.371.817.375.519 atau 36,15 persen dari Tahun 2022. Penurunan tersebut merupakan capaian yang cukup positif, di mana pemerintah mengurangi penerimaan pembiayaan, didukung dengan kenaikan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi dari Tahun 2023.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.072.010.651.415.779	1.219.817.004.057.156
Arus Kas Keluar	626.216.334.361.770	521.650.869.627.628
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**445.794.317.054.009**	**698.166.134.429.528**

F.2.3.1. Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp902.837.385.270.107 dan Rp1.107.581.763.373.185, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	37.225.200.000.000	-
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	757.734.589.688.370	973.418.285.498.601
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	90.373.466.054.058	124.037.949.770.694
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	17.504.129.527.679	10.125.528.103.890
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**902.837.385.270.107**	**1.107.581.763.373.185**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp204.744.378.103.078 atau 18,49 persen dari Tahun 2022.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada Tahun 2023 Tahun 2022 sebesar Rp37.225.200.000.000 dan Rp0. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp37.225.200.000.000 atau 100,00 persen dari Tahun 2022.

b. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp757.734.589.688.370 dan Rp973.418.285.498.601, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	34.542.000.000.000	68.605.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	450.925.819.706.060	648.951.017.006.441
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	224.088.336.686.968	209.102.808.095.159
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	13.830.000.000.000	17.223.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	34.348.433.295.342	29.536.460.397.001
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	**757.734.589.688.370**	**973.418.285.498.601**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp215.683.695.810.231 atau 22,16 persen dari Tahun 2022.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp90.373.466.054.058 dan Rp124.037.949.770.694, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	58.975.466.054.058	74.532.499.770.694
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing - Jangka Panjang	31.398.000.000.000	49.505.450.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	**90.373.466.054.058**	**124.037.949.770.694**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp33.664.483.716.636 atau 27,14 persen dari Tahun 2022.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.504.129.527.679 dan Rp10.125.528.103.890, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	16.672.197.186.598	10.125.528.103.890
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	831.932.341.081	-
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	**17.504.129.527.679**	**10.125.528.103.890**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp7.378.601.423.789 atau 72,87 persen dari Tahun 2022.

F.2.3.1.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp162.650.352.798.218 dan Rp108.283.083.586.601, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Tunai	82.990.780.840.684	65.592.711.439.666
Penarikan Pinjaman Kegiatan	79.659.571.957.534	42.690.372.146.935
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**162.650.352.798.218**	**108.283.083.586.601**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp54.367.269.211.617 atau 50,21 persen dari Tahun 2022.

F.2.3.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.374.398.495.969 dan Rp3.952.157.097.370, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	2.041.258.121.405	29.858.499.715
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	4.333.140.374.564	3.922.298.597.655
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**6.374.398.495.969**	**3.952.157.097.370**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp2.422.241.398.599 atau 61,29 persen dari Tahun 2022.

F.2.3.1.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp148.514.851.485 dan Rp0. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain merupakan penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo.

F.2.3.2. Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp542.860.028.458.620 dan Rp440.563.575.597.568, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	441.536.249.313.377	342.589.967.131.663
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	98.378.018.023.089	96.049.362.716.256
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	2.945.761.122.154	1.924.245.749.649
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	**542.860.028.458.620**	**440.563.575.597.568**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp102.296.452.861.052 atau 23,22 persen dari Tahun 2022.

F.2.3.2.2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp81.450.306.790.493 dan Rp79.281.905.245.457, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	41.620.171.896.141	37.619.613.777.567
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	39.830.134.894.352	41.662.291.467.890
Jumlah	**81.450.306.790.493**	**79.281.905.245.457**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp2.168.401.545.036 atau 2,74 persen dari Tahun 2022.

F.2.3.2.3. Pemberian Pinjaman yang bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.905.999.112.657 dan Rp1.805.388.784.603. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp100.610.328.054 atau 5,57 persen dari Tahun 2022.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp34.793.236.369.070, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp391.624.901.747.838, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp445.794.317.054.009, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp19.376.178.937.101.

F.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp88.761.873.212.786 dan Rp20.042.387.123.266. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.719.486.089.520 atau 342,87 persen dari Tahun 2022. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (neto)	620.329.866.094	151.170.449.070
Transito (neto)	14.112.089.380.009	(3.468.162.038.412)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	74.033.583.845.555	23.360.027.823.784
Kiriman Uang antar Rekening Bank (neto)	(4.129.878.872)	(649.111.176)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	**88.761.873.212.786**	**20.042.387.123.266**

F.2.4.1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. PFK Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp620.329.866.094 dan Rp151.170.449.070, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	26.362.502.018.784	25.504.271.807.301
Penerimaan PFK Beras BULOG	281.475.805.508	301.458.681.292
Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	9.599.384.497.952	9.730.400.014.403
Penerimaan PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	-
Penerimaan PFK 2% Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/Polri	(4.132.913.455)	1.074.346.520
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.834.445.783	4.340.889.187
Penerimaan PFK Lain-lain	475.468.203.386	507.093.858.839
Jumlah Penerimaan PFK	**36.720.532.057.958**	**36.048.639.597.542**

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	21.216.282.180.842	21.705.480.691.701
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	-	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	764.851.794	151.343.770
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	155.469.306.417	60.765.915.687
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	393.105.319.168	284.259.999.596
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	69.856.768.617.317	67.906.138.390.431
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**91.622.390.275.538**	**89.956.796.341.185**
Penerimaan Wesel Pemerintah	-	-
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji	(22.022.336.757.752)	(22.021.688.086.123)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(2.136.557.552.256)	(2.028.180.273.264)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(281.484.698.786)	(301.480.627.378)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(11.674.123.619.963)	(11.327.710.057.307)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	-
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(6.382.422.812)	(3.895.699.233)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(476.519.434.552)	(517.251.051.376)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(36.597.404.486.121)**	**(36.200.205.794.681)**

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(20.719.693.394.609)	(21.401.489.943.775)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	-	-
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	(151.343.770)	(1.405.445.487)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	(155.469.306.417)	(60.765.915.687)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(393.105.319.168)	(284.259.999.596)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	(69.856.768.617.317)	(67.906.138.390.431)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**(91.125.187.981.281)**	**(89.654.059.694.976)**
Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga (neto)	**620.329.866.094**	**151.170.449.070**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Fihak Ketiga (neto) sebesar Rp469.159.417.024 atau 310,35 persen dari Tahun 2022.

F.2.4.2. Transito (Neto)

Transito (neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari KPA dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu. Transito (neto) juga berasal dari transaksi penerimaan *Escrow*. Transito (neto) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp14.112.089.380.009 dan minus Rp3.468.162.038.412, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (*Audited*)	Tahun 2022 (*Audited*)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	8.273.143.316.477	7.157.979.701.854
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	219.039.555.000	2.149.095.459.091
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	375.405.222	464.413.060
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	45.089.190.780.727	76.949.092.307.037
Penerimaan *Escrow*	44.573.170.856.122	29.805.455.049.871
Jumlah Penerimaan Transito	**98.154.919.913.548**	**116.062.086.930.913**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(8.217.321.050.502)	(7.065.399.224.030)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(219.039.555.000)	(2.149.095.459.091)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(375.405.222)	(464.413.060)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(45.107.694.556.983)	(76.934.674.527.894)
Pengeluaran *Escrow*	(30.498.399.965.832)	(33.380.615.345.250)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(84.042.830.533.539)**	**119.530.248.969.325)**
Jumlah Transito (neto)	**14.112.089.380.009**	**(3.468.162.038.412)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (neto) sebesar Rp17.580.251.418.421 atau 506,90 persen dari Tahun 2022.

F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan dan kesalahan sistem perbankan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) juga berasal dari transaksi non anggaran pihak ketiga Rekening Pemerintah Lainnya, Migas, Non Migas, Rekening Khusus dan Optimalisasi Kas.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp74.033.583.845.555 dan Rp23.360.027.823.784, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	85.578.399.047.009	67.653.593.843.752
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.015.151.541.826.392	1.174.714.894.129.607
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	4.432.932.220.347	718.693.308.384
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga NonMigas	774.821.766.650.951	637.136.376.401.370
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	14.797.174.012.904	12.235.900.092.053
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	155.068.282.181.648	59.240.475.106.648
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**2.049.850.095.939.251**	**1.951.699.932.881.814**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga	(85.700.490.333.165)	(67.656.545.297.434)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(894.226.796.795.500)	(1.104.622.742.269.127)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(47.446.280.050.848)	(47.607.131.905.781)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non-Migas	(773.583.870.244.984)	(636.976.599.635.567)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(14.793.837.834.010)	(12.239.255.767.493)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(160.068.282.181.648)	(59.240.475.106.648)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(1.975.819.557.440.155)	(1.928.342.749.982.050)
Neto	**74.030.538.499.096**	**23.357.182.899.764**
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	22.968.090.595.650	24.788.242.815.554
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(22.965.422.805.274)	(24.785.433.906.236)

Uraian	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
Jumlah PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan	**2.667.790.376**	**2.808.909.318**
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	45.350.255.055	3.668.620.729
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(44.972.698.972)	(3.632.606.027)
Jumlah Koreksi Pemindahbukuan	**377.556.083**	**36.014.702**
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	**74.033.583.845.555**	**23.360.027.823.784**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) sebesar Rp50.673.556.021.771 atau 216,92 persen dari Tahun 2022.

F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN. Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang disebabkan oleh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas belum sepenuhnya dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar minus Rp4.129.878.872 dan minus Rp649.111.176, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 *(Audited)*	Tahun 2022 *(Audited)*
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	21.614.784.151.976.050	20.410.110.617.317.699
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(21.614.788.281.854.922)	(20.410.111.266.428.875)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto)	**(4.129.878.872)**	**(649.111.176)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) sebesar Rp3.480.767.696 atau 536,24 persen dari Tahun 2022.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 sebesar Rp3.404.893.056.498.959 dan Rp3.916.345.179.380.431. Nilai Ekuitas Awal tahun 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2022 pada LKPP Tahun 2022 *Audited.*

G.2. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp31.626.165.809.863 dan Rp480.272.439.016.692. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. PENYESUAIAN SILPA

Penyesuaian SiLPA pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.498.554.940.209 dan Rp9.431.660.376.686. Nilai tersebut merupakan mutasi transaksi atas akun SiLPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian SiLPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 dan transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
311211	SiLPA	1.603.949.124.314	9.457.907.426.911
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(105.394.184.105)	(26.247.050.225)
Jumlah		**1.498.554.940.209**	**9.431.660.376.686**

G.3.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.454.942.591.117 dan Rp3.732.184.012.634. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam pencatatan persediaan. Koreksi Nilai Persediaan dengan nilai yang signifikan berasal dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.394.169.695.581.

G.3.3. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp56.981.718.247.281 dan minus Rp60.953.016.315.937. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang disebabkan selain revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, dan Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	**31 Desember 2023 (*Audited*)**	**31 Desember 2022 (*Audited*)**
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	62.559.753.652.634	(68.024.459.762.604)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(5.494.721.601.883)	1.369.550.410.667
3. Penyesuaian Konsolidasi	(83.313.803.470)	5.701.893.036.000
Jumlah	**56.981.718.247.281**	**(60.953.016.315.937)**

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada Otorita IKN sebesar Rp62.730.884.379.000 yang merupakan pencatatan atas hasil penilaian aset tanah yang dimiliki Otorita IKN yang berasal dari penilaian KJPP, dan Kementerian Luar Negeri sebesar Rp3.360.616.470.924 yang paling besar berasal dari koreksi manual Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung KBRI Bangkok.
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada BA 999.99 sebesar minus Rp5.037.585.460.587. Koreksi tersebut antara lain merupakan koreksi nilai aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B, KKKS SKK Migas, BLBI, BMN *Idle*, KKKS BPMA, KKKS PBMN, KKKS Dit. PKN, dan Aset Lain-Lain.
3. Penyesuaian konsolidasi sebesar minus Rp83.313.803.470 merupakan koreksi nilai aset non revaluasi akibat penyajian ganda aset tanah antara BPS dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan dan Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertahanan dengan Kemendikbudristek, Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu juga termasuk di dalamnya penyesuaian transaksi TKTM antara KL dan BUN.

G.3.4. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.146.315.181.897 dan Rp916.566.907.783. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp1.978.713.876.073.

G.3.5. KOREKSI LAINNYA

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp33.539.693.083.251 dan Rp15.588.603.391.310. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2023 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	(3.231.239.054.169)	31.387.075.088.782
2. Koreksi Lainnya pada BUN	62.493.159.589.321	(17.407.588.622.362)
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(25.722.227.451.901)	1.609.116.924.890
Jumlah	**33.539.693.083.251**	**15.588.603.391.310**

a. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar minus Rp3.231.239.054.169 dan Rp31.387.075.088.782. Koreksi Lainnya pada K/L pada 31 Desember 2023 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada Kementerian ESDM sebesar minus Rp4.912.345.131.446, Kemendikbudristek sebesar minus Rp2.889.503.180.889, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.875.131.226.714.

b. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp62.493.159.589.321 dan minus Rp17.407.588.622.362. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BA BUN 999.00 Kuasa BUN	(10.144.912.737.082)	18.612.148.638.665
BA BUN 999.01 Pengelolaan Utang	(348.433.807.838)	825.169.398.659
BA BUN 999.02 Pengelolaan Hibah	1.262.041.438.199	1.037.365.564.206

Bagian Anggaran	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	31.588.223.378.734	(52.049.031.031.088)
BA BUN 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(147.939.140.574)	-
BA BUN 999.05 Transfer ke Daerah	8.702.029.740.761	(4.137.591.470.498)
BA BUN 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(3.592.823.821.542)	(5.708.407.644.565)
BA BUN 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain	(515.642.683.752)	590.056.898.607
BA BUN 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	229.322.791.975	5.281.424.623.005
BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	31.224.446.851.326	13.769.960.869.124
Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN	4.236.847.579.114	4.371.315.531.523
Jumlah	**62.493.159.589.321**	**(17.407.588.622.362)**

Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2023 yang paling signifikan berasal dari koreksi lainnya pada Kuasa BUN BA 999.99, BA 999.03, dan BA 999.00. Koreksi Lainnya pada BUN BA 999.99 sebesar Rp31.224.446.851.326 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengelolaan Transfer Khusus	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	37.270.922.232.041	(2.269.532.490.961)
UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	7.342.838.894.595	14.426.191.314.069
UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(13.389.316.962.828)	1.613.302.046.016
UAPBUN TK Badan Kebijakan Fiskal	2.687.518	-
Jumlah	**31.224.446.851.326**	**13.769.960.869.124**

Sedangkan Koreksi Lainnya pada BUN 999.03 sebesar Rp31.588.223.378.734 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama UAKPA	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
1	KPA DJPK	(36.456.899.772)	36.456.899.772
2	KPA Dit PNBP DJA	82.058.488.844.136	40.596.841.126.574
3	BLU LPDB KUMKM	(13.663.136.300)	136.425.904.251
4	KPA BLU LMAN	238.568.277.058	989.109.042.522
5	KPA Kementerian BUMN	(89.325.986.290.583)	(19.543.900.681.635)
6	KPA DJKN	11.983.072.486.909	14.535.366.629.542
7	KPA Dit SMI	1.230.333.650.980	(19.387.840.078.412)

No	Nama UAKPA	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
8	KPA BP Tapera	184.251.838	599.047.486
9	UAIP	25.288.212.501.603	(69.716.919.075.080)
10	KPA Badan Bank Tanah	130.663.791.650	304.805.204.600
11	KPA BLU BPDLH	1.342.599.199	24.949.292
12	KPA Dit EAS	33.463.302.016	-
Jumlah		**31.588.223.378.734**	**(52.049.031.031.088)**

Koreksi Lainnya pada BUN BA 999.00 sebesar minus Rp10.144.912.737.082 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Koreksi atas SAL	(2.804.406)	854.804
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	-
Koreksi atas Ekuitas	354.106.233.367	20.515.912.344.859
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	(18.216.293.568)	(32.123.110.511)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	11.096.844.487.771	1.150.651.829.898
Mutasi Kas BLU	13.422.355.639.754	(3.022.293.280.385)
Jumlah	**(10.144.912.737.082)**	**18.612.148.638.665**

c. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada konsolidasi LKPP pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar minus Rp25.722.227.451.901 dan Rp1.609.116.924.890. Penyesuaian konsolidasian LKPP berasal dari eliminasi penyajian ganda antar entitas pelaporan (K/L dan BUN) antara lain mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran yang dicatat pada K/L, mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang dicatat pada BUN, mutasi Kas BLU pada BUN, eliminasi penyisihan piutang atas Resiprokal Utang-Piutang BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo, serta eliminasi mutasi Kas di BP yang berasal dari transaksi transitoris UP/TUP.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp104.317.762.744. Transaksi Antar Entitas Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	12.667.170.944.867.453	11.850.744.434.441.046
Diterima Dari Entitas Lain	(12.694.687.653.104.387)	(11.866.832.009.214.400)
Pengesahan Hibah Langsung	26.515.826.164.869	17.365.806.652.678
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(42.119.811.134)	(48.673.349.010)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.262.041.438.199	1.036.262.395.320
Setoran Surplus BLU	(219.039.555.000)	(2.149.095.459.091)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023 (*Audited*)	31 Desember 2022 (*Audited*)
Transfer Keluar	(289.902.457.955.992)	(641.817.820.238.770)
Transfer Masuk	289.902.457.955.992	641.805.412.534.984
Jumlah*	-	**104.317.762.757**

**) Selisih Rp13 pada 31 Desember 2022 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU. Transfer Keluar Kas BLU dan Transfer Masuk Kas BLU merupakan transaksi perpindahan Kas BLU dari satu BLU ke BLU lain yang dapat terjadi salah satunya karena likuidasi.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN. Rincian per K/L dan BUN terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 32.**
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan Rekening RPATA sehubungan dengan pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dan RPATA dicatat pada BUN. Dana lainnya dari *Escrow* juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dan dana lainnya dari RPATA dicatat pada LK tiap-tiap Kementerian/Lembaga sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp131.247.389.853.618 dan Rp511.452.122.881.472. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.536.140.446.352.577 dan Rp3.404.893.056.498.959. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp3.404.893.056.498.959 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp131.247.389.853.618.

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.